

I

Penciptaan Perdamaian: Studi Kasus Indonesia, Timor Timur, Filipina dan Papua New Guinea

Indonesia, Transisi Politik dan Kekerasan Komunal

Harold Crouch

Keruntuhan rezim otoriter Soeharto yang didukung militer pada bulan Mei 1998 disambut dengan harapan yang tinggi bahwa kejatuhan tersebut akan diikuti oleh era baru, yaitu demokratisasi dan “good governance”. Harapan tersebut sebagian besar mengecewakan. Sekalipun pembatasan-pembatasan otoriter terhadap kebebasan politik telah dicabut dan untuk pertama kalinya dalam 44 tahun terakhir dilaksanakan pemilihan umum yang sungguh-sungguh bebas, ternyata demokrasi gagal menghasilkan pemerintahan yang kuat dan efektif. Ketegangan sosial yang sudah lama dipendam muncul ke permukaan dan Indonesia menyaksikan pecahnya kekerasan antar suku dan agama, demikian juga

pertempuran antara kekuatan pemerintah dan gerakan-gerakan separatis bersenjata.

Namun, menempatkan kekerasan ini dalam suatu perspektif sangatlah penting. Walaupun ada kesan yang sering dikemukakan di luar negeri, Indonesia bukanlah suatu “negara yang gagal” di mana otoritas pemerintah boleh dikatakan tidak ada. Kekerasan yang terburuk semenjak tahun 1998 terjadi di beberapa propinsi dengan penduduk yang relatif kecil – Aceh dengan penduduk sekitar 2 persen dari total penduduk Indonesia, Papua dengan penduduk 1 persen, dua propinsi Maluku dengan penduduk sekitar 1 persen, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan penduduk 2 persen dan Poso (Sulawesi Tengah) dengan penduduk sekitar 0,2 persen dari total penduduk Indonesia. Penduduk dari propinsi-propinsi di mana negara sesungguhnya “gagal” merupakan hanya sekitar 6 persen dari total penduduk Indonesia dan itu pun sebagian dari daerah-daerah tersebut secara relatif tetap tidak terpengaruh. Konflik sosial juga terjadi di propinsi-propinsi yang didiami oleh 94 persen penduduk lainnya, namun benturan komunal dan benturan lainnya di daerah-daerah tersebut tidak menimbulkan korban dan kerusakan yang hebat seperti yang dialami oleh propinsi-propinsi yang terkena paling parah. Akibat-akibat tragis dari kekerasan sosial bagi mereka yang terlibat langsung memang tidak boleh diabaikan, namun kekerasan tersebut tidak umum dialami di sebagian besar daerah Indonesia.

Perlu pula diingat bahwa sebagian besar kekerasan semenjak tahun 1998 tersebut akarnya sudah ada sejak zaman Orde Baru dan masa sebelumnya. Tidaklah benar, sebagaimana yang dilangsir oleh negara-negara lain, bahwa sumber utama kekerasan politik di Indonesia ada hubungannya dengan pemilu yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.¹ Aceh sudah mengalami pemberontakan pada tahun 1950-an,² kemudian pada tahun 1970-an, dan terutama semenjak akhir tahun 1980-an. Perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan Jakarta di Papua sudah mulai segera setelah penyerahan daerah tersebut ke Indonesia pada permulaan tahun 1960-an.³ Konflik antar suku yang hebat terjadi

di Kalimantan Barat pada tahun 1997 sebelum kejatuhan rezim Soeharto.⁴ Sementara janji pemilu mungkin telah memicu beberapa pertikaian di masyarakat setelah tahun 1998,⁵ akar penyebab konflik di daerah-daerah seperti Kalimantan, Maluku dan Poso terletak pada persaingan antara penduduk asli dan para pendatang yang telah didorong oleh pemerintahan sebelumnya untuk pindah mencari kesempatan-kesempatan yang lebih baik di daerah-daerah lain di Indonesia jauh sebelum tahun 1998. Sebagian pendatang tersebut dipindahkan di bawah program transmigrasi pemerintah dan sebagian lagi pindah atas kemauan sendiri. Faktor ini juga terdapat dalam konflik separatis di Aceh dan Papua. Daerah-daerah ini, seperti halnya daerah-daerah lain, juga mengalami hal-hal yang tidak memuaskan sebagai akibat dari eksploitasi besar-besaran kekayaan alam mereka oleh pihak-pihak yang berkepentingan di Jakarta yang aktivitas mereka sering melibatkan, dan selalu dilindungi oleh pihak militer.

Keadaan politik semenjak kejatuhan rezim otoriter pada tahun 1998 telah menciptakan suasana di mana kekerasan komunal dan kekerasan sosial lainnya terjadi. Survei ini akan terfokus pada:

- Kegagalan institusi demokratis menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif.
- Unjuk kerja petugas keamanan yang tidak baik dalam menangani konflik dalam masyarakat.
- Tidak adanya sistem peradilan yang efektif.
- Program desentralisasi yang terlalu radikal yang diterapkan pada tahun 1999.
- Munculnya kembali kelompok-kelompok Islam radikal, termasuk kelompok yang mempunyai hubungan internasional.

Kegagalan Menciptakan Pemerintahan Demokratis yang Kuat

Setelah berada tiga dekade di bawah pemerintahan represif Soeharto, tuntutan-tuntutan untuk mengadakan perubahan mulai terdengar pada tahun 1990-an. Namun, baru setelah pemerintah ternyata tidak mampu menangani keambrokan ekonomi yang

disebabkan oleh Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997, rezim tersebut jatuh segera setelah terjadinya kekacauan besar-besaran di Jakarta pada bulan Mei 1998. Sesuai dengan prosedur konstitusional, Soeharto digantikan oleh Wakil Presiden, B.J. Habibie. Sekalipun Habibie, sebagai menteri dalam kabinet Soeharto yang paling lama bertahan, pernah berada di pusat pemerintahan rezim Orde Baru, dia dengan cepat menyatakan bahwa dalam situasi yang baru gaya pemerintahan Soeharto yang otoriter sudah tidak lagi cocok. Reformasi ke arah demokrasi yang dijalankan Habibie tidaklah disebabkan oleh perubahan kepercayaannya secara tiba-tiba pada nilai-nilai demokrasi, tetapi lebih disebabkan oleh kesadarannya bahwa masa jabatannya tidak akan bertahan lama tanpa itu. Habibie membebaskan para tahanan politik, menghilangkan pembatasan terhadap pers yang bebas, mengizinkan pembentukan partai politik baru dan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas pada bulan Juni 1999.⁶ Realisasi dari suasana demokratis yang baru dipertunjukkan ketika Habibie sendiri diberhentikan dari jabatannya dengan cara-cara yang demokratis pada bulan Oktober 1999. Penggantinya, Abdurrahman Wahid, mengalami nasib yang sama dan digantikan oleh Wakil Presidennya, Megawati Soekarnoputri, pada bulan Juli 2001.

Semangat demokrasi yang baru ternyata lebih ampuh dalam menangkal praktek-praktek otoriter dari rezim Soeharto daripada menciptakan demokrasi yang stabil dan efektif. Tidak seperti di zaman Soeharto di mana hanya tiga partai, pada pemilu 1999 48 partai diizinkan untuk berlaga. Kebalikan dari praktek lama di mana pihak birokrat dan militer memberikan jaminan kemenangan besar pada partai pemerintah, yaitu Golkar, pemilu 1999 bebas dari campur-tangan pemerintah, namun gagal menghasilkan pemenang yang pasti. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) memimpin dengan perolehan 34 persen suara.⁷ Tetapi kemenangan dalam pemilihan presiden mensyaratkan mayoritas absolut dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas 700 anggota yang bertindak sebagai pemilih. Selama beberapa bulan

manuver politik antara pemilu pada bulan Juni dan pemilihan presiden pada bulan Oktober, suatu aliansi partai-partai Islam memblok kandidat PDI-P, Megawati, dan memilih seorang pluralis Abdurrahman Wahid, yang partainya hanya meraih 11 persen suara dalam pemilihan umum.⁸ Dengan jumlah pendukung dari partainya sendiri yang demikian kecil, Abdurrahman tidak punya banyak pilihan kecuali membentuk pemerintahan koalisi yang unsur-unsurnya diambil dari setiap partai yang mempunyai jumlah anggota yang cukup signifikan, ditambah militer. Namun, setelah 19 bulan Abdurrahman Wahid telah begitu menjauh dari partner-partner koalisinya sehingga pada bulan Juli 2001 dia diberhentikan dan digantikan oleh Megawati.⁹ Seperti halnya Abdurrahman Wahid, Megawati juga memasukkan wakil-wakil dari kekuatan-kekuatan yang signifikan dalam kabinetnya dan, sebagai akibatnya, hampir tidak lebih padu dari kabinet Abdurrahman Wahid.¹⁰ Karena kurangnya visi yang membangkitkan semangat dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah kebijakan, Megawati tampaknya tidak mampu memaksakan kemauannya pada kabinetnya dan lalu kebijakan-kebijakan dibiarkan mengambang tanpa arah yang jelas.

Transisi demokratis ternyata gagal menghasilkan pemerintahan yang kuat dan efektif. Selain karena kekurangan mereka sendiri, masing-masing presiden tidak mampu menegakkan otoritas mereka karena mereka sangat tergantung pada dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terpecah-pecah yang terdiri atas partai-partai yang tidak begitu berminat bekerja sama satu sama lainnya. Akibatnya adalah bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Kesetiaan kepada pemerintah dibeli dengan cara memberikan perlindungan kepada para pendukung. Partai-partai lebih tertarik mengumpulkan dana untuk pemilihan umum yang akan datang daripada berusaha sungguh-sungguh agar pemerintahan bekerja secara efektif.

Tiga pemerintahan sesudah Soeharto terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing di Jakarta sehingga tidak bisa memberikan cukup perhatian pada ketegangan sosial dan agama

di daerah-daerah yang jauh di Nusantara. Namun demikian, beberapa tindakan sementara telah dilaksanakan oleh pemerintahan Megawati bagi penyelesaian sebagian dari konflik tersebut. Perjanjian “perdamaian” yang disponsori pemerintah telah dicapai antara kelompok-kelompok yang bertikai di Poso (Desember 2001) dan Maluku (Februari 2002) dan pemerintah juga merundingkan suatu persetujuan “penghentian permusuhan” di Aceh (Desember 2002). Persetujuan Poso dan Maluku pada umumnya bertahan walaupun kekerasan terjadi secara sporadis, tetapi perjanjian di Aceh buyar pada Bulan Mei 2003 ketika ofensif militer yang baru dilancarkan setelah beberapa bulan berunding tanpa hasil.¹¹

Unjuk-Kerja Militer dan Polisi

Aksi militer tidak pernah bisa menangani akar penyebab konflik sosial tetapi, begitu konflik tersebut pecah, hanya intervensi militer atau polisi yang efektif yang bisa menghentikannya.

Pihak militer merupakan tulang punggung rezim Soeharto. Pihak militer selalu terwakili dalam kabinet, beberapa ribu perwira diangkat pada jabatan-jabatan di birokrasi sipil dan sekian kursi di parlemen dialokasikan untuk wakil-wakil militer. Konflik sosial ditindas, sering dilakukan secara brutal, oleh pihak militer yang diorganisir atas dasar “teritorial” dengan sekitar 2/3 tentaranya disebar ke seluruh pelosok dalam kesatuan-kesatuan yang sesungguhnya “membayangi” pemerintahan sipil.¹² Sebagai komponen yang penting dalam rezim Orde Baru, pihak militer sesudah Mei 1998 sebagian aib bersama presiden yang dijatuhkan. Pihak militer juga dicela habis-habisan oleh kalangan pers dan partai politik karena korupsi dan kebrutalannya sementara secara moral pihak militer juga rusak karena ketidakmampuannya menyelamatkan pelindungnya.

Segera setelah kejatuhan rezim Soeharto, suatu program reformasi militer dilancarkan yang bertujuan mengurangi secara signifikan peranan politik formal militer. Pihak militer telah melepaskan idiologi “dwifungsi”nya yang telah memberi justifikasi terhadap peranannya di dalam pemerintahan, memutuskan

hubungannya dengan kendaraan politik Soeharto, Golkar, dan mengambil posisi netral dalam pemilihan umum 1999. Para perwira aktifnya telah ditarik dari birokrasi sipil dan telah pula menyetujui untuk menarik wakil-wakilnya dari DPR nasional dan regional menjelang 2004. Yang tidak kurang pentingnya adalah pemisahan polisi dan militer dan penyerahan tanggung jawab utama keamanan internal kepada pihak polisi. Pada tahun 2002, proses reformasi mencapai puncaknya dengan berlakunya UU baru tentang Pertahanan Nasional berdasarkan konsep supremasi sipil. Namun, proses reformasi ini segera kehilangan momentumnya. Sebagai akibatnya, pihak militer tetap melaksanakan pengaruh politik informalnya, terutama melalui penerapan struktur “teritorial”nya.¹³ Struktur seperti ini juga memungkinkan pihak militer terus memainkan peranan penting dalam masalah keamanan internal sekalipun sudah ada penyerahan secara formal atas tanggung jawab tersebut kepada pihak polisi.

Kendala utama terhadap pembinaan pasukan keamanan yang profesional adalah sangat kurangnya dana.¹⁴ Anggaran pemerintah Indonesia hanya cukup untuk membiayai 30 persen dari kebutuhan militer. Kekurangan yang 70 persen diserahkan kepada pihak militer untuk mencarinya. Gaji para prajurit sangat rendah dan jauh dari cukup bahkan untuk mempertahankan standar hidup yang minim, apalagi untuk gaya hidup mewah yang dinikmati oleh banyak jenderal-jenderal senior. Dalam praktek, masing-masing personil dan kesatuan diberi kepercayaan untuk meningkatkan anggaran dan menaikkan gaji sendiri. Sering disebutkan bahwa sumber utama penghasilan tambahan tersebut berasal dari kerajaan bisnis militer. Namun dalam kenyataan sebagian besar perusahaan militer tersebut dikelola secara tidak efisien dan tidak banyak membantu. Sebagian besar dari pendapatan ekstra militer tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tepat disebut sebagai “pemerasan”. Pada tingkat yang tinggi, ada semacam komisi yang diperoleh ketika persenjataan dan peralatan-peralatan lainnya dibeli, ada sumbangan yang cukup besar didapat dari perusahaan-perusahaan asing dalam sektor sumber kekayaan alam seperti pertambangan dan minyak, serta

ada pembayaran dari pemerintah daerah untuk “proteksi” yang diberikan dengan kehadiran militer di situ. Pada tingkat menengah, perwira-perwira militer meminta sumbangan dari perusahaan-perusahaan di kota-kota dan sering pula menyediakan personil militer sebagai petugas ‘keamanan’. Perwira militer juga melindungi penebangan kayu, pertambangan dan penangkapan ikan liar serta penyelundupan. Pajak-pajak tidak resmi juga ditarik atas barang-barang yang keluar-masuk pelabuhan dan di sepanjang jalan raya. Pada tingkat yang paling bawah, personil militer terlibat dalam perlindungan prostitusi, perjudian liar, kejahatan-kejahatan kecil lainnya serta distribusi narkotika.

Keadaan keuangan polisi tidak kurang parahnyanya. Personil kepolisian juga terlibat dalam praktek-praktek yang hampir sama dengan militer sekalipun pada umumnya di tingkat menengah dan bawah. Sebagai pesaing untuk menguasai sumber-sumber yang sama dan pesaing dalam berbagi tanggung jawab keamanan dalam negeri, kesatuan-kesatuan militer dan polisi sering terlibat dalam perebutan ‘lahan’ yang kadang-kadang berujung pada saling tembak dan pembunuhan.

Tentara dan polisi mendapat gaji yang rendah, kurang terlatih, kurang disiplin dan kurang persenjataan. Terdapat banyak kelompok baik di pusat di Jakarta maupun di daerah-daerah (sekalipun, tidak seperti yang banyak diduga, kelompok-kelompok tersebut biasanya tidak berdasarkan identitas agama). Oleh karena itu, tidaklah aneh bahwa unjuk kerja mereka di lapangan masih jauh dari harapan. Di daerah-daerah di mana terjadi pemberontakan – seperti Aceh dan Papua – anggota-anggota pasukan keamanan melakukan pelanggaran HAM tetapi kebal hukum. Tampaknya sudah menjadi praktek umum membakar desa dan mengambil tindakan balas dendam lainnya kapan saja ada anggota militer yang terbunuh.¹⁵ Di daerah-daerah yang terlibat konflik agama atau etnik – seperti Maluku dan Poso – anggota-anggota pihak keamanan sering berpihak – kadang-kadang ikut dalam pertempuran atau setidaknya-tidaknya membantu para pejuang dengan senjata atau peluru. Dalam beberapa kasus persenjataan disuplai oleh tentara

yang berpihak pada satu atau lain kelompok karena alasan etnik atau agama, tetapi dalam kasus-kasus lain motifnya semata-mata komersial.¹⁶

Banyak spekulasi di Indonesia bahwa pihak militer, atau setidaknya-tidaknya beberapa elemen di dalamnya, secara aktif memelihara konflik sosial tersebut. Satu kemungkinan motifnya adalah keinginan untuk menggoncang dan mendeskreditkan pemerintahan sipil (walaupun alasan ini kurang meyakinkan di bawah pemerintahan Megawati yang mempunyai kecenderungan ke militer). Juga banyak dikatakan bahwa militer di “daerah yang bergolak” mempunyai kepentingan untuk mempertahankan sekurang-kurangnya konflik tingkat bawah karena kondisi yang tidak aman memudahkan bagi pihak militer untuk memperoleh uang dengan cara menawarkan “perlindungan” pada perusahaan komersial di daerah tersebut. Dalam beberapa kasus, unsur-unsur tertentu dalam militer nampaknya terlibat dalam usaha-usaha menghalangi perundingan dan persetujuan damai.

Pada bulan Mei 2003, pihak militer melancarkan operasi militer terbesar semenjak Timor Timur menyusul gagalnya perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Lebih dari 40.000 pasukan militer dan polisi terlibat dalam pertempuran untuk menumpas kekuatan kecil GAM yang oleh intelijen militer diperkirakan berjumlah hanya beberapa ribu orang. Sekalipun kemenangan fisik meningkat secara tajam dalam beberapa bulan pertama operasi militer, namun tidak banyak bukti keberhasilan dalam pertempuran untuk merebut “hati” rakyat setempat.¹⁷

Pemberontakan dan kerusuhan sosial sebagian disebabkan oleh kondisi pasukan keamanan yang menyedihkan. Tindak-tanduk mereka lebih sering menimbulkan masalah daripada memecahkannya. Memang tidak dapat dihindari bahwa personil militer dan polisi tetap jauh dari penduduk setempat selama mereka diharapkan “hidup jauh dari rakyat” untuk menutupi kurangnya anggaran pasukan keamanan. Pasukan keamanan juga akan tetap gagal merebut hati rakyat setempat di daerah-daerah bergolak selama langkah-langkah yang efektif tidak diambil untuk menjamin

bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Indonesia sangat memerlukan pasukan keamanan yang lincah bergerak dan profesional yang bisa mencegah kekerasan sejak awal. Namun, pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa sering kali kehadiran “elit” militer dan polisi malah memperburuk masalah.

Tidak Adanya Sistem Peradilan yang Efektif

Pengadilan Indonesia dirusak oleh korupsi pada setiap tingkat proses peradilan, mulai dari polisi, jaksa dan hakim. Sebagaimana halnya pasukan keamanan, gaji para pejabat hukum begitu rendah sehingga mereka tidak punya pilihan selain mencari tambahan dari sumber-sumber lain. Kebanyakan dari mereka memperoleh bagian terbesar dari pendapatan mereka dari uang suap. Sudah umum bagi hakim untuk berkolusi dengan para jaksa untuk membuat kasus lemah sehingga mudah bagi hakim untuk membebaskan tertuduh.¹⁸

Dalam kasus-kasus kerusuhan sosial sangatlah sulit untuk menegakkan hukum. Kedua-belah pihak dalam konflik sosial selalu yakin bahwa mereka adalah korban kekerasan yang dimulai oleh pihak lain. Ketika kesatuan keamanan tidak mampu mencegah penyerangan, masing-masing pihak memobilisasi diri untuk pertahanan, kemudian melancarkan serangan balasan terhadap pihak lain. Para pelaku kerusuhan dianggap pahlawan karena berperang menyelamatkan masyarakat mereka. Dalam keadaan demikian, polisi sering merasa tidak berdaya melakukan penahanan karena takut akan memicu kerusuhan lain. Walaupun penangkapan dilakukan, pengadilan enggan untuk menjatuhkan hukuman. Pola seperti ini terlihat di semua daerah di Indonesia di mana kerusuhan masal terjadi. Sekalipun terjadi ribuan pembunuhan di Maluku, tidak seorang pun yang pernah dituduh atas pembunuhan tersebut. Di Poso, penjatuhan hukuman terhadap beberapa orang Kristen malah memicu kerusuhan berikutnya. Di Kalimantan Tengah, para pemimpin Dayak ditangkap, namun segera dilepaskan kembali. Melihat kenyataan gagal nya sistem peradilan menyelesaikan

kerusuhan sosial, kadang-kadang ada usul agar hukum adat tradisional dihidupkan kembali. Masalahnya adalah bahwa hukum adat memang kadang-kadang berhasil dalam masyarakat dengan budaya yang sama, tetapi tidak mungkin efektif menangani konflik antara dua masyarakat yang mempunyai hukum adat berbeda.

Sistem peradilan juga gagal menangani secara efektif penyalahgunaan yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan. Di bawah undang-undang saat ini, anggota militer yang dituduh melakukan tindak kejahatan sipil akan diadili oleh pengadilan militer yang dikenal suka memberikan hukuman-hukuman yang ringan. Ada pengecualian dalam undang-undang yang diberlakukan tahun 2000, yaitu pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili pelanggaran berat HAM. Di bawah undang-undang inilah 15 anggota militer dan tiga orang sipil dituduh bertanggung jawab terhadap pembunuhan di Timor Timur sebelum dan sesudah referendum tahun 1999.¹⁹ Semua tertuduh dalam pengadilan pertama dinyatakan tidak bersalah tetapi kemudian, tampaknya dalam rangka merespon keprihatinan internasional, tiga perwira militer, seorang polisi dan dua orang sipil Timor Timur dinyatakan bersalah dan dihukum penjara yang berkisar antara tiga sampai sepuluh tahun. Namun, semuanya mengajukan banding dan karenanya tetap bebas sementara menunggu hasil banding mereka.²⁰ Sampai sekarang, belum ada anggota pasukan keamanan yang diadili di pengadilan khusus atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan di Aceh atau Papua, dan hanya beberapa – hampir semuanya berpangkat rendah – yang diadili di pengadilan khusus yang, seperti biasanya, mendapat hukuman ringan, misalnya hukuman 2 sampai 5 tahun terhadap tujuh orang yang dituduh membunuh pemimpin kemerdekaan Papua, Theys Eluay. Sikap pimpinan militer terungkap ketika tujuh orang tersebut dianggap sebagai “pahlawan” oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ryamizard Ryacudu.

Pengaruh Otonomi Daerah

Presiden Soeharto dan militer menerapkan rezim yang sangat sentralistik pada masyarakat yang sangat beraneka ragam. Sekalipun

ada pemilihan, para gubernur dan bupati – sebagian besar adalah orang Jawa – sesungguhnya ditunjuk oleh pejabat pusat, sedangkan struktur pemerintahan daerah hanya memberi sedikit kelonggaran pada kekhususan daerah. Bahkan struktur pemerintahan desa dibuat seragam, berdasarkan model Jawa. Dihantui oleh pemberontakan daerah yang pecah pada dasawarsa pertama kemerdekaan pada tahun 1950-an, Soeharto tampaknya percaya bahwa hanya dengan keseragaman dan kontrol langsung dari pusat – dengan didukung oleh pihak militer – yang bisa menyatukan Indonesia. Tentu saja dominasi pusat juga memberi kemudahan bagi eksploitasi kekayaan alam kepada para elit Jakarta.

Sentralisasi, eksploitasi ekonomi dan dominasi militer yang berlebihan telah menyebabkan ketidaksenangan di daerah-daerah, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Segera setelah jatuhnya Soeharto, pemerintahan Habibie yang lemah harus menghadapi tuntutan yang semakin meningkat terhadap otonomi daerah. Di tiga propinsi – Timor Timur, Aceh dan Papua – pemerintah menghadapi gerakan separatis bersenjata. Dalam situasi baru ini, otonomi daerah tidak lagi dilihat – sebagaimana anggapan pada masa Soeharto – sebagai langkah awal ke arah disintegrasi nasional tetapi sebagai cara yang paling efektif untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Di Timor Timur, tawaran pemerintah untuk “otonomi khusus” ditolak dalam suatu referendum di mana rakyat justru memilih untuk merdeka. Tetapi undang-undang otonomi daerah yang radikal yang diajukan oleh pemerintahan Habibie disambut baik di daerah-daerah lain. Undang-undang tersebut, yang telah diperdebatkan secara intensif di DPR pusat, menyerahkan sebagian besar wewenang pemerintah pusat bukan kepada tiga puluh propinsi tetapi kepada 350 kabupaten. Undang-undang tersebut juga memberikan kepada daerah-daerah bagian yang jauh lebih besar terhadap hasil kekayaan alam. Pemerintah pusat memperkirakan bahwa pengalihan wewenang kepada pemerintah kabupaten yang terlalu kecil untuk membentuk negara merdeka akan menghambat keinginan-keinginan para separatis.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak pernah bebas dari masalah.²¹ Banyak peraturan yang diperlukan agar transisi berjalan dengan mulus ternyata belum dikeluarkan ketika pelaksanaan otonomi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001. Beberapa pejabat di pusat melakukan taktik mengulur-ngulur waktu untuk tetap memegang kekuasaan sementara para kepala daerah kadang-kadang merasa telah memperoleh wewenang lebih banyak dari yang sesungguhnya diserahkan. Tidak saja kekacauan terjadi tentang wewenang mana yang telah diserahkan dan mana yang belum, tetapi pertengkaran juga terjadi tentang yurisdiksi antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya dan antara kabupaten dengan propinsi. Pejabat-pejabat daerah berusaha menguasai kegiatan-kegiatan yang menjanjikan perolehan finansial yang besar sementara mereka enggan mengambil alih pelayanan-pelayanan yang sangat mahal untuk dilaksanakan. Wewenang terhadap eksploitasi sumber kekayaan alam – hutan, pertambangan, lahan – memungkinkan pejabat setempat membuat perjanjian-perjanjian yang sangat menguntungkan dengan para kontraktor yang sering-sering berujung pada pelanggaran undang-undang dan peraturan yang ada. Pejabat pusat mengeluh tentang banyaknya korupsi di daerah-daerah tetapi, mengingat begitu banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pusat pada masa pemerintahan Soeharto, tuduhan seperti itu sama sekali tidak ada gemanya.

Kombinasi demokratisasi dan desentralisasi kadang-kadang mempertajam persaingan antar agama dan etnis di daerah-daerah yang didiami oleh masyarakat yang berbeda-beda. Di beberapa daerah, pemerintah setempat mencoba menerapkan kebijakan “putera daerah”, terutama di pemerintah, dan bahkan mereka mencoba menghambat migrasi dari kelompok etnis lain. Dalam beberapa kasus persaingan antar kelompok etnis telah mendorong mereka untuk membentuk kabupaten atau propinsi baru yang dapat menjamin dominasi politik dari masyarakat suku tertentu.²² Dalam beberapa kasus lain, kerusuhan etnis tampaknya berkaitan dengan pemilihan lokal ketika para politisi mengerahkan kelompok etnis mereka sendiri melawan kelompok lain atau bahkan memaksa

anggota dari masyarakat etnis lain itu untuk meninggalkan daerah tersebut.

Sekalipun demikian, adalah penting untuk tetap melihat pengaruh demokratisasi dan desentralisasi dalam perspektif yang sebenarnya. Demokratisasi dan desentralisasi sudah menjadi fenomena nasional yang sudah mempengaruhi daerah-daerah yang multi-etnis dan hanya sekali-sekali saja menjadi penyebab kerusuhan antar agama dan etnis. Pemilu yang benar-benar bebas pada tahun 1999 berlangsung dengan sangat damai dibandingkan dengan pemilu-pemilu di masa Orde Baru.

Demokratisasi mengambil bentuk lain di dua propinsi (setelah pemisahan Timor Timur) di mana gerakan separatis bersenjata masih aktif. Pada tahun 2002, undang-undang otonomi khusus mengakui kekhususan Aceh dan Papua dan mengalokasikan pendapatan dari sumber alamnya jauh lebih tinggi dari propinsi-propinsi lain. Undang-undang otonomi khusus di Aceh pada waktu itu menjadi dasar bagi negosiasi antara pemerintah pusat dan pihak GAM, tetapi dengan gagalnya perundingan dan kemudian diikuti oleh pemberlakuan darurat militer pada bulan Mei 2003 sesungguhnya memberikan kembali kontrol kepada pemerintah pusat. Di Papua, harapan bahwa undang-undang otonomi khusus akan mengurangi oposisi ke pemerintahan di Jakarta ternyata dirusak ketika tentara membunuh pemimpin gerakan kemerdekaan Papua dan ketika pemerintahan Megawati membagi propinsi itu menjadi tiga propinsi baru bahkan tanpa merundingkannya terlebih dahulu dengan pemerintah daerah “otonomi” tersebut.²³

Islam dan Kerusuhan Sosial

Bahwa kerusuhan sosial sering melibatkan orang-orang Islam tidaklah mengherankan mengingat bahwa 87 persen penduduk Indonesia adalah Muslim. Namun banyak kerusuhan yang melibatkan orang Islam bukanlah didorong oleh kepedulian agama. Dalam banyak kasus apa yang kelihatannya sebagai konflik agama, akarnya sesungguhnya adalah konflik etnis seperti, misalnya, ketika pendatang yang kebetulan memeluk agama tertentu pindah ke suatu

daerah yang agamanya berbeda dengan para pendatang tersebut. Ketegangan-ketegangan sering terpicu ketika masyarakat pendatang berhasil merebut posisi yang kuat dalam bidang ekonomi atau menjadi cukup banyak jumlahnya sehingga mereka bisa menggoyahkan dominasi penduduk asli dalam bidang politik setempat. Keadaan seperti ini sangat kentara dalam dua “perang agama” di Indonesia semenjak tahun 1998. Dalam konflik di Poso (Sulawesi Tengah), garis pemisah antara Muslim dan Kristen kebetulan sama dengan garis pemisah antara pendatang dan penduduk asli;²⁴ di Maluku, konflik antara pendatang yang Muslim dan penduduk asli yang Kristen adalah pemicu yang menyebabkan konflik yang lebih luas sehingga kemudian melibatkan juga penduduk asli yang Muslim.²⁵ Persepsi yang umum di Barat bahwa konflik tersebut adalah akibat dari keinginan orang Islam untuk membasmi orang Kristen adalah keliru. Sesungguhnya, keterlibatan orang-orang Kristen dalam pembunuhan orang Islam tidak lebih kurang daripada keterlibatan orang Islam dalam pembunuhan orang Kristen.

Dalam beberapa kasus kerusuhan sosial, korban utamanya adalah orang-orang Islam, namun konflik tersebut timbul lebih karena masalah etnis daripada antagonisme agama. Di Kalimantan Barat dan Tengah, para pendatang Muslim dari pulau Madura merupakan sasaran yang dituju oleh penduduk asli. Di Kalimantan Barat, orang Dayak yang non-Muslim dan orang Melayu yang Muslim bergabung menyerang orang-orang Madura. Di Kalimantan Tengah, di mana sebagian suku Dayak adalah Muslim, baik orang Dayak Muslim maupun yang non-Muslim terlibat dalam pembunuhan orang-orang Madura.²⁶ Di Papua, para transmigran Muslim dari Jawa menjadi sasaran kekerasan oleh orang Papua yang non-Muslim, sementara di Aceh, transmigran Muslim dari Jawa kadang-kadang menjadi sasaran penyerangan oleh orang Aceh yang Muslim.

Sebagian kekerasan tersebut memang bermotif agama. Penyerangan-penyerangan oleh orang-orang Islam radikal terhadap gereja, klenteng, dan “tempat-tempat maksiat” sesekali terjadi pada

masa Orde Baru, tetapi makin sering semenjak 1998. Organisasi “fundamentalis” yang baru, di antaranya adalah Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta dan Laskar Jihad. FPI kegiatan utamanya adalah menyerang bar, night-club, kasino dan tempat-tempat pelacuran, sementara Laskar Jihad yang bermarkas di Jawa dibentuk untuk membantu orang Islam di Maluku dan Poso melawan orang Kristen. Dalam kedua kasus tersebut, anggota pasukan keamanan memberi kemudahan munculnya kelompok-kelompok ini. Dalam hal FPI, anggota polisi di Jakarta menyambut baik penyerangan-penyerangan yang dilakukannya karena dengan demikian akan memungkinkan mereka menaikkan uang perlindungan dari para pemilik tempat tersebut.²⁷ Dalam hal Laskar Jihad, kelihatannya beberapa perwira militer memberikan bantuan pada Laskar Jihad – termasuk senjata dan latihan militer – dengan tujuan menggoyang pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid setelah yang bersangkutan mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan kontrol sipil terhadap militer.²⁸ Tetapi, dalam kasus mana pun, pihak militer maupun polisi sesungguhnya tidak menaruh simpati terhadap tujuan jangka-panjang dari organisasi-organisasi tersebut.

Namun kekerasan oleh orang Islam bergerak ke tingkat yang baru dengan munculnya kelompok bawah tanah yang disebut Jemaah Islamiyah (JI) yang berhubungan dengan al-Qaidah Osama bin Laden.²⁹ Tidak seperti halnya FPI dan Laskar Jihad yang tujuantujuannya terfokus pada Indonesia saja, jaringan JI meluas ke Malaysia, Singapura dan Filipina Selatan. Keberadaan JI baru terungkap setelah kegagalan rencana peledakan kedutaan besar Amerika dan beberapa kedutaan lain di Singapura pada bulan Desember 2001. Belakangan terungkap bahwa JI juga bertanggung jawab terhadap rangkaian pemboman gereja di Indonesia dan peledakan di Manila pada bulan Desember 2000 serta percobaan pembunuhan terhadap duta besar Filipina di Jakarta. Pada bulan Oktober 2002, kelompok JI juga bertanggung jawab terhadap peledakan bom yang menewaskan lebih dari 200 orang - sebagian besar para turis Barat – di pulau Bali. Setelah pemboman di Bali,

pelaku utamanya segera tertangkap dan jaringan JI makin terungkap. Di Jakarta, “pemimpin spiritual” JI, Abu Bakar Ba’asyir, juga ditangkap – sekalipun tuduhan terhadapnya tidak termasuk pemboman di Bali. Pada akhirnya pada bulan September 2003, yang bersangkutan dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan dihukum empat tahun penjara.

Bagian terbesar dari Muslim Indonesia tidak bisa dicap sebagai radikal atau fundamentalis. Demikian juga tidak banyak bukti yang mendukung persepsi umum bahwa Islam politik sedang meningkat. Satu indikasi tentang besar-kecilnya kelompok fundamentalis adalah dukungan yang diperoleh dalam pemilu tahun 1999 oleh partai-partai yang mengusung pelaksanaan hukum *syari’ah*. Jumlah suara gabungan yang memilih partai-partai Islam radikal hanya sekitar 15 persen. Partai-partai ini melanjutkan keikut-sertaan mereka dalam proses konstitusional dengan cara yang hampir sama dengan partai-partai sekuler. Perhatian mereka tidak hanya pada masalah-masalah agama tetapi juga pada hal-hal lain yang dibutuhkan oleh para pemilinya. Wakil presiden Indonesia yang sekarang (Hamzah Haz) dan juga beberapa menteri kabinet mewakili partai “fundamentalis” namun pengaruh mereka tidaklah menentukan. Perlu dilihat bahwa kelompok-kelompok Islam yang terlibat dalam kerusuhan dan terorisme merupakan minoritas yang kecil. Mereka yang terlibat secara aktif dalam JI mungkin jumlahnya kurang dari seribu orang, anggota FPI yang ikut unjuk rasa dan penyerbuan-penyerbuan jarang melebihi seribu, sementara Laskar Jihad tidak pernah bisa memobilisir lebih dari 3000 – 4000 pejuang di Maluku. Perlu pula dicatat bahwa penangkapan pemimpin JI, FPI dan Laskar Jihad tidak menyebabkan protes publik yang luas. Praktis tidak ada rasa simpati dari publik – bahkan oleh anggota-anggota organisasi Islam radikal sekalipun – untuk para pelaku bom Bali.

Ini tidak berarti bahwa kekerasan oleh orang Islam, terutama keterkaitan JI dengan al-Qaidah, tidak merupakan ancaman serius terhadap stabilitas di Indonesia. Tetapi semua ini harus dilihat dalam konteks hubungan damai yang pada umumnya ditunjukkan

antara Muslim dan non-Muslim di sebagian besar daerah di Indonesia.

Kesimpulan

Dengan tumbangannya pemerintahan otoriter di Indonesia, ketegangan etnis dan agama yang sebelumnya terpendam di bawah permukaan semasa Orde Baru, sekarang muncul. Proses demokratisasi memberikan opsi-opsi politik baru bagi kemerdekaan, namun tidak menghasilkan pemerintahan yang kuat dan padu dengan otoritas yang cukup untuk memecahkan masalah utama kekerasan sosial. Tambahan lagi, pasukan keamanan ternyata tidak saja merupakan alat penyelesaian konflik sosial yang buruk, tetapi sering bahkan mereka menjadi penyebab konflik itu sendiri. Sementara itu, sistem peradilan yang korup dan tidak kompeten tidak banyak membantu mencegah kekerasan. Program desentralisasi pemerintah pusat menciptakan infrastruktur yang potensial dapat menangani ketegangan lokal secara lebih sensitif, tetapi dalam jangka pendek kadang-kadang justru memperburuk hubungan sosial. Bersamaan dengan perkembangan seperti tersebut di atas, bentuk baru terorisme Muslim muncul yang dapat memperburuk keadaan sekalipun mereka tidak punya kapasitas untuk mengubah bentuk dasar negara. Indonesia masih harus mencari rumusan penyelesaian ketegangan sosial yang memang tidak terhindarkan dalam masyarakat yang sangat majemuk yang sedang mengalami perubahan politik yang drastis. Namun demikian, pecahnya kerusuhan sosial yang hebat hanya terbatas pada beberapa daerah saja. Apa pun tantangan lain yang mereka hadapi, sebagian besar orang Indonesia tidak secara langsung mengalami kerusuhan sosial yang parah.

Catatan

¹ Jack Snyder, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, (New York: W.W. Norton & Company, 2000).

² Tentang pemberontakan di Aceh tahun 1950-an, lihat Nazarudin Syamsuddin, *The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985).

³ Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: the Guerilla Struggle in Irian Jaya*, (Sydney: Allen & Unwin, 1985).

⁴ Human Rights Watch/Asia, "Indonesia: Communal Violence in West Kalimantan", Vol.9, No.10 (c).

⁵ Dalam masalah Maluku, lihat Gerry van Klinken, "The Maluku Wars: Bringing Society Back In", *Indonesia*, 71, April 2001.

⁶ David Bourchier, "Habibie's Interregnum: Reformasi Elections, Regionalism and the Struggle for Power", dalam Chris Manning & Peter van Diermen, eds. *Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000).

⁷ Harold Crouch, "Indonesia: Democracy and the Threat of Disintegration", *Southeast Asian Affairs 2000*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000).

⁸ Marcus Mietzner, "The 1999 General Session: Wahid, Megawati and the Fight for the Presidency", dalam Manning & van Dierman, *Indonesian in Transition*.

⁹ Perkembangan yang menyebabkan berakhirnya masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid dianalisis dalam International Crisis Group, "Indonesia's Presidential Crisis", *Indonesia Briefing*, Jakarta/Brussels, 21 Februari 2001 dan dalam International Crisis Group, "Indonesia's Presidential Crisis: The Second Round". *Indonesia Briefing*, Jakarta/Brussels, 21 Mei 2001.

¹⁰ International Crisis Group, "The Megawati Presidency", *Indonesia Briefing*, Jakarta/Brussels, 10 September 2001.

¹¹ Edward Aspinall and Harold Crouch, "The Aceh Peace Process: Why It Failed", *Policy paper No.1*. East West Center, Washington, Nopember 2003.

¹² Robert Lowry, *The Armed Forces of Indonesia*, (St. Leonards [Sydney]: Allen & Unwin, 1996), hal. 91-94.

¹³ International Crisis Group, “Indonesia: Keeping the Military Under Control”, *ICG Asia Report*, No.9 Jakarta/Brussels, 5 September 2000.

¹⁴ Ibid. hal. 16-17.

¹⁵ International Crisis Group, “Aceh: Why Military Force Won’t Bring Lasting Peace”, *ICG Asia Report*, No.17. Jakarta/Brussels, 12 Juni 2001.

¹⁶ International Crisis Group, “Indonesia: The Search for Peace in Maluku”, *ICG Asia Report*, No.31. Jakarta/Brussels, 8 Februari 2002.

¹⁷ International Crisis Group, “Aceh: How Not to Win Hearts and Minds”, *Indonesia Briefing*, Jakarta/Brussels, 23 Juli 2003.

¹⁸ Addi Andojo Soetjipto, “Legal Reform and Challenges in Indonesia”, dalam Manning & van Dierman, *Indonesian in Transition*.

¹⁹ International Crisis Group, “Indonesia: Impunity versus Accountability for Gross Human Rights Violations”, *ICG Asia Report*, No.12. Jakarta/Brussels, 2 Februari 2001.

²⁰ International Crisis Group, “Indonesia: The Implications of the Timor Trials”, *Indonesia Briefing*. Jakarta/Brussels, 8 Mei 2002.

²¹ Mark Turner dan Owen Podger, *Decentralization in Indonesia: Redesigning the State* (Canberra: Asia Pacific Press, 2003).

²² Misalnya, lihat International Crisis Group, “Indonesia: Overcoming Murder and Chaos in Maluku”, *ICG Asia Report*, No.10. Jakarta/Brussels, 19 Desember 2000, hal. 6.

²³ International Crisis Group, “Dividing Papua: How Not To Do It”, *Asia Briefing*, Jakarta/Brussels, 9 April 2003.

²⁴ David Rohde, “Indonesia Unravelling”, *Foreign Affairs*, Juli-Agustus 2001; Aragon, Lorraine V. “Communal Violence in Poso, Central Sulawesi: Where People Eat Fish and Fish eat People”, *Indonesia 72*, Oktober 2001.

²⁵ Jacques Bertrand, “Legacies of the Authoritarian Past: Religious Violence in Indonesia’s Moluccan Islands”, *Pacific Affairs*, 75.1, edisi Musim Semi 2002.

²⁶ International Crisis Group, “Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan”, *ICG Asia Report* No.19. Jakarta/Brussels, 27 Juni 2001.

²⁷ Berdasarkan interview di Jakarta. Lihat juga Kevin O’Rourke, *Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia*, Crows Nest, NSW: 2002.

hal. 346, di mana FPI dilihat sebagai lebih terkait pada unsur-unsur dalam militer daripada polisi.

²⁸ Bukti yang menunjukkan bahwa Laskar Jihad didukung oleh beberapa elemen dalam militer didapat dalam laporan International Crisis Group: "Indonesia: The Search for Peace in Maluku", *ICG Asia Report* No.31. Jakarta/Brussels, 8 Februari 2002, hal. 5-7. Bukti tidak langsung lain dapat dijumpai dalam buku Kevin O'Rourke, op. cit. hal. 348-9. Lihat juga tulisan Kirsten E. Schulze, "Laskar Jihad and the Conflict in Ambon", *The Brown Journal of World Affairs*, IX.1, edisi Musim Semi 2002.

²⁹ Asal-usul dan perkembangan Jemaah Islamiyah dibahas dalam beberapa publikasi International Crisis Group: "Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the 'Ngruki Network' in Indonesia", *Indonesia Briefing*, 8 Agustus 2002; "Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates", *ICG Asia Report* No.43, 11 Desember 2002; "Jemaah Islamiyah in Southeast Asia: Damaged But Still Dangerous", *ICG Asia Report* No.63, 26 Agustus 2003.

Laporan-laporan

International Crisis Group (www.crisisweb.org)

"Why the Military Option Still Won't Work", *Indonesia Briefing Paper*, 9 Mei 2003.

"Indonesia: The Search for Peace in Maluku", *Asia Report* No. 31, 8 Februari 2002.

"Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya", *Asia Report* No. 23, 20 September 2001.

"Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan", *Asia Report* No. 19, 27 Juni 2001.

Publikasi

Aragon, Lorraine V., "Communal Violence in Poso, Central Sulawesi: Where People Eat Fish and Fish Eat People" *Indonesia* 72, Oktober 2001.

Aspinall, Edward and Greg Fealy (eds), 2003, *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization*, Indonesia Update Se-

ries. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.

O'Rourke, Kevin, 2002, *Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia* Sydney: Allen and Unwin.

Kontak Narasumber

Edward Aspinall, School of European, Asian and Middle Eastern Languages and Studies, University of Sydney, Australia. E-mail: edward.aspinall@asia.usyd.edu.au

Jacques Bertrand, Department of Political Science, Toronto University, Canada. E-mail: bertrand@chass.utoronto.ca

Richard Chauvel, Australia Asia Pacific Institute, Victoria University, Melbourne, Australia. E-mail: richard.chauvel@vu.edu.au

Greg Fealy, Research School of Pacific and Asian Studies, Australia National University, Canberra, Australia. E-mail: greg.fealy@anu.edu.au

Sidney Jones, Director Indonesia Project, International Crisis Group, Jakarta, Indonesia. E-mail: sjones@crisisweb.org

William Liddle, Department of Political Science, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. E-mail: liddle@polisci.sbs.ohio-state.edu

Kirsten Schulze, Department of International History, London School of Economics, London, United Kingdom. E-mail: k.e.schulze@lse.ac.uk

Rizal Sukma, Center for Strategic and International Studies, Jakarta, Indonesia. E-mail: rsukma@csis.or.id

Masyarakat Madani: Bagian yang Hilang dari Penciptaan Perdamaian di Aceh

Aguswandi

Dengan gagalnya proses perdamaian, diikuti dengan pengumuman berlakunya keadaan darurat di Aceh pada tanggal 19 Mei 2003, pemerintah Indonesia sekali lagi memilih opsi pendekatan militer dalam menangani konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh. Dengan pemberlakuan darurat militer, Aceh sekali lagi berada di bawah kontrol militer dengan wewenang yang hampir tanpa batas dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Namun, tidak mungkin, bahwa operasi sekarang ini akan berhasil menyelesaikan krisis, karena konflik yang

terjadi adalah konflik politik dan karenanya menuntut penyelesaian secara politik pula. Penyelesaian yang dimaksud dapat dicari dengan cara melibatkan masyarakat madani Aceh dalam proses perdamaian. Dialog yang sungguh-sungguh harus diadakan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa – Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia – disertai dengan keikut-sertaan masyarakat madani.

Tidak ada hubungan langsung antara konflik di Aceh dengan kebangkitan nasionalisme orang Aceh. Selama bertahun-tahun orang Aceh telah menghabiskan tenaganya untuk mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim-rezim pemerintah Indonesia dan angkatan bersenjatanya. Kebangkitan nasionalisme pada saat ini di Aceh adalah reaksi terhadap penindasan yang berkelanjutan tersebut.

Pada tahun 1953, sembilan tahun setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, dan empat tahun sesudah Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Hindia Timur Belanda kepada pemerintahan Soekarno, Daud Beureueh memimpin pemberontakan terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Yang menarik adalah bahwa Beureueh adalah salah seorang dari pemimpin daerah yang mendukung integrasi penuh Aceh ke dalam negara baru Indonesia.² Pada saat revolusi Indonesia, antara tahun 1945–1949, Beureueh terlibat bersama-sama penduduk setempat dalam perjuangan menentang Belanda yang mencoba menduduki kembali negeri ini.³ Orang-orang Aceh banyak sekali memberikan sumbangan bagi perjuangan tersebut, sehingga Aceh mendapat julukan sebagai *Daerah Modal*, sementara Beureueh dan pemimpin-pemimpin setempat menjadi terkenal sebagai pahlawan republik.

Namun, pemberontakan Beureueh telah menyebabkan kekecewaan besar yang pertama orang Aceh terhadap kebijakan sentralistik Jakarta dalam program pembangunan bangsa (nation-building) pasca era kolonial Belanda. Di Aceh, kebijakan sentralisasi ini berujung pada penggabungan propinsi Aceh ke dalam daerah Sumatera Utara.⁴ Gerakan Beureueh, sebagai bentuk pemberontakan melawan kecenderungan sentralistik tersebut, tidak

mengarah ke pemisahan Aceh dari Indonesia. Gerakan tersebut hanya ingin mempertanyakan ketidakadilan dari kebijakan pemerintah pusat yang tidak hanya melanggar janji pemberian otonomi, tetapi bahkan menghapus propinsi Aceh. Gerakan Beureueh ini tidak mempunyai tuntutan-tuntutan politik tertentu. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap keputusan pemerintah pusat menghapus propinsi Aceh. Beureueh hanya mengkritik cara-cara negara Indonesia dibangun pada masa pasca pemerintahan kolonial. Walaupun kenyataannya demikian, pemerintah pusat menjawabnya dengan mengirimkan ribuan tentara dan membunuh banyak orang yang terlibat dalam gerakan tersebut. Menurut satu cerita, dalam bulan Maret 1954, dalam satu insiden tentara Indonesia membunuh 148 orang dari dua desa nelayan di Jeumpa-Bireuen, Aceh Utara.⁵

Pada tahun 1959, Gerakan Beureueh pada akhirnya melemah melalui pendekatan non-militer ketika pemerintah pusat menetapkan Aceh kembali sebagai sebuah propinsi dengan otonomi yang luas dalam hal agama, pendidikan dan kebudayaan. Aceh dinamakan *Daerah Istimewa* (special region)⁶ berdasarkan otonomi yang diterimanya. Namun, operasi militer yang besar dan brutal yang terjadi sebelumnya telah menimbulkan kepahitan yang luar biasa di antara penduduk setempat dan merupakan benih antagonisme terhadap pemerintah pusat di Jakarta, terutama di daerah pedalaman di mana penduduk setempat telah mengalami tindakan brutal semasa operasi menumpas pemberontakan Beureueh.

Kegetiran mereka bertambah ketika status *Daerah Istimewa* menjadi hampir tidak punya arti dan janji-janji otonomi sebagian besar tidak terlaksana. Keadaan ini semakin parah dengan munculnya rezim Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto yang projek pembangunan bangsanya didasarkan pada kebijakan-kebijakan sentralistik dengan dukungan cara-cara teror oleh negara dan eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa. Di bawah rezim Orde Baru, Aceh memberikan minyak dalam jumlah yang sangat besar, dan, menjelang tahun 1980, sekitar 30% ekspor minyak dan

gas bumi berasal dari Aceh.⁷ Pendapatan yang sangat besar dari sumber daya alam Aceh tidak memberikan keuntungan apa pun pada penduduk setempat sedangkan masalah pengangguran, kemiskinan dan buta huruf tetap tidak terselesaikan. Kecenderungan yang ekstrim dari program nasionalisasi Orde Baru telah menghancurkan struktur masyarakat Aceh dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang diambil dari tradisi Jawa. Inilah sebagian alasan lahirnya Gerakan Aceh Merdeka dan proklamasi kemerdekaan Aceh oleh Hassan Di Tiro pada tanggal 14 Desember 1976. Seperti yang dikatakan oleh Robinson, bahwa deklarasi Hassan Di Tiro tidaklah secara kebetulan bersamaan dengan kebijakan Orde Baru di Aceh.⁸ Ciri reaktif dari deklarasi ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa pada tahun 1958, Hasan Di Tiro menerbitkan sebuah buku berjudul *Democracy for Indonesia*, di mana dia mengajukan argumen bagi dibentuknya sistem federal berdasarkan kesukuan di Indonesia.⁹ Jadi, GAM, sebagaimana halnya gerakan Beureueh, timbul sebagai reaksi terhadap cara negara Indonesia dibangun, hanya sekarang sebagai reaksi terhadap Orde Baru.

Dalam usaha mereka mendapatkan dukungan dari rakyat Aceh, Hassan Di Tiro dan GAM merujuk ke sejarah untuk memperkuat deklarasi mereka dengan argumentasi bahwa Aceh adalah negara and entitas merdeka dan tidak pernah dijajah. Namun, pada mulanya, dukungan terhadap gerakan Di Tiro terbatas pada beberapa ratus penduduk desa dari Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Orang-orang inilah yang merupakan anggota gerakan beserta kerabat mereka dan juga beberapa orang pengikut Beureueh yang tidak puas dengan penyelesaian terdahulu dan selama ini tetap tinggal di gunung-gunung.

Namun, ketika pemerintahan Orde Baru dan angkatan bersenjata mulai makin kuat dan menguras kekayaan alam Aceh dan menteror rakyatnya, dukungan terhadap gerakan Di Tiro makin menjadi. Ketidaksenangan rakyat Aceh terhadap rezim Orde Baru menghidupkan kembali sentimen antagonistik penduduk setempat terhadap pemerintah pusat. Menurut Benedict Anderson, tingkah-

laku Orde Baru menyebabkan makin banyak orang Aceh kehilangan harapan dan keyakinan bahwa mereka menjadi bagian dari usaha bersama bangsa Indonesia.¹⁰ Kebijakan-kebijakan Orde Baru telah menyebabkan orang Aceh merasa terasing dari usaha bersama ini.

Dinamika Konflik

Mengingat kecilnya jumlah pengikut Di Tiro, penguasa Orde Baru mengumumkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Keputusan ini ternyata kesalahan yang paling besar yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam menangani konflik di Aceh. Tidak saja keputusan tersebut gagal meredam GAM, tetapi juga menyebabkan makin meluasnya konflik, dan bahkan melahirkan generasi baru pejuang dan pendukung GAM. Kegagalan menangani akar penyebab konflik dan meningkatnya kebrutalan angkatan bersenjata terhadap orang Aceh menimbulkan reaksi keras terhadap pemerintah dan cara-caranya menyelesaikan konflik. Pelaksanaan DOM mengakibatkan terbunuhnya ribuan penduduk setempat selama operasi penumpasan. Diperkirakan 7.078 orang telah menjadi korban selama operasi. Banyak penduduk sipil yang terbunuh dan hilang dan ribuan orang disiksa di kamp-kamp militer dan penjara-penjara, sebagian besar dilakukan oleh Kopassus, suatu kesatuan khusus angkatan darat yang dilatih dan didukung oleh beberapa negara Barat. Kopassus telah melakukan banyak sekali tindakan brutal serta kejahatan lainnya, bahkan sampai ke dalam kompleks Exxon Mobile di Aceh Utara yang dijadikan sebagai kamp untuk menahan orang yang dicurigai sebagai pemberontak.

Tabel 9.6.1. Pelanggaran HAM oleh Pihak-Pihak yang Bertikai di Aceh selama Masa DOM (1989-1998)

Jenis Pelanggaran	Jumlah
Hilang	1958
Terbunuh	1321
Penyiksaan	3430
Kekerasan seksual	209
Perampokan	160
Jumlah	7078

Sumber: Institute for Policy Research and Advocacy (ELSHAM), 1999.

Semasa DOM, banyak orang Aceh, terutama di Pidie, Aceh Timur, hidup di bawah pengawasan militer secara terus-menerus. Aceh adalah salah satu faktor yang membawa kemajuan pada pihak militer secara ekonomi dan politik. Penerapan DOM memberi keleluasaan penuh pada militer untuk mengontrol semua kegiatan bisnis di Aceh. Secara politis, propinsi Aceh menjadi ajang para jenderal untuk meniti karir, karena keberhasilan di Aceh akan membuka pintu ke lingkaran dalam Cendana.¹¹ Kebijakan ekonomi dan politik Orde Baru dan militernya berakibat pada langgengnya pendudukan militer di Aceh.

Kebrutalan DOM baru terungkap setelah kejatuhan Soeharto. Cerita-cerita tentang pembunuhan dan penyiksaan mulai menarik perhatian ketika LSM mulai melakukan investigasi dan para korban pelanggaran HAM mulai bicara dan menuntut keadilan. Kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, memberi harapan kepada orang Aceh akan terbentuknya masyarakat yang adil dan demokratis. Topik utama pembicaraan pada permulaan masa pasca-Soeharto adalah keadilan dan perubahan dalam struktur hubungan antara pusat di Jakarta dan daerah di Aceh. Sayangnya, tuntutan agar

terjadi perubahan yang signifikan tidak ditanggapi dan presiden B.J. Habibie gagal melaksanakan sebagian besar janjinya, termasuk janji untuk menegakkan keadilan dan mengadakan perubahan struktur hubungan antara Aceh dan Jakarta. Masalah politik di Indonesia adalah salah satu alasan mengapa kurangnya tanggapan dari pemerintah pusat, karena, walaupun rezim politik sudah berubah, namun struktur dasar rezim Orde Baru seperti kekebalan hukum dan sentralisasi masih berlanjut. Masalah utama bagi rezim yang baru adalah pilihan antara penegakan keadilan bagi orang Aceh dan kompromi secara politis dengan pihak militer. Sejak pemerintahan Habibie sampai pemerintahan Megawati sekarang, Jakarta memilih pilihan kedua, yang berakibat berlanjutnya masalah kekebalan hukum. Dengan demikian, konflik di Aceh pada masa pasca Orde Baru secara tidak langsung adalah juga potret Indonesia moderen dan potret usaha yang gagal dari transisi menuju masyarakat demokratis.

Kekebalan hukum dan kurangnya kemauan politik untuk menyelesaikan konflik dari rezim pasca Orde Baru telah mengakibatkan makin meningkatnya tingkat permusuhan antara orang Aceh dan Jakarta. Meningkatnya popularitas GAM, sekitar tahun 1999, terjadi berbarengan dengan dilancarkannya operasi militer yang baru di mana terjadi beberapa pembunuhan massal.¹² Untuk kali pertamanya, GAM mendapat dukungan yang luas, ketika banyak korban kekerasan mulai bergabung dengan gerakan itu. Ide separatis menjadi topik pembicaraan utama di Aceh.

Dalam bentuknya seperti sekarang, kelompok perlawanan bersenjata GAM dapat dibagi menjadi empat unsur. Pertama adalah unsur politik, yang meyakini bahwa penyerahan kedaulatan Aceh dari Belanda kepada pemerintahan Soekarno adalah tidak sah. Geoffrey Robinson menggambarkan kelompok ini sebagai kumpulan para intelektual, birokrat setempat, para desertir polisi dan militer, dan pengusaha lokal.¹³ Mereka ini dihormati oleh penduduk setempat karena komitmen, kesetiaan dan kesederhanaan mereka. Komandan GAM, Abdullah Syafii, yang terbunuh dua tahun yang lalu, adalah contoh yang paling baik untuk

kelompok ini. Ketika dia terbunuh, tidak ada orang yang merasa gembira atas kematiannya, bahkan juga para pejabat pemerintah di Aceh.¹⁴

Kelompok kedua terdiri dari para korban pelanggaran HAM. Kegagalan pemerintah merespon tuntutan penegakan keadilan telah menyebabkan banyak di antara mereka bergabung dengan GAM, bukan karena alasan politik tetapi untuk membalas dendam terhadap kekebalan hukum pihak militer. Unsur ini merupakan kelompok paling besar dari anggota GAM sekarang, yang sebagian besar anggota keluarganya adalah korban semasa DOM atau korban operasi militer semasa pasca Orde Baru.¹⁵ Grup ketiga dalam gerakan tersebut terdiri atas orang-orang yang lebih tertarik mengeksploitasi konflik untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Beberapa di antara mereka membina hubungan ekonomi rahasia dengan pihak polisi dan militer Indonesia. Kelompok keempat terdiri dari orang-orang yang terpaksa memilih salah satu di antara dua kelompok yang bertikai. Generalisasi yang dibuat oleh pemerintah berarti bahwa siapa saja yang mengkritik ketidakadilan yang dilakukan pemerintah dan militer akan diklasifikasikan sebagai GAM, dan karenanya dapat ditangkap, atau bahkan dibunuh. Akibatnya, banyak yang akhirnya memilih GAM. Namun, keempat kelompok ini tidaklah merupakan gambaran GAM secara utuh, karena perubahan-perubahan bisa terjadi sesuai dengan dinamika konflik di Aceh, dan terutama dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah Indonesia merespon konflik tersebut.

Penaggulangan Konflik oleh Pemerintah

Situasi di Aceh mulai membaik ketika Abdurrahman Wahid (lebih dikenal dengan Gus Dur) menjadi presiden RI yang keempat. Selama pemerintahannya, konflik di Aceh berubah bentuk dari militeristik menjadi masalah politik. Langkah yang paling positif adalah ketika Gus Dur memutuskan untuk memulai dialog dengan orang Aceh.

Bahkan sebelum Gus Dur menjadi presiden, dia telah bicara di beberapa kesempatan kemungkinan mengadakan referendum,

sama seperti yang dilakukan Habibie di Timor Timur, sebagai mekanisme penyelesaian konflik di Aceh.¹⁶ Namun, ide tersebut tidak terlaksana ketika dia menjadi presiden, dan inisiatif untuk referendum serta cara-cara damai yang lain menemui banyak halangan dari banyak politisi dan, terutama, pihak militer. Perpecahan dalam pemerintahan Gus Dur merupakan kendala utama bagi kemajuan penyelesaian konflik Aceh.

Namun, pengiriman Bondan Gunawan, Pejabat Sekretaris Negara dalam kabinet Gus Dur, untuk bertemu dengan komandan GAM Abdullah Syafii, memperluas kemungkinan dialog antara GAM dan pemerintah Indonesia. Inisiatif dialog, didukung oleh banyak kelompok di Aceh dan Jakarta, memperoleh momentum yang baik ketika Henry Dunant Center (HDC) menawarkan diri sebagai fasilitator perundingan, dengan tujuan mengurangi kekerasan dan membuka jalan bagi bantuan kemanusiaan di Aceh.¹⁷ Pemerintahan Gus Dur memutuskan menerima tawaran tersebut. Setelah melalui beberapa kali perundingan yang difasilitasi oleh HDC, pada tanggal 12 Mei 2000, GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani sebuah perjanjian untuk “Jedah Kemanusiaan”.

Perjanjian tersebut mendapat dukungan yang luas dari orang Aceh. Pada hari perjanjian tersebut ditandatangani, ribuan orang di Banda Aceh dan di banyak tempat lain berkumpul untuk memanjatkan doa bagi keberhasilan perjanjian tersebut.¹⁸ Masyarakat internasional juga menyatakan dukungan mereka disertai pujian yang datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Amerika Serikat dan banyak lagi pemerintahan asing. Banyak kelompok LSM yang meluncurkan program-program mereka untuk membantu desa-desa yang menderita akibat konflik.

Sebagai tindak lanjut perjanjian jedah kemanusiaan itu, beberapa pertemuan telah diadakan di Banda Aceh antara wakil GAM dan wakil pemerintah Indonesia untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan perjanjian. Di samping pendirian Forum Bersama sebagai badan tertinggi bagi penyelesaian kemungkinan terjadinya deadlock, dua badan lain juga dibentuk: Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) untuk mencegah berlanjutnya

operasi militer, dan Komite Bersama Aksi Kemanusiaan (KBAK) untuk membantu pendistribusian bantuan. Di samping itu, juga dibentuk suatu kelompok monitoring yang dinamakan Tim Monitoring Modalitas Keamanan.

Namun, ternyata perjanjian tersebut tidak berhasil menciptakan demiliterisasi di lapangan. Wakil-wakil GAM dan pemerintah Indonesia tidak bisa mencapai kesepakatan tentang beberapa hal yang fundamental, seperti batasan tentang jedah atau penghentian tembak-menembak, peranan petugas keamanan, dan pengibaran bendera Indonesia dan Aceh. Kegagalan demiliterisasi berakibat berlanjutnya kontak senjata antara petugas keamanan Indonesia dan pejuang GAM. Memang pada awal masa jedah, kekerasan sangat berkurang, namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Pemerintah Indonesia dan GAM terus-menerus tidak bisa mencapai kesepakatan tentang banyak hal yang substansial, dan segera kekerasan kembali pada tingkat semula.

Situasi makin memburuk dengan dimulainya kembali operasi militer dalam bulan April 2001. Keputusan untuk melancarkan kembali operasi militer dipengaruhi oleh melemahnya posisi Gus Dur, sehingga memberi kesempatan kepada pihak militer untuk memegang kembali tali kendali di Aceh. Memburuknya keadaan di Aceh dan ketidakmampuan pemerintah mencapai persetujuan dengan GAM tentang proses demiliterisasi membuka kesempatan bagi dimulainya kembali operasi militer. Pada akhir masa jabatannya sebagai presiden, sebelum digantikan oleh Megawati, Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 4, di mana dia memberi izin terhadap pelaksanaan operasi militer di Aceh dan membatalkan semua perjanjian dengan GAM.

Dengan penggantian Gus Dur oleh seorang politisi nasionalis, Megawati, prospek perdamaian menjadi semakin suram. Namun, tekanan internasional yang terus-menerus memaksa pemerintah Indonesia untuk mulai berunding dengan GAM, namun ini hanya masalah waktu sebelum perundingan gagal, karena militer telah memegang kendali kembali dalam perpolitikan Indonesia. Ketidakluwesannya GAM dalam tuntutan juga menjadi penyebab

gagalnya perundingan. Namun, operasi militer sekarang terutama disebabkan oleh naiknya militer dalam percaturan politik di Indonesia, terutama adanya unsur garis keras dalam militer Indonesia, yang terus-menerus mendorong operasi militer sebagai satu-satunya jalan penyelesaian konflik di Aceh.

Diplomasi Multi-jalur

Masyarakat madani di Aceh merupakan unsur yang potensial dalam rangka mencari perdamaian yang adil dan positif dalam perjuangan menyelesaikan konflik di Aceh. Kelompok-kelompok sipil berkeinginan untuk mengubah konflik dari sekadar wacana penentuan nasib sendiri nasional, dan lebih difokuskan pada perjuangan yang lebih luas, yaitu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Aceh dan juga masyarakat Indonesia. Bersama-sama dengan banyak kelompok lain di luar Aceh mereka berusaha mencari solusi damai dan demokratis. Dalam usaha menciptakan masyarakat demokratis di Aceh, mereka mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk mengejar tujuan-tujuan politik mereka melalui cara-cara demokratis dan tanpa kekerasan.

Cerita masyarakat madani Aceh adalah cerita sebuah harapan, kreatifitas dan politik yang progresif. Di samping kehancuran kehidupan dan harta benda, konflik di Aceh telah pula melahirkan generasi baru Aceh yang mempunyai visi dan tekad untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih baik, yaitu generasi yang kritis baik terhadap kebijakan negara di Aceh maupun terhadap masyarakat mereka sendiri.

Terdiri atas para intelektual, LSM, mahasiswa, jaringan wanita, media, dan banyak kelompok-kelompok sektoral lainnya, masyarakat madani Aceh yang baru muncul itu telah memainkan peranan penting dalam mengubah konflik dan menciptakan peluang-peluang bagi proses perdamaian. Di bawah pemerintahan Orde Baru, orang Aceh baik yang ada di desa maupun di kota telah mengalami tekanan yang luar biasa, tetapi begitu rezim Orde Baru runtuh, rakyat di semua tingkatan masyarakat mengambil inisiatif menuntut kembali diadakannya dialog dan usaha-usaha

yang menyangkut krisis di Aceh. Peranan mereka begitu dominan sehingga ketika sebuah LSM setempat, Walhi Aceh, menyelenggarakan polling tentang siapa yang seharusnya mewakili Aceh, sebagian besar dari mereka yang dipilih adalah pemimpin kelompok masyarakat madani.¹⁹ Kelompok-kelompok masyarakat madani Aceh telah aktif secara lokal, nasional, dan internasional, dan telah pula bekerja membangun jaringan-jaringan ke tingkat-tingkat yang berbeda ini.

Tabel 9.6.2
Inisiatif Masyarakat Madani pada Tingkat Lokal, Nasional, dan Internasional

Tingkat	Sektor Sosial	Tuntutan dan
Lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dan gerakan Pemuda - Kelompok wanita - LSM - Para Korban - Intelektual, akademisi - Tokoh agama progresif - Artis - Organisasi sektoral seperti petani/ nelayan, pedagang, sopir 	<ul style="list-style-type: none"> - Demiliterisasi - Proses perdamaian - Akhiri kekerasan militer dan jajak pendapat terhadap pejuang - Pendidikan masyarakat - Pemberdayaan pendukung mengenai hak keterampilan workshop, dan - Keadilan budaya HAM, investasi para korban
Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa - LSM - Kelompok Wanita - Intelektual - Kelompok Solidaritas - Masyarakat Aceh di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - reformasi media demonstrasi - Pertanggungjawaban - Keadilan budaya - Demokratis
Internasional	<ul style="list-style-type: none"> -Kelompok Solidaritas - Masyarakat Aceh di luar negeri - LSM Internasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan dan demokrasi - Building capacity madani - Tekanan internasional

Karena banyaknya kekerasan selama DOM, banyak organisasi dibentuk untuk melakukan investigasi dan menghimpun kasus-kasus pelanggaran HAM. Kelompok-kelompok seperti

CORDOVA, Koalisi LSM-HAM, dan Kontras Aceh bekerja sama dengan kelompok HAM tingkat nasional seperti Kontras dan Lembaga Bantuan Hukum dalam menghimpun data-data kronologis, membuat database, dan menyiapkan laporan tentang situasi HAM di Aceh. Pada bulan Juni 1998, investigasi seperti itu diikuti oleh advokasi pada tingkat lokal, nasional dan internasional, yang pada akhirnya memaksa pemerintah Indonesia mengakhiri DOM.

Gerakan Mahasiswa

Setelah berakhirnya DOM, kelompok-kelompok mahasiswa secara cepat muncul sebagai elemen yang paling aktif dalam masyarakat madani Aceh. Kelompok mahasiswa seperti SMUR (Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat), FARMIDIA (Front Mahasiswa Muslim untuk Reformasi di Aceh), dan KARMA (Koalisi Mahasiswa Aceh untuk Reformasi) yang dibentuk semasa Reformasi, secara aktif melakukan kegiatan kampanye anti-militer, advokasi bagi para korban, dan protes, mogok makan dan pemogokan umum lainnya. Dalam bulan Maret 1999, gerakan mahasiswa juga melakukan kampanye memboikot pemilu, yang berakibat kurang dari 50 persen pemilih yang memilih, sebagai protes terhadap keputusan pemerintah pusat untuk mempertahankan operasi militer di Aceh.

Dalam masalah penyelesaian politik, para mahasiswa bertekad untuk mencari solusi demokratis tanpa kekerasan dan mulai melakukan kampanye tentang ide referendum sebagai solusi terbaik mengatasi konflik. Ide referendum pertama kali disuarakan pada Kongres Mahasiswa dan Pemuda seluruh Aceh, yang diselenggarakan pada bulan Februari 1999 di Banda Aceh. Dengan partisipasi lebih dari 200 kelompok, termasuk kelompok mahasiswa dan pemuda, organisasi massa dan kelompok para korban kekerasan, kongres memutuskan untuk membentuk suatu organisasi untuk mendukung ide referendum, yang akhirnya melahirkan Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA). Kongres tersebut diorganisir melalui pembentukan jaringan pergerakan

mahasiswa dan pemuda yang luas di seluruh propinsi Aceh, dan segera setelah itu mahasiswa menjadi kelompok sipil yang paling menonjol di Aceh.

Pada tanggal 9 November 1999, koalisi kelompok aktivis mahasiswa dan pemuda di Aceh mengadakan apel yang paling besar dalam sejarah Aceh, dengan lebih dari satu juta rakyat hadir di ibukota Banda Aceh menuntut diselenggarakannya referendum di Aceh.²⁰ Apel ini merupakan tonggak sejarah bagi gerakan masyarakat madani, karena bukan saja apel tersebut berlangsung dengan sangat sukses dengan hampir 40% penduduk hadir, tetapi juga merupakan demonstrasi yang sangat damai. Apel tersebut juga memberi tekanan pada GAM untuk mendukung ide referendum setelah melihat begitu besarnya dukungan rakyat bagi referendum sebagai cara mencari penyelesaian politik. Menjelang akhir tahun 1999, istilah referendum bermunculan di seluruh Aceh, ditulis di dinding-dinding bangunan publik dan di jalan-jalan di kota maupun desa menggantikan diskursus kemerdekaan dari GAM.

Di samping konsolidasi kelompok mahasiswa di belakang ide referendum, kongres mahasiswa juga membuat model bagi para mahasiswa dalam memperkuat sektor lain dari masyarakat madani. Misalnya, aktivis mahasiswa yang bekerja untuk membantu para korban, memfasilitasi kongres para korban pada tahun 2000 yang pada akhirnya menghasilkan pendirian suatu organisasi yang disebut SPKP HAM (Solidaritas Para Korban Pelanggaran HAM) di Aceh. Kongres-kongres serupa juga diselenggarakan oleh wanita, ulama, dan kelompok-kelompok lain. Alasan utama dari gerakan ini adalah kepercayaan bahwa gerakan sosial yang sebenarnya haruslah berupa gerakan rakyat, bukan hanya gerakan mahasiswa, dengan partisipasi dari sebagian besar anggota masyarakat.

Mobilisasi Jaringan Kota-Desa

Selama masa tersebut di atas, para mahasiswa juga mulai mendirikan pos-pos di pedesaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dan membangun jaringan pendukung antara daerah-

daerah pedalaman dan pusat-pusat di kota. Salah satu kelompok itu adalah Pusat Krisis Rakyat (People's Crisis Center) yang didirikan pada tahun 1999. Pusat Krisis ini bekerja untuk membantu dan melatih para pengungsi untuk dapat membangun kembali kehidupan ekonomi mereka, fasilitas-fasilitas kesehatan, dan sistem pendidikan yang telah rusak oleh konflik bersenjata. Dengan dukungan dari pekerja-pekerja PCC, para pengungsi belajar bertanggung jawab atas pengelolaan kamp-kamp mereka, menangani tugas-tugas seperti menjaga sanitasi, membagi-bagikan makanan, mengurus yang sakit, dan mengatur ruang-ruang kelas darurat untuk anak-anak yang pendidikannya terganggu oleh pertikaian bersenjata. PCC juga mendorong terlaksananya proses pembuatan keputusan kolektif yang dapat mewujudkan perubahan-perubahan penting dalam organisasi sosial dalam suatu kelompok. Wanita dan anak-anak, misalnya, yang sebelumnya tidak dapat ikut dalam rapat-rapat yang diadakan pada malam hari, sekarang dapat ikut secara aktif dalam setiap diskusi di mana keputusan harus diambil. Para pengungsi juga terlibat dalam pengembangan koperasi, kegiatan-kegiatan agama dan budaya, tugas-tugas media, sehingga memungkinkan mereka menjadi anggota aktif dalam gerakan sipil.

Kelompok-kelompok wanita juga memainkan peranan organisasi yang menonjol di daerah-daerah pedalaman. Satu organisasi, Bunga Aceh, didirikan pada tahun 1989, dan telah memainkan peranan penting dalam membantu para korban perkosaan dan kekerasan berlatar gender semasa DOM. Bunga Aceh dan organisasi wanita lainnya, termasuk mahasiswa, membangun suatu jaringan untuk memberikan dukungan dan pelatihan kepada wanita dalam berbagai aktivitas seperti penanganan trauma, perbaikan kehidupan ekonomi, keluarga berencana, dan gerakan kesadaran masyarakat akan persamaan dan keadilan gender.

Hasil yang paling penting dari mobilisasi rakyat ini adalah munculnya kepemimpinan baru di berbagai tingkat masyarakat Aceh, baik di daerah pedalaman maupun di daerah perkotaan. Para

mahasiswa memainkan peranan yang paling penting dalam memperkuat berbagai sektor masyarakat madani, dan dalam membangun jaringan pendukung kota-desa. Mahasiswa juga telah mendorong kerja sama yang lebih baik dengan kelompok-kelompok masyarakat madani Indonesia dalam mengajukan solusi damai non-militer terhadap konflik melalui advokasi, penyuluhan, kampanye melalui media, dan pameran budaya. Kegiatan di lapangan juga terbantu dengan kehadiran kelompok-kelompok asing seperti OXFAM, Save the Children, Peace Brigades International, dan Jesuit Refugee Service.

Kegiatan di Tingkat Internasional

Masyarakat madani Aceh juga telah aktif pada tingkat internasional. Banyak kelompok HAM setempat yang telah bekerja membangun jaringan dengan organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch dalam usaha mereka mengakhiri kekerasan di Aceh. Kelompok yang paling menonjol menyuarakan HAM di Aceh pada tingkat internasional adalah International Forum for Aceh (IFA) yang didirikan pada tahun 1998 di Amerika Serikat oleh Jafar Siddiq Hamzah. Pada bulan Juli 1999, IFA dan Forum Asia mensponsori suatu konferensi di Bangkok yang akhirnya menjadi pendorong diadakannya satu pertemuan dari beberapa pertemuan awal antara GAM dan pemerintah Indonesia, dan ini membuka jalan bagi perundingan-perundingan berikutnya antara kedua belah pihak serta persetujuan diterapkannya jeda kemanusiaan pada tahun berikutnya. Pada bulan September 2001, persis satu tahun setelah Jafar meninggal, IFA bekerja bersama American University menyelenggarakan Acehese Brotherly Dialogue (ABD), di mana Acehese Civil Society Task Force (ACSTF) didirikan untuk mengatur keterlibatan masyarakat madani dalam memajukan proses perdamaian, dan sampai pada saat bubarnya COHA, tetap bekerja untuk membangun dialog antara berbagai kelompok di lapangan.

Masyarakat Madani dan Proses Perdamaian

Bahkan sebelum berlakunya Jedah Kemanusiaan, beberapa kelompok di Aceh telah menuntut diakhirinya kekerasan oleh kedua belah pihak. Satu contoh dari tuntutan itu adalah pembentukan Tim 21 pada bulan Januari 2000, suatu kelompok sebagai payung yang melibatkan LSM, kelompok mahasiswa dan organisasi keagamaan yang bertemu dengan GAM dan pejabat-pejabat Indonesia menuntut penghentian tembak-menembak dan pembentukan zona-zona damai di Aceh. Beberapa LSM bahkan mencoba memfasilitasi pertemuan antara Pejabat Sekretaris Negara pemerintahan Gus Dur, Bondan Gunawan, dan pemimpin GAM di Aceh, Abdullah Syafii, untuk melihat kemungkinan diadakannya suatu dialog. Pertemuan tersebut merupakan kontak terbuka pertama antara pejabat pemerintah Indonesia dan pemimpin GAM. Ketika HDC datang ke Aceh, inisiatif proses perdamaian memperoleh momentum dan mulai mendominasi iklim politik di Aceh. Setelah beberapa bulan berlangsungnya pembicaraan tertutup, pada bulan Juni 2000 GAM dan pemerintah Indonesia setuju untuk melaksanakan Jedah Kemanusiaan. Namun, ketika perundingan-perundingan berlangsung, masyarakat madani makin dimarginalkan dalam proses tersebut. Dalam proses tersebut, yang diakui adalah kelompok-kelompok bersenjata, sedangkan masyarakat madani terbentur pada tidak jelasnya peranan formal mereka, dan sedikitnya jaminan keamanan bagi aktivitas mereka di lapangan. Pada akhirnya kelompok-kelompok lokal terjebak dalam posisi membingungkan antara dua kelompok bersenjata dan karenanya tidak bisa berpartisipasi dalam proses perdamaian sebagai unsur yang independen. Para anggota masyarakat madani yang ditunjuk duduk dalam komite bersama diposisikan sebagai wakil dari GAM atau wakil dari pemerintah Indonesia, yang mengakibatkan terjadinya polarisasi dari kelompok-kelompok non-partisan. Keadaan ini bertepatan pula dengan makin memburuknya situasi keamanan, di mana para aktivis mahasiswa, pekerja kemanusiaan, intelektual, jurnalis, dan pelaku-pelaku sipil lainnya mulai menjadi sasaran baru militer. Di antara insiden-insiden or-

ang-orang hilang, penangkapan semena-mena, siksaan, pembunuhan dan intimidasi terhadap masyarakat madani adalah pembunuhan Safwan Idris dan Dayan Dawood, Rektor dari dua universitas di Aceh; penculikan dan pembunuhan ketua IFA Jafar Siddiq Hamzah; dan penculikan, penyiksaan, dan eksekusi pekerja-pekerja kemanusiaan dari Rehabilitation of Torture Victims in Aceh (RATA). Dilancarkannya kembali operasi militer juga berarti dimulainya kekerasan di daerah pedalaman dan bertambahnya jumlah pengungsi. Namun demikian, kelompok-kelompok masyarakat madani terus mencanangkan proses dialog sementara tetap bersikap kritis, bersama dengan banyak kelompok lain mencoba menciptakan peluang-peluang ke arah perdamaian di desa maupun di kota dengan mensosialisasikan ide-ide penghentian tembak-menembak, pendidikan dan pelatihan untuk perdamaian, dan membangun jaringan untuk monitoring. Namun usaha-usaha tersebut makin melemah oleh tindakan petugas keamanan. Pada tanggal 3 Mei 2002, misalnya, seminar satu hari yang diorganisir oleh Gugus Tugas Masyarakat Madani Aceh, dilarang pada saat-saat terakhir oleh pihak polisi. Seminar tersebut yang bertema “Membangun Komitmen Baru di Aceh” dimaksudkan untuk mencari cara-cara membawa masyarakat madani Aceh secara langsung ke dalam proses perdamaian.²¹ Seminar tersebut sedianya akan dihadiri oleh pembicara Wakil Gubernur Aceh dan wakil GAM, di samping orang Aceh, orang Indonesia lainnya, dan wakil-wakil LSM internasional. ACSTF tetap aktif membangun kepercayaan dan kerja sama di antara berbagai kelompok masyarakat Aceh, melalui perundingan-perundingan, termasuk para ulama, akademisi, pengusaha dan bahkan anggota GAM dan petugas keamanan Indonesia, sampai dengan saat bubarnya COHA, dan deklarasi darurat militer pada tanggal 19 Mei 2003. Tidak dimasukkannya kelompok-kelompok masyarakat madani dalam proses perdamaian adalah suatu pengingkaran terhadap pentingnya melibatkan orang-orang sipil sebagai patner yang setara pada semua tingkat proses perdamaian tersebut. Sebagai akibatnya, perubahan sosial yang sudah sedemikian jauh yang sudah dicapai

oleh aktivitas masyarakat madani di lapangan tidak dapat diterjemahkan dalam kegiatan resmi dalam negosiasi-negosiasi politik. Banyak orang Aceh melihat negosiasi tersebut tidak hanya sebagai suatu dialog antara dua kelompok bersenjata, tetapi juga suatu kesempatan untuk mentransformasikan hubungan-hubungan sosial dan ketidaksetaraan yang telah menimbulkan kondisi-kondisi yang memicu konflik. Bagi sebagian besar rakyat biasa Aceh, perundingan-perundingan tersebut merupakan langkah awal ke arah perubahan dari sistem yang tidak adil ke masyarakat yang bersendikan partisipasi demokratis, di samping juga keadilan politik, ekonomi, dan sosial. Potensi masyarakat madani tetap mendapat kendala dari beberapa faktor lain. Salah satunya adalah kapasitas yang lemah dari kelompok-kelompok masyarakat madani itu sendiri. Ini tidak hanya akibat dari kapasitas internal tetapi juga disebabkan oleh penekanan yang telah berlangsung lama yang telah melemahkan elemen-elemen yang kritis dalam masyarakat Aceh karena militerisasi yang terus-menerus. Kebijakan pemerintah juga ikut mempunyai pengaruh terhadap lemahnya masyarakat madani setempat, tiadanya pemberdayaan masyarakat lokal dan terciptanya ketergantungan yang luar biasa.

Sekarang di bawah keadaan darurat militer, kehadiran militer telah mengakibatkan habisnya ruang gerak untuk sipil. Pergerakan sipil telah bergabung dengan GAM yang merupakan target utama dari perang di Aceh. Tidak saja para mahasiswa, aktivis, pembela HAM dan pemimpin masyarakat diintimidasi, ditangkap, diculik dan dibunuh, tetapi juga ruang untuk berbeda pendapat pun sudah dihapus, dan siapa pun penentang pemerintah akan dikelompokkan sebagai orang yang berpotensi sebagai pemberontak. Sebagai contoh, beberapa hari setelah darurat militer dicanangkan, pemerintah mencap SIRA, Kontras, dan SMUR sebagai simpatisan GAM. Semenjak diumumkannya darurat militer, penangkapan masal dan pemburuan para aktivis telah berlangsung di Aceh. Semua kelompok non-pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya harus mendapat izin dari penguasa darurat militer yang juga bertindak sebagai panglima dari operasi militer. Pejabat yang

berwenang juga telah menutup Aceh bagi petugas kemanusiaan dan para jurnalis asing. Pembatasan juga dikenakan pada semua aktivitas LSM.

Tantangan lain yang dihadapi oleh gerakan ini adalah bagaimana mendapatkan dukungan dari masyarakat madani di daerah lain di Indonesia. Keterlibatan orang Aceh dan masyarakat madani Indonesia bisa memberi dukungan alternatif pada keseluruhan proses perdamaian di Aceh. Hal ini bahkan lebih urgen sekarang karena konflik sudah menjadi lebih kompleks sehingga menuntut kreativitas dan kepandaian yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi. Pemerintahan yang sekarang kelihatannya tidak begitu kreatif dan akibat itu memberi prioritas pada proses politik yang tidak mempertimbangkan apa yang penting bagi masyarakat umum, dalam hal mana mereka tidak punya jalan untuk berperan-serta. Di samping itu, keikutsertaan masyarakat madani Indonesia juga penting karena baik orang Aceh maupun masyarakat Indonesia lainnya adalah korban dari konflik di Aceh. Orang Aceh adalah korban yang kasat mata, sedangkan masyarakat Indonesia pada umumnya adalah korban yang terselubung dari perang di Aceh.

Orang Aceh menginginkan perdamaian yang positif, bukan yang negatif. Mereka tidak melihat konflik sebagai sesuatu yang jelek. Masyarakat Aceh menolak unsur destruktif dalam konflik itu, tetapi mengakui potensi-potensi dan peluang-peluang positif, konstruktif, dan kreatif yang dibawa oleh konflik tersebut. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mentransformasikan kecenderungan yang destruktif dalam konflik itu menjadi kecenderungan yang kreatif, dan bagaimana membangun ruang gerak yang cukup luas bagi berkembangnya masyarakat di mana orang ikut terlibat dalam melaksanakan perdamaian, menuntut keadilan, mempraktekkan hubungan-hubungan demokratis dalam kehidupan sehari-hari.

Prospek

Tidak ada jalan yang mudah untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Konflik tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan sudah sampai pada titik di mana suatu penyelesaian menjadi semakin sulit ditemukan. Kompleksitas masalah Aceh semakin dipersulit oleh masalah politik Indonesia yang juga kompleks. Tidaklah mungkin memahami perang di Aceh tanpa memahami dinamika politik yang ruwet di Jakarta yang menyebabkan ini terjadi. Perpolitikan di Indonesia pada masa pasca-Orde Baru memang kacau-balau. Makin terbukanya pelanggaran-pelanggaran HAM dan teror negara di masa Orde Baru, yang sebagian besar dilakukan oleh ABRI, berarti reformasi militer merupakan unsur yang sangat penting dari agenda besar reformasi Indonesia. Namun, segera akan jelas bahwa posisi militer yang kuat dalam struktur kekuasaan sipil di Indonesia mempunyai implikasi bahwa masalah kekebalan hukum tidak akan diutak-atik; pada saat yang sama, korupsi yang merajalela dan sistem hukum yang lemah telah mengganggu usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan dasar. Banyak yang mengatakan bahwa reformasi sudah mati. Tidak dapat disangkal bahwa situasi politik yang lebih luas di Indonesia mempunyai hubungan yang langsung pada usaha-usaha menyelesaikan krisis di Aceh.

Prospek bagi campur tangan pihak ketiga mengecil ketika rezim Orde Baru jatuh. Pembicaraan mengenai reformasi terlihat sebagai indikasi yang cukup bahwa perubahan pasti terjadi. Namun, realitas reformasi sangat berbeda. Situasi politik domestik pada saat ini tidak memungkinkan terbukanya pintu penyelesaian konflik. Perubahan-perubahan yang terjadi justru membuat konflik Aceh semakin kompleks. Namun, kesulitan-kesulitan menemukan solusi politik terhadap masalah Aceh seharusnya tidak berarti bahwa satu-satunya alternatif adalah membiarkan militer Indonesia memegang kendali. Kini mestinya adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menyatukan masyarakat madani mencari 'penyelesaian' lain. Masyarakat madani bisa mengambil inisiatif, bertindak kreatif dan menunjukkan kesediaan berunding yang diperlukan dalam setiap

usaha perdamaian. Semua ini tentu saja bukan karakteristik dari penengah yang dipercaya untuk mengakhiri konflik, yaitu pihak militer. Sering-sering, mereka justru menjadi penyebab kekacauan, kekerasan dan kehancuran baik di Aceh maupun di masyarakat Indonesia umumnya. Pengulangan taktik dan strategi yang sekarang terjadi dan yang telah gagal dalam setiap operasi di Aceh sampai saat ini lebih memperjelas lagi hal ini.

Jika perang di Aceh perlu berubah, maka campur tangan pihak ketiga atau pengakuan terhadap masyarakat madani sangatlah penting. Sayangnya, sikap resmi pemerintah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut adalah hanya pemerintah dan GAM, telah menutup peluang bagi masyarakat madani untuk bekerja secara konstruktif. Kontrol militer yang sangat ketat terhadap informasi mengenai konflik makin memupus peluang tersebut. Selama mereka mampu merepresentasikan satu pandangan saja tentang perang, maka tidak saja tekanan untuk segera mengakhiri operasi di sana tidak akan dianggap kredibel, tetapi mereka juga bebas merepresentasikan diri mereka sebagai satu-satunya kelompok yang mampu mengatasi krisis politik di Indonesia. Kelompok masyarakat madani tidak saja dibatasi ruang geraknya atau dicap sebagai 'tidak patriotik', tetapi juga secara aktif dijadikan target oleh pihak militer. Intervensi terhadap pemerintah dari luar negeri tidak akan terjadi sementara tidak ada informasi yang dapat dipercaya tentang fakta-fakta di propinsi tersebut. Kelihatannya dua pihak yang potensial dan sangat tepat untuk mengubah prospek-prospek di Aceh telah terpinggirkan.

Rekomendasi

Sekalipun terdapat kendala-kendala yang kelihatannya tidak dapat diatasi untuk memecahkan *deadlock* di Aceh, namun masih ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak, dalam negeri maupun luar negeri, untuk memperbesar kemungkinan perdamaian di Aceh.

** Pemerintah Indonesia harus segera mengakhiri keadaan darurat militer di Aceh dan kembali ke meja perundingan dengan GAM.*

Pemerintahan lain, para donor dan pendukung-pendukung proses perdamaian untuk Aceh harus meningkatkan ruang lingkup dan urgensi usaha-usaha menekan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri keadaan darurat sesegera mungkin dan secara aktif mencari mediasi pihak ketiga internasional, serta partisipasi masyarakat madani Aceh untuk mencari solusi non-militer terhadap konflik Aceh. Negara-negara ASEAN, di samping Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa harus memainkan peranan yang nyata dalam mendekati pemerintah Indonesia.

** Pemerintah Indonesia hendaknya memberikan akses kepada organisasi-organisasi kemanusiaan dan pengawas HAM internasional.*

PBB hendaknya terus mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan akses kepada organisasi HAM dan kemanusiaan masuk ke Aceh. Berbagai organisasi HAM dan kemanusiaan internasional yang telah berpengalaman bekerja di Aceh telah mencoba berulang kali memperoleh kembali akses ke propinsi tersebut setelah penguasa darurat militer menolak memperpanjang 'Buku Biru' mereka pada tahap-tahap awal terjadinya konflik kembali. Beberapa organisasi masih bisa memberikan pelayanan mereka dalam tenggang waktu 14 hari yang diberikan oleh penguasa darurat militer. Beberapa staf individual yang telah diberikan izin kunjungan singkat ke propinsi itu dilarang bepergian keluar ibukota propinsi ke daerah-daerah yang paling menderita akibat konflik. Akses ke propinsi Aceh hendaknya tidak dibatas pada tenggang waktu yang ditentukan. Mereka tentu dapat mengevaluasi keamanan mereka sendiri di luar ibukota.

** Semua tingkat di masyarakat internasional harus menjamin bahwa perundingan-perundingan damai pada tataran politik berjalan bersamaan dengan proses perdamaian di masyarakat seluruhnya.*

Badan-badan PBB, pemerintahan lain, para donor, LSM asing dan LSM dalam negeri harus mendukung program *capacity-building*

untuk mempersiapkan penduduk setempat untuk berbagai tahap proses perdamaian dan seterusnya. Dukungan logistik, keuangan, dan politik bagi kelompok-kelompok masyarakat madani dalam negeri akan membantu mereka dalam tugasnya, misalnya, rekonstruksi sistem ekonomi, pendidikan dan kesehatan, atau pendidikan politik dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

** Dukungan internasional untuk reformasi dan demokratisasi di Indonesia hendaknya dijadikan prioritas kebijakan.*

Pihak militer tetap menjadi kendala utama dalam mencari penyelesaian politik di Aceh dan Indonesia. Rekomendasi-rekomendasi di atas hendaknya disatukan dengan desakan dan bantuan kepada pemerintah Indonesia yang dapat membantu masyarakat madani dan memperlemah pihak militer Indonesia secara politis. Misalnya, demiliterisasi dan demobilisasi; penyelidikan pelanggaran HAM; pembentukan kembali mekanisme peradilan. Sampai hal ini terwujud, masyarakat madani setempat dan masyarakat madani nasional akan tetap berjuang mencari solusi terhadap masalah tersebut. Baru setelah peranan politik pihak militer Indonesia dipersempit, kita akan dapat menemukan suatu penyelesaian bagi krisis di Aceh dan di Indonesia pada umumnya.

** Masyarakat madani, di Aceh maupun di Indonesia lainnya, hendaknya bekerja sama mencari solusi terhadap krisis di Aceh.*

Keterlibatan civil society ini harus berjalan paralel dengan usaha-usaha memfasilitasi pembicaraan antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan dan menjaga kontak secara teratur antara, serta usaha-usaha membangun, jaringan LSM, kelompok mahasiswa, para intelektual dan aktivis dari Aceh dan daerah Indonesia lainnya. Strategi yang terintegrasi akan membantu usaha-usaha dalam menentukan masyarakat seperti apa yang mereka ingin bangun.

Catatan

¹ Jumlah pengungsi berubah setiap waktu. Hal ini disebabkan sifat pengungsian di Aceh pada umumnya sementara, berpindah hanya apabila ada operasi militer atau terjadi pertempuran. Banyak dari para pengungsi tersebut pulang ke desanya apabila pertempuran atau operasi berhenti. Tidak ada endnote nomor satu di teks!!! Teks ini tidak merujuk kepada teks di artikel.

² Bersama dengan enam ulama terkemuka di Aceh, Beureueh menyatakan persetujuan integrasi Aceh ke dalam negara Indonesia yang baru di bawah rezim Soekarno melalui pernyataan bersama.

³ Pada masa antara 1945-1949, Belanda mencoba menduduki kembali Indonesia, yang menimbulkan perlawanan terhadap Belanda di banyak daerah di Indonesia. Periode ini disebut zaman revolusi dalam sejarah Indonesia.

⁴ Untuk uraian yang lengkap tentang pemberontakan Beureueh lihat buku N. Syamsuddin, *The Republican Revolt: A Study of the Acehese Rebellion*, (Singapore: Institute of the South East Asian Studies, 1985).

⁵ SCHRA, *Aceh, The Untold Story of Aceh, an Introduction to Human Rights Crisis in Aceh*, 2000.

⁶ N. Syamsuddin, *The Republican Revolt: A Study of the Acehese Rebellion*, (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 1985).

⁷ I. Sulaiman, *Aceh Merdeka: Idiologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, (Al Kautsar, 2000).

⁸ G. Robinson, "Rawan is as Rawan Does: The Origin of Disorder in New Order Aceh", *Indonesia*, 66, 1998.

⁹ H Di Tiro, *Democracy untuk Indonesia*, (Jakarta: Teplok Press, 1999).

¹⁰ B. Anderson, "Indonesian Nationalism Today and in the Future", *New Left Review* No. 235, May-June 1999.

¹¹ Seputar Cendana adalah istilah yang dipakai untuk menggantikan seputar Soeharto, Cendana adalah tempat di mana keluarga Soeharto tinggal. Untuk informasi selanjutnya tentang kepentingan-kepentingan militer di Aceh, lihat buku Aguswandi, *Aceh: Tradisi Ketidakadilan*, paper yang disajikan pada seminar tentang kepentingan militer di Aceh, diorganisir oleh Pusat Pengembangan Studi Kawasan (PSPK), Banda Aceh, 27 Mei 2000.

¹² Priyambudi S, "Whither Aceh", *Third World Quarterly*, Vol. 22, No. 3,

438, 2001.

¹³ Robinson, "Rawan is as Rawan Does, The Origin of Disorder in New Order Aceh", *Indonesia* No. 66, Oktober 1998.

¹⁴ Interview dengan Otto Syamsuddin Ishak di *Inside Indonesia*, Februari 2002.

¹⁵ Pada Masa pasca Orde Baru dan sebelum pemberlakuan Keadaan Darurat sekarang ini, sudah terjadi beberapa kali operasi seperti Operasi Wibawa (Januari-April 1999), operasi Sadar Rencong I (Mei 1999-Januari 2000), operasi Rencong II (Februari-Mei 2000), operasi Cinta Meunasah I (Juni-September 2000), operasi Cinta Meunasah II (September 2000-Februari 2001), OPKH I (Februari-Agustus 2001) dan OPKH II (September 2001-Februari 2002).

¹⁶ *Serambi Indonesia*, 16 September 1999.

¹⁷ HDC 'Mission Statement', www.hdcentre.org.

¹⁸ *Serambi Indonesia*, 13 Mei 2000.

¹⁹ Polling Walhi Aceh, Juni 1999.

²⁰ Referendum yang dituntut sama dengan referendum yang diadakan di Timor Timur di mana kemerdekaan dan otonomi adalah opsi-opsi yang dapat dipilih oleh rakyat.

²¹ *Tapol Bulletin*, No. 166/167, April/Mei 2002.

Laporan-laporan

Human Rights Watch

"Indonesia: Aceh Under Martial Law: Inside the Secret War", Desember 2003, Vol. 15, No. 10 (C).

"Inside Indonesia: The War in Aceh", Vol. 13, No. 4 (C), Agustus 2001.

International Crisis Group

"Aceh: Why Military Force Won't Bring Lasting Peace", Jakarta/Brussels, 12 Juni 2001.

"Aceh: A Fragile Peace", Jakarta/Brussels, 27 Februari 2003.

Tapol Indonesian Human Rights Campaign

“A Reign of Terror, Human Rights Violations in Aceh”, 1998-2000,
Maret 2000

Amnesty International

“Shock Therapy: Restoring Order in Aceh 1989-1993”, London: Am-
nesty International, 1993.

Publikasi

Geoffrey Robinson, “Rawan Is as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh”, *Indonesia*, No. 66, Oktober 1998.

Priyambudi Sulistiyanto, “Whither Aceh”, *Third World Quarterly*, Vol. 22, No.3, hal. 437-452, tahun 2001.

Tim Kell, “The Roots of Acehnese Rebellion, 1989-1992”, *Cornell Modern Indonesia Project*, Publikasi 74, 1995.

James T. Siegel, *The Rope of God*, Michigan University Press (2nd edition). 2000.

Nazaruddin Sjamsuddin, 1985, *The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Situs Internet

www.acheh-eyes.org

<http://tapol.gn.apc.org>

<http://dte.gn.apc.org>

Kontak Narasumber

Sidney Jones, International Crisis Group (ICG), Jakarta Office, e-mail: sjones@crisisweb.org

Liem Sio Liong, Indonesian Kodemo, Amsterdam, e-mail: slliem@xs4all.nl

Carmel Budiardjo, Tapol Indonesian Human Rights Campaign, London, e-mail: tapol@gn.apc.org

Lesley Mc Cullogh, SCHRA, Australia, e-mail: lesleymc@deakin.ed.au

Otto Syamsuddin Ishak, Yappika, Jakarta, e-mail: aroen_jeram@yahoo.com

Munir, Imparsial Jakarta, e-mail: munir91@plasa.com

Saeki Natsuko, NINDJA Japan, e-mail: sekjen@nindja.com
Damien Kingsbury, Deakin University Australia, e-mail:
dlk@deakin.edu.au
Aguswandi, Tapol, e-mail: agus_smur@hotmail.com

Organisasi Lokal:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS)
Jl. Cisadane No. 9, Cikini 10330, Indonesia
Tel: +62 21 390 1978
Fax: +62 21 319 00627

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Jl. Diponegoro No 74, Jakarta 10320, Indonesia
Tel: +62 21 314 5518
Fax: +62 21 330 140

Imparsial
Jl. Diponegoro No 9, Jakarta, Indonesia
Tel: +62 21 391 3819
Fax: +62 21 319 00627

International Crisis Group (ICG) Jakarta Office
Menara Thamrin, Lt. 14, Suite 1402
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia
Tel: +62 21 398 30303 Fax: +62 21 398 30304

Organisasi Internasional:

Tapol Indonesian Human Rights Campaign
111 Northwood Road, Thornton Heath, Surrey
CR7 8HW, UK
Tel: +44 20 8771 2904
Fax: +44 20 8653 0322

Support Committee for Human Rights in Aceh (SCHRA)
C/o Network for Indonesian Democracy, Japan (NINDJA)
Chateaux Sawamura A, 8 Sugacho Shinjukuku, Tokyo 160-0018,
Japan Tel/Fax: +81-3-3356-8364

Kalimantan: Kesatuan atau Keragaman?

John Bamba

Kalimantan memiliki sejarah panjang keragaman budaya dan kekerasan etnik, kekayaan dan penambangan. Meski ketegangan di kalangan banyak orang Dayak, Melayu, Madura dan berbagai kelompok etnik lainnya termasuk Cina, sempat mengakar, namun di bawah pemerintahan diktator Soeharto setidaknya ketegangan tetap terkendali hingga rezim itu jatuh pada 1998. Di Kalimantan, Sanggau Ledo, Sambas dan Sampit konflik sangat parah sehingga mengundang perhatian internasional. Inisiatif untuk meredakan konflik secara umum dapat dipandang gagal, dan penyebab konflik tetap tak teratasi. Sebagian besar pengungsi telah dimukimkan kembali di daerah yang terisolasi dan terbelakang,

dan ketegangan etnik semakin tercermin menurut garis politik dan sosial.

Konflik etnik yang keras memang memiliki sejarah yang panjang, meski bersifat sporadis di Kalimantan. Sejak 1952,¹ telah mulai muncul konflik antara orang Madura dan suku Dayak atau Melayu,² dengan sering meletupnya perkelahian komunal yang bersifat terbatas dan berskala kecil, dan jatuhnya korban nyawa di kedua belah pihak. Pada beberapa tahun terakhir, kekerasan pecah di Sanggau Ledo, Kalimantan Barat pada 1997, di Sambas, Kalimantan Barat pada 1999 dan di Sampit, Kalimantan Tengah pada 2001. Bab ini secara khusus membahas kekerasan komunal di dalam konteks Kalimantan Barat yang melibatkan suku Dayak, Madura dan Melayu.

Secara historis, penduduk paling awal di Kalimantan berjumlah ratusan orang yang berasal dari berbagai suku, yang kemudian secara kolektif dikenal sebagai suku Dayak, tanpa membedakan bahasa dan adat istiadat. Pada umumnya mereka tinggal di hutan-hutan. Lalu hijrah ke kawasan pedalaman pulau Borneo ketika para pedagang Arab, India dan daerah lain di Asia mendirikan pelabuhan dan pusat perdagangan di pesisir. Hijrah itu juga disebabkan oleh keengganan mereka terhadap agama Islam, meski memang ada upaya para pedagang ini untuk mengislamkan mereka. Mereka yang konversi ke Islam dipandang sebagai suku "Melayu" dan mendapatkan peluang untuk memperoleh keuntungan sosial tertentu.

Kaum Melayu adalah keturunan para pedagang Muslim maupun suku Dayak yang memeluk agama Islam. Mereka umumnya tinggal di kawasan pesisir sebagai nelayan, atau mencari nafkah, seperti halnya suku Dayak yang lain, sebagai petani di kawasan pedalaman. Pada zaman modern, kaum Melayu cenderung memiliki kedudukan politik yang lebih besar dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan suku Dayak atau Madura.

Dengan demikian, sejarah ketimpangan masa silam dan persaingan mutakhir terhadap kedudukan ekonomi, sosial dan

politik antara suku Dayak non-Muslim dan mayoritas kaum Muslim Melayu dapat dipandang sebagai sumber utama potensi konflik yang tetap berlanjut antara kedua kelompok etnik tersebut—yang perbedaan latar belakang agamanya mungkin pula semakin memperburuk hubungan. Tetapi, meski terdapat ketegangan antara kaum Melayu dan suku Dayak, namun hal ini tidak pernah meledak menjadi konflik keras yang bersifat terbuka seperti yang pernah terjadi antara suku Dayak dan Madura.

Orang Madura pertama kali hijrah ke Kalimantan Barat pada 1904 ketika mereka diberangkatkan dari pulau Madura, yang terletak di sebelah Timur Laut Pantai Jawa, ke daerah itu untuk dipekerjakan sebagai kuli oleh para pedagang Melayu, Bugis, dan Arab.³ Tak lama berselang terjadi zaman penjajahan Belanda (Kolonisasi). Setelah itu, semakin banyak orang Madura yang hijrah untuk mengadu nasib. Orang Madura ini tampaknya berasal dari kawasan paling miskin di Madura—sebuah daerah di mana keuletan, kesungguhan dan gotong-royong menjadi syarat penting untuk bertahan hidup—dan tempat yang padanya harga diri memiliki peran penting dalam budaya. Di Kalimantan Barat, kebanyakan orang Madura bekerja di sektor angkutan seperti pengayuh becak dan supir bus umum, dan dalam sektor informal menjadi pedagang asongan atau penjual rokok. Sebagian lain menanam singkong dan sayuran di kawasan pinggiran dan menjajakannya langsung ke rumah-rumah atau di pasar. Hanya sedikit dari mereka yang menjadi pengusaha yang berhasil, pejabat pemerintah dan politisi. Meski cukup banyak orang Madura yang tinggal di kota-kota, namun sebagian lainnya hidup di kawasan pedalaman menjadi petani dan di daerah pesisir menjadi nelayan.

Stereotip tentang konflik etnik maupun hubungan etnik menyebar luas di Kalimantan. Orang Madura dianggap agresif, pemberang, memusuhi kelompok etnik yang lain, dan acap terlibat kejahatan. Suku Dayak sering dianggap barbar dan terbelakang. Suku Melayu dicap angkuh dan pengecut. Dengan segala stereotip itu, pencitraan tersebut cenderung berkaitan dengan sejarah hubungan etnik di Kalimantan, dan kekekalan stereotip itu

diperkuat oleh struktur politik dan ekonomi saat ini.

Dulu Kalimantan memiliki hutan-hujan tropis terbesar kedua setelah Amazon. Tetapi, menurut Bank Dunia, sekitar 746 000 hektar⁴ hutan rusak setiap tahun karena kegiatan penebangan dan penambangan. Kerusakan hutan juga disebabkan oleh pembakaran hutan demi kepentingan lahan pertanian. Kawasan ini umumnya dimiliki oleh para pengusaha swasta dan dimanfaatkan oleh para pemodal asing dari Malaysia dan Eropa.⁵

Bagi suku Dayak, yang kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya bergantung pada hutan, pengrusakan hutan semakin mempertebal rasa terpinggirkan, dan sering kali membuat mereka terpaksa menggunakan kekerasan untuk mempertahankan diri. Penggunaan kekerasan juga dipicu oleh identifikasi aktual terhadap sentimen Pan-Dayak dan upaya terpadu untuk menegaskan identitas itu.⁶

Dinamika Konflik

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, suku Dayak dan Melayu berupaya keras untuk menggunakan Reformasi demi memperkuat dan membentuk identitas kolektif yang menurut mereka telah dirusak oleh Jakarta. Pada masa lalu, kekerasan menjadi alat penting yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menekan protes; kini digunakan oleh rakyat untuk mengutarakan kegendahan mereka. Suku Dayak, misalnya, sering terlibat dalam konflik kekerasan etnik dengan orang-orang Madura, dan sebagian cenderung memanfaatkan kekerasan ini untuk menampilkan citra mempertahankan diri terhadap segala potensi ancaman.

Secara geografis, kekerasan berpusat di sekitar Pontianak dan Sambas di Kalimantan Barat, serta Sampit di Kalimantan Tengah. Biasanya, konflik disulut oleh perselisihan pribadi yang disebabkan oleh pertengkaran atas tanah, utang atau perempuan. Para penduduk setempat memandang konflik cenderung untuk menegaskan etnik dan bentrokan budaya sebagai sebab utama, namun ketidakadilan, peminggiran penduduk asli, dan kebijakan pemerintah yang tidak tegas termasuk pula menjadi sebab mendasar

konflik maut ini. Adapun pemerintahan yang buruk, kebijakan yang lemah, dan kegundahan yang menumpuk jelas mudah memicu kekerasan komunal.⁷

Setiap kelompok etnik cenderung menanggapi perselisihan, termasuk perselisihan dengan kekerasan, menurut adat kebiasaan dan tradisinya sendiri. Ini secara khusus terjadi di kawasan pedalaman. Sumber utama pertikaian adalah kebiasaan orang-orang Madura membawa pisau tajam (clurit) di depan umum. Kebiasaan semacam ini tidak disukai oleh suku Dayak, dan umumnya dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang bukan-Madura. Kelompok etnik yang lain mengeluh banyaknya orang Madura yang langsung menghunus senjata untuk menyelesaikan perselisihan, yang dengan sendirinya meningkatkan ketegangan. Orang-orang Melayu dan Dayak menganggap penggunaan senjata terhadap orang Madura sebagai respons rasa frustrasi mereka kepada tindak kekerasan orang Madura, termasuk pembunuhan orang-orang Dayak dan Melayu.⁸

Konflik terbuka antara Melayu dan Madura telah mencuatkan keseriusan dan rumitnya hubungan etnik di Kalimantan. Banyak orang yang, melalui pemberitaan pers, percaya bahwa konflik antara suku Dayak dan Madura disebabkan oleh bangkitnya tradisi pengayauan,⁹ yang dipicu oleh perbedaan agama antara suku Dayak yang mayoritas Kristen dan orang Madura yang beragama Islam. Namun kasus Sambas pada 1999 yang melibatkan orang-orang Melayu dan Madura meruntuhkan argumen ini, sebab orang Melayu tidak memiliki sejarah pengayauan,¹⁰ dan kedua komunitas itu sama-sama menganut agama Islam.

Pada umumnya, jika orang Madura diusir dari sebuah kawasan, orang Melayu dan Dayak merebut daerah pemukiman orang Madura, biasanya dengan menguasai tanah namun menghancurkan harta benda seperti rumah dan peralatan yang ditinggalkan. Dalam merebut tanah ini, orang Dayak dan Melayu yakin bahwa mereka sebenarnya mendapatkan kembali tanah yang dirampas dari mereka. Tindakan mereka mencerminkan sifat dasar konflik itu, yang, seperti telah dikemukakan di atas, bukanlah semata-mata

konflik etnik atau budaya sebab ternyata konflik berakar pada pertikaian terhadap pengelolaan sumber daya, kekuasaan ekonomi dan politik, dan tidak adanya penegakan hukum.

Kebijakan pemerintah terhadap penduduk asli dan hak-hak adat mereka¹¹ mengakibatkan mereka dirundung rasa tertekan dan terpinggirkan, dan direbutnya tanah mereka oleh negara. Para penduduk asli ini kemudian merasa diabaikan dan dikhianati. Program transmigrasi, yang telah memindahkan 8 juta orang dari pulau-pulau berpenduduk padat seperti Jawa dan Bali ke Kalimantan, Sumatera dan Papua Barat, merupakan sumber ketegangan abadi karena penduduk setempat dihadapkan kepada persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber alam, pekerjaan dan kedudukan politik.

Salah satu ciri konflik ini adalah terusiknya para pemimpin dan politisi daerah oleh pemerintah dan polisi. Selama konflik Sanggau Ledo, misalnya, A.R. Mecer, mantan politisi terkenal Dayak dan pemimpin LSM Dayak Pancur Kasih, dikirim surat kaleng yang mengaitkannya dan 6 orang Dayak lain dengan “Republik Borneo Merdeka” atau RBM. Surat itu menyatakan bahwa RBM menghimpun kekuatan di Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan, demikian pula di Sabah dan Serawak. Surat itu dikirimkan kepada gubernur Lemhanas, gubernur Kalimantan dan Pangdam Tanjung Pura VI. Sebagai akibatnya, Mecer dipanggil polisi dan diinterogasi selama 36 jam. Pada kesempatan lain, Zainudin Isman,¹² pemimpin Ormas Muhammadiyah setempat, ditangkap karena membawa senjata tajam di dalam mobilnya. Dia kemudian dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Lalu pemimpin budaya Dayak, Kma Usop, guru besar Universitas Palangkaraya di Kalimantan Tengah, juga ditangkap dan dibawa polisi ke Jakarta sebelum akhirnya dibebaskan.¹³

Ketika konflik terjadi, aparat keamanan lamban memberikan respons, sehingga pertikaian pribadi merembet menjadi konflik dan kekerasan yang meluas. Jika sebuah konflik tak terkendali, maka pemerintah harus berupaya mengatasinya melalui perundingan perdamaian resmi, namun tanpa perwakilan memadai

dari pihak-pihak yang bertikai. Pemerintah juga memaksakan penampungan kembali, menggunakan kekuatan untuk memisahkan pihak-pihak yang bertikai, dan bahkan menggunakan tentara untuk mengendalikan kekerasan. Tetapi, tindakan semacam itu justru semakin memperkuat budaya kekerasan. Dalam hal mengelola sumber alam, penduduk setempat merasa semakin tertekan oleh para pendatang maupun kaum transmigran. Pembukaan jutaan hektar lahan bagi penanaman modal asing dalam minyak sawit dan bisnis penanaman pohon industri, yang memanfaatkan upah murah yang ditawarkan oleh kaum pendatang namun memberikan sedikit kesempatan kerja bagi penduduk daerah, telah meningkatkan ketegangan, kecemburuan, frustrasi dan kekecewaan.¹⁴ Orang-orang Melayu dan Dayak, yang selama berabad-abad telah secara efektif mengendalikan sumber daya alam, langsung dihadapkan kepada meningkatnya jumlah kaum pendatang yang juga ikut mengelola dan memiliki sumber daya alam itu.

Konflik di Sanggau Ledo (Kabupaten Bengkayang), Sambas (Kabupaten Sambas) dan Sampit (Kalimantan Tengah) telah menelan 1,388 korban jiwa, 9,649 rumah rusak dan memaksa 167,000 orang Madura untuk meninggalkan rumah mereka. Sejak akhir konflik Sambas pada bulan April, kebanyakan orang Madura telah meninggalkan kawasan ini; demikian pula, kebanyakan mereka telah meninggalkan Sampit di Kalimantan Tengah pada 2001. Sejak bulan Februari 2003, lebih dari 45,000 pengungsi Madura tinggal di Jawa Timur dan nyaris 130,000 berada di Madura.¹⁵ Para pengungsi lainnya pindah ke kawasan lain di Kalimantan Barat, termasuk sekitar 60,000 di tenda pengungsi di Pontianak, ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Ini memang mencegah berulangnya konflik serupa, namun meningkatkan ketegangan di Pontianak. Tiga tahun setelah berakhirnya konflik kekerasan di Sambas, tak ada pengungsi Madura yang kembali ke daerah Melayu dan kaum Melayu menolak membahas rekonsiliasi atau mempertimbangkan kembalinya orang-orang Madura.¹⁶ Tetapi, masyarakat Madura yang tinggal di kabupaten lain di Kalimantan Barat seperti di Ketapang,

Kapuas Hulu dan Sintang tidak terkena pengusiran paksa ini.¹⁷ Menurut Kantor PBB Bidang kordinasi Masalah-masalah Kemanusiaan (Office for Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA), sejak akhir tahun 2002, 107 kepala keluarga Madura (540 orang) telah kembali dari Madura ke tiga kawasan di Kalimantan Tengah.¹⁸

Respons pihak kepolisian dan militer terhadap beberapa kasus di kota Pontianak, dan, kemudian, di Sambas pada tanggal 15 Desember 2002¹⁹ telah menunjukkan bahwa tindakan cepat dapat mencegah keadaan agar tidak menjadi semakin buruk. Tetapi, di Sanggau Ledo, Sambas dan Sampit, aparat keamanan tampaknya telah melepaskan tanggung jawab mereka untuk menjaga ketertiban dan bahkan mendorong semakin maraknya kekerasan karena gagal mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap para perusuh. Konon aparat keamanan malah menonton kekerasan antar-komunal itu, dengan menyatakan bahwa mereka tak dapat ikut campur karena tidak mempunyai jumlah personil yang memadai.

Penanggulangan Konflik oleh Pemerintah

Untuk mengelola konflik di Kalimantan, pemerintah telah menetapkan sebuah strategi yang mencakup tiga macam opsi: Pengembalian, Pemberdayaan dan Pemukiman Kembali.²⁰

Pada opsi yang pertama, pemerintah bermaksud secara damai mengembalikan para pengungsi kepada kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kebijakan pemberdayaan, pemerintah bermaksud memberikan berbagai fasilitas dan peluang kerja kepada para pengungsi untuk membangun kehidupan baru di dalam komunitas yang telah mereka tinggalkan. Dengan kebijakan pemukiman kembali, pemerintah bermaksud untuk menempatkan kembali para pengungsi di berbagai lokasi baru melalui program transmigrasi.

Tetapi, di Kalimantan Barat, pemerintah daerah telah memberikan prioritas tertinggi kepada para pengungsi. Protes keras yang dilakukan oleh para penduduk setempat terhadap upaya pengembalian kaum pengungsi semakin mempertebal keengganan pemerintah untuk berupaya sungguh-sungguh dalam menemukan

jalan keluar yang dapat diterima oleh para pengungsi, dan malah mendorong penggunaan langkah relokasi, betapapun tak ada feadahnya, untuk mengungkapkan akar penyebab konflik.

Pada bulan Agustus 2002, sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Komisi Regional Kalimantan Barat tentang Hak Hak Asasi Manusia dihadiri oleh perwakilan suku Melayu Sambas dan Madura. Pertemuan itu diawali dengan diskusi intensif tentang berbagai kelompok etnik dan proses sosialisasi yang menghasilkan kesepakatan damai. Tak lama kemudian diselenggarakan pertemuan di Singkawang yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah. Para peserta dalam pertemuan itu sepakat untuk membahas dan menyampaikan tujuan pertemuan kepada warga komunitas masing-masing, dan mengusulkan anggaran kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan rekonsiliasi antara suku Melayu dan Madura.

Pertemuan paling akhir diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2003²¹ di Singkawang, yang hanya dihadiri oleh dua perwakilan Ormas Madura, satu Ormas Melayu dan polisi. Pada pertemuan ini, kedua belah pihak tidak mampu mencapai kesepakatan yang berarti untuk meredakan keadaan. Kesabaran diperlukan sebelum perubahan perilaku akar rumput dalam komunitas Melayu dapat diharapkan. Penolakan komunitas Melayu Sambas terhadap orang Madura dipicu oleh persoalan di dalam komunitas Melayu sendiri: tidak adanya kerja sama dan koordinasi di kalangan berbagai kelompok yang menangani inisiatif kerukunan, dan kemampuan terbatas semua kelompok ini. Meski jutaan dolar dana pemerintah dan sumbangan dari luar negeri telah dialokasikan khusus bagi program pemukiman kembali para pengungsi ke kawasan hunian baru, namun tak ada dana yang secara khusus dialokasikan bagi rekonsiliasi. Penyebab dasar konflik tidak ditangani dan upaya meredakan konflik secara umum diabaikan. Di samping itu, sebagian pemimpin komunitas merasa terancam oleh anggota komunitas mereka sendiri jika mereka menyetujui kembalinya orang Madura ke berbagai kawasan di Sambas.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 3/2000, sebuah badan koordinasi nasional, Bakornas PBB, yang membentuk Kebijakan Nasional tentang Percepatan Penanganan Pengungsi di Indonesia,²² dengan mandat menangani secara menyeluruh semua masalah pengungsi sebelum akhir tahun 2002, dan semua tenda pengungsi di Pontianak telah berhasil dikosongkan oleh pemerintah.

Di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan LSM untuk menyelenggarakan dialog dan berbagai kegiatan pelatihan. Inisiatif ini mencakup dialog peredaan konflik dan penyusunan berbagai rencana kerja, pelatihan penanganan konflik bagi perwakilan suku Dayak di Palangkaraya dan pengungsi Madura di Madura pada bulan April 1992, pertemuan Tim Kalimantan Tengah dan Tim Madura di Yogyakarta, Jawa Tengah, pada bulan Mei 2002, dan anak-anak suku Dayak dan Madura pada kawasan masing-masing pada bulan Juli 2002, dan Jambore Anak-anak Dayak dan Madura yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus 2002. Terlepas dari semua prestasi ini, pemerintah daerah tetap saja tidak mempunyai program jangka panjang yang komprehensif.

Berulangnya konflik etnik di Kalimantan juga mengundang perhatian internasional. Kebanyakan kegiatan badan-badan PBB seperti OCHA dan WHO bertumpu pada rehabilitasi dan bantuan darurat, khususnya, yang berhubungan dengan para pengungsi. UNICEF telah membantu pendidikan anak-anak pengungsi; OCHA telah menyampaikan prinsip-prinsip menyangkut pengungsi kepada pemerintah, dan UNHCR maupun WHO juga telah membantu pemerintah Indonesia dalam menangani para pengungsi.

Jalur-Jalur Diplomasi

Untuk mencapai kerukunan etnik di Kalimantan, lembaga-lembaga pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah telah menyelenggarakan berbagai pertemuan, mendorong dialog, dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Pembicaraan damai telah dilakukan oleh

Kantor Presiden, melalui forum Musyawarah Anak Bangsa yang dilaksanakan di Bogor tak lama berselang setelah meletusnya konflik Sampit. Tetapi, inisiatif ini hanya melibatkan kaum elit dan pemimpin komunitas, yang justru gagal menyertakan akar rumput mereka dalam proses itu. Pada umumnya, inisiatif berawal dan berakhir di dalam sebuah seminar, dialog atau workshop di salah satu hotel kota.

Kelompok LSM dan umat beragama telah mengembangkan dan mendapatkan angin segar sejak Reformasi. Para mahasiswa, yang melengserkan Soeharto pada bulan Mei 1998, merupakan unsur penting dalam masyarakat sipil dengan kemampuan potensial untuk mengubah kembali kebijakan pemerintah. Para mahasiswa berkelompok di berbagai organisasi intra dan ekstra kampus. Ketika tekanan mahasiswa melalui demonstrasi besar-besaran telah terbukti efektif dalam mengubah kebijakan pemerintah dan bahkan mengubah pemerintahan, maka mereka juga menjadi target kelompok-kelompok politik yang berusaha menggunakan mereka bagi kepentingan politik tertentu.

Peran berbagai kelompok masyarakat sipil ini dalam upaya menciptakan perdamaian bermacam-macam. Meski para mahasiswa menjadi kekuatan yang paling vokal dan potensial untuk mengubah kehidupan politik, namun mereka sama sekali tidak aktif dalam isu-isu menyangkut kerukunan. Tak ada demonstrasi mahasiswa yang digelar mengenai isu konflik etnik di Kalimantan. Di Kalimantan Barat, berbagai kelompok mahasiswa hanya terlibat dalam inisiatif darurat seperti membagi-bagikan makanan gratis kepada para pengungsi atau menjadi peserta berbagai diskusi tentang hubungan etnik. Sekelompok kecil mahasiswa Kalimantan yang belajar di Jawa (Yogyakarta) melakukan beberapa langkah penciptaan perdamaian dengan menyelenggarakan forum antar-etnik, dialog dan kampanye umum.

Di sisi lain, para pemimpin agama besar (Islam dan Kristen) sengaja tidak mau terlibat dalam upaya-upaya rekonsiliasi, dengan mengaku tetap bersikap “netral” dan enggan bersikap yang kemudian akan membuat mereka dituding sebagai “provokator”

dalam konflik itu. Sikap semacam itulah yang kemungkinan mendorong Uskup Pontianak, Hieronimus Bumbun menyatakan bahwa Gereja Katolik tidak ada hubungannya dengan konflik etnik antara suku Dayak dan Madura.²³ Tetapi, organisasi-organisasi keagamaan telah terlibat dalam kegiatan kemanusiaan selama dan setelah konflik.²⁴ Meski kebanyakan pemimpin agama ikut serta dalam dialog etnik setelah konflik, namun ternyata mereka gagal mencegah para pengikut mereka agar tidak melakukan tindak kekerasan dan balas dendam. Kegagalan ini terlihat jelas justru pada puncak konflik ketika upaya aktif para pemimpin ini untuk mencegah konflik sangat diharapkan. Salah satu penafsiran atas sikap pasif ini adalah bahwa para pemimpin agama tidak ingin dituding sebagai “provokator,” seperti yang terjadi pada sekelompok ulama Madura yang menjadi anggota BASRA (Badan Silaturahmi Ulama Madura).²⁵

Upaya berlapis LSM untuk meredakan konflik dapat dibagi ke dalam dua kategori besar: 1) Membangun komunikasi dan dialog antara berbagai kelompok etnik, khususnya pihak-pihak yang bertikai, dan 2) memberikan bantuan darurat. Langkah-langkah ini dilakukan oleh LSM daerah, gabungan LSM daerah dan nasional, dan gabungan LSM daerah, nasional dan internasional.

Aktivitas ini mencakup penyelenggaraan forum untuk membahas rekonsiliasi dan langkah-langkah penciptaan perdamaian dengan berbagai LSM daerah dan kelompok etnik yang bertikai. Berbagai lokakarya, program pelatihan dan seminar tentang upaya meredakan konflik diselenggarakan baik pada tingkat daerah maupun nasional. Berbagai isu menyangkut hubungan damai etnik dan kesadaran untuk menerima perbedaan budaya telah dibahas di dalam berbagai forum dan pertemuan yang mengkaji hak-hak asasi manusia, demokrasi, pelestarian lingkungan hidup dan otonomi daerah, di mana pentingnya upaya menciptakan perdamaian demi keberhasilan kelangsungan pembangunan di Kalimantan telah dijelaskan.

Kebanyakan LSM dan kelompok masyarakat di Kalimantan yang ikut menangani konflik telah memusatkan perhatian dalam

memberikan bantuan darurat bagi para pengungsi. Di setiap tenda pengungsi di Pontianak terdapat pos-pos pelayanan yang didirikan oleh LSM untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi, maupun memberikan informasi terbaru mengenai keadaan sehari-hari pada tenda-tenda pengungsi. Makanan, obat-obatan, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya yang dibagikan oleh semua LSM itu kepada para pengungsi bersumber dari bantuan dana para donatur internasional. Berbagai organisasi termasuk LSM daerah, himpunan mahasiswa Islam, organisasi pemuda Madura, ikatan pelajar dan ulama, dan organisasi Kristen ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Beberapa LSM internasional, termasuk Save the Children, British Council, dan Search for Common Ground-Indonesia, dengan bekerja sama dengan berbagai LSM daerah, juga melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak, dengan menggalang anak-anak dari berbagai latar belakang etnik untuk bekerja sama dalam meredakan konflik dan menciptakan perdamaian. Organisasi lain seperti *BBC* dan *Kalimantan Review Magazine*, bersama dengan British Council, bekerja sama dengan para wartawan daerah dalam berbagai pelatihan jurnalisme damai.

Masih ada LSM lain yang langsung berkiprah di tempat-tempat penampungan kembali para pengungsi. World Vision International telah memberikan bibit dan peralatan pertanian dan ikut aktif melaksanakan program persiapan lahan. Save the Children-UK, Catholic Relief Services, dan International Medical Corps juga mempunyai program di kawasan pemukiman kembali, dan International Organization of Migration (IOM) ikut aktif dalam membangun tempat-tempat pemukiman kembali.

Ketika berbagai kegiatan dipusatkan pada upaya-upaya penanggulangan keadaan darurat bagi para pengungsi, sedikit sekali upaya yang dilakukan di bidang penanganan konflik. Kerja sama antara berbagai LSM, akademisi, kelompok-kelompok agama, pemerintah dan komunitas internasional sangat lemah, dan akibatnya adalah munculnya strategi yang tumpang tindih dan tidak efisien. Demikian pula komunikasi dan kordinasi antar berbagai

kelompok terbatas hanya pada upaya berbagi informasi di tingkat awal keterlibatan. Karena prioritas diberikan untuk menangani para pengungsi, banyak kegiatan penciptaan perdamaian cenderung berhenti ketika dana bantuan habis atau ketika tenda-tenda pengungsi dikosongkan.

Kinerja YKKSS (Yayasan Korban Kerusakan Sosial Sambas) mencerminkan keadaan ini. YKKSS didirikan oleh para wakil pengungsi, LSM aktif, sukarelawan pemuda dan pelajar, anggota DPRD, wakil pemerintah dan aparat keamanan. Yayasan itu telah bekerja dengan giat dalam berbagai perundingan dengan lembaga-lembaga pemerintah, seraya membagikan bantuan material dan dana kepada para pengungsi dan memonitor jumlah pengungsi pada berbagai tenda dan tempat-tempat penampungan. Yayasan tersebut juga menjadi anggota Tim Kolektif dalam menangani para pengungsi di Kalimantan Barat dengan wakil dari berbagai unsur pemerintahan, polisi dan militer.

YKKSS secara khusus bergerak dalam perundingan mengenai besarnya kompensasi bagi pengungsi yang akan meninggalkan tenda dan menetap di tempat-tempat relokasi. Tampaknya ia berperan sebagai “makelar” antara pemerintah dan para pengungsi. Konflik di dalam tubuh yayasan itu membuatnya pecah ke dalam dua kubu, yakni ketika sekelompok pengungsi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pengelolaan. Perpecahan internal ini langsung melemahkan dasar legitimasi dan kemampuan bekerja secara efektif. Kemudian berbagai isu mengenai pengungsi diserahkan kepada pemerintah lokal.

Seperti yang telah dinyatakan di atas, kebanyakan respons masyarakat sipil terhadap konflik ternyata lebih bertumpu pada persoalan para pengungsi dan bukan kepada penciptaan perdamaian dan peredaan ketegangan. Hanya sedikit langkah yang berhubungan dengan sumber utama penyebab konflik, dan sebagai akibatnya, penduduk setempat (kaum Melayu di Sambas dan suku Dayak di Sampit) tetap menentang kembalinya orang-orang Madura ke rumah yang mereka tinggalkan, dan rasa terdiskriminasi orang Madura semakin bertambah. Sebuah peristiwa yang terjadi

pada tanggal 15 Desember 2002 di Karamungting-Kabupaten Bengkayang, yang nyaris meledak menjadi pembantaian, menjelaskan rentannya keadaan itu, dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar. Mengingat fakta bahwa upaya-upaya rekonsiliasi hanya dipusatkan pada penanganan jangka pendek atas perang pengungsi, sebuah organisasi, yakni Refugees International, mengusulkan kepada badan-badan donor internasional untuk memusatkan perhatian mereka terhadap inisiatif penciptaan perdamaian dan rekonsiliasi berjangka panjang.²⁶

Prospek

Meski tenda-tenda pengungsi di Pontianak telah berhasil dikosongkan oleh pemerintah, namun tak ada upaya berarti yang dilakukan pada tingkat pemerintahan untuk menangani penyebab konflik, atau mewujudkan kerukunan sejati antara berbagai pihak yang bertikai. Meski akses penduduk daerah terhadap pengelolaan lahan dan sumber daya alam selalu menjadi hal terpenting dalam konflik yang melanda Kalimantan,²⁷ pemerintah daerah gagal mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan kebijakan perkayuan, pembangunan pertanian, atau program transmigrasi, yang kesemuanya penting dalam hal akses dan masalah-masalah pengelolaan.

Salah satu tantangan yang paling sulit bagi berbagai pihak yang berupaya meredakan konflik adalah mengakhiri penolakan kuat penduduk daerah terhadap kembalinya para pengungsi. Perbedaan pendapat yang masih saja berlangsung antara orang Madura, Melayu atau Dayak dimanfaatkan untuk menyatakan bahwa kelompok etnik ini harus hidup secara terpisah. Tanpa adanya kemajuan menyangkut isu kembalinya para pengungsi itu, maka semua upaya rekonsiliasi tampaknya akan gagal.

Tetapi, masih ada beberapa peluang untuk melangkah menuju rekonsiliasi. Tekad kaum Melayu untuk berdialog dengan orang-orang Madura, termasuk membahas kembalinya para pengungsi, dapat menjadi titik awal bagi penyelesaian yang bermakna.²⁸

Demikian pula, ada tanda-tanda menggembarakan dari masyarakat Madura. Misalnya, masyarakat Madura secara terbuka mengucapkan selamat kepada suku Dayak atas perayaan Naik Dango—Hari Raya Panen—dan IKBM (Ikatan Keluarga Besar Madura) dengan sukarela menyerahkan anggota masyarakat Madura yang melukai orang Melayu pada perkelahian yang melibatkan anak-anak muda Madura dan Melayu di Tanjunghulu-Pontianak pada tanggal 21 Oktober 2003.

Haruslah diperhatikan bahwa selain konflik antara orang Madura dengan orang Melayu atau Dayak, konflik yang keras antara suku Dayak dan Melayu bukanlah perkara yang mustahil. Malah sulit membayangkan akibat kejadian semacam itu, seperti halnya resiko bencana serupa yang telah menimpa Maluku dapat berulang di Kalimantan Barat, sebab konflik seperti itu tidak hanya bersifat etnik namun juga bersifat keagamaan. Kecenderungan menggunakan kekerasan terhadap anggota komunitas lain sebagai ungkapan jati diri etnik, ketika ketiga komunitas besar di Kalimantan bersaing dalam memperebutkan kekuasaan politik, tetaplah menjadi sumber masalah yang besar.

Rekomendasi

Rakyat Kalimantan harus diberikan hak untuk memilih dan melaksanakan sistem pemerintahan desa mereka sendiri, mengelola sumber daya alam yang didasarkan atas budaya dan tradisi daerah, dan dilindungi dari setiap kegiatan pemerintah, misalnya penebangan kayu, pertanian monokultur, penambangan dan projek-projek transmigrasi, yang dapat mengebiri hak mereka sebagai penduduk asli.

Berbagai upaya yang sungguh-sungguh harus ditempuh demi mengembangkan budaya daerah dan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia, prinsip tanpa-kekerasan, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Upaya-upaya ini haruslah dapat menghapuskan pandangan miring, pemisahan dan kebencian etnik.

Nilai-nilai semacam itu harus diajarkan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi termasuk sekolah-sekolah militer dan lembaga-lembaga pendidikan agama. Kampanye umum haruslah memanfaatkan media dan melibatkan para pemimpin agama. Pemerintah dan berbagai unsur masyarakat sipil harus bekerja bahu-membahu demi semua inisiatif ini. Dengan mempertimbangkan potensi mahasiswa sebagai kekuatan bagi perubahan, LSM yang bekerja menangani konflik dan menciptakan perdamaian haruslah melibatkan lebih banyak mahasiswa dalam kegiatan mereka.

LSM harus membantu dan mendorong penggunaan adat istiadat yang sah²⁹ menurut masyarakat sebagai sarana untuk mencegah maupun menangani konflik. Musyawarah masyarakat yang lebih luas dan analisis komprehensif terhadap akar konflik, dibutuhkan. Musyawarah dan analisis tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mendorong terciptanya kerja sama antara berbagai kelompok masyarakat sipil dan pemerintah. Intervensi strategis berjangka panjang terhadap penanganan konflik, rekonsiliasi dan penciptaan perdamaian haruslah merupakan upaya multi-dimensional yang melibatkan seluruh pihak, pada semua tingkatan masyarakat, yang mewakili semua pengalaman dan keahlian.

Polisi dan militer harus cepat tanggap terhadap setiap insiden yang terjadi demi menjamin agar insiden semacam itu tidak bertambah buruk. Tetapi tindakan yang bertanggung jawab dan cepat tidaklah berarti bahwa kekerasan harus dijadikan pilihan pertama, sebab respons yang keras terhadap masyarakat sipil hanya akan memperburuk dan mengekalkan konflik, dan bukan meredakannya. Dengan demikian, rencana untuk meningkatkan kehadiran militer dengan menambah jumlah personil, yang didukung oleh militer maupun pemerintah daerah di Kalimantan Barat, tidak boleh dilakukan; sebab pengerahan militer di Indonesia terbukti tidak efektif dalam menjaga ketertiban ketika kekerasan antar-komunal telah menjadi persoalan yang serius.

Lembaga-lembaga internasional, khususnya badan-badan donor, harus lebih memusatkan perhatian pada inisiatif menciptakan perdamaian berjangka panjang dan bukan proyek-proyek kemanusiaan berjangka pendek seperti pemukiman kembali para pengungsi.³⁰ Secara khusus, badan-badan donor itu harus memusatkan perhatian untuk membantu dan mengembangkan kemampuan menangani konflik daerah, dan membantu media untuk memberikan peliputan tentang konflik secara lebih akurat dan lebih bertanggung jawab. Gaya peliputan media yang sensasional, yakni dengan menggunakan istilah-istilah seperti pemenggal kepala, kanibalisme, haus darah, buas, kejam³¹ telah menambah persepsi yang keliru dan kesalahpahaman masyarakat, nasional maupun internasional, terhadap hakikat sebenarnya konflik itu.

Dalam program pendidikan juga diperlukan program yang mendukung penciptaan perdamaian dan rekonsiliasi, kebudayaan perdamaian, rasa hormat terhadap keanekaragaman negara dan perlindungan hak-hak manusia. Dalam hal ini akan diperlukan reformasi dalam sistem pendidikan dan kurikulum di sekolah dan di universitas, termasuk institusi pendidikan yang berbasis militer atau agama. Kenyataan bahwa para mahasiswa terbukti merupakan golongan yang paling efektif untuk mendorong reformasi, mereka yang giat bekerja dalam bidang penciptaan perdamaian dan rekonsiliasi harus mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatannya. Dalam institusi keagamaan mahasiswa hendaknya dididik toleransi terhadap penganut agama apapun. Tokoh-tokoh agama hendaknya memasukkan toleransi dalam melakukan tugas mereka, biar dalam bentuk khotbah atau dalam diskusi dengan anggota masyarakatnya.

Pada 2002, sebuah program yang bernama “Musyawarah-Mufakat Anak Bangsa”, digagas oleh Menteri Dalam Negeri (Suryadi Sudirja) dan dihadiri oleh empat gubernur Kalimantan (Barat, Tengah, Timur dan Selatan) dan Jawa Timur, termasuk Madura. Musyawarah itu dilaksanakan di NAM Center, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu merekomendasikan pertemuan serupa yang dilaksanakan di propinsi terkait untuk menyusun rancangan

daerah bagi penyelesaian konflik. Pertemuan tersebut akhirnya terselenggara berkat bantuan pemerintah propinsi terkait. Tetapi, dengan menyebutkan alasan klise tak tersedianya dana, para pemimpin pertemuan ini gagal menindaklanjuti pertemuan prospektif ini dengan tindakan nyata.

Kelemahan berbagai inisiatif multi-jalur dalam menangani kekerasan antar-komunal di Kalimantan tidak hanya dapat dinisbahkan pada tidak adanya dukungan pemerintah, namun juga kepada terbatasnya partisipasi akar rumput. Inisiatif rekonsiliasi umumnya hanya dibahas dan dimusyawarahkan di tingkat elite, sebab kelompok-kelompok elite tersebut memang cenderung merupakan kelompok yang paling koperatif dan mudah diajak berdialog. Kenyataannya, kepemimpinan di dalam berbagai komunitas sangatlah lemah sebagai akibat proses panjang marjinalisasi dan ko-optasi para pemimpin daerah oleh rezim terdahulu. Ketika upaya-upaya rekonsiliasi dilakukan pada jenjang pemimpin daerah (formal maupun informal) melalui berbagai kesepakatan dan dialog damai, pengaruhnya terhadap akar rumput ternyata sangat kecil. Untuk mengatasi persoalan ini, ada dua strategi yang diperlukan: pertama, menumbuhkan kepemimpinan daerah yang efektif, dan kedua, membangun kultur damai dan sikap menghargai perbedaan di dalam keragaman masyarakat Kalimantan.

Strategi ini hanya akan ditempuh jika memang ada perubahan mendasar dalam kebijakan yang berhubungan dengan otonomi dan kedaulatan rakyat dalam menata kehidupan sosial, kultural, ekonomi dan politik mereka. Tetapi, pengembangan kepemimpinan daerah dan pembangunan budaya damai merupakan upaya berjangka panjang dan membutuhkan kesungguhan dalam bidang sosial, kultural dan politik. Kedua hal di atas membutuhkan kerja sama di kalangan berbagai kelompok yang memiliki program dan tujuan yang sama, dan harus dimulai dari bawah dan melalui proses yang partisipatoris.

Catatan

¹ Edi Petebang & Eri Sutrisno, 2000, h. 201.

² Contohnya kasus akhir tahun 1960-an ketika suku Dayak menyerang orang-orang Cina di Kalimantan. Ketika itu, tentara Indonesia, yang tengah memerangi Pasukan Gerilyawan Rakyat Sarawak (PGRS), kelompok komunis (Van der Kroef, 1968, h. 245) yang didukung Peking dan sebagian komunitas Cina di sepanjang perbatasan Kalimantan dan Sarawak-Malaysia, meminta suku Dayak untuk menghentikan bantuan Cina kepada gerakan PGRS. Apa yang semula merupakan tindakan terbatas berubah menjadi konflik yang serius. Sekitar 3000 orang Cina di Kalimantan dibunuh dan nyaris semua orang Cina yang tinggal di desa-desa di Kalimantan Barat diusir dari kota itu. (Lihat: Herbert Feith (1968), David Jenkins (1978), Robert Peterson (1968) & Herman Josep van Hulten (1992).

³ Sudagung, 2001, h. 76-83.

⁴ Bank Dunia dalam Barber & Schweithelm (2000, h. 2).

⁵ Sekurang-kurangnya 62 perusahaan Eropa (Van Gelder, 2002, h. 2-4) dan 41 perusahaan Malaysia (*New Straits Times*, Malaysia, Kamis, 2 Oktober 1997) ikut dalam pengelolaan 4 juta hektar tanaman kelapa sawit. 18 perusahaan Eropa telah menanamkan modal dalam industri pulp dan kertas dengan jumlah produksi setiap tahun mencapai 4,481,000 ton pulp dan 4,737,250 ton kertas (Van Gelder, *ibid.*). Pemerintah merencanakan perluasan lahan pertanian dari jumlah 7.4 hektar menjadi 30 juta hektar, 75% di antaranya akan dibangun oleh penanaman modal asing, dengan pengusiran penduduk asli dan pengrusakan habitat (Lihat: Pernyataan Konferensi INFID XI di Bonn, Jerman, Mei 1998, "Indonesia: Democratization in the Era of Globalization", Bonn, Jerman, 4-6 Mei 1998, <http://www.infid.be/BonnConference.html>).

⁶ Ada sejarah konflik kekerasan di berbagai kelompok sub-etnik Dayak, bdk. Bamba, 2001c; Peluso & Harwell, 2001. Mengenai bangkitnya Dayakisme, lihat juga Van Klinken, 2001.

⁷ Konflik Sambas dipicu oleh keributan kecil pada bulan Januari 1999 ketika seorang Madura dituduh mencuri dan ada protes terhadap hal itu. Keributan kecil ini menjadi tak terkendali lalu menjadi kekerasan brutal antara suku Melayu dan Madura. Ketika sekelompok orang Dayak diserang, suku Dayak bergabung dengan orang-orang Melayu dan menciptakan perang terbuka antara suku Melayu dan Dayak di satu pihak,

dan orang-orang Madura di pihak lain. Perang etnik itu berlangsung nyaris selama empat bulan.

⁸ Konflik kekerasan antara suku Dayak dan Madura pernah meletus sebanyak 14 kali di Kalimantan Barat sejak tahun 1952 hingga 1997. Lihat: Edi Petebang & Eri Sutrisno, 2000.

⁹ Isu berburu kepala dimunculkan oleh pers setiap terjadinya kekerasan di Kalimantan. Lihat Bamba: 2001.

¹⁰ Tetapi, sebagian analisis masih percaya bahwa tradisi berburu kepala telah menjadi salah satu faktor kekerasan, dan menulis bahwa sebagian orang Melayu adalah suku Dayak yang telah memeluk agama Islam.

¹¹ Reformasi sejak 1998 telah mencuatkan isu tentang masyarakat tradisional, hak-hak tradisional atas tanah, hukum adat, identitas budaya, dan sebagainya, dengan menggunakan istilah masyarakat hukum adat tanpa dengan jelas menyebutkan “penduduk asli”. Istilah “masyarakat tradisional” maupun “masyarakat hukum adat” sama-sama tidak mencerminkan arti sebenarnya dari kata “penduduk asli” seperti yang disepakati di dalam konvensi internasional.

¹² Zainuddin bekerja sebagai wartawan Kompas, koran terbesar di Indonesia, yang dimiliki oleh Konglomerat Katolik. Zainuddin adalah seorang Muslim namun menyatakan diri sebagai orang Dayak. Polisi menyatakan bahwa mereka menemukan selebaran provokatif yang melibatkan Zainuddin. Lihat: *TIRAS*, No. 5/Thn. III/27 Februari 1997.

¹³ Gerry van Klinken termasuk orang yang sangat yakin bahwa Prof. Usop mempunyai peran penting dalam menghasut kekerasan etnik di Sampit. Lihat: Van Klinken, 2001, h. 30-31.

¹⁴ Dari 1264 kasus kejahatan dan kasus yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) yang terjadi di daerah-daerah transmigrasi di Indonesia hingga tahun 2000, separuhnya terjadi di Kalimantan. Untuk kelengkapan data, lihat tabel yang disajikan oleh Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja Indonesia dalam [http://www.nakertrans.go.id/Info Trans/situs/buku%20iii/ T3_9.htm](http://www.nakertrans.go.id/Info%20Trans/situs/buku%20iii/T3_9.htm).

¹⁵ Catatan Akhir, Misi ke Pulau Madura, Jawa Timur, 17-19 Februari 2003.

¹⁶ Pada awal tahun 2002, seorang pengungsi Madura dengan dikawal oleh lima orang tentara kembali ke Sambas untuk menjual tanah yang telah ditinggalkannya, namun dia dibunuh oleh segerombolan orang di

pasar Sambas ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah orang Madura. Para pengungsi Madura juga mengeluh bahwa pemerintah daerah telah mengingkari janjinya untuk melindungi hak milik orang Madura di Sambas dan malah membantu orang Melayu menempati atau menjual tanah itu. Lihat: Purwana, 200, h. 78.

¹⁷ Di berbagai daerah selain Kabupaten Sambas (Bengkayang, Pontianak, Landak dan Sanggau), orang-orang Dayak lebih toleran dibandingkan dengan orang Madura, yang masih dapat kembali ke rumah-rumah mereka. Tetapi, sebagian daerah itu, misalnya Salatiga, telah ditempati oleh orang-orang Dayak.

¹⁸ Dalam Database Global Pengungsi, 21 Mei 2003, h. 260.

¹⁹ Pada tanggal 15 Desember 2002, pertikaian antara kedua kelompok etnik itu nyaris merebak menjadi kekerasan yang lebih luas, ketika seorang Melayu dibunuh oleh seorang Madura karena judi. Satu orang Melayu dan satu orang Madura tewas, 16 rumah orang Madura dibakar dan 228 orang Madura diungsikan dari daerah itu, namun kekerasan yang lebih parah dapat dicegah oleh tindakan cepat dan tegas pihak kepolisian. (*AP Post*, 17 Desember 2002).

²⁰ Pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) yang beranggotakan 13 Departemen. Menko Kesra dipilih sebagai ketua Badan itu, dibantu oleh seorang sekretaris, dan Direktur Jenderal Bantuan Sosial. Para anggotanya adalah Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan. Organisasi non-pemerintah antara lain Palang Merah, dan Pramuka Indonesia. Badan-badan lain, misalnya Badan Meteorologi dan Geo Fisika dan berbagai perguruan tinggi yang menangani bantuan ilmiah dan teknik bagi badan koordinasi itu. Kelompok kerja itu bertugas mengevaluasi dan mempersiapkan kajian rekomendasi kepada Ketua. Badan itu menyusun “Kebijakan Nasional Terhadap Penanganan Pengungsi di Indonesia” yang dibahas dan disepakati dalam Sidang Kabinet 25 September 2001. Kebijakan itu mencakup tiga prinsip. BAKORNAS PBP, Kebijakan Nasional Percepatan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Sekretariat Bakornas PBP, Jakarta 2001.

²¹ *AP Post*, 26 Oktober 2003.

²² <http://www.who.int/disasters/repo/7420.pdf>.

²³ Dalam menyikapi Konflik Sampit (Kalimantan Tengah, 2001), pernyataan bersama dikeluarkan oleh delapan uskup di Kalimantan dan disampaikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2002. Dalam pernyataan mereka, para uskup itu menegaskan kembali bahwa konflik etnik di Sambas bukanlah konflik agama. Menurut mereka, akar konflik adalah perbedaan budaya, peminggiran suku Dayak dan ketidakpuasan terhadap penanganan konflik di masa lalu. Lihat: *Kalimantan Review* No. 68/Th/X/10 April-10 Mei 2001, h. 18-19.

²⁴ Pada konflik 1997, gereja-gereja di kawasan pedalaman, misalnya Menjalin, Kabupaten Landak, digunakan sebagai tenda oleh kaum perempuan dan anak-anak suku Dayak yang meninggalkan desa mereka karena takut kepada serangan orang-orang Madura. Keuskupan Pontianak juga dilaporkan terlibat aktif dalam pekerjaan kemanusiaan bagi para pengungsi Sambas di kota Pontianak. Kaum wanita, anak-anak dan kaum manula juga berlindung di masjid-masjid dan pesantren selama kekerasan berlangsung, meski mereka tidak selalu aman dari serangan.

²⁵ Lihat: *TIRAS*, No. 5/Thn. III/27 Februari 1997. Mengenai Penjelasan KH. Sahal, lihat: D&R No. 28/XXVIII/ 1 Maret 1997 dan *FORUM KEADILAN*, No. 24, Tahun V, 10 Maret 1997.

²⁶ *Refugees International*, “Few Options for Madurese IDPs in West Kalimantan,” 29 Maret 2002.

²⁷ Dalam ketiga konflik (Sanggau Ledo, Sambas dan Sampit) penempatan kembali tanah yang ditinggalkan orang-orang Madura muncul menjadi isu. Lihat juga catatan 17 di atas.

²⁸ Contoh paling mutakhir mengenai dialog semacam itu diselenggarakan oleh LPPMKB dan IKBMB Madura, PFKPM (Tebas, Pemangkat, Sungkawang dan Sambas) Melayu dan Polisi, pada tanggal 25 Oktober 2003 di Singkawang. Para peserta dari suku Melayu menyatakan tekad mereka untuk menerima kembalinya para pengungsi Madura dengan syarat mereka diberi waktu yang cukup untuk bekerja di dalam komunitas mereka pada tingkatan akar rumput. (*AP Post*, 26 Oktober 2003).

²⁹ Ada keluhan berbagai kelompok lain dan aparat pemerintah berkenaan dengan apa yang mereka sebut sebagai “komersialisasi” hukum adat Dayak untuk menangani perselisihan. Denda berupa uang dijatuhkan—sebagiannya mencapai hampir seratus juta rupiah—serta dengan ancaman

dan intimidasi. Praktek semacam itu tidak sepenuhnya menjadi bagian hukum adat Dayak, yang biasanya menuntut penyelesaian dengan hewan ternak atau genteng, bukan tunai.

³⁰ Refugees International, "Few Options for Madurese IDPs in West Kalimantan," 29 Maret 2002.

³¹ John Bamba, "CNN-Effects" or "Haatzaai Artikelen"? Makalah yang disampaikan pada lokakarya "Covering Conflict for Kalimantan Journalist" yang diselenggarakan oleh British Broadcasting Corporation (BBC)-British Council dan Institut Dayakologi di Pontianak, 22-27 Oktober 2001.

Singkatan

PFKPM	: Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
FKPM	: Forum Komunikasi Pemuda Madura
HIMMA	: Himpunan Mahasiswa Madura
Bakornas-PBP	: Badan Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi.

Laporan-laporan

Human Rights Watch, Asia

Indonesia Communal Violence in West Kalimantan, vol. 9, No. 10 (c),
Desember 1997.

U.S. Agency for Internaional Development Office of Transition Initiatives (OTI), "OTI Trip Report: West Kalimantan," 13-19
Nopember 2000, h. 11.

ICG Asia Report No. 18, "Communal Violence in Indonesia: Lessons
from Kalimantan," Jakarta/Brussels, 27 Juni 2001, h. iv.

Refugees International, "Few Options for Madurese IDPs in West
Kalimantan," 29 Maret 2002.

Majalah

Kalimantan Review Magazine, No. 45, Mei 1999.

Kalimantan Review Magazine, No. 55, 5 April-5 Mei 2000.

Michael Dove, "Dayak Anger Ignored", dalam *Inside Indonesia*, No. 51, Juli-September 1997.

Gerry van Klinken, "Ethnic Fascism in Borneo: Old Elites in Central Kalimantan Discover New and Dangerous Strategies", dalam *Inside Indonesia*, Oktober-Desember 2001, h. 30-31.

Situs Internet

Louise William, "1 200 go missing in ethnic warfare", Herald Correspondent in Jakarta, Rabu, 5 Maret 1997.

<http://www.smh.com.au/daily/content/970305/world/world1.html>.

Dini Djalal, "Fight to the death for tribal rights", for *Asia Times*, 20 Februari 1997,

<http://www.asiatimes.com/97/02/20/20029704.html>.

Jonathan Head, "Analysis: Behind the Borneo Violence", *BBC News*, Jumat, 23 Februari 2001, 11:26 GMT, <http://newsbbc.co.uk/hi/english/world/asia-pacific/default/stm>.

AP Post Online, Selasa, 17 Desember 2002, Judi Picu Rusuh Kerimunting, <http://www.appost.co.id/berita/utama.php?id=5646>.

Kontak Narasumber dan Organisasi di Kalimantan Barat

Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM)

Jalan Teluk Intan No. 5

Siantan-Pontianak Utara

Kalimantan Barat

Tlp: +62 561 881 348.

Yayasan Korban Kerusuhan Sosial Sambas (YKKSS)

Jalan Paralel Tol Gang Melati No. 5

Pontianak Timur, Kalimantan Barat

Tlp: +62 811-568467

Kontak: Subro

Majelis Adat Budaya Melayu (MABM)

Jalan Sungai Kawi

Jembatan II No. 123

Pontianak

Kalimantan Barat

Tlp: +62 561 732 317.

Kontak: Imim Taha

Lembaga Adat dan Budaya Melayu (LEMBAYU)

Jalan Tanjung Raya II

Kompleks Delima Kitâb masyâhid al-asrâr A/7

Pontianak

Kalimantan Barat

Tlp: +62 561 739 177.

Kontak: Syarief Toto Taha Alkadrie

Institut Dayakologi

Kompleks Bumi Indah Katulistiwa

Jalan Budi Utomo Blok A3, No. 3-4

Pontianak 78241

Kalimantan Barat

Tlp: +62 561 884 567; Fax: +62 561 883 135

E-mail: i.dayakologi@ptk.centrin.net.id.

www.Dayakologi.com.

SEGERAK “PANCUR KASIH”

Jalan Budi Utomo Blok A3,

Pontianak 78241

Kalimantan Barat

Tlp: +62 811-569895.

E-mail : duwata@pontianak.wasantara.net.id.

Kontak: Stepanus Djuweng

Tantangan Perdamaian di Maluku

Samsu Rizal Panggabean

Sejak tahun 1999, Maluku telah menjadi ajang kekerasan komunal yang mengerikan, dengan ribuan korban tewas dan ratusan ribu penduduk kehilangan tempat tinggal mereka. Pada mulanya, kekerasan hanya terjadi antara penduduk asli Kristen di pulau Ambon dan kaum pendatang Muslim, lalu meluas menjadi kekerasan antara komunitas Kristen dan Muslim di Ambon dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau lain di Propinsi Maluku dan Maluku Utara. Pada galibnya, ketertiban memang telah dipulihkan di seluruh kepulauan itu sejak tahun 2000, kecuali Ambon. Meski para pemimpin komunitas telah menandatangani Deklarasi Malino Februari 2002 yang disponsori pemerintah, ketegangan masih membara dan hanya segelintir kesepakatan yang termuat dalam

deklarasi tersebut yang dilaksanakan. Berbagai upaya lain untuk meredakan konflik yang mencakup pendekatan tradisional maupun keterlibatan berbagai LSM dan masyarakat sipil, dapat menjadi contoh strategi yang melindungi perjanjian untuk meredakan ketegangan.

Gugusan pulau Indonesia Timur yang dikenal sebagai Maluku (dalam bahasa Inggris juga disebut Moluccas) merupakan kepulauan terluas yang terdiri dari hampir 1000 pulau. Sejak dimekarkan menjadi dua propinsi pada 1999, Maluku Utara dan Maluku, kepulauan itu pada umumnya terdiri dari dataran tinggi gunung berapi berhutan lebat yang menjulang dari laut. Kedua propinsi itu, dengan jumlah penduduk sekitar 2,1 juta orang, telah dilanda kekerasan antar-komunal yang parah sejak Januari 1999, khususnya di pulau Ambon dan Kota Ambon, ibukota Maluku dan pusat pemerintahan di kawasan itu.

Dikenal sebagai “Pulau Rempah-rempah” oleh orang Cina, Arab, Spanyol, Portugis dan Belanda, Maluku sering kali dijajah oleh Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris pada awal abad keenam belas, dan diduduki Jepang selama berkecamuknya Perang Dunia II. Hubungan awal dengan para pedagang Arab pada abad kelima belas langsung menghadirkan Islam. Orang Portugis membawa Katolik Roma pada abad keenam belas, dan Belanda memperkenalkan Protestan Reformasi pada abad ketujuh belas ke kepulauan itu.

Meski telah tercipta sejarah panjang kerukunan antara kaum Kristen dan kaum Muslim di Maluku, catatan historis yang ada, tulis antropolog Dieter Bartels, “mengungkapkan gambaran yang jauh lebih rumit yang sarat dengan manipulasi, intrik dan permusuhan”. Orang-orang Portugis, Belanda, dan Jepang sama-sama berusaha dan “sering kali berhasil memanipulasi keberagaman kaum elit untuk memecah belah kaum Muslim dan kaum Kristen.” Selama bertahun-tahun, khususnya pada masa panjang kolonial Belanda, perpecahan antara kaum Kristen dan kaum Muslim sengaja dimanfaatkan bagi kepentingan politik, dan pemerintah kolonial Belanda memberi peluang kepada kaum

Kristen untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam birokrasi dan militer dan, yang tak kalah pentingnya, akses ke dalam dunia pendidikan modern. Pada masa singkat pendudukan Jepang, keadaan menjadi berbalik. Sungguhpun demikian, tulis Bartels, kecuali ketika mereka dipaksa oleh kekuatan asing, “tampaknya tak cukup kuat bukti bahwa para penjajah itu pernah menanamkan sentimen keagamaan berurat-akar kepada masyarakat Ambon pada umumnya, dan sebelum masa awal kolonial, tak pernah desa-desa Ambon Muslim atau Kristen bersatu untuk... saling berperang.”¹

Praktik-praktik manipulatif yang dimulai pada masa kolonialisme, khususnya ketika jabatan-jabatan penting dipertaruhkan, terus berlanjut hingga sesudah Indonesia merdeka. Misalnya, menjelang akhir tahun-tahun panjang kepemimpinan Soeharto, dia menggunakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang didirikan pada 1990, untuk meng-kooptasi kelas menengah Muslim dan sebaliknya, para anggota ICMI menggunakan organisasi itu sebagai batu loncatan untuk berkuasa. Pada tahun 1990-an, demi mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Muslim, Soeharto dua kali mengangkat gubernur dari kalangan orang Ambon Muslim, dan tidak memberikan jabatan itu kepada para petinggi militer yang telah pernah didukungnya.² Pada dua kali kesempatan itu, calon lain bagi jabatan tersebut adalah seorang Protestan.

Meski secara tradisional Maluku memiliki penduduk yang sangat beragam, namun keseimbangan antara kaum Kristen dan kaum Muslim berubah secara drastis selama tiga dasawarsa terakhir, terutama karena kebijakan “transmigrasi” yang dicanangkan pada masa pemerintahan Soeharto. Kebijakan ini menimbulkan arus deras kaum pendatang Muslim dari pulau-pulau berpenduduk padat menuju kawasan berpenduduk kurang padat, termasuk Maluku. Populasi Muslim Maluku bertambah dari sekitar 50 persen pada 1971 menjadi nyaris 60 persen sejak tahun 1999. Pada masa yang sama, populasi Kristen merosot dari sekitar 47 persen menjadi kira-kira 40 persen sejak tahun 1999.³ Akibat perpindahan penduduk terlihat jelas pada kenaikan jumlah kaum Muslim

pendatang, dari sekitar 5 persen dari seluruh penduduk Maluku pada 1971, menjadi lebih dari 14 persen pada tahun 1995, dengan kecenderungan terus meningkat. Proporsi terbesar kaum pendatang ini berasal dari Sulawesi Selatan, dan kebanyakan secara etnik mereka adalah orang-orang Buton, Bugis dan Makassar.

Sebagai bagian dari kebijakan transmigrasi, kepada para pendatang baru ini diberikan lahan yang biasanya diambil dari penduduk asli. Pemerintah juga membangun berbagai fasilitas seperti pasar, jalan, sekolah, dan rumah-rumah sakit bagi para transmigran. Sejak tahun 1969 hingga 1999, 25319 kepala keluarga (nyaris 100,000 orang) ditransmigrasikan ke Maluku dan Maluku Utara, dengan lebih dari separuhnya menetap di Maluku Tengah, khususnya di kepulauan Ambon, Seram dan Buru. Perpindahan lain yang tak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah juga terjadi, meski sulit diketahui dengan pasti berapa jumlah kaum pendatang tak resmi ini. Kebanyakan kaum pendatang ini berasal dari Sulawesi Selatan dan tak sedikit pula yang datang dari Jawa. Selain itu, kebanyakan para pendatang ini adalah kaum Muslim.

Tidaklah mengherankan jika kebijakan transmigrasi dan perpindahan tak terkendali itu telah menjadi sumber ketegangan utama dan kekecewaan masyarakat Maluku. Hilangnya lahan yang luas, dengan ganti rugi yang sedikit atau bahkan tak ada sama sekali, dan dominasi para pendatang baru telah menimbulkan api dalam sekam di kalangan penduduk asli. Desa-desa kaum Kristenlah yang paling terkena dampaknya, di mana para penduduknya merasa jalan hidup mereka terancam oleh semakin meningkatnya jumlah kaum Muslim pendatang. Pada tahun 1970-an, yakni ketika transmigrasi baru saja dilaksanakan, desa-desanya sepi dan sebagian besar hanya dapat ditempuh melalui jalur laut. Sejak akhir tahun 1990-an, desa-desa itu dihubungkan dengan jalan-jalan seiring dengan tumbuhnya berbagai kawasan bisnis dan hunian baru, yang nyaris secara eksklusif dimiliki kaum Muslim bukan-pribumi.⁴ Pada masa itu pula, Maluku dengan cepat dilanda urbanisasi, sebuah faktor yang diyakini para pengamat sebagai pemicu rasa tak-aman di kalangan kaum Kristen, khususnya mereka yang menetap di Kota Ambon.⁵

Isu penting lain di Maluku menyangkut isu perwakilan. Seperti yang telah dikemukakan di atas, di bawah pemerintahan kolonial Belanda, kaum Kristen memiliki kedudukan istimewa dan peluang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang baik. Akibatnya, ketika Indonesia merdeka, kaum Kristen lebih siap dibandingkan kaum Muslim dalam menghadapi kehidupan modern dan lebih mudah dalam mendapatkan jabatan-jabatan profesional. Karena tak mendapatkan akses ke dalam pendidikan atau kedudukan dalam birokrasi, maka selama zaman kolonial, kaum Muslim menguasai pasar-pasar. Setelah kemerdekaan, yakni ketika kaum Muslim dan kaum Kristen memiliki akses yang sama ke dalam pendidikan dan peluang yang lebih besar dalam mobilitas sosial, keadaan mulai berubah dan lambat laun semakin banyak kaum Muslim yang mampu bersaing dalam meraih kedudukan di berbagai jenjang masyarakat. Pertarungan antara kedua komunitas itu dalam bidang ekonomi dan kekuasaan politik mulai muncul. Sejak lama kaum Muslim menaruh perhatian utama untuk mendapatkan perwakilan di dalam pemerintahan dan birokrasi. Mereka merasa bahwa mereka kurang memiliki perwakilan dalam korps pegawai negeri sipil, khususnya di Kota Ambon dan mereka mengeluhkan diskriminasi terhadap para mahasiswa dan dosen Muslim di Universitas Pattimura yang didominasi kaum Kristen. Demikian pula, kaum Kristen merasa dirugikan ketika kaum Muslim mulai menduduki semakin banyak jabatan pemerintahan di tingkat propinsi. Kaum Kristen takut kehilangan peran penting yang secara tradisional telah mereka mainkan.

Faktor pemicu kekerasan yang lain adalah runtuhnya struktur pemerintahan tradisional sebagai akibat kebijakan pemerintah terhadap pemerintahan lokal. Pada tahun 1970-an, pemerintah pusat memberlakukan peraturan untuk menyeragamkan pemerintahan lokal di seluruh tanah air. Sebagai akibatnya, para pemimpin tradisional di desa (yang disebut Raja, Bapa Raja, atau Latu Patti) digantikan oleh kepala desa dan kekuasaan tradisional diganti dengan pemerintahan desa. Peran tradisional para Raja sebagai pengelola konflik dan penengah jelas menjadi kian

melemah. Selain itu, status tanah juga berubah. Pada masa-masa sebelumnya, tanah lazimnya dimiliki oleh suku. Tetapi, dengan penataan baru, tanah dapat diregistrasi, dibeli dan dijual. Akibatnya, penjualan tanah dilakukan secara besar-besaran termasuk penjualan kepada kaum pendatang dari Sulawesi Selatan.

Pergantian sistem kesukuan dengan sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh pejabat tingkat bawah birokrasi Indonesia lebih egaliter dan benar-benar memberi peluang kepada kaum pendatang etnis Bugis, Buton dan Makassar dan para anggota komunitas mereka sendiri banyak yang menjadi kepala desa. Namun kepala-kepala desa tersebut tidak memiliki otoritas sebagaimana dimiliki oleh Raja terdahulu, dan ketika konflik pecah, hanya segelintir orang pada tingkatan lokal yang mampu menghentikannya.⁶

Khususnya pada rezim “Orde Baru” pimpinan Soeharto, pendidikan agama di komunitas Muslim maupun Kristen cenderung menekankan dimensi internal dan eksklusif agama dan bukan dimensi eksternal dan inklusif agama. Para pemimpin agama “melarang jemaat mereka meninggalkan sisa-sisa kepercayaan tradisional mereka.”⁷ Proses kristenisasi di dalam umat Kristen dan islamisasi di dalam umat Islam telah melemahkan lembaga-lembaga adat-istiadat dan kebiasaan dan “berbagai gagasan tentang persaudaraan Muslim-Kristen.”⁸

Pada saat yang sama, proses revitalisasi agama ini semakin mengedepankan kedudukan agama di dalam masyarakat, dengan bahasa dan simbol-simbol agama yang menjadi kian penting dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kewarganegaraan, kesukuan, dan persaingan ekonomi maupun politik. Di dalam konteks ini, jati diri komunal dan lokal (orang-orang Kristen Ambon di satu pihak dan kaum Muslim Ambon dan bukan-Ambon di pihak lain), jati diri nasional (Kristen Indonesia dan Muslim Indonesia), dan jati diri internasional/global (Kaum Muslim Maluku sebagai bagian dari universalisme Islam dan Kaum Kristen Maluku sebagai bagian dari universalisme Kristen) menjadi semakin penting.

Kekerasan di Maluku terjadi dalam konteks krisis ekonomi Asia dan runtuhnya rezim Orde Baru. Dengan kian lemah dan terpuruknya pemerintah pusat oleh krisis ekonomi dan politik, maka ia tak mampu berperan dalam menangani konflik atau menjaga keamanan, dan tak mampu pula, ketika kekerasan pertama pecah, memelihara ketertiban. Pada awal kerusuhan 1999, kelompok etnik pendatanglah yang menjadi target kekerasan kaum Kristen. Namun ketika konflik dan kerusuhan berlanjut, dan ketika kebanyakan kaum pendatang melarikan diri, ia meningkat menjadi konflik antara berbagai komunitas Kristen dan Muslim. Jelas polisi dan militer gagal mengendalikan keadaan yang mengubah konflik di Ambon dari konflik merugikan yang menimpa kaum pendatang namun masih dapat diatasi menjadi konflik “antar-komunal” dan “antar-agama” yang jauh lebih meluas dan berbahaya.

Ketika kekerasan di Maluku menjadi berkepanjangan, kelompok-kelompok yang bertikai terpaksa memobilisasi para pendukung dan sumber daya demi memenangkan perang mereka. Para pemimpin agama menyebarkan fitnah seraya melukiskan, misalnya, “pihak musuh” bukan hanya sebagai musuh Tuhan namun juga sebagai musuh negara. Kaum Kristen dituduh mendukung gerakan politik separatis Republik Maluku Selatan (RMS). Masjid dan gereja terjun ke dalam ajang konflik dan berubah menjadi benteng bersenjata. Kitab suci dan tradisi dieksploitasi untuk menganiaya komunitas lawan dan mendakwa saudara seagama yang dianggap kurang “militan”; sebagian dicap sebagai kaum munafik. Maka, proses dehumanisasi yang keras itupun menjadi semakin meningkat di kalangan komunitas agama di Maluku. Suara-suara yang menyerukan hidup berdampingan secara damai dan toleransi dipandang dengan penuh kecurigaan dan ditekan. Malah ketika kerja sama dan komunikasi di antara para juru damai di berbagai komunitas benar-benar dibutuhkan, ia justru tercekik karena bahaya nyata yang dihadapi oleh orang-orang yang mencoba mencapai perdamaian.

Akibat lain dari kegagalan untuk segera meredakan konflik dan menciptakan ketertiban adalah keterlibatan berbagai kekuatan

yang datang dari wilayah lain di Indonesia dan bahkan dari luar Indonesia dalam konflik yang relatif telah dilokalisasi itu. Khususnya pada bulan Mei 2000, kedatangan para pejuang Laskar Jihad yang dilengkapi dengan persenjataan modern untuk membela umat Islam, benar-benar telah mengubah sifat konflik. Kedatangan Laskar Jihad mencerminkan ketidakmampuan aparat keamanan dalam mengawasi jalur masuk ke Maluku dan memperlihatkan bias pro-Muslim di sebagian kalangan militer dan pemerintah. Milisi serupa akhirnya terbentuk di kalangan umat Kristen.

Dinamika Konflik

Kekerasan di Maluku biasanya dilukiskan dalam generalisasi yang luas. Citra umum yang dihasilkan adalah tentang perang dashyat yang melibatkan umat Kristen dan umat Islam di seluruh Maluku dan Maluku Utara dan tak kunjung reda sejak 1999 dan seterusnya. Keadaan yang sebenarnya sangatlah berbeda, dengan sifat, intensitas dan jangka waktu kekerasan benar-benar berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kekerasan terus berlanjut di Kota Ambon dari tahun 1999 hingga tahun 2002, kekerasan di sebagian wilayah hanya terjadi selama tahun 1999 dan ketertiban segera dapat dipulihkan kembali. Sementara itu, di sebagian wilayah yang lain, kekerasan hanya meletus dalam waktu yang relatif singkat pada tahun 2000. Ada beberapa upaya untuk membedakan sifat dan cakupan kekerasan di berbagai wilayah lain di Maluku, untuk mengetahui desa dan kecamatan mana yang paling parah, atau untuk menghitung jumlah korban (tewas maupun luka-luka) menurut tempat dan waktu terjadinya kekerasan.⁹

Kekerasan yang melibatkan umat Kristen dan umat Islam di Kota Ambon dipicu oleh pertengkaran antara seorang supir bis Kristen dan anak muda Muslim dari kelompok etnik Bugis pada tanggal 19 Januari 1999, bertepatan dengan hari Idul Fitri, hari raya terbesar umat Islam di Indonesia. Saat itu, polisi kekurangan personel karena banyak anggotanya yang libur.

Pertikaian yang tampaknya kecil ini meluas dan berubah menjadi kerusuhan besar di seluruh Kota Ambon yang berlangsung

hingga tanggal 23 Januari. Desa-desa sekitar juga terjun ke dalam kancan kekerasan, dengan melakukan serangan mendadak terhadap komunitas musuh, membakar rumah, perang batu dan kelewang. Pada mulanya, perkelahian terjadi antara kaum Kristen Ambon dan kaum pendatang Muslim dari Sulawesi Selatan. Lalu, kaum Muslim Ambon juga terlibat dalam perkelahian itu. Pada bulan berikutnya, semakin banyak insiden yang terjadi di Kota Ambon lalu pada berbagai wilayah lain di pulau Ambon.

Hanya beberapa hari sebelum meletusnya kekerasan di Ambon, yakni antara tanggal 13 dan 17 Januari, kaum Kristen dan kaum Muslim telah bentrok di Dobo, di distrik Maluku Tenggara. Aparat keamanan lokal tak mampu meredakan kekerasan dan meminta bantuan dari Ambon. Polda Maluku kemudian mengirim satuan Brimob pada 19 Januari, hanya beberapa jam menjelang pecahnya kekerasan di Kota Ambon.

Setelah kerusuhan komunal di Kota Ambon, kekerasan menyebar ke Maluku Tengah pada bulan Februari 1999, meski jumlah insiden jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang terjadi di Kota Ambon. Lalu pada bulan Maret kekerasan menyebar ke kepulauan Kei di Maluku Tenggara. Di sini, insiden paling serius, yang menelan korban nyawa, hanya terjadi pada 1999. Maluku Utara juga dilanda kekerasan komunal, namun ketika ketertiban telah dipulihkan pada awal 2000, kekerasan pun benar-benar berhenti. Dinamika konflik di Maluku Utara dan Kepulauan Kei jelas sangat berbeda jika dibandingkan dengan kekerasan berlarut-larut yang melanda Ambon, termasuk Kota Ambon dan Kepulauan Lease yang berdekatan.

Sebenarnya, di Propinsi Maluku sendiri, kebanyakan peristiwa kekerasan yang parah (yakni kekerasan yang menelan korban nyawa, pembakaran rumah, penyerangan, penembakan, pemboman, pembunuhan, demonstrasi kekerasan dan sebagainya) terjadi di Kota Ambon, tempat terjadinya pula pengrusakan harta benda yang sangat parah.¹⁰

Ketika kekerasan berlanjut di Kota Ambon, konflik pun menjadi semakin “dipersenjantai” dan bertambah banyak insiden

yang melibatkan senjata dan bom rakitan. Tetapi, insiden yang melibatkan penggunaan senjata dan bom menjadi jauh lebih meningkat antara 1999 dan 2001, dari 19 menjadi 76, sebelum berkurang hingga 52 pada 2002. Peristiwa pemboman pada 1999 berjumlah 18 kasus dan benar-benar meningkat setiap tahun hingga menjadi 69 kasus pada 2002. Justru ketika penggunaan senjata itu tengah berlangsung, frekuensi insiden kekerasan semakin menurun di luar Kota Ambon. Bentrok yang melibatkan penduduk desa Kristen dan Muslim menurun dari 66 kasus pada 1999 menjadi 32 kasus pada 2000, 7 kasus pada 2001 dan hanya satu kasus pada 2002. Serangan yang dilakukan sebuah desa terhadap desa yang lain menurun dari 29 kasus pada 1999 menjadi hanya dua kasus pada 2002.¹¹

Ketika konflik kian memanas dan semakin melibatkan penggunaan senjata, aparat keamanan justru mulai memainkan peranan yang sangat disayangkan. Polisi—terutama polisi setempat—dan tentara terjun ke ajang konflik. Di Maluku, aparat keamanan yang “tercemar” ini ikut berperang membela saudara seagama mereka, menjadi pelindung, pemasok dan penjual senjata maupun amunisi, bahkan menjadi mata-mata. Mereka juga melatih milisi dan mengajarkan mereka cara membuat bom, termasuk misalnya, penggunaan bom peninggalan dari Perang Dunia II yang ditemukan di perairan di sekitar Maluku. Selain itu, ketika konflik berlanjut, aparat keamanan malah menaruh kepentingan pribadi pada konflik tersebut. Banyak aparat keamanan terlibat dalam kegiatan bisnis dan menarik keuntungan dari konflik, dengan berdagang, mengawal sarana transportasi antar desa, dan menjadi centeng. Seperti yang dilaporkan oleh International Crisis Group (ICG), “Ketika aparat keamanan tidak berusaha keras untuk meredakan konflik 1999-2000, kepentingan finansial mereka justru malah dilindungi oleh rasa takut masyarakat. Ledakan bom dan letusan senjata api yang kadang terjadi, telah cukup mendorong para pebisnis dan hartawan merogoh kocek guna mendapatkan perlindungan khusus. Tidak jarang ledakan bom di Ambon melibatkan kaum militer berpangkat rendah.”¹²

Ketika polisi dan militer berpihak dalam konflik, seperti yang terjadi di Maluku, berlanjut kekerasan dan perpecahan di dalam sektor keamanan menjadi semakin kuat. Saling tuding dan curiga memecah belah aparat polisi dan aparat keamanan, dan merebak di tengah-tengah polisi dan militer, di berbagai unit polisi, unit militer, dan antara polisi dan militer di satu pihak serta kaum milisi Kristen dan Muslim di pihak lain. Pada berbagai kesempatan, Penguasa Darurat Sipil mengadakan pos-pos bersama untuk mempersatukan militer dan polisi guna mencegah pertikaian di kalangan berbagai unit keamanan.¹³ Kekacauan di dalam sektor keamanan tersebut semakin menguatkan rasa tak aman dan ketakberdayaan masyarakat.¹⁴

Di pihak lain, militer memainkan peran yang jauh lebih konstruktif di Maluku Utara dan oleh karena itu, berhasil dengan relatif cepat menghentikan permusuhan di sana, tanpa insiden berarti setelah pertengahan tahun 2000. Ini dapat dinisbahkan baik kepada kehadiran pasukan keamanan di kawasan itu maupun kepada upaya-upaya para pemimpin komunitas dan pemerintah setempat. Pada berbagai kesempatan pasca-kekerasan, TNI dan Polri membantu dan mendukung proses rekonsiliasi, dengan misalnya mengundang para pemimpin komunitas di berbagai kota dan kecamatan, mengawal para pemimpin komunitas yang berniat ikut dalam proses rekonsiliasi, dan menjamin keamanan ketika pertemuan rekonsiliasi berlangsung.¹⁵

Salah satu dampak paling serius konflik tersebut menimpa sistem layanan kesehatan. Para petugas kesehatan termasuk dokter, perawat dan paramedis, yang dikenali karena agama mereka, sulit bergerak dari desa ke desa. Ambulan nyaris tak mendapatkan ruang gerak. Kekerasan itu juga menyebabkan krisis obat-obatan, kesulitan mencapai pos-pos kesehatan dan rumah sakit bagi individu maupun seluruh komunitas agama yang “keliru” (banyak rumah sakit dan pos-pos kesehatan yang hanya memberikan layanan kepada salah satu komunitas agama saja), perubahan dalam sistem rujukan layanan kesehatan, dan mahalnnya harga obat dan layanan kesehatan. Terlebih lagi, banyak rumah sakit dan pos-pos

kesehatan yang rusak atau hancur.

Ketika konflik semakin meningkat, beberapa perkembangan penting benar-benar berpengaruh terhadap jalannya peristiwa. Salah satunya adalah kedatangan Laskar Jihad di Maluku, yang berawal pada bulan Mei 2000. Jumlah mereka sekitar 1500 atau ribuan orang. Mereka membela kaum Muslim di Kota Ambon maupun desa-desa lain di pulau itu. Sebagian anggota Laskar Jihad juga tiba di Seram, kepulauan Buru dan Maluku Utara. Laskar Jihad yakin bahwa pemerintah pusat tak mampu melindungi saudara seagama mereka dan bahwa jika konflik terus berlanjut, keadaan kaum Muslim akan menjadi semakin buruk. Melalui siaran radio, selebaran dan surat kabar, Laskar Jihad memobilisasi bantuan kemanusiaan maupun pasukan bersenjata bagi kaum Muslim di Maluku. Mereka juga melakukan penangkapan, penghukuman dan tuduhan terhadap orang-orang Kristen yang telah mereka anggap sebagai pemicu konflik pada bulan Januari 1999. Meski pada mulanya hanya segelintir kaum Muslim yang menyambut hangat kehadiran Laskar Jihad dan kebanyakannya tidak mengenal dekat para milisi itu, namun banyak pula akhirnya yang mensyukuri perannya dalam menangkal milisi Kristen dan mengubah keseimbangan kekuatan antara kedua komunitas yang bertikai itu.¹⁶

Para pemimpin Kristen melihat kehadiran Laskar Jihad, khususnya unsur-unsur bersenjatanya, sebagai penghambat kelanggengan perdamaian. Salah satu responsnya adalah pembentukan Front Kedaulatan Maluku (FKM-Maluku Sovereignty Front) pada bulan Juni 2002. Penguasa Darurat Sipil, yang dibentuk untuk memerintah Maluku pada tanggal 26 Juni 2000,¹⁷ memandang Laskar Jihad sebagai penghambat untuk mengupayakan pemulihan ketertiban dan di berbagai kesempatan, membujuk Laskar Jihad untuk meninjau kembali kehadirannya di Maluku serta mengakhiri keterlibatannya dalam kekerasan. Pada penghujung tahun 2000, Penguasa Darurat Sipil meminta Pemerintah Pusat untuk mencegah keberangkatan pasukan Laskar Jihad dari berbagai pelabuhan di Jawa dan Sulawesi Selatan. Namun kehadiran Laskar Jihad terus berlangsung di Kota Ambon dan

berbagai wilayah lain di Maluku hingga ia membubarkan diri pada bulan Oktober 2002.

Di kalangan umat Kristen, FKM bertindak provokatif, dan kehadiran para preman dan milisi seperti Laskar Yesus juga memperburuk konflik di Maluku. Seperti halnya Laskar Jihad, FKM menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia gagal menciptakan keamanan di Maluku dan meminta bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional.

Perhitungan terhadap jumlah korban tewas dalam konflik antara tahun 1999 dan 2000 sangatlah berbeda. Data resmi menyebutkan kira-kira 1451 korban tewas (termasuk 66 orang tentara dan 23 orang aparat kepolisian) dan 2,140 orang luka-luka,¹⁸ dengan sekitar dua pertiga korban tewas dan luka-luka jatuh di Kota Ambon.¹⁹ Perkiraan lain mengenai korban tewas mencapai sekitar 10,000 orang.²⁰ Pemerintah setempat memperkirakan bahwa pada bulan Juni 2001, konflik telah mengakibatkan 329,818 orang kehilangan tempat tinggal, sedangkan perhitungan lain menyebutkan jumlah sekitar 400,000 orang. Nyaris 75% tuna wisma tetap berada di Maluku sedangkan kira-kira 100,000 orang mengungsi ke Sulawesi Tenggara. Kekerasan juga mengakibatkan rusaknya sekitar 6,488 rumah, 243 kios, 66 gereja, 36 masjid, kerusakan parah bagi universitas negeri dan sekolah-sekolah lain, kantor-kantor pemerintah termasuk kantor gubernur dan, seperti yang telah disebutkan di atas, berbagai fasilitas kesehatan.²¹ Akhirnya, akibat konflik, banyak pulau yang dipisahkan menurut garis agama.

Penanggulangan Konflik oleh Pemerintah

Konflik di Maluku berawal pada masa pemerintahan Presiden Habibie, sesudah tiga puluh tahun rezim Soeharto yang berakhir pada bulan Mei 1998. Tetapi, masa kepresidenan Habibie hanya berlangsung hingga bulan Oktober 1999. Abdurrahman Wahid menggantikan Habibie namun kemudian menyerahkan tanggung jawab penanggulangan konflik di Maluku dan Maluku Utara kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Tetapi, Presiden Wahid

meragukan kemampuannya dengan menyatakan bahwa hanya pihak-pihak yang bertikai di Maluku yang dapat mengakhiri kekerasan.

Salah satu langkah paling nyata yang ditempuh pemerintah pusat di bawah Presiden Wahid adalah maklumat Darurat Sipil di Maluku dan Maluku Utara pada tanggal 26 Juni 1999. Status darurat ini memberikan kewenangan luas bagi gubernur Maluku dan Maluku Utara, Pangdam, Kapolda, dan kantor kejaksaan sehingga mereka dapat secara efektif memulihkan ketertiban dan keamanan. Seorang “Penguasa Darurat Sipil” diberikan kewenangan untuk menyampaikan perintah, dan membatasi hak-hak sipil maupun kebebasan individu.

Di Maluku, pemerintah setempat berusaha menghentikan kekerasan melalui dialog dan rekonsiliasi. Pada 1999, misalnya, berulang kali pemerintah mempersatukan para pemimpin komunitas dari berbagai latar belakang dan agama. Setiap kali, para peserta dan wakil pemerintah setempat menyampaikan pernyataan bersama untuk menghentikan dan mengakhiri kekerasan.²² Berulang kali selama berlangsungnya konflik, pemerintah setempat juga membentuk tim rekonsiliasi yang beranggotakan wakil-wakil dari berbagai komunitas. Misalnya pada bulan Maret 1999, pemerintah setempat membentuk Pusat Rujuk Sosial (PRS-Centre for Social Reconciliation) dengan mandat membantu usaha pemerintah dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan di Maluku. PRS menduga bahwa penyebab utama kekerasan di Maluku harus dikaji dan bahwa upaya-upaya untuk menciptakan komunitas yang hidup berdampingan secara damai harus diperkuat, menganjurkan pembentukan pos-pos keamanan di desa-desa yang dilanda kekerasan.²³

Penguasa Darurat Sipil gagal mengakhiri kekerasan, dan ini semakin menguatkan dugaan di kalangan komunitas Kristen dan Muslim di Maluku bahwa kekerasan sebenarnya memang sengaja diciptakan dari Jakarta. Pada awal tahun 2002, pemerintah pusat mengumpulkan para pemimpin Kristen maupun Muslim Maluku dan kedua umat sepakat menghadiri pertemuan yang akan

dilaksanakan pada 11-12 Februari 2002, di Malino, Sulawesi Selatan guna membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan upaya mengakhiri konflik dan membangun kembali masyarakat yang dicabik-cabik kekerasan itu. Inilah pertemuan yang dinanti-nanti, dan dihadiri oleh 35 peserta Muslim dan 35 peserta Kristen. Tim penengah pemerintah terdiri dari Menko Kesra, Menko Polkam, Kapolri, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda, Pangdam, DPRD Maluku dan Walikota Ambon.

Pada akhir pembicaraan selama dua hari itu, para peserta menyepakati hal-hal berikut:

- Mengakhiri semua konflik dan pertikaian.
- Mematuhi proses penegakan hukum dengan terbuka, adil, jujur dan tidak memihak, yang didukung oleh berbagai pihak, dengan pengertian bahwa aparat keamanan juga wajib melaksanakan tugasnya secara profesional.
- Menolak dan menentang semua bentuk gerakan separatis yang mengancam kesatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dukungan terhadap Republik Maluku Selatan (RMS).
- Bahwa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat Maluku memiliki hak untuk hidup dan bekerja secara sah dan terbuka di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan yang lain juga memiliki hak untuk hidup dan bekerja di Maluku, selama mereka menghormati kebudayaan daerah dan hukum, dan menjaga ketertiban.
- Melarang dan melucuti organisasi, kelompok atau milisi liar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kelompok-kelompok asing yang mengganggu perdamaian di Maluku akan diusir.
- Membentuk tim investigasi nasional yang independen untuk menyelidiki, antara lain, peristiwa tragis 19 Januari 1999, organisasi-organisasi semacam Front Kedaulatan Maluku, Republik Maluku Selatan, Republik Maluku Selatan Kristen, Laskar Jihad, dan Laskar Kristus; praktek pemaksaan agama

dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

- Menyerukan agar para pengungsi secara sukarela kembali ke rumah-rumah mereka, dan pengembalian harta milik mereka.
- Memperbaiki infrastruktur sosial, ekonomi dan umum, khususnya fasilitas pendidikan, kesehatan, agama dan tempat tinggal, dengan bantuan Pemerintah Indonesia.
- Memelihara hukum dan ketertiban bergantung pada kerja sama pihak militer dan kepolisian dan kesungguhan mereka dalam mencapai tujuan mereka; dan bahwa pengefektifan tugas kepolisian membutuhkan penataan dan penyempurnaan kembali peralatan sebagian unit dan fasilitas.
- Memastikan hubungan yang baik dan keharmonisan di kalangan semua komunitas dan agama di Maluku, semua kegiatan juru dakwah haruslah menghargai keragaman rakyat dan mengakui budaya setempat.
- Membantu perbaikan Universitas Pattimura demi kemaslahatan bersama, rekrutmen staf dan mahasiswa harus bersifat terbuka, didasarkan atas prinsip kejujuran dan tekad menjaga mutu.

Meski Deklarasi Malino memberikan sebuah langkah maju, namun pelaksanaannya menghadapi banyak masalah. Komite yang dibentuk di Malino, yang terdiri atas para wakil pemerintah dan masyarakat setempat, gagal menjalankan mandat mereka karena pemerintah pusat dan Penguasa Darurat Sipil gagal memberikan dukungan yang mereka butuhkan dan tidak mempunyai kemauan politik untuk mendorong keberhasilan. Pemerintah pusat gagal menepati janji untuk memberikan dana kepada komite guna melaksanakan program-program seperti perbaikan dan rekonstruksi, dan pemerintah lokal di bahwa Penguasa Darurat Sipil bekerja semauanya. Di samping itu, para anggota komite bahkan tidak berusaha untuk berunding seperti yang dianjurkan dalam kesepakatan.

Tidak adanya dukungan dari aparat keamanan juga terlihat dari beberapa kejadian penting yang menghambat proses perdamaian Malino. Pada tanggal 3 April 2002, sebuah bom

meledak di wilayah kaum Kristen di kota Ambon, yang menewaskan enam orang dan melukai banyak lainnya. Beberapa jam kemudian, kantor Gubernur dan pemerintah propinsi Maluku dibakar. Pada tanggal 25 April, insiden pengibaran bendera, berkibarnya bendera Forum Kedaulatan Maluku dan RMS di banyak wilayah yang dijaga ketat di Maluku juga memupus kepercayaan terhadap deklarasi Malino. Tiga hari kemudian, penyerangan terhadap Desa Soya yang mayoritas penduduknya beragama Kristen telah menelan 12 korban jiwa. Para preman Kristen, yang termakan hasutan aparat keamanan, berada di balik penyerangan itu. Selain upaya resmi untuk meredakan konflik pada tingkat nasional maupun regional, PBB dan ICRC, yang hadir di Maluku untuk mengatasi krisis kemanusiaan, juga secara tak langsung terlibat dalam berbagai upaya untuk meredakan konflik.²⁴ Badan-badan yang bekerja di bawah naungan PBB antara lain Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), UNICEF, UNDP, UNHCR, Badan Pangan Dunia, dan WHO. Program dan aktivitas semua badan itu, yang sebagiannya dilaksanakan dengan bekerja sama dengan LSM-LSM, mencakup berbagai rancangan untuk menyatukan kaum Muslim dan kaum Kristen di bawah payung program yang sama, dan program-program penciptaan perdamaian dan peredaan konflik, seperti program kesehatan WHO yang menjadi jembatan bagi program perdamaian di Maluku pada 2000-2001. Tetapi, berbagai kegiatan dan program PBB di Maluku terhambat oleh berbagai peristiwa kekerasan yang mengakibatkan perwakilan PBB hengkang dari Maluku dan hanya kembali setelah ketegangan mereda.

Jalur-jalur Diplomasi

Karena respons terhadap kekerasan yang desentralistis, berbagai pendekatan untuk meredakan konflik yang didasarkan atas nilai-nilai dan lembaga-lembaga tradisional dibahas secara luas di Maluku. Salah satu sistem tradisional bagi peredaan konflik di dalam masyarakat Maluku yang bersifat pluralistik adalah sistem *pela* atau “sistem persekutuan antar desa.”²⁵ Sistem *pela* dapat

ditemukan di kebanyakan desa di Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaut, dan kepulauan Seram. Sistem persekutuan serupa juga terdapat di banyak pulau lain di Maluku dan propinsi Maluku Utara. Di kepulauan Maluku, kebanyakan desa bersifat mono-religius dalam arti bahwa seluruh penduduk desa itu adalah kaum Muslim atau kaum Kristen. Oleh karena itu, persekutuan antar-desa dengan sendirinya menjadi persekutuan antar-agama.²⁶ Menurut Bartels,

Persekutuan pela disepakati antara dua desa atau lebih dan jarang dilakukan antara suku-suku di desa yang berbeda. Kecuali pegunungan Leitimore di Pulau Ambon di mana desa-desanya yang berdekatan terlibat dalam perjanjian semacam itu, para peserta persekutuan pela biasanya hidup terpencar dan sering kali mendiami pulau yang berbeda. Kebanyakan persekutuan terbentuk antara desa-desa Kristen, namun tak jarang pula antara desa Kristen dan desa Muslim, yang berarti melintasi batas-batas agama. Pela antara sesama kaum Muslim tidak ada.²⁷

Secara historis, sistem pela telah memainkan peranan penting dalam meredakan konflik antara desa Muslim dan desa Kristen. Kembali mengutip Bartels,

Karena adanya sistem pela, potensi pertikaian antara kaum Muslim dan Kristen Ambon dicegah sedini mungkin, yang sangat berbeda dengan fenomena umum kekerasan antara para penganut agama ini di seluruh dunia. Pada tataran praktis, ada peningkatan mencolok pertukaran ekonomi dan banyak gereja, masjid dan sekolah dibangun dengan bantuan ikhlas para peserta persekutuan pela yang menyediakan tenaga kerja, bahan bangunan, uang atau bahan pangan untuk melaksanakan pembangunan itu tanpa bantuan pemerintah. Setelah proyek diselesaikan, para peserta persekutuan pela diundang untuk menghadiri acara peresmian, dan, dalam hal gereja atau masjid, kaum Kristen dan kaum Muslim sama-sama memasukinya dengan niat yang sama.²⁸

Sayangnya, sistem pela tidak berlaku bagi desa-desa kaum pendatang yang berasal dari kelompok etnik lain, khususnya Makassar, Bugis dan Buton yang hijrah ke Maluku. Sistem pela juga tidak berlaku bagi desa dan kawasan hunian yang relatif baru yang ditempati keluarga dari berbagai latar belakang agama. Di

samping itu, sebagai sebuah mekanisme peredaan konflik, sistem pela semakin dilemahkan oleh dua macam proses: pendidikan agama yang cenderung menghapuskan adat tradisional (pepatah dan norma-norma budaya yang diwariskan oleh para leluhur), dan meningkatnya sentralisasi yang terjadi di bawah pemerintahan Orde Baru.²⁹

Pada 1999, undang-undang baru tentang pemerintahan daerah dibuat untuk menggantikan pendekatan sentralistik Orde Baru dengan memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintahan desa. Sementara di beberapa propinsi di Indonesia, undang-undang ini telah mendorong munculnya kembali berbagai bentuk pemerintahan daerah dan tradisional, kekerasan di Maluku justru telah menunda pelaksanaan reformasi pemerintahan daerah. Pada awal 2003, dengan bantuan Baku Bae, organisasi daerah yang menganjurkan rekonsiliasi, pertemuan para Raja dan Latu Patti (pemimpin tradisional) di Ambon berakhir dengan pembentukan “Forum Latu Pati” untuk membahas pemerintahan desa.³⁰

Setidak-tidaknya di desa Waiyame, pendekatan kurang tradisional digunakan dan terbukti sangat berhasil dalam memelihara ketertiban. Waiyame (kata yang berarti “air kehidupan”) adalah desa yang berpenduduk lima ribu orang dan merupakan penghasil minyak terbesar di Pulau Ambon. Dahulu merupakan desa Kristen, kini Waiyame berpenduduk kaum Kristen dan kaum Muslim, yang kebanyakannya adalah tenaga guru, pegawai negeri dan kelas menengah. Pada bagian desa yang lebih tua, juga ada penduduk miskin. Desa itu menjadi pusat bisnis bagi desa-desa di sekitarnya dan terkenal karena pasar sayur-mayurnya. Meski ia menampung banyak pengungsi Kristen dan Muslim setelah kerusuhan, Waiyame adalah satu-satunya desa di Ambon yang tidak diterpa oleh kekerasan komunal. Untuk mencegah agar konflik tidak menyebar ke desa itu, para pemimpin Kristen dan Muslim setempat membentuk sebuah tim krisis, disebut sebagai “Tim 20”, yang beranggotakan sepuluh orang Kristen dan sepuluh orang Muslim.³¹ Menurut sebagian orang, kepentingan pemerintah untuk melindungi depot minyak berarti bahwa pemerintah akan

menekan para pemimpin komunitas itu untuk memelihara ketertiban. Seperti yang ditulis pakar konflik, W. Moore,

Misi atau tujuan Tim 20 adalah mencegah, mengendalikan dan menangani perbedaan antar-agama di Waiyame, dan menghentikan menyebarnya kekerasan yang telah memecah-belah seluruh wilayah agar tidak menghancurkan desa itu. Tim 20, sebagai sebuah organisasi informal, sejak awal mengandalkan kredibilitasnya kepada reputasi dan kehormatan para anggota setiap komunitas, namun para pemimpinnya yakin bahwa agar menjadi lebih efektif, mereka membutuhkan legitimasi dan kewenangan formal.³²

Tim 20 menetapkan seperangkat aturan bagi masyarakat Waiyame, termasuk sanksi dan hukuman bagi para pelaku kekerasan. Aturan tersebut secara tegas memuat kebebasan beragama dan mencela berbagai bentuk kekerasan atas nama agama, semua rumor tentang konflik agama harus dilaporkan kepada Tim 20 untuk diteliti, dan melarang semua senjata, perkelahian, pengrusakan rumah-rumah ibadat, dan konsumsi minuman keras di desa itu. Secara khusus, aturan itu juga menetapkan bahwa seseorang tidak dapat dimakamkan di desa itu jika dia tewas karena keterlibatannya dalam konflik antar-agama. Penegakan hukum diserahkan kepada komunitas itu; artinya, jika kaum Muslim melanggar kaidah itu, mereka dihukum oleh para pemimpin Muslim dan jika orang Kristen melanggar peraturan, kasus mereka ditangani oleh komunitas mereka sendiri.³³

Sejak pecahnya konflik di Maluku, banyak LSM telah memainkan peran yang sangat penting. Di Kota Ambon, jumlah LSM meningkat dari sekitar 30 atau 40 pada 1999, menjadi lebih dari 500 pada 2002. Kebanyakan LSM baru menaruh perhatian terhadap penanganan masalah darurat dan bantuan kemanusiaan termasuk pembagian bahan makanan, air, tempat berlindung, dan sanitasi bagi para pengungsi. Banyak LSM daerah di Maluku telah menerima bantuan dari LSM internasional.³⁴

Selama tahun pertama kekerasan, ada upaya pada tingkat daerah dan di dalam jaringan LSM untuk menyelenggarakan

pertemuan berkala antara para pemimpin Kristen dan Muslim dengan utusan LSM itu. Salah satunya adalah Forum TIRUS, atau tim relawan kemanusiaan, yang sangat aktif pada periode pertama kekerasan. Lebih dari 60 LSM dari komunitas Kristen dan Muslim ikut serta di dalam berbagai kegiatan TIRUS. Forum itu memiliki tiga orang koordinator yang juga mewakili komunitas Muslim, Protestan dan Katolik. Jaringan antar-komunal lainnya adalah Gerakan Perempuan Peduli (GPP), kelompok masyarakat sipil ternama yang dibentuk pada bulan September 1999 sebagai gerakan moral menentang kekerasan. Lebih dari 40 aktivis perempuan dari komunitas Protestan, Muslim dan Katolik terlibat di dalam GPP. Selain mengadakan rapat umum untuk menentang kekerasan di Maluku, GPP juga membantu kaum wanita dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Selain kinerjanya yang telah dijelaskan di atas menyangkut pemerintahan daerah, gerakan Baku Bae, yang dibentuk pada bulan Maret 2000, berusaha sekuat tenaga untuk menghimpun LSM daerah dan pemimpin-pemimpin komunitas. Dengan dukungan berbagai organisasi masyarakat madani di Jakarta, Baku Bae telah menjadi respons utama masyarakat madani terhadap kekerasan dan konflik di Maluku dengan menciptakan balai-balai kerukunan yang dihadiri oleh para peserta dari berbagai latar belakang, dan mengembangkan kerja sama dan hubungan ekonomi antar-komunal.

Baku Bae juga membentuk beberapa “zona-netral” dengan bantuan desa-desa di Maluku. Zona netral ini menciptakan kawasan aman pada perbatasan-perbatasan wilayah Kristen dan Muslim untuk kepentingan bisnis, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebuah zona dibentuk di desa Nania, dekat kota Kristen Passo di perbatasan antara semenanjung Leihitu yang mayoritas penduduknya Muslim di sebelah utara pulau dan semenanjung Leitimor yang berpenduduk mayoritas Kristen di sebelah selatan.³⁵ Zona kedua terletak di Pohon Pule di dekat Ambon tengah. Pasar-pasar di pinggir jalan didirikan di Nania maupun Pohon Pule di mana kaum Kristen dan kaum Muslim berpartisipasi sebagai

pedagang maupun pembeli.

Di daerah Pohon Pule, Universitas Pattimura dapat membangun kampus sementara (untuk menggantikan kampus yang hancur pada bulan Juli 2000) dan Rumah Sakit TNI dibuka bagi kaum Muslim dan Kristen yang membutuhkan layanan kesehatan.³⁶ Pasar kaget lain didirikan di zona “netral” sempit di Mardika.³⁷ Tetapi, zona netral bukanlah tanpa rintangan. Pada penghujung tahun 2001, sejumlah bom meledak di dekat pasar, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas maupun luka-luka.³⁸

Baku Bae juga menyelenggarakan pertemuan antara para wartawan dan pengacara dari kedua komunitas itu, yang berkumpul untuk membahas berbagai upaya untuk mendukung proses perdamaian. Dengan bekerja sama dengan AJI (Aliansi Jurnalis Independen), Baku Bae mendorong terselenggaranya pertemuan antara para wartawan Muslim dan Kristen pada bulan Maret 2001 di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini menghasilkan pembentukan “Pusat Media” (Pusat Media Maluku—PMM) di zona netral Mardika, di Kota Ambon. Program ini jelas membantu pemberitaan yang lebih berimbang di Ambon. Pada bulan Januari 2002, Baku Bae juga menyelenggarakan workshop bagi para pengacara Muslim dan Kristen di Jakarta. Rencananya workshop akan dihadiri oleh kaum intelektual, guru, aparat militer dan kepolisian, LSM, para pemimpin agama dan usahawan.³⁹

Selain usaha-usaha daerah ini, sebuah LSM yang berkantor pusat di Jakarta, Lembaga Timur Jauh, juga aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian di Maluku dengan mendorong Dialog Nasional tentang Komunitas Maluku dan Maluku Utara, yang diselenggarakan di dekat Tual di kepulauan Kei Maluku Tenggara. Dialog itu dihadiri oleh 1500 Muslim dan Kristen dari seluruh penjurus daerah. Konferensi itu mengeluarkan ikrar untuk melanjutkan usaha perdamaian dan mengusulkan “penggunaan tradisi daerah sebagai titik temu dalam mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok di propinsi itu.” Ia juga mengusulkan agar pemimpin-pemimpin tradisional, atau Bapa Radja, memimpin kembali...namun sekaligus pula mendukung

hukum negara dan menjamin diterimanya semua pendatang untuk tinggal di propinsi itu.⁴⁰ Tetapi, pada saat pertemuan berlangsung, sebagian perwakilan Muslim dari Ambon menolak menandatangani kesepakatan itu. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Ambon mengatakan bahwa “mereka akan ditolak oleh anggota kami” jika mereka menandatangani.⁴¹

Selain LSM daerah, LSM nasional dan kelompok-kelompok masyarakat madani, LSM internasional juga sangat aktif dalam memberikan bantuan kepada berbagai komunitas dan LSM daerah. Ini mencakup Save the Children (program pendidikan darurat, program perlindungan anak dan menciptakan kedamaian di kalangan anak), CARDI (projek penampungan, air, dan sanitasi maupun program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi), dan ACF (pembagian pangan, air dan program sanitasi, serta pembagian bibit dan peralatan pertanian). Di antara cukup banyak LSM internasional yang datang ke Maluku, Mercy Corps International (MCI) tercatat karena aktivitasnya dalam meningkatkan kemampuan LSM daerah di Maluku. Ia juga melaksanakan program air dan sanitasi dan menyelenggarakan workshop tentang cara menghadapi bahaya. Dalam bidang pengembangan komunitas, MCI menyalurkan kredit kecil, menyelenggarakan pelatihan usaha kecil dan manajemen usaha bagi LSM daerah. Ia juga mendorong pembentukan pusat LSM di kota Ambon, memberikan tempat netral bagi LSM asing untuk bekerja. Di Maluku Tengah, International Medical Corps (IMC) membantu pengaktifan kembali rumah sakit yang rusak karena kerusuhan dan mendirikan klinik darurat pada bulan Agustus 2001. Keberadaan rumah sakit semakin melicinkan jalan rekonsiliasi antara kedua komunitas itu.

Ketika insiden kekerasan telah menurun dan keadaan darurat telah mereda, banyak LSM dan LSM internasional mengubah aktivitasnya menjadi aktivitas menciptakan dan meningkatkan perdamaian. Semakin banyak LSM yang menghimpun berbagai etnik dan kelompok agama di bawah program dan kegiatan yang sama. Setelah deklarasi Malino, banyak LSM daerah terlibat dalam upaya meningkatkan perdamaian dan kerukunan. Sebagiannya

menjadi jembatan penghubung antara negara dan masyarakat sipil.

Pengalaman kinerja LSM di Maluku selama empat tahun terakhir mencuatkan beberapa isu untuk menjadi bahan pelajaran. Pertama, menyangkut hubungan antara LSM dan pemerintah daerah maupun perbedaan gaya kerja dan budaya berorganisasi yang terkadang menimbulkan kesulitan. LSM di Maluku kadang kala harus menghadapi berbagai aturan yang dibuat oleh birokrasi daerah, yang berupaya menangguk keuntungan dari programnya seperti yang dilakukannya ketika melaksanakan proyek-proyek pembangunan pada masa damai. Kedua, lemahnya pembinaan terhadap kinerja LSM di berbagai kawasan konflik seperti Maluku. LSM daerah merasa menjadi aktor penting dalam pendidikan masyarakat dan katalisator perubahan damai di Maluku. Namun untuk mencapai keberhasilan, mereka membutuhkan keahlian dan pengetahuan tentang manajemen konflik, pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat. Ketiga, LSM perlu berterus terang terhadap apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang tidak dapat mereka lakukan di Maluku guna mencegah timbulnya dugaan yang tak beralasan. Citra LSM sebagai lembaga pemberi bantuan terhadap masyarakat harus dihindari.

Prospek

Pemerintahan yang tak berdaya, pemerintah pusat yang lemah, demoralisasi, terpecah-belah, aparat keamanan yang tidak tegas, campur tangan asing, dan ketegangan sosial yang tak terkendali sebagai akibat perubahan kependudukan, sama-sama mendorong munculnya kekerasan komunal yang tragis di Maluku.

Meski pemerintahan Megawati akhirnya berhasil menghimpun berbagai kelompok untuk menciptakan Deklarasi Malino, namun dasar-dasar kesepakatan ini tidak berhasil diwujudkan. Kegagalan ini bermula dari beberapa sumber: pemerintah pusat gagal menuangkan tekad yang kuat bagi pelaksanaan deklarasi Malino, masyarakat terlanjur porak poranda sehingga tak dapat bekerja sama untuk mewujudkan kesepakatan ini, dan pemerintah daerah maupun wakil-wakil masyarakat tidak membuat rincian hubungan

kerja antara mereka sendiri. Batas akhir penyerahan senjata yang ditetapkan oleh PSDM (Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku) sebenarnya adalah tanggal 31 Maret 2002. Akan tetapi, ini tidak dapat dilaksanakan sehingga kebanyakan senjata masih tetap berada di tangan masyarakat. Rasa takut yang berlebihan telah menghalang-halangi rakyat, khususnya kaum muda, untuk menyerahkan senjata mereka, dan tak ada upaya yang berarti untuk mengatasi persoalan ini. Kesepakatan Malino juga ditentang oleh beberapa kelompok. Pada tanggal 1 Maret 2002, Forum Perempuan Muslim Baguala melancarkan protes terhadap stasiun Radio Suara Perjuangan Muslim Maluku. Mereka juga menuduh stasiun TVRI Ambon dan RRI Ambon sebagai melakukan perbuatan propokatif pada masa konflik dan menuntut dihentikannya kegiatan kedua stasiun tersebut. Kemudian menjadi jelas, terlepas dari tidak adanya kekerasan paling mutakhir, keadaan tetap seperti api dalam sekam.

Isu lain yang muncul di Maluku pasca-Malino adalah kembalinya para pengungsi hanya untuk menyaksikan rumah mereka telah ditempati oleh penghuni baru. Ini sering kali memicu konfrontasi dan menjadi sumber potensi kekerasan. Juga ada kasus-kasus di mana kelompok tertentu tidak mengizinkan kelompok agama lain untuk kembali ke desa mereka. Oleh karena itu, isu-isu tersebut harus diatasi jika perdamaian dan stabilitas ingin dipulihkan.

Rekomendasi

- Pemerintah pusat dan daerah harus menekankan pelaksanaan deklarasi Malino khususnya dengan menguraikan pernyataannya yang bersifat umum dan menyusun langkah-langkah nyata untuk mengawasi pelaksanaan tersebut. Penekanan khusus harus diberikan kepada beberapa prinsip misalnya kerukunan, toleransi, belas kasih, keadilan dan kebenaran yang tercantum di dalam deklarasi itu. Pemukiman kembali para pengungsi yang dimandatkan oleh deklarasi Malino harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif.

- Rancangan pola baru dan yang telah direvisi harus diciptakan. Masih banyak orang yang meyakini lembaga tradisional pola merupakan kesepakatan persekutuan dan kerja sama yang melibatkan berbagai desa. Penting pula mempertimbangkan potensi pola sebagai mekanisme daerah untuk mengendalikan konflik. Pola dapat pula diubah dan diperkuat agar menjadi sistem persekutuan yang melibatkan berbagai desa tanpa memandang latar belakang agama dan etnik penduduk di desa-desa tersebut. Dengan menjadikan kawasan hunian sebagai dasar persekutuan dan bukan agama atau etnisitas, lembaga tradisional itu dapat diselaraskan dengan keadaan baru di Maluku.
- Pola Waiyame harus ditiru. Berbeda dengan sistem pola yang memusatkan perhatian terhadap kerja sama antar-desa, pola Waiyame cocok bagi pengendalian konflik pada tingkat pedesaan.
- Kota Ambon, dengan dua kecamatannya Sirimau dan Nusaniwe harus diperlakukan secara khusus. Sebagai sebuah kawasan urban di mana pengaruh pemimpin tradisional semakin melemah, dan norma-norma dan adat istiadat tradisional kurang berpengaruh terhadap penduduk, kota itu membutuhkan bentuk penataan lain yang didasarkan atas partisipasi masyarakat sipil, pemimpin agama, polisi dan pemerintah daerah.
- Reformasi kepolisian harus dilaksanakan. Polisi di Maluku terlibat korupsi, kurang terlatih, bergaji rendah, tidak disiplin, dan menyalahgunakan wewenang. Akan tetapi, polisi wajib menjaga hukum dan ketertiban serta melindungi penduduk di Maluku. Perubahan mendasar dibutuhkan di dalam organisasi kepolisian. Polisi harus memerhatikan peran mereka di dalam masyarakat—bukan hanya sebagai aparat keamanan dan penegak hukum namun juga sebagai “pemecah persoalan.” Keahlian, pengetahuan dan cara menangani masyarakat, khususnya masyarakat pasca-konflik, harus ditingkatkan di kalangan angkatan kepolisian di Maluku.
- Reformasi institusi militer harus semakin ditingkatkan. Selama

konflik, jumlah tentara yang ditugaskan ke Maluku jauh lebih besar daripada jumlah aparat kepolisian. Pada pertengahan tahun 2002, jumlah tentara (lebih dari 4100 personil) di Ambon mencapai kelipatan empat dari jumlah polisi. Pada tingkat propinsi, ada 1.5 bataliyon polisi dan 10 bataliyon tentara. Banyak anggota militer yang korup dan tidak disiplin. Banyak bukti bahwa personil angkatan khusus tentara terlibat dalam menghasut kekerasan menjelang, dan tak lama berselang setelah, kesepakatan Malino. Tentara juga memulihkan status kantor pusatnya di Maluku. Sebagai akibatnya, tentara memainkan peran yang lebih besar dalam menangani masalah-masalah keamanan di Maluku, meski kewenangan resmi berada di tangan pihak kepolisian. Ketika Indonesia bertekad untuk melaksanakan program demiliterisasi, kebalikannya justru terjadi di Maluku sehingga reformasi militer dan politik mengalami kemunduran. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mengurangi peran militer di Maluku dan memperbaiki kinerja personil tentara harus dikedepankan.

Catatan

¹ Dieter Bartels, "Your God Is No Longer Mine," 2000, makalah yang tidak diterbitkan, h. 6.

² International Crisis Group *Briefing Paper*, "Indonesia's Maluku Crisis: The Issues," Jakarta/Brussels, 19 Juli 2000, h. 2.

³ Data statistik ini berasal dari jumlah sensus resmi SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) tahun 1991, 1985 dan 1990.

⁴ Bartels, "Your God Is No Longer Mine," 2000, makalah yang tidak diterbitkan.

⁵ Lance Castles, "Census Data in Time-Depth Which May Be Relevant to the Conflicts in Maluku," makalah yang tidak diterbitkan, h. 1-2.

⁶ Human Rights Watch, "Indonesia: The Violence in Ambon", h. 9.

⁷ International Crisis Group *Briefing Paper*, "Indonesia's Maluku Crisis: The Issues," Jakarta/Brussels, 19 Juli 2000, h. 2.

⁸ Bartels, h. 21.

⁹ UNSFIR (United Nations Support for Indonesia's Recovery) di Jakarta sedang menyusun database yang berkaitan dengan seluruh tujuan ini.

¹⁰ Lihat Pemerintah Darurat Sipil, *Laporan Konflik Maluku*, Ambon, November 2002. Menurut laporan ini, yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Militer, 902 dari 1189 (77.4%) peristiwa kekerasan yang terjadi di Maluku sejak awal 1999 hingga Nopember 2002 meletus di Kota Ambon. Selain itu, 726 dari 1359 (53.4%) kekerasan yang menelan korban jiwa terjadi di Kota Ambon. Angka-angka mengenai kerusakan harta benda juga mengungkapkan konsentrasi di Kota Ambon menyangkut: pengrusakan, pembakaran atau pemusnahan rumah (2320 dari jumlah total 6488 atau 35.75%); gereja (18 dari 66 atau 27.3%); masjid (15 dari 36 atau 57.7%); toko dan kios (213 dari 243 atau 87.6%); dan bangunan milik pemerintah (15 dari 22 atau 68%).

¹¹ Pemerintah Darurat Sipil Maluku, *Laporan Konflik Maluku*, Ambon, Nopember 2002, Tabel 1.1.a., Tabel 1.2.a., Tabel 1.3.a., dan Tabel 1.4.a., dalam Apendiks.

¹² International Crisis Group, "Indonesia: The Search for Peace in Maluku," ICG Asia Report No. 31, 8 Februari 2002, h. 21.

¹³ Pemerintah Darurat Sipil Maluku, *Laporan Konflik Maluku*, Ambon, Nopember 2002, h. 83-84.

¹⁴ Muhammad Najib Azca, "The Role of the Security Forces in Communal Conflict: The Case of Ambon" Tesis Master, Faculty of Asian Studies, Australian National University, Juli 2003.

¹⁵ Chris Wilson, "Examining the Successful Reconciliation Process in North Halmahera," laporan penelitian awal yang tak diterbitkan.

¹⁶ Mengenai Laskar Jihad lihat Kirsten Schulze, "Laskar Jihad and Conflict in Ambon", Spring 2002, vol. IX, Issue I, online pada www.Watsoninstitutue.org/bjwa/archive/9.1./Indonesia/Schulze.pdf.

¹⁷ Ia dibubarkan pada pertengahan tahun 2003.

¹⁸ Pemerintah Darurat Sipil Maluku, *Laporan Konflik Maluku*, Ambon, Nopember 2002, Tabel 2.1.b., Tabel 2.2.b., Tabel 2.3.b., dan Tabel 2.4.b.

¹⁹ Pemerintah Darurat Sipil Maluku, *Laporan Konflik Maluku*, Ambon, Nopember 2002, Tabel 2.1.b., Tabel 2.2.b., Tabel 2.3.b., dan Tabel 2.4.b.

²⁰ Nick Mawdsley, Monica Tanuhandaru, dan Kees Holman, *Report of*

the EC Conflict Prevention Assessment Mission Indonesia (The European Commission, Maret 2002), h. 71. Sebuah tim peneliti yang disponsori oleh UNDP dan UNSFIR di Maluku dan Maluku Utara yang ikut serta menyusun statistik bencana dan kerusakan.

²¹ Pemerintah Darurat Sipil Maluku, *Laporan Konflik Maluku*, Ambon, Nopember 2002, Apendiks, Tabel 8.

²² Pemerintah Darurat Sipil Maluku, *Laporan Konflik Maluku*, Ambon, Nopember 2002, h. 21-23.

²³ Pemerintah Darurat Sipil Maluku, *Laporan Konflik Maluku*, Ambon, Nopember 2002, h. 10-11.

²⁴ *Consolidated Inter-Agency Appeal for the Maluku Crisis*. The United Nations, 2001.

²⁵ Bartels, "Your God," h. 9.

²⁶ Lembaga tradisional lainnya adalah *gandong*. Jika pela merupakan persekutuan berdasarkan perjanjian, *gandong* didasarkan atas ikatan leluhur dan keturunan. Dua desa yang terikat oleh *gandong* yakin bahwa mereka mempunyai leluhur yang sama.

²⁷ Bartels, "Your God," h. 10.

²⁸ Bartels, "Your God," h. 14.

²⁹ ICG, "Maluku Crisis," h. 2.

³⁰ M. Shaleh Putuhena, "Kerusuhan Maluku. Pengalaman dan Renungan dari Makassar," dan R.Z. Leirissa, "'Encounter' sebagai Mekanisme Gerakan Baku Bae, Maluku," dalam Ichsan Malik, et al., *Baku Bae. Breaking the Violence with Compassion* (Jakarta: Yappika, 2003).

³¹ *Tempo* 25-31 Desember 2001.

³² Christopher W. Moore, "Developing A Village-Level Conflict Management System to Handle and Resolve Religious Conflict: The Waiyame Experience in Ambon, Indonesia," tidak diterbitkan, 2001.

³³ Paul Jeffrey, "Building Peace in Indonesia: Religion is Both a Help and a Complication as Country Struggles with New Democracy," *National Catholic Reporter*, 6 Juni 2003.³⁴ Nick Mawdsley, Monica Tanuhandaru, dan Kees Holman, *Report of the EC Conflict Prevention Assessment Mission Indonesia* (The European Commission, Maret 2002), h. 30.

³⁵ *Kompas*, 8 September 2001.

³⁶ *Forum Keadilan*, No. 15, 15 Juli 2001.

³⁷ *Forum Keadilan*, No. 15, 15 Juli 2001.

³⁸ *Koran Tempo*, 28 September 2001.

³⁹ Joint Committee of Baku Bae Maluku, *The Community-Based Reconciliation Process of Baku Bae in Maluku*, Bogor, 2001.

⁴⁰ *The Jakarta Post*, 20 Maret 2001.

⁴¹ *The Jakarta Post*, 20 Maret 2001.

Laporan-laporan

Human Rights Watch

“Indonesia: The Violence in Ambon,” Maret 1999.

“Mollucan Islands Communal Violence in Indonesia,” Juni 2000.

International Crisis Group

“Indonesia: Overcoming Murder and Violence di Maluku,” *ICG Asia Report* No. 10 Jakarta/Brussels, 19 Desember 2000.

“Indonesia: The Search for Peace in Maluku,” *ICG Asia Report* No. 31, 8 Februari 2002.

Makalah Pendek “Indonesia’s Maluku Crisis: The Issues,” Jakarta/Brussels, 19 Juli 2000.

European Commission Conflict Prevention Assessment Mission

“Indonesia”. Oleh Nick Mawdsley, Monica Tanuhandaru, Kees Holman, Maret 2002.

Projek Matabajak

“Indonesia-Molucca Islands (1999-first combat deaths)”, *Armed Conflict Report* 2002, revisi mutakhir: Januari 2002, www.ploughshares/content/ACR/ACR00/ACR00-IndonesiaMoluccaIslands.html.

United Nations Inter-Agency.

Appeal for the Maluku Crisis, Jakarta, Maret 2000.

United Nations

Consolidated Inter-Agency Appeal 2001.

Publikasi

George Junus Aditjondro, *Guns, Pamphlets, and Handy Talkies: How the Military exploited local ethni-religious tensions in Maluku to preserve their political dan economic privileges*, Makalah revisi dalam rangka menyambut Konferensi tentang “Conflicts and Violence in Indonesia”. Diselenggarakan oleh Institute of Southeast Asian Studies, Department of African and Asian Studies, Humbolt-University di Berlin, 3-5 Juli 2000.

Dieter Bartels, “Pela and the Failure of Reconciliation,” *Maluku World Wide* (27 Juli 2000), www.geotics.com/chosye/Paper/Dieter-Bartels.htm.

R. William Liddle, “Indonesian Political Developments and Their Implications for the U.S., With Special Reference to Maluku Crisis”, Makalah disampaikan kepada United States Commission on International Religious Freedom, Hearing on the Maluku Islands, Washington D.C., 13 Februari 2001. [www.geotics.com /Paper/William-Liddle.htm](http://www.geotics.com/Paper/William-Liddle.htm).

Dan Murphy, “Why Local Conflicts Becomes Indonesia’s National War,” *The Christian Science Monitor*, 20 September 2000. www.csnweb2.emcweb.com/durable/2000/09/20/p8s1.htm.

Atlas Maluku. Utrecht: Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, 1998.

Dieter Bartels, 2000, “Your Lord Is No Longer Mine,” makalah yang tidak diterbitkan.

Robert William Hefner, “Islam and Asian Security,” *Strategic Asia 2002-2003: Executive Summary*, The National Bureau of Asian Research.

Paul Jeffrey, “Building peace in Indonesia: religion is both a help and a complication as country struggles with new democracy,” *National Catholic Reporter*, 6 Juni 2003.

Ichsan Malik, et. Al., 2003, *Bakube. Breaking the Violence with Compassion*, Jakarta.

Ichsan Malik, 2003, *The Community Based Movement for Reconciliation Process in Maluku*, Jakarta; Bakubae Maluku.

Christopher W. Moore, *Developing A Village-Level Conflict Management System to handle and Resolve Religious Conflicts: The Wayame Experience in Ambon, Indonesia*, 2001.

Gerry van Klinken, "The Maluku War: Bringing Society Back In," *Indonesia* (Cornell University), vol. 71, April 2001.

Situs Internet Pilihan

www.websitereg.com/ambon/index.html

<http://www.hawaii.edu/cseas/conf/links.html>

Organisasi

Institut Arus Informasi

Jl. Utan Kayu No. 68 H

Jakarta 13120

Tlp: +62 21 857 3388 ext. 125.

Fax: +62 21 856 7811.

Kantor Berita Radio 68 H

Jl. Utan Kayu No. 68 H

Jakarta 13120

Tlp: +62 21 857 3388 ext. 125

Fax: +62 21 857 3387

Mercy Corps

Aman's Building

Jl. Pantai Mutiara No. 53

Ambon.

Tlp: +62 911 315 390

Fax: +62 911 315 391

United Nations Support Facility for Indonesian Recovery
(UNSFIR)

Gedung Surya Lt. 9

Jl. M.H. Tamrin Kav. 9

Jakarta 10350

Tlp: +62 21 392 4320

Fax: +62 21 392 1152

Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN)

Ambon

Hubungan Pribadi: Bai Tualeka

Tlp: +62 911 314 176

E-mail: bai_lmb@yahoo.com

Forum Komunikasi Nusaniwe-Sirimau (Forkonussi)

Ambon

Hubungan Pribadi: Cony Lelapari

Tlp: +62 911 351 854

Bakubae Maluku Movement

Jl. Mendur No. 3

Jakarta Pusat

Tlp/Fax: +62 21 315 3865

E-mail: bakubaemaluku@hotmail.com

Narasumber

M. Adnan Amal, Maluku Utara. Tlp: +62 921 24011

Dieter Bartels, www.geocities.com/chosye/Paper/Dieter-Bartels.htm

Gerry van Klinkes, e-mail: gerryvk@ykt.mega.net.id:
editor@insideindonesia.org

Ichsan Malik, Baku Bae Movement, e-mail: bagjanet@indo.net.id

Imam B. Prasodjo, Department of Sociology, Faculty of Social and
Political Sciences, University of Indonesia, e-mail: budi@dnet.net.id

Tamrin Amal Tomagola, Jakarta.

Daniel Springga, Departemen Sosiologi Fisip Universitas Airlangga, Jl.
Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya. Tep. +62 31 503 4015 ext.
262

M. Najib Azca, e-mail: najibazca2002@yahoo.com.au

Arifah Rahmawati, e-mail: arifah.rahmawati@cspu-ugm.or.id

Lambang Trijono, e-mail: lambang@cspu-ugm.or.id

Konrad Hurber, e-mail: konrad_huber@unicef.org

Papua Barat: Menciptakan Perdamaian dengan Cara Memahami Konflik

Yohanis G. Bonay dan Jane McGrory

Konflik di Papua Barat telah berlangsung selama 40 tahun. Pada umumnya, ia merupakan konflik dalam arti tradisional: ada bentrokan antara gerakan separatis bersenjata dan pasukan pemerintah. Tetapi, konflik di Papua Barat juga bersemayam di dalam struktur yang timpang yang berpengaruh terhadap setiap aspek dan bagian masyarakat. Tidak adanya perdamaian di Papua pada masa sekarang bersumber dari penolakan terhadap aspirasi orang Papua untuk merdeka melalui integrasinya ke dalam Republik Indonesia pada 1963. Perdamaian hakiki hanya dapat dicapai

melalui penanganan konflik yang berkaitan dengan kedaulatan dan kemerdekaan orang Papua, yang dilakukan bersama proses penciptaan perdamaian dengan mengubah struktur konflik dan membangun dasar-dasar masyarakat damai.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, propinsi Papua disebut Irian Jaya. Pada masa kekuasaan Belanda, yakni sebelum menjadi bagian Indonesia, ia disebut Nieuw Guinea. Baru pada tanggal 1 Januari 2000, Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, setuju menggunakan “Papua” sebagai nama resmi propinsi itu.¹ Keputusan ini sangat penting artinya bagi masyarakat pribumi di Papua. Mereka memandang keputusan itu sebagai tanda pengakuan terhadap rakyat Papua dan keberadaan mereka sebagai sebuah bangsa.

Sejak abad ke-18, pulau Pasifik Selatan Papua telah menjadi korban ambisi penjajahan, dan pernah dikuasai oleh Inggris, Jerman, Belanda dan Jepang. Separuh bagian barat Papua tetap berada di bawah pemerintahan Belanda bahkan setelah kawasan lain Hindia Belanda berada di dalam kedaulatan Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Baru pada tahun 1950-an, pemerintah Belanda mulai melepaskan kekuasaannya atas bagian akhir dari bekas kerajaannya di Asia Pasifik. Orang-orang Belanda menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Papua melalui proses dekolonisasi menuju kemerdekaan.

Pemerintah baru Republik Indonesia memandang kebijakan Belanda bagi kemerdekaan Papua sebagai siasat licik untuk melanggengkan kekuasaan kolonial Belanda di Pasifik. Pada tanggal 19 Desember 1961, dengan tujuan mengusir Belanda dan membangun klaim kedaulatannya terhadap seluruh wilayah yang pernah dijajah pemerintah Hindia Belanda, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengumandangkan rencana militer untuk mengembalikan Papua Barat (kemudian disebut Indonesia sebagai Irian Barat). Invasi militer Indonesia terhadap Papua Barat menarik perhatian internasional di tengah-tengah kecemasan Perang Dingin. Amerika Serikat kemudian menjadi makelar, yang berupaya menarik simpati Indonesia dan menjaga agar Jakarta tidak masuk

ke dalam sumbu Soviet. Melalui perjanjian ini—yakni Perjanjian New York—Papua Barat berada di bawah pemerintahan sementara PBB, yang disebut United Nations Temporary Executive Authority in West New Guinea (UNTEA), pada bulan Oktober 1962. Kawasan itu akhirnya diserahkan ke tangan Indonesia pada bulan Mei 1963 dengan perjanjian bahwa PBB mengawasi jalannya referendum yang mengizinkan rakyat Papua untuk memutuskan apakah mereka akan menjadi bagian dari negara kesatuan Indonesia atau memerdekakan diri pada 1969. Referendum ini disebut “Akta Bebas Memilih” (Act of Free Choice).

Untuk melaksanakan Act of Free Choice, Jakarta menetapkan untuk menunjuk badan musyawarah yang dapat mewakili rakyat Papua Barat. Dengan secara cermat membentuk sebuah lembaga yang beranggotakan 1025 “perwakilan” Pro-Indonesia, Indonesia mengubah referendum itu menjadi “akta tanpa pilihan”. Karena diintimidasi dan diancam, lembaga itu mendukung integrasi dengan Indonesia. Kebringasan dan teror juga membungkam orang-orang yang memprotes cara-cara yang merugikan hak kemerdekaan rakyat Papua.

Mayoritas rakyat Papua memandang aneksasi Indonesia atas Papua tidak sah. Mereka melawan pemerintah Indonesia karena mengingkari hak mereka untuk merdeka. Sebagai jawabannya, pemerintah Indonesia bertindak keras, dan dimulailah konflik yang tetap berlanjut hingga kini. Setidak-tidaknya ada empat dimensi kekerasan:

- Konflik terbuka antara kaum separatis bersenjata—Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM)²—dan militer Indonesia.
- Kekerasan negara terhadap penduduk sipil sebagai akibat operasi militer dan sikap keras aparat negara terhadap penolakan rakyat sipil atas pemerintah Indonesia.
- Kekerasan struktural melalui sistem ekonomi, politik, sosial dan kezaliman budaya yang meminggirkan rakyat Papua dan melindungi kekuasaan pemerintah Indonesia.
- Konflik komunal antara berbagai kelompok agama, etnik dan

sub-etnik.

Setiap dimensi konflik ini bersumber dari satu akar penyebab: pengingkaran hak rakyat Papua untuk merdeka. Tetapi dalam mencermati kewajiban menciptakan perdamaian di Papua, yang penting adalah bukan hanya bagaimana akar penyebab konflik ini dapat “diatasi”, namun juga bagaimana akibat dan dampak akar penyebab ini dapat digunakan untuk menciptakan perdamaian yang adil dan langgeng

Dinamika Konflik Konflik Terbuka

Sejak tahun 1965, sudah ada konflik terbuka antara sekelompok kecil kaum separatis bersenjata (TPN/OPM) dan pasukan keamanan Indonesia.³ Militer Indonesia telah melaksanakan berbagai operasi militer, khusus untuk menumpas “pemberontakan kaum separatis.”⁴ Demi tujuan ini, sejumlah 60,000 tentara dikirim ke Papua Barat dari tahun 1967 hingga tahun 1972.⁵ Perhitungan mutakhir atas jumlah personil militer dan polisi mencapai angka 15,000-20,000.⁶ Personil TPN/OPM, sementara itu, kira-kira berjumlah 1600,⁷ termasuk di dalamnya satuan-satuan yang menempuh jalan non-kekerasan.⁸

Meski TPN/OPM tak pernah menjadi ancaman serius terhadap pasukan ABRI/TNI yang kuat, namun aktivitas mereka telah memperkuat alasan untuk melakukan militerisasi yang meluas di Papua Barat. Kehadiran pasukan keamanan di Papua Barat dan modus operandi mereka tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik dan ekonomi mereka. Secara politik, kepentingan militer terlindungi oleh “ancaman terhadap kesatuan nasional”, yang menyokong posisi militer dalam politik nasional. Secara ekonomis, kehadiran militer tak dapat dipisahkan dari kepentingan bisnis tentara Indonesia. Ini mencakup penebangan kayu ilegal, perlindungan terhadap instalasi komersial yang penting, perdagangan hewan liar yang dilindungi, dan sebagainya. Pendapatan di luar anggaran dari berbagai kegiatan ini menjadi sumber penghasilan utama bagi minimnya anggaran negara yang

dialokasi bagi para aparat keamanan.⁹

Kekerasan Negara

Saat ini, ada dua bentuk kekerasan negara di Papua Barat. Pertama, korban rakyat sipil yang disebabkan oleh operasi militer yang dilakukan secara buruk dan brutal. Sejak tahun 1963, operasi militer Indonesia dalam menumpas TPN/OPM sering menimbulkan korban tewas dan luka-luka di kalangan rakyat sipil, pengusiran dan kerusakan harta benda.¹⁰ Di samping itu, operasi militer menciptakan budaya rasa takut, yang sering kali amat parah di kalangan masyarakat pedalaman.

Pola kedua kekerasan negara adalah respons terhadap gerakan politik bagi kemerdekaan Papua Barat. Aparat keamanan berupaya menumpas dan membungkam musuh-musuh pemerintah Indonesia dengan cara melanggar hak-hak asasi manusia. Statistik pelanggaran hak-hak asasi manusia pada masa rezim Orde Baru sulit diperoleh dan bahkan lebih sulit lagi untuk diverifikasi. Beberapa laporan mutakhir memperlihatkan daftar persoalan sebagai berikut:

- Penelitian oleh ELSHAM Papua Barat mencatat rata-rata 1000 kasus pelanggaran hak asasi manusia terjadi antara 1997 dan 2002.
- Laporan mutakhir Dewan Gereja Dunia kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa menyebutkan meningkatnya kasus pembunuhan tanpa proses peradilan pada periode 2000 hingga 2002, selain 838 kasus penahanan sewenang-wenang, interogasi dan penculikan.
- Human Rights Watch mencatat sekurang-kurang ada sebelas kasus yang di dalamnya banyak tentara diperintahkan untuk membubarkan unjuk rasa nasionalisme Papua selama tahun 1999 dan 2000, termasuk insiden di Biak, Nabire dan Merauke ketika militer menggunakan kekerasan untuk menurunkan bendera Papua “Bintang Pagi” yang menimbulkan banyak korban.¹¹

Salah satu tindak kekerasan khususnya yang melukai rasa

keadilan rakyat Papua adalah pembunuhan atas Theys Hiyo Eluay, pemimpin kemerdekaan dan ketua Papua Presidium Council (PPC) oleh militer Indonesia pada tanggal 11 Nopember 2001.

Ada lingkaran setan ketika gerakan protes dan penentangan umum justru malah meningkatkan kontrol pemerintah pusat terhadap Papua; perlawanan terhadap kontrol bertemu dengan kontrol terhadap perlawanan. Kekerasan negara dewasa ini sangat berpengaruh terhadap rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.¹²

Kekerasan Struktural

Pemerintah Indonesia melakukan sistem kekerasan struktural di Papua yang menimbulkan kerugian ekonomi, politik, sosial dan budaya rakyat Papua.¹³ Kekerasan struktural ini telah menciptakan ketimpangan hubungan kekuasaan dan peluang hidup antara rakyat Papua dan bukan-Papua.

Meski merupakan propinsi terkaya dari segi sumber daya alam, Papua justru menjadi propinsi paling miskin di Indonesia. Rakyat Papua memperoleh kesempatan pendidikan, layanan kesehatan dan media yang lebih rendah dibandingkan dengan seluruh daerah lain di Indonesia.¹⁴ Selain itu, sebelum peraturan otonomi khusus diterapkan, orang-orang bukan-Papua mendominasi jabatan dalam birokrasi pemerintah, khususnya untuk jabatan tinggi.¹⁵ Sedikit sekali wakil Papua yang duduk di dalam bagian eksekutif dan legislatif pemerintah, maupun di dalam angkatan militer dan kepolisian. Bisnis besar biasanya dikuasai oleh para investor dari luar Papua. Kaum pendatang menguasai sektor komersial daerah.¹⁶ Rakyat Papua merasa kecewa, sebab mereka hanya menjadi warga negara kelas dua yang hanya duduk menyaksikan bisnis sumber alam yang diambil dari tanah mereka.

Nyaris selama 40 tahun—baru reformasi otonomi saat ini yang menaikkan APBD Propinsi Papua—pemanfaatan pendapatan ekonomi pada umumnya disalurkan langsung ke Jakarta. Papua benar-benar tidak mendapat berkah pembangunan. Kesejahteraan ekonomi rakyat Papua terpuruk akibat penguasaan lahan tradisional

dan merosotnya budaya penduduk asli. Kerusakan tak terperikan menimpa lingkungan hidup. Contohnya adalah penambangan emas dan batubara PT Freeport di Mimika, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan sosial dalam usaha penambangan emas yang konon terbesar di dunia.¹⁷

Pemerintah Indonesia telah berusaha “memperadabkan” rakyat Papua, yang digambarkan sebagai masyarakat yang primitif, untuk membuat orang Papua berpikir, berbuat dan berpenampilan seperti “orang Indonesia.” Berbagai upaya “pengindonesiaan”, dengan melarang pakaian tradisional Papua, menghapuskan pemerintahan tradisional, maupun membatasi upacara dan simbol-simbol tradisional, telah menghilangkan jati diri penduduk asli Papua. Runtuhnya nilai-nilai dan sistem tradisional telah menimbulkan berbagai masalah sosial di kalangan masyarakat Papua, termasuk alkoholisme, runtuhnya etika kerja dan kekerasan domestik.

Haruslah dicatat bahwa tingkat kekerasan struktural mulai berubah karena adanya reformasi otonomi yang diperluas, yang telah memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk bekerja di kantor pemerintah propinsi maupun kabupaten. Berbagai upaya “Papuanisasi” birokrasi baru-baru ini telah mendorong rakyat Papua berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Tetapi, kenyataannya menyedihkan sebab terbukti bahwa rakyat Papua dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh kultur birokrasi yang egois dan cari untung seperti para pendahulu mereka. Meski otonomi daerah ditujukan untuk menghindari kekerasan struktural, namun struktur ketidakadilan dan kekurangberuntungan telah terlanjur mengekalkan dirinya. Proses panjang pendidikan dan pelatihan dibutuhkan untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi dan sosial itu.

Konflik Komunal

Wajah demografis Papua berubah drastis sejak Papua berintegrasi ke dalam wilayah Indonesia, khususnya melalui kedatangan kaum transmigran yang berasal dari berbagai daerah

di Indonesia.¹⁸ Akibat transmigrasi, baik yang merupakan program pemerintah maupun swakarsa, sejumlah besar etnik Melayu, Jawa dan Bugis dari wilayah Barat Indonesia datang ke suatu komunitas yang secara etnik benar-benar orang Melanesia, pada saat integrasi. Sementara banyak kaum pendatang beragama Islam, penduduk asli Papua pada umumnya beragama Protestan atau Katolik. Di samping itu, kaum pendatang sering kali memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi daripada penduduk asli Papua. Perbedaan dalam etnisitas, agama dan status sosio-ekonomi ini telah menjadi sumber masalah di dalam masyarakat Papua kontemporer.

Penting pula diperhatikan bahwa baik penduduk asli Papua maupun pendatang tidak bersifat homogen dan monolitik. Ada perbedaan kultur yang mencolok di antara lebih dari 250 kelompok sub-etnik Papua, khususnya antara suku yang tinggal di daerah pesisir dan di daerah pedalaman. Di antara kaum pendatang, juga ada banyak perbedaan dan sebagian “kaum pendatang” telah menetap di Papua Barat selama beberapa generasi. Tetapi, sulit mengingkari bahwa isu jati diri di Papua adalah rumit. Kesadaran terhadap jati diri etnik dan sentimen primordial merebak di kalangan masyarakat Papua. Pandangan miring selalu ada dan kecurigaan antara berbagai kelompok etnik dan sosial, tinggi. Ini sekurang-kurangnya menimbulkan dua pola konflik komunal; a) konflik sosial antara berbagai kelompok etnik/agama, dan b) manipulasi perbedaan atau ketegangan etnik/agama demi kepentingan politik tertentu.

Contoh-contoh konflik yang bersifat komunal antara lain adalah terjadinya beberapa kali pertikaian antar-etnik di pasar-pasar Jayapura selama tahun 2000.¹⁹ Dalam kejadian ini, ketimpangan ekonomi menimbulkan kebencian dan kecemburuan sosial orang-orang Papua terhadap kaum pendatang. Karena tidak adanya mekanisme untuk menengahi atau mengatasi ketegangan ini, orang Papua melakukan tindak kekerasan. Konflik, ketegangan dan polarisasi antara berbagai kelompok etnik merupakan bukti ketidakadilan ekonomi; tekanan vertikal, misalnya struktur

ketimpangan ekonomi yang timbul akibat berbagai kebijakan pemerintah, menciptakan “keretakan” di dalam masyarakat, dan mengejawantah sebagai konflik kekerasan di sepanjang garis komunal.

Kedua, jelas bahwa sentimen etnik dimanipulasi dan dimanfaatkan demi tujuan politik tertentu. Sebuah kajian penting telah mencatat dinamika konflik antara orang Papua dan kaum pendatang di kota pegunungan Wamena pada tahun 2000, yang mengakibatkan lebih dari 30 orang tewas (7 orang Papua dan 24 orang pendatang²⁰), 10,000 orang kehilangan tempat tinggal dan merebaknya tindakan pengrusakan terhadap harta benda. Kajian itu menemukan bahwa meski konflik ini telah sering kali dijelaskan sebagai meledaknya sentimen kesukuan, ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa ia didalangi oleh militer berlatar menentang kepentingan elit politik.²¹ Baru-baru ini, dugaan menjadi semakin kuat bahwa kemungkinan konflik antar-agama dipicu oleh kedatangan kelompok milisi Islam, Laskar Jihad, di Papua Barat. Ada dugaan bahwa dukungan para petinggi militer terhadap Laskar Jihad dapat mencerminkan strategi untuk sengaja memicu konflik agama dan menciptakan rasa tidak aman di Papua Barat demi menopang kepentingan politik kaum militer.²²

Situasi Saat ini

Situasi di Papua Barat dewasa ini ditandai oleh sikap politik yang tidak toleran terhadap aspirasi kemerdekaan, dan ini menimbulkan konflik aktual dan potensial. Konflik terbuka antara kelompok separatis dan angkatan bersenjata terus berlanjut, meski terkadang bersifat sporadis. Dan ketika kekerasan negara mungkin telah dibatasi oleh kebebasan media yang lebih besar, tindakan berani kaum militer membunuh pemimpin kemerdekaan, Theys Hiyo Eluay, menunjukkan bahwa cara brutal tentara tetap tak berubah. Kekerasan struktural terhadap penduduk asli secara umum masih tetap ada, meski sudah ada kebijakan otonomi khusus. Potensi konflik komunal pun masih tetap tinggi.

Menguatnya kembali sikap politik yang tidak toleran datang setelah periode singkat rasa optimis di kalangan rakyat Papua terhadap prospek kemerdekaan. Rasa optimis ini muncul sejak tahun 1999 ketika Presiden Habibie dan Presiden Wahid membuka peluang untuk berdialog mengenai aspirasi rakyat Papua. Presiden Wahid juga mengizinkan pengibaran bendera Bintang Pagi dan mengubah nama propinsi itu menjadi Papua—keduanya merupakan isyarat yang mempertebal harapan rakyat Papua untuk merdeka. Keterbukaan era ini ternyata tak pernah disokong niat tulus pemerintah Indonesia untuk benar-benar mempertimbangkan pemisahan Papua Barat dari Indonesia. Sungguhpun demikian, periode ini menjadi kilas balik bermakna di dalam perjuangan rakyat Papua. Pergerakan kemerdekaan berubah dari pemberontakan bersenjata yang terpecah-pecah menjadi gerakan politik luas yang benar-benar didasarkan atas pendekatan damai.

Pemerintah Indonesia juga berupaya meredakan aspirasi kemerdekaan rakyat dengan otonomi khusus. Otonomi khusus mendekati “masalah Papua” sebagai masalah pembangunan, dengan asumsi bahwa ia dapat diselesaikan dengan meningkatkan pendapatan dan pemerintahan yang tidak sentralistik. Reformasi itu juga telah menimbulkan konflik di kalangan rakyat Papua karena perbedaan pendapat terhadap isu otonomi khusus. Sebagian memandang otonomi khusus sebagai alternatif terbaik menurut keadaan saat ini dan mendukungnya dengan alasan bahwa otonomi yang diperluas bisa menjadi langkah pertama yang strategis menuju pemerintahan sendiri dan tujuan tertinggi kemerdekaan. Perlawanan terhadap otonomi khusus bersumber dari rasa tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, dan lahir karena pengalaman. Para penentang juga mengemukakan bagaimana tujuan rakyat Papua bagi rencana itu—yakni pemerintahan otonom yang diperluas—benar-benar termuat dalam musyawarah mengenai keputusan akhir, namun pada proses pengundangannya tidak menghargai hak rakyat Papua untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang secara langsung berpengaruh terhadap

kesejahteraan dan keamanan mereka.

Rentannya stabilitas sosial di Papua terbukti pada bulan Nopember 2003 ketika terbit sebuah keputusan di Jakarta untuk membagi Papua ke dalam tiga propinsi yang memicu kekerasan komunal di Timika, ibukota propinsi Irian Jaya Tengah yang baru. Pemecahan tersebut didasarkan atas peraturan yang terbit sebelum otonomi khusus dan umumnya dianggap bertentangan dengan semangat—jika bukan surat—peraturan otonomi khusus²³, yang menciptakan polarisasi antara para pendukung dan penentang keputusan itu. Bahkan sebelum pertikaian maut di Timika, kebijakan itu telah menimbulkan kontroversi. Yang jelas adalah bahwa ia tidak mewakili kepentingan rakyat Papua atau dikeluarkan melalui musyawarah dengan rakyat.

Akumulasi ketegangan struktural dan komunal selalu menjadi pemicu paling cepat terhadap potensi kekerasan dan konflik horisontal di kalangan masyarakat. Ini mengurangi posisi tawar rakyat, dan justru memperkuat kedudukan elite politik yang memaksakan “garis keras”. Rasa tidak aman memberikan peluang kepada pihak militer untuk memperluas cengkeramannya—sebuah keadaan yang dimanfaatkan selama pengundangan peraturan Otonomi Khusus dan undang-undang anti teroris.

Peran PBB

Ada kekecewaan meluas di kalangan aktivis Papua terhadap peran PBB. Rasa kecewa ini bersumber dari pandangan bahwa PBB tidak hanya gagal memberikan perhatian yang semestinya terhadap keadaan di Papua Barat, namun bahkan tidak memiliki rasa tanggung jawab karena keterlibatannya dalam perjanjian politik yang memprioritaskan integrasi. PBB, yang gagal menjalankan mandat internasional untuk menentukan kedaulatan Papua Barat, dikritik karena mengabaikan kewajibannya sebagai pengawas referendum untuk memastikan proses itu pada Akta Pilihan Bebas 1969.

Dengan mengabaikan isu pada sumber konflik, keterlibatan PBB di Papua Barat bertumpu pada pemberian bantuan.

Pembangunan masyarakat dan program kesejahteraan yang dijalankan oleh beberapa badan PBB memang telah membantu meredakan kekerasan struktural.²⁴ UNDP juga bekerja sama dengan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan para donor bilateral untuk memperbaiki standar pemerintahan, termasuk pelaksanaan Otonomi Khusus.²⁵ Kontribusi paling relevan dari kinerja berbagai organisasi internasional adalah pelatihan hukum kemanusiaan bagi personil militer dan polisi di Papua yang diselenggarakan oleh Komite Internasional bagi Palang Merah.

Organisasi Regional

Pemerintah regional cenderung memprioritaskan hubungan komersial, keamanan dan politik dengan Indonesia, dan ini mengabaikan setiap masalah kemanusiaan yang dapat mendorong badan-badan regional untuk mengambil pendirian politik tentang Papua Barat. Indonesia adalah anggota dua badan regional besar, ASEAN dan APEC, yang umumnya menghindari masalah-masalah politik yang sensitif di kalangan negara-negara anggota.

Salah satu organisasi regional yang melakukan upaya bermakna untuk meredakan konflik di Papua adalah Forum Kepulauan Pasifik. Pada masa lalu, forum itu kurang mendapatkan simpati di tingkat internasional menyangkut penderitaan rakyat Papua.²⁶ Negara-negara anggota, Nauru dan Vanuatu, memiliki peran besar untuk menarik perhatian regional terhadap perjuangan rakyat Papua.²⁷ Secara khusus, Vanuatu telah memperjuangkan agar Papua Barat dikembalikan kepada daftar dekolonisasi PBB dan minta dipertanyakan legalitas Akta Bebas Memilih dari Mahkamah Internasional.²⁸ Pemerintah di Port Vila juga telah mengizinkan Lembaga Presidium Papua dan OPM untuk membuka kantor perwakilan di Vanuatu.²⁹

Di luar kerangka organisasi Asia-Pasifik, pemerintahan regional (termasuk AS dan Australia) di masa lalu pernah menaruh perhatian terhadap tingkat kekerasan di Papua Barat.³⁰ Perdana Menteri Selandia Baru, Phil Goff, pernah menawarkan diri sebagai penengah untuk mengatasi konflik di Papua meski sebenarnya

tawaran ini menyatakan dengan jelas niatnya untuk menggali pilihan damai di dalam kerangka kedaulatan Indonesia.³¹

Upaya Penanggulangan Konflik

Selama pemerintahan Orde Baru di Papua, berbagai upaya resmi untuk “mengatasi konflik” mencakup operasi militer untuk menumpas separatisme dan kekerasan struktural untuk menyumbat cita-cita kemerdekaan rakyat. Pada awal era reformasi politik Indonesia 1998, strategi pemerintah memang beragam, namun tak ada yang berhasil menengahi tuntutan kemerdekaan atau menghapuskan penderitaan rakyat Papua.

Akhir rezim Soeharto dan cengkeraman tangan besinya atas Papua Barat telah menciptakan peluang berumur pendek bagi keterlibatan politik tingkat-tinggi atas cita-cita rakyat Papua. Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian/Papua (FORERI), yang beranggotakan banyak unsur masyarakat, memelopori tahapan awal “dialog nasional.” Forum itu memperjuangkan perspektif untuk mengurangi ketidakadilan di Papua dan memajukan dialog sebagai alternatif bagi konflik. FORERI juga menyelenggarakan pertemuan kelompok perwakilan rakyat Papua Barat, “Tim 100”, dengan Presiden Habibie pada tanggal 26 Februari 1999.

Namun tak lama setelah itu, dialog antara pemerintah Indonesia dan para pemimpin Papua menjadi “deadlock”. Dalam upaya mendapatkan momentum baru dalam musyawarah resmi, kongres rakyat Papua yang diselenggarakan pada bulan Mei/Juni 2001 sepakat untuk membentuk badan perwakilan baru, Lembaga Presidium Papua. LPP, yang beranggotakan 31 orang, memiliki mandat eksekutif dan bertugas menyelenggarakan “panel” 501 wakil dari sepuluh bagian masyarakat Papua (penduduk asli, kaum wanita, pemuda, para pendatang bukan-Papua, profesional, gereja, inter alia). LPP beroleh mandat dari kongres rakyat untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat atas nama rakyat Papua demi mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan empat arah kebijakan yang menyangkut: pelurusan sejarah; pembangunan agenda politik; menciptakan kerja sama dan rekonsiliasi di kalangan berbagai

kelompok di Papua; dan memajukan hak-hak penduduk asli.

Tetapi, LPP segera dicap oleh Jakarta sebagai kelompok politik separatis, yang secara efektif menutup pintu bagi “dialog nasional” dan prospeknya untuk menjalankan mandatnya. Saat ini, para anggota LPP menghadapi tekanan dan intimidasi politik di tengah merebaknya kembali sikap tidak toleran Jakarta terhadap kemerdekaan Papua. Peran LPP dalam diplomasi resmi di dalam negeri terhambat tidak hanya oleh sikap tak bersahabat Jakarta. LPP sendiri menghadapi sejumlah masalah dalam menjalankan mandatnya, dan banyak masalah itu mempersulit pembentukan lembaga perwakilan sebenarnya yang mencerminkan kepentingan lintas daerah Papua. Meski keanggotaan itu dipersatukan oleh cita-cita kemerdekaan mereka, ada berbagai silang pendapat mengenai bagaimana dan bilamana hal ini harus dicapai dan ini menghambat kemampuan LPP untuk memajukan agenda mereka. Tiga tahun setelah pembentukannya, sebagian orang mempersoalkan peran LPP dan kemampuannya untuk mewakili aspirasi rakyat Papua.

Tenggat singkat dialog nasional tentang isu Papua berakhir pada tahun 2001 dan muncul kembali represi politik. Pemerintah Indonesia disadarkan oleh kekuatan dan luasnya gerakan kemerdekaan yang tumbuh selama “musim semi Papua” dan menyikapinya dengan membatasi kebebasan berpolitik. Pada saat yang sama, pemerintah berupaya menangani masalah dengan program kesejahteraan luas dengan tujuan meyakinkan rakyat Papua yang enggan terhadap manfaat menjadi bagian negara Indonesia³² dan kemudian, dengan menawarkan Otonomi Khusus pada bulan Oktober 2001. Saat ini, ketika kebebasan sipil dan politik dibatasi, janji otonomi yang diperluas berdering di banyak telinga. Saat ini, prospek dialog terhambat oleh sikap saling tidak percaya kedua belah pihak. Menurut pengalaman rakyat Papua, konsesi dari Jakarta adalah janji-janji kosong yang sama sekali tidak membawa perubahan berarti dalam sikap ekonomi, sosial dan hukum mereka. Misalnya, kini Jakarta mengizinkan bendera dan lagu kebangsaan Papua, namun sebagai lambang budaya dan bukan lambang nasional. Di samping itu, meski Otonomi Khusus telah

meningkatkan hak pendapatan resmi Papua dari bisnis yang berhubungan dengan sumber alam di propinsi itu, namun ini tidak mengalir ke masyarakat Papua atau menciptakan peningkatan berarti dalam kesejahteraan sosio-ekonomi. Janji Jakarta menyangkut reformasi pemerintahan juga sulit diharapkan. 18 bulan setelah pelaksanaan Otonomi Khusus, hanya 10 persen reformasi yang telah dijalankan.³³ Jakarta gagal membentuk Majelis Rakyat Papua, sebuah majelis daerah yang beranggotakan kaum wanita, pemimpin agama dan pemimpin adat, dengan peran sebagai penasihat pada tingkat propinsi. Pembentukan majelis ini merupakan bagian penting dari Undang-undang Otonomi Khusus tahun 2003 untuk mendemokratisasikan pemerintahan daerah. Kegagalan Jakarta untuk menindaklanjuti pembentukannya bukan hanya merupakan kelemahan birokratis namun juga merupakan cermin ketidakpercayaannya terhadap rakyat Papua; ia khawatir Majelis Rakyat Papua akan menjadi alat bagi cita-cita kemerdekaan.

Dengan melihat kilas balik proses diplomasi resmi di dalam negeri selama lebih dari empat tahun, jelaslah ada tiga macam kelemahan mendasar pada pemerintah Indonesia yang membatasi prospek kebijakan yang konsisten dan konstruktif di Papua Barat:

- Indonesia masih mengalami peralihan menuju demokrasi. Dalam fase mentah politik demokrasi ini, kebijakan diarahkan oleh berbagai motivasi politik berjangka pendek.
- Supremasi sipil yang utuh dalam pemerintahan belum lagi terbentuk dan pihak militer tetap berpengaruh di dalam pengambilan keputusan pada tingkat nasional dan daerah.
- Krisis ekonomi yang masih berlangsung dijadikan alasan untuk mengakui dan mengendalikan sumber daya alam Papua yang melimpah.

Selama ketiga faktor di atas mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua Barat, prospek penanganan bermakna dan pendekatan realistik terhadap manajemen konflik tetaplah lemah. Pada tingkatan yang lebih mendasar, diplomasi resmi dibelenggu oleh “kepentingan nasional” yang menimbulkan sikap keras Jakarta terhadap isu kedaulatan Papua. Jakarta tetap

mempertahankan kepentingan keamanan, ekonomi dan politik atas Papua; Papua terlalu berharga untuk dilepaskan.

Jalur-jalur Diplomasi

Sekurang-kurangnya ada 140 LSM yang beroperasi di Papua³⁴ dan ada sekitar 72 organisasi yang aktif dalam penciptaan perdamaian.³⁵ Selain LSM, ada sejumlah organisasi berbasis massa, termasuk jaringan organisasi masyarakat adat yang tumbuh terus. Gereja Protestan dan Katolik memiliki pengaruh yang kuat di seluruh wilayah Papua, di samping berbagai kelompok agama lainnya. Juga sering kali terdapat banyak organisasi yang berkaitan dengan gereja, seperti lembaga kependetaan, kelompok pemuda dan ikatan kaum wanita. Organisasi Islam juga memiliki pengaruh yang kuat, khusus di daerah-daerah perkotaan. Organisasi kesukuan dibentuk oleh berbagai kelompok kaum pendatang, termasuk organisasi masyarakat Minang, Batak, Madura dan Jawa yang tinggal di Papua.³⁶ Selain itu, ada sejumlah persekutuan profesional.

Tetapi, keberadaan berbagai organisasi masyarakat sipil itu tidak dengan sendirinya menyiratkan kuatnya masyarakat sipil. Ciri khas berbagai organisasi ini harus pula diperhatikan. Salah satu sifat yang sangat relevan dalam konteks ini adalah kecenderungan pembentukan organisasi masyarakat sipil menurut garis etnik, khususnya lembaga-lembaga komunitas etnik dan organisasi adat. LSM sering kali memiliki jati diri “Papua” atau “bukan-Papua”, yang secara umum mencerminkan jati diri para anggotanya. Eksklusivitas etnik kebanyakan organisasi masyarakat sipil dan pola kesukuan organisasi itu menimbulkan keraguan terhadap sejauh mana masyarakat sipil itu dapat berperan sebagai ajang interaksi di kalangan rakyat yang memiliki berbagai identitas etnik dan agama.

Salah satu indikator penting mengenai kekuatan masyarakat sipil adalah posisi tawar-menawarnya vis-a-vis pemerintah. Ada tanda-tanda bahwa LSM memainkan peran dalam advokasi kebijakan umum dan penetapan undang-undang. Contoh paling nyata mengenai hal ini adalah kontribusi LSM dalam penetapan

Undang-undang Otonomi Khusus. Pada tingkat pemerintahan daerah, LSM juga memanfaatkan peluang yang tercipta oleh kebijakan desentralisasi untuk ikut serta secara aktif dalam penetapan peraturan daerah menyangkut sejumlah isu, termasuk kesejahteraan sosial, hak-hak adat dan tanah. Ada bukti-bukti bahwa masyarakat sipil menjadi kekuatan penyeimbang—selain juga mekanisme komplementer—terhadap kekuasaan pemerintah.

Ruang lingkup inisiatif masyarakat sipil bagi perdamaian telah bertambah luas sejak tahun 1990-an, terutama karena Gereja menjadi satu-satunya agen pencipta perdamaian di Papua. Secara khusus, berbagai kegiatan LSM di Papua telah menjadi jauh lebih meningkat dalam era reformasi. Saat ini, kita dapat menyaksikan berbagai inisiatif sehat di kalangan masyarakat sipil. Ini mencakup inisiatif dalam menyikapi kekerasan negara, dan orang-orang yang bekerja mengubah struktur kekerasan; pola keikutsertaan dan konfrontasi dengan pemerintah dan aparat keamanan; dan inisiatif dari ketinggian diplomasi internasional hingga akar rumput masyarakat Papua.

Ada perbedaan nyata pada peran LSM internasional. LSM internasional pada umumnya berkiprah pada tingkatan bantuan internasional untuk menumbuhkan kesadaran terhadap situasi di Papua di kalangan pemerintahan dan negara-negara asing, atau dengan mendanai organisasi daerah. Peran paling terkenal dari LSM daerah adalah dalam menangani kekerasan negara dengan melakukan penelitian dan pelaporan tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia. Selain itu, ada komunitas LSM dan organisasi Gereja yang bekerja dengan cara yang penting, meski tidak populer, menangani akibat dan sebab-sebab kekerasan struktural melalui program pendidikan, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Demikian pula, ada beberapa inisiatif berharga dari organisasi-organisasi agama dan LSM untuk secara langsung menangani berbagai isu mengenai kerukunan dan toleransi antar-etnik dan antar-agama. Dimensi konflik yang menderita kurangnya perhatian dari masyarakat sipil adalah konflik terbuka antara TPN/OPM dan militer Indonesia.

Inisiatif Aktivistis Internasional, Regional dan Lokal

Salah satu kekuatan inisiatif menciptakan perdamaian dari organisasi internasional dan regional adalah cara membantu “memasukkan Papua ke dalam agenda” pada tingkat nasional dan internasional. Perhatian utama internasional yang mereka arahkan kepada situasi di Papua juga membantu penempatan pemeriksa tindakan Indonesia di Papua dan mendorong akuntabilitasnya menurut standar internasional. Berdasarkan data yang diberikan oleh LSM daerah dan gereja, LSM internasional—termasuk Amnesti Internasional, TAPOL, Human Rights Watch, Dewan Gereja se-Dunia, dan Komisi Pengungsi Katolik Internasional—menjadi aktivis terkemuka dalam mengkampanyekan isu perdamaian dan keadilan di kalangan rakyat Papua pada jenjang internasional. Demikian pula, gerakan solidaritas internasional, khususnya di Australia, UK dan rakyat Belanda, aktif menumbuhkan profil internasional mengenai perjuangan rakyat Papua. Diaspora Papua di Australia dan Belanda juga aktif dalam meningkatkan kesadaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan berbagai isu tentang kemerdekaan. Dengan didukung oleh keberadaan kuat Gereja Protestan dan Katolik di Papua, dewan gereja dunia memainkan perannya dalam meningkatkan kesadaran umum, gerakan solidaritas dan melobi organisasi-organisasi gereja internasional, misalnya Dewan Gereja Dunia dan Fransiscans International, juga menggunakan kedudukan mereka sebagai penasihat pada Komisi PBB tentang Hak Asasi Manusia untuk ikut menangani pelanggaran hak asasi manusia di Papua.³⁷ Pada tingkat regional, Pacific Concerns Resource Centre aktif dalam membangkitkan kesadaran di kalangan pemerintah dan masyarakat di wilayah Pasifik terhadap konflik di Papua.

Ada juga LSM internasional yang bekerja secara langsung di Papua dalam bidang menciptakan perdamaian, termasuk Common Ground Indonesia, InterNews dan World Vision Indonesia. Sejumlah badan donor internasional juga mendukung upaya menciptakan perdamaian berbagai organisasi daerah melalui pendanaan dan pengembangan kemampuan. Kinerja bantuan

internasional dari berbagai organisasi internasional benar-benar bertumpu pada informasi yang berasal dari berbagai sumber daerah, khususnya mereka yang aktif dalam bidang hak asasi manusia. Para pemain kuat dalam bidang ini antara lain adalah ELSHAM Papua, LBH Papua, KONTRAS Papua, Aliansi Demokrasi untuk Papua, gereja yang berbasis Office of Justice and Peace dan GKI Division of Law and Human Rights. Kegiatan organisasi ini mencakup pemetaan/survai konflik, pengawasan dan penelitian, penggugatan dan bantuan hukum, kampanye, lokakarya dan konferensi. Demikian pula, ELSHAM Papua Barat membantu pelatihan polisi dalam hal hak asasi manusia. Ia juga aktif dalam berdialog dengan pemimpin TPN/OPM untuk mendorong mereka agar menggunakan cara-cara non-kekerasan. KONTRAS aktif dalam mengkampanyekan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Selain itu, jaringan perempuan damai telah mendapatkan momentum di kalangan berbagai unsur masyarakat sipil di Jayapura, ibukota Papua. Partisipasi luas kaum perempuan dari berbagai latar belakang etnik, agama dan profesional menyampaikan pesan kuat tentang keterbukaan dan perjuangan yang sama menentang kekerasan. Ikatan Kamar Dagang Indonesia (IKADIN) merupakan satu-satunya organisasi profesional yang secara aktif menangani berbagai isu perdamaian dan keadilan. Ia memberikan bantuan (penggugatan dan jalan damai) bagi rakyat yang dituduh subversi, termasuk para anggota OPM.³⁸ Ada pula sejumlah besar kontingen LSM dan organisasi-organisasi gereja yang aktif menangani keadaan sosio-ekonomi yang menyedihkan. Sebagian program memiliki hubungan langsung dengan pencegahan konflik, misalnya kegiatan Yayasan Pengembangan Prakarsa Wirausaha (YPPW-P) untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi para pedagang Papua di pasar-pasar, dan pada saat yang sama menciptakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai yang dapat terjadi di antara para pedagang dari berbagai latar belakang etnik. Dalam bidang pembangunan, perhatian program-program ekonomi secara umum dicurahkan kepada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Papua yang kurang beruntung.

Organisasi-organisasi gereja aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kesempatan belajar, khususnya di atau dari kalangan masyarakat Papua yang terpencil. Meski program ini tampaknya tidak berkaitan langsung dengan isu perdamaian atau konflik, namun kontribusinya dalam mengurangi pengaruh kekerasan struktural dan mengubah struktur ketidakadilan dalam jangka panjang sangatlah bermakna. Dengan mengurangi kesenjangan sosio-ekonomi antara masyarakat Papua dan kaum pendatang dan mengatasi beberapa ketegangan sosio-ekonomi yang membebani hubungan antar-kelompok, semua kegiatan ini juga mempunyai pengaruh tak langsung dalam meredakan potensi konflik komunal.

Komponen lain masyarakat sipil yang juga berperan adalah lembaga masyarakat adat. Lembaga masyarakat adat memberikan sumbangan penting bagi penciptaan perdamaian dengan menangani pertikaian dalam masalah sumber daya alam dan mempertahankan hak penduduk asli atas lahan dan sumber daya alam. Dengan menghidupkan kembali adat, yang tak dipisahkan dari martabat, jati diri dan masyarakat Papua, lembaga adat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan perdamaian. Adat juga menawarkan mekanisme alami terhadap upaya penyelesaian konflik dan dapat membantu menjembatani hubungan masyarakat.

Daya jangkau gereja (dengan semua golongan agamanya) di seluruh Papua dan pengaruhnya terhadap kehidupan spiritual dan sosial rakyat Papua juga membuatnya menjadi kekuatan ampuh dalam menciptakan perdamaian. Selain kinerja gereja dalam bidang hak asasi manusia dan sosial, kehormatan yang mereka miliki sebagai institusi membuat mereka menjadi alat yang kuat bagi prinsip-prinsip universal dari perdamaian dan keadilan tanpa kekerasan.³⁹ Gereja-gereja juga memanfaatkan otoritas moral terhadap pemerintah dan elite Papua. Jaringan gereja-gereja tidak mendapatkan hambatan berarti dalam menjangkau seluruh wilayah Papua, yang dengan demikian berarti mudah dalam mendapatkan informasi dari masyarakat yang terpencil, maupun dalam menyampaikan informasi mengenai krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Secara umum, upaya menciptakan perdamaian cenderung bertumpu pada penanganan kekerasan negara atau konflik struktural. Sangat jarang organisasi masyarakat sipil yang secara khusus menangani isu konflik komunal atau kohesi sosial. Salah satu contoh mutakhir adalah kampanye media bagi terciptanya toleransi antar-etnik yang dilaksanakan oleh organisasi jaringan LSM, FOKER LSM, pada tahun 2002. Selain itu, Gereja Katolik telah mengambil inisiatif dalam meningkatkan dialog antar-agama melalui pembentukan Kelompok Kerja Antar-Agama. Kelompok kerja ini menghimpun para pemimpin agama untuk berdialog, menyampaikan pernyataan dan menyusun agenda demi saling pengertian antar agama, misalnya gerakan damai yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2002. Berdasarkan inisiatif komunitas damai, salah satu contoh yang patut diperhatikan adalah konsep “zona-damai.” Ide itu muncul pada bulan Juni 1999 pada berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh mahasiswa di kabupaten Yepen Waropen. Pada tanggal 17 Juli tahun yang sama, para pemimpin penduduk asli dan pemimpin masyarakat bukan-Papua berkumpul untuk menyusun dan menandatangani komunike damai. Komunike ini menyatakan kawasan itu sebagai zona-damai dan memuat tekad untuk bekerja sama memelihara perdamaian dan mencegah provokator luar mengembuskan angin konflik. Inisiatif ini mendapatkan dimensi luas Papua ketika LPP mencanangkan program “zona-damai” bagi seluruh Papua. Ia menyerukan semua kelompok, termasuk etnik bukan-Papua, lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat pengusaha, untuk bekerja sama mewujudkan misi damai kemanusiaan.⁴⁰ Meski tindak lanjut LPP dalam mewujudkan cita-cita ini sangat minim, gagasan “zona-damai” mendapatkan momentumnya sendiri, dengan memelopori berbagai inisiatif perdamaian. Konsep itu tampaknya menjadi sebuah “pasak” tempat menyandarkan berbagai inisiatif penciptaan perdamaian, dan karena itu memberikan dorongan, kerangka bimbingan dan percepatan bagi inisiatif masyarakat cinta-damai.

Juga berkaitan erat dengan konsep “Zona-Damai” adalah dua lembaga yang didasarkan atas inisiatif menciptakan perdamaian yang dibentuk pada tahun 2002, yang mencerminkan kesadaran di kalangan masyarakat sipil terhadap kebutuhan untuk membangun gerakan perdamaian yang kuat dan strategis. Pertama adalah Konferensi Perdamaian yang penyelenggaraannya merupakan hasil kerja sama LSM hak asasi manusia, ELSHAM, DPRD Tingkat I dan otoritas kepolisian. Salah satu hasil konferensi adalah pembentukan Angkatan Cinta Damai yang bertujuan menjadi sebuah forum bagi pencegahan konflik melalui dialog. Kedua adalah lokakarya penciptaan perdamaian yang diselenggarakan oleh Kantor Gereja Katolik bagi Keadilan dan Perdamaian. Lokakarya itu menyatukan berbagai organisasi keagamaan, LSM, lembaga adat dan kaum akademisi untuk mengembangkan kesamaan pandangan mengenai sebab konflik, visi penciptaan perdamaian dan menyusun rancangan bersama atau komplementer untuk meningkatkan budaya damai di Papua.

Renungan Tentang Inisiatif LSM

Meski sulit membayangkan prospek masa depan yang adil dan damai bagi Papua tanpa adanya sektor LSM yang efektif, potensi LSM sebagai agen penciptaan perdamaian tidak boleh diabaikan. Banyak LSM yang memiliki kelemahan dalam manajemen internal dan hal ini mengurangi keefektifannya. Banyak organisasi—khususnya LSM hak asasi manusia—terperangkap oleh sikap “reaktif” terhadap berbagai kejadian. Meski daya tanggap ini menjadi kekuatan kinerja mereka, namun hal itu juga mengurangi kemampuan mereka untuk bekerja secara lebih strategis dan berpandangan luas dalam menciptakan perubahan struktural. Ada sejumlah isu menyangkut LSM berpandangan sempit. Organisasi semacam ini memiliki potensi sesungguhnya untuk menciptakan konflik dan bukan untuk mengatasinya.

Masalah-masalah legitimasi juga didengungkan menyangkut keabsahan pendekatan berorientasi proyek terhadap upaya meningkatkan perdamaian dan keadilan. Perilaku para donor

merupakan bagian persoalan pendekatan berorientasi proyek itu; badan-badan donor mendanai inisiatif yang mudah “dipaketkan” sebagai proyek; mereka mendukung berbagai upaya menciptakan perdamaian, misalnya pelatihan dan lokakarya, namun tidak mendukung proses yang lebih kekal untuk menciptakan perubahan terhadap keadaan dan penyebab konflik pada semua tingkatannya. Inisiatif perdamaian daerah harus dibentuk sedemikian rupa agar selaras dengan struktur proyek tertentu dari sang donor, jika mereka memang ingin mendapatkan bantuan dana. Ini menghambat kreativitas, daya tanggap dan kemampuan organisasi daerah untuk meningkatkan strategi perdamaian jangka panjang. Juga ada bentuk sensor-diri di kalangan para donor, yang enggan mendukung berbagai kegiatan “radikal” karena takut organisasi mereka dimasukkan ke daftar hitam oleh pemerintah Indonesia. Beberapa organisasi internasional—baik organisasi donor maupun pemberi bantuan jasa—memaksakan prioritas mereka kepada organisasi daerah; mereka dikendalikan oleh kepentingan mereka sendiri dan bukan oleh kepentingan rakyat yang ingin mereka bantu. Berbagai persoalan dengan organisasi internasional ini menjadi bertambah pelik karena kenyataannya, bahwa banyak LSM daerah yang bergantung pada bantuan dana internasional.

Dilihat dari segi jaringan kerja, LSM itu menjadi contoh dari koordinasi yang kuat dan efektif antara LSM lokal, khususnya kegiatan bersama LSM hak asasi manusia untuk berdialog, konferensi pers dan kampanye umum. Tetapi, jaringan efektif dan kekal antara LSM itu tidak ada. Sektor LSM cenderung “terkompartementalisasi”; setiap organisasi memiliki kegiatan, fokus dan orientasinya sendiri, dan karenanya mengerjakan pekerjaannya sendiri. Hubungan antara LSM juga bertambah pelik oleh adanya persaingan mendapatkan dana, citra publik atau “padang rumput”.⁴¹

Meski masing-masing organisasi mungkin saja berhasil mencapai rencana yang telah mereka gariskan dan dalam mewujudkan program masing-masing, namun mereka belum mencapai bentuk “massa-kritis” dan menjadi gerakan penting bagi

perubahan sosial. Kedua lembaga berbasis inisiatif menciptakan perdamaian yang disebutkan di atas mungkin merupakan sebuah langkah. Ujian terhadap inisiatif ini terletak pada kelanggengan dan komitmen organisasi untuk melanjutkan pengembangan kerangka kerja ini.

Politisasi merupakan resiko lain yang harus dihadapi oleh inisiatif LSM—sebuah resiko yang berhubungan langsung dengan kentalnya sifat politik persoalan Papua. FORERI merupakan contoh mengenai hal ini. Ia dimaksudkan untuk bekerja sebagai platform terbuka bagi dialog dan pengendalian konflik, namun kepemimpinan ternyata menempuh arah yang lebih bersifat politis. Dampak politisasi FORERI melemahkan peran yang dapat dimainkannya sebagai sebuah forum terbuka dan inklusif.

Isu jati diri—Papua dan bukan-Papua—juga sensitif, namun sangat penting bagi organisasi masyarakat. Meski banyak organisasi Papua memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan perdamaian di Papua, namun kenyataannya peran mereka tidak sepenuhnya dapat diterima oleh orang-orang yang memahami jati diri Papua secara sempit. Rendahnya tingkat pluralisme dan toleransi antar-etnik di kalangan organisasi masyarakat dapat menjadi penghalang dalam mengembangkan masyarakat sipil yang lebih kohesif.

Kerasnya kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat sipil adalah bahwa apapun prestasi mereka dalam menciptakan perdamaian, maka upaya ini dapat dengan mudah diingkari oleh tindakan unsur-unsur yang keliru di dalam pemerintah, militer atau masyarakat Papua. Para pekerja LSM, khususnya aktivis hak asasi manusia, menghadapi rintangan, intimidasi dan ancaman akan keselamatan diri.

Salah satu kesulitan dalam implementasi konsep Zona-Damai merupakan contoh yang baik tentang kuatnya tantangan terhadap upaya menciptakan perdamaian di Papua. Gagasan Zona-Damai dianggap berbahaya karena gagasan itu telah diko-optasi oleh aparat keamanan dan pemerintah. Mereka memandang konsep Zona-Damai sebagai alasan untuk menindas orang-orang yang menurut

mereka menjadi ancaman terhadap perdamaian dalam arti stabilitas dan keamanan nasional (dan contoh “ancaman” ini mencakup berbagai organisasi hak asasi manusia dan para anggota Presidium). Ini menjelaskan apa sebenarnya tantangan yang paling sulit dalam menciptakan gerakan luas berbasis perdamaian di Papua; di kalangan para pekerja LSM, aktivis independen, kaum pendatang dan rakyat Papua—belum lagi aparat keamanan—terdapat berbagai konsep dan pemahaman tentang apa sebenarnya arti “perdamaian” di dalam konteks Papua. Kecuali jika ada kesamaan konsep yang diterima secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, inisiatif perdamaian akan tetap berada di jalan yang berbeda menuju tujuan yang berbeda.

Prospek

Thom Beanal, pemimpin adat rakyat Amungme dan anggota LPP, pernah mengatakan: “Kami menuntut kemerdekaan karena kami tidak ingin terus menerus dibunuh seperti ini.”⁴²

Ungkapan ini mencerminkan sentimen luas di kalangan rakyat Papua yang memandang persoalan kemerdekaan sebagai tak terpisahkan dari perjuangan hidup rakyat Papua—baik dalam arti fisik maupun budaya. Ia menegaskan bagaimana penanganan semua dimensi konflik di Papua harus menjawab persoalan kedaulatan. Teriakan emosional Thom Beanal juga merupakan isyarat rasa takut yang disebabkan oleh konflik. Penderitaan dan perasaan dikhianati di kalangan rakyat Papua tergores dalam, terlalu dalam bahkan bagi otonomi atau pembagian kekuasaan sebagai alternatif terhadap luasnya aspirasi untuk mencapai “kemerdekaan”.⁴³ Kepemimpinan politik di Papua tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk meredakan tuntutan keras semacam itu dan menengarai aspirasi rakyat. Pendirian “garis-keras” bagi kemerdekaan rakyat Papua memberikan kepada elite Papua hanya satu posisi saja dalam bermusyawarah, yakni kemerdekaan. Sementara itu, penegasan Jakarta terhadap persatuan nasional tetap tak tergoyahkan, dan sifat kedua pendirian yang tidak sejalan ini membuat prospek penyelesaian politik menjadi

tetap lemah. Selain itu, dengan kekuatan regional dan internasional yang tidak ingin menantang status quo kesatuan nasional Indonesia, dan alasan pemerintah Indonesia alergi terhadap setiap “intervensi asing”, prospek mediasi internasional juga buram. Terlebih lagi, dinyatakan⁴⁴ bahwa pemerintah pusat selalu membatasi akses internasional di Papua Barat karena mengkhawatirkan masalah Papua menjadi masalah internasional.⁴⁵ Selama konflik bersenjata di Papua Barat dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai pemberontakan kaum separatis, intervensi keamanan atau pemeliharaan perdamaian oleh dunia internasional belum dapat diharapkan. Mungkin hanya musibah kemanusiaan dan hak asasi manusia seperti yang terjadi sesudah referendum Timor Timur yang akan benar-benar menarik perhatian internasional.

Rekomendasi

Perdamaian sejati hanya dapat dicapai di Papua Barat jika beberapa persoalan berikut ini dijawab:

- Bagaimana tuntutan mengenai kedaulatan Papua dapat diselesaikan sedemikian rupa demi menghormati hak rakyat Papua untuk merdeka? Bagaimana berbagai golongan dapat terlibat secara konstruktif dan terbuka untuk menyelesaikan inti persoalan menyangkut kedaulatan Papua?
- Bagaimana hukum yang efektif dan adil dapat ditegakkan? Bagaimana hak asasi manusia dapat ditegakkan dan hukuman terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa silam dapat dilaksanakan?
- Bagaimana kekerasan (yang bersifat terbuka dan struktural) dapat dihentikan dan rasa aman masyarakat, keadilan sosial dan pemerintahan yang baik dapat diwujudkan?
- Bentuk masyarakat yang bagaimana yang diinginkan Papua Barat di masa depan? Apa arti “perdamaian” bagi rakyat Papua?

Untuk menjawab semua pertanyaan di atas diperlukan tindakan bersama oleh semua pihak yang terlibat jika mereka memang bekerja dalam sebuah proses untuk menciptakan

perdamaian. Dalam hal ini, yang direkomendasikan adalah:

- Semua pihak yang terlibat konflik secara kritis menyatukan peran mereka dan bertanggung jawab terhadap konflik di Papua. Mereka harus menjauhkan diri dari kepentingan pribadi dan bekerja sama dalam sebuah proses terbuka untuk menciptakan saling pengertian terhadap apa arti perdamaian menurut konteks Papua dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya.
- Hendaknya pemerintah Indonesia menarik pelajaran dari kasus Timor Timur dan Aceh—yakni bahwa kekerasan bukanlah alat yang ampuh untuk menjaga kesatuan nasional. Ia tentunya melibatkan dialog yang tulus dengan rakyat Papua yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional. Inilah satu-satunya cara untuk meredakan konflik di Papua yang memang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
- Militer Indonesia hendaknya mereformasi sistem komando wilayahnya, yang telah menciptakan keberadaan militer yang opresif dan pengendalian sosial pada semua lapisan masyarakat Papua. Tanggung jawab keamanan rakyat hendaknya diserahkan kepada angkatan kepolisian dan hukum harus ditegakkan.
- Perusahaan transnasional dan perusahaan besar lainnya kiranya melindungi hak rakyat Papua sebagai subjek hukum. Eksploitasi terhadap rakyat Papua harus diakhiri dan sumber daya alam atau tanah yang menjadi hak tradisional mereka harus diserahkan kepada mereka.
- Masyarakat internasional hendaknya mengkaji ulang keabsahan Akta Bebas Memilih 1969 dan integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia. Secara khusus, PBB harus menjalankan kewajibannya untuk mengakui hak rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat.
- Badan-badan internasional (badan-badan PBB, lembaga donor bilateral dan LSM) hendaknya dapat menjamin bahwa segala kegiatan mereka di Papua menghormati martabat dan kemampuan rakyat Papua. Prioritas harus diberikan kepada kebutuhan rakyat Papua, dan bukan agenda mereka sendiri.
- Badan-badan internasional dan pemerintah asing hendaknya

menggunakan pengaruh mereka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Indonesia menyangkut keadaan di Papua, termasuk perlindungan para pekerja hak asasi manusia di Papua dan proses hukum untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa silam.

- Presidium hendaknya mengambil pendirian yang lebih tegas tentang bagaimana ia akan menjalankan mandatnya untuk mencapai kemerdekaan. Pendirian ini harus dapat diterima oleh rakyat Papua dan masyarakat internasional, dan dapat membuka jalan untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia.
- Gereja dan organisasi gereja hendaknya lebih memusatkan perhatian untuk memperkuat dan meningkatkan proses perubahan damai yang dicanangkan rakyat; mereka harus bertindak sebagai fasilitator inisiatif rakyat bagi perdamaian yang menghormati upaya penduduk asli bagi perdamaian.
- LSM (daerah dan internasional) hendaknya lebih menekankan pemberdayaan rakyat Papua sebagai agen perubahan struktural untuk menciptakan kondisi sosio-ekonomi yang demokratis dan adil.
- LSM (daerah dan internasional) hendaknya mengembangkan pendekatan yang lebih “holistik” dan strategis untuk menciptakan perdamaian yang mengakui dan memanfaatkan keseimbangan peran dan kekuatan berbagai organisasi.
- Rakyat Papua hendaknya memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap masa depan mereka sendiri dan tidak bergantung kepada para elite politik Papua untuk mewakili kepentingan mereka. Rakyat Papua harus mengembangkan mekanisme kontrol demi meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga dan perwakilan politik mereka sendiri. Ini juga mengharuskan rakyat Papua sendiri untuk mempersatukan berbagai kepentingan. Rakyat Papua perlu mengembangkan kemampuan dan forum yang memungkinkan mereka mengendalikan dan meredakan konflik yang terjadi di dalam dan antar berbagai komunitas Papua.

Catatan

¹ Perubahan nama propinsi itu diresmikan dalam undang-undang otonomi khusus bagi Papua (Undang-undang no. 21/2001).

² TPN adalah sayap militer kelompok payung gerakan pemberontakan yang dikenal sebagai OPM.

³ Ini bagian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang merujuk pada aparat keamanan nasional sebelum reformasi keamanan pada 1999 ketika angkatan bersenjata dan kepolisian nasional menjadi lembaga yang terpisah; Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

⁴ Giay, B., 2001, "West Papua: Peace-Zone, a possible dream; the role of West Papuan churches and local initiatives in the human rights struggle", makalah yang tidak diterbitkan, h.3

⁵ Mason, J. 2000, op. Cit. h. 35.

⁶ Richards, C. 2002, "Military Madness:, New Internationalist, West Papua Special Edition 344, April 2002.

⁷ Papua Post, 11 Agustus 2003.

⁸ Pemimpin Papua, Kelly Kwalik, pernah menyatakan bahwa dia telah meninggalkan kekerasan pada tahun 2001. Kwalik mengatakan bahwa dia dan para pemimpin OPM yang lain menyadari bahwa kegiatan gerilya mereka juga mengekalkan lingkaran setan konflik di Papua. Tetapi, TPN/OPM adalah organisasi yang terpecah dan ada sembilan unit yang beroperasi secara otonom. Tidak jelas unit mana yang telah bertekad untuk melaksanakan strategi tanpa-kekerasan.

⁹ Untuk informasi selanjutnya mengenai bisnis militer lihat McCulloch, L., 2000, "Trifungsi: The Role of the Indonesian Military in Business", makalah disampaikan pada International Conference on Soldiers in Business: Military as an Economic Actor, Jakarta, 17-19 Oktober 2000. www.bice.de/budget/events/milbus/confpapers.html.

¹⁰ Giay, B., 2001, op. cit., h. 3.

¹¹ Human Rights Watch, 2001, "Violence and Political Impasse in Papua, vol. XX, No. X (X), Juli 2001, www.hrw.org/press/2001/07/papua0703.htm., h. 23.

¹² Polling pendapat baru-baru ini yang diselenggarakan oleh International Foundation for Election System menemukan bahwa militer dan polisi merupakan lembaga publik yang paling kurang dihargai di kalangan

rakyat Papua. (International Federation for Election Systems, 2003, “Papua Public Opinion Survey Indonesia”, www.ifes.org/reg_activities/pdf/Papua_Summary_Report_Final.pdf, h. 12)

¹³ Definisi kekerasan struktural yang dikemukakan Harris dan Lewis jelas menunjukkan hakikat kekerasan struktural di Papua; dengan menyebutnya sebagai sebuah program sistematis untuk “mempertahankan dominasi salah satu kelompok di pusat kekuasaan terhadap kelompok lain... [yang pada tataran praktis... dapat mengandung arti upah rendah, tak memiliki tanah, buta huruf, kesehatan buruk, terbatas, tidak memiliki perwakilan politik atau hak hukum, dan secara umum, banyak aspek kehidupan mereka yang dibatasi.” Harris, G., & Lewis, N., “Structural Violence, positive peace and peacebuilding,” dalam Harris G., (ed.), *Recovery from Armed Conflict in Developing Countries: An economic and political analysis* (London: Routledge 1999), h. 29-30.

¹⁴ IFES, 2003, op.cit., h. 4-7.

¹⁵ International Crisis Group, 2001, “Ending Repression in Irian Jaya”, ICG Asia Report No. 23, 20 September 2001, www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/a400414-20092001.pdf, h. 6.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Eksploitasi ekonomi Papua terjadi ketika PT. Freeport mulai beroperasi pada 1967 (yakni sebelum integrasi). Perusahaan penambangan raksasa milik AS itu, yang sangat didukung oleh rezim di Jakarta, menjadikan Papua sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai objek penting nasional, kontrak perusahaan itu menarik kehadiran polisi dan militer yang kuat—sebuah kehadiran yang membebani anggaran PT. Freeport sebesar 35 juta dolar AS dan pengeluaran tahunan sebesar 11 juta dolar AS dalam biaya keamanan (Richards, C., 2002, op. cit.). Dana perlindungan ini diambil dari keuntungan tahunan Freeport sebesar 19.000.000.000 dolar AS setelah dipotong pajak.

¹⁸ Pada tahun 1960-an, penduduk pendatang hanya 2.5% dibandingkan dengan perhitungan saat ini yang mencapai 30%. (ICG, 2001, op.cit., h. 5-6).

¹⁹ “Insiden di Pasar Abepura,” 11 & 12 Nopember 2000, ELSHAM.

²⁰ Statistik tentang yang dikutip dari laporan “Peristiwa Tragedi Kemanusiaan Wamena 6 Oktber 2000 Sebelum dan Sesudahnya: Sebuah Laporan Investigasi”, disusun oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian,

KONTRAS Papua, Elsham dan LBH-Jayapura, Januari 2001.

²¹ Mote, O. & Rutherford, D., 2001, "From Irian Jaya to Papua: The limits of primordialism in Indonesia's trouble east", *Indonesia*, Ithaca, Oktober 2001: 72, h. 115-140.

²² ICG, 2002, "Indonesia: Resources and conflict in Papua", *ICG Asia Report* No. 39, 13 September 2002, www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=74

²³ Undang-undang pemekaran Papua menjadi 3 propinsi dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 1999 (UU No. 45) namun tidak dilaksanakan karena mendapat tantangan masyarakat. Presiden memperbaiki rancangan dan mengeluarkan INPRES No. 1/2003 yang memerintahkan pelaksanaan UU tahun 1999 untuk memekarkan Papua.

²⁴ Blair, D.C., Phillips, DL., 2003, "Indonesia Commission: Peace and Progress in Papua", Report of an Independent Commission Sponsored by the Council on Foreign Relations Center for Preventive Action, www.cfr.org/pdf/Indonesia_Commission.pdf, h. 34-5.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., h. 35.

²⁷ ICG, 2001, op. cit., h. 16

²⁸ Port Villa Presse, 25 September 2002.

²⁹ Ibid.

³⁰ ICG, 2001, op. cit., h. 16.

³¹ ICG, 2001, op. cit., h. 16 yang mengutip "West Papuan to ignore warning", *Sydney Morning Herald*, 24 Nopember 2000.

³² ICG, 2001, op. cit., h. 18.

³³ Dr. Laurence Sullivan, ahli hukum konstitusi berkebangsaan Inggris, dalam wawancaranya dengan Radio Australia (ABC) pada tanggal 11 September 2003.

³⁴ Yayasan Pengembangan Prakarsa Wirausaha Papua (YPPW-P) telah menyusun daftar LSM yang aktif di Papua, yang jumlahnya lebih dari 140 organisasi pada tahun 2002.

³⁵ Direktori Upaya Penciptaan Perdamaian yang disusun oleh CRS-Cordaid pada 2002 mencantumkan 72 organisasi cinta damai di Papua dan 14 organisasi lainnya dengan berbagai program di Papua. Organisasi yang tercantum dalam direktori itu didasarkan atas "lambang-diri" sebagai

“organisasi cinta-damai” dan sesuai dengan pemahaman terhadap luasnya cakupan upaya menciptakan perdamaian untuk meningkatkan keadaan dan hubungan yang memajukan perdamaian dan keadilan.

³⁶ Setyanto, B., Sugiono, B., Reba, Y., Wamafima, N., 2002, “The Position and Role of Civil Society Organisations in Resolving the Papuan Conflict”, FOCUS ASIEN: Schriftenreihe des Asienhauses, Asian House Focus Series, No. 12, <http://www.asienhaus.de/publikat/focus/focus12/focus12.pdf>, h. 32

³⁷ WCC, “Press Release: UN Commission on Human Rights: WCC mengungkapkan keadaan hak asasi manusia yang memprihatinkan di Papua, *Indonesia*, 17 April 2002”, <http://www2.wcc-coe.org/pressreleasesen.nsf/index/pu-02-11.html>. dan Fransiscan International, 2002, “Fransiscan International and Dominicans for Justice and Peace menuntut diakhirinya pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung lama di Papua, Indonesia”, Pernyataan sesi ke 58 Commission of Human Rights, 10 April 2002, Jenewa.

³⁸ Setyanto, B., et al., 2002, op. cit., h. 30.

³⁹ Polling pendapat baru-baru ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga agama merupakan lembaga yang paling dihormati di Papua, yang mencapai 50% dari hasil survai, dan lembaga yang dihormati pada urutan kedua adalah pemerintah daerah tingkat II, dengan capaian 15%. Meski Gereja jelas bukan merupakan satu-satunya institusi agama di Papua, namun ia layak mendapatkan penghargaan tinggi sebagai institusi agama. (IFES, 2003, op. cit., h. 12).

⁴⁰ Glay, B., 2001, op. cit., h. 10-14.

⁴¹ Kata “turf” merujuk pada kecenderungan organisasi dalam bersaing untuk mengamankan dan melindungi “tempat” mereka—baik menurut isu-isu tertentu, wilayah geografis maupun masyarakat yang dituju—yang ingin mereka nyatakan sebagai wilayah eksklusif mereka dan enggan berbagi dengan organisasi yang lain.

⁴² Thom Beanal, pemimpin adat suku Amungme dan anggota LPP dalam dialog dengan Presiden Habibie di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1999.

⁴³ Survai IFES mengungkapkan bahwa cita-cita kemerdekaan mencapai 75% di kalangan penduduk asli Papua. (IFES, 2003, op. cit., h. 17).

⁴⁴ Ini diisyaratkan oleh Pendeta Fransiscan dan aktivis hak asasi manusia,

Br. Theo van den Broek ofm.

⁴⁵ Theo van den Broek ofm, "Papua 2003: Situational report for the diplomatic community in Jakarta", April 2003, h. 7.

Laporan-laporan

Human Rights Watch

"Violence and Political Impasse in Papua", vol. XX, No. X (X),
Juli 2001

www.hrw.org/press/2001/07/papua0703.htm

International Crisis Group

"Indonesia: Resources and Conflict in Papua", *ICG Asia Report*
No. 39, 13 September 2002.

[www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/
A400774_13092002.pdf](http://www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/A400774_13092002.pdf)

"Ending Repression in Irian Jaya", *ICG Asia Report* No. 23, 20
September 2001.

[www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/
A400414_20092001.pdf](http://www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/A400414_20092001.pdf)

International Federation for Election Systems

"Papua Public Opinion Survey Indonesia"

www.ifes.org/reg_activities

Publikasi

"Indonesia Commission: Peace and Progress in Papua", Report of an
Independent Commission Sponsored by the Council on Foreign Re-
lations, Center for Preventive Action, oleh D.C. Blair dan D.L.
Phillips, 2003. [www.cfr.org/pdf/Indonesia_ Commission.pdf](http://www.cfr.org/pdf/Indonesia_Commission.pdf)

Giay, B., 2001, "Against Indonesia: West Papuan Strategies of resistance
against Indonesian political and cultural aggression in the 1980s",
dalam Anderson B. (ed.), *Violence and State in Soeharto's Indonesia*,
New York, Cornell Southeast Asia Program Publications, h. 129-
38.

D. Leith, *The Politics of Power: Freeport in Soeharto's Indonesia*, University of
Hawaii Press, 2003.

- L. McCulloch, *Trifungsi: The Role of the Indonesian Military in Business*, Makalah disampaikan pada The International Conference on Soldiers in Business: Military as an Economic Actor, Jakarta, Oktober 17-19, 2000. www.bicc.de/budget/events/milbus/confpapers.html
- B. Setyanto, B. Sugiono, Y. Reba, N. Wamafma, "The Position and Role of Civil Society Organisations in Resolving the Papuan Conflict", FOCUS ASIEN: Schriftenreihe des Asienhauses, *Asian House Focus Series*, No. 12, 2002. www.asienhaus.de/publikat/focus/focus12/focus12.pdf

Situs Internet

- www.papuaweb.org (situs "penerang rumah" yang dikelola bersama oleh perguruan tinggi Papua dan Australia untuk memberikan data resmi dan makalah akademik yang berkaitan dengan Papua).
- www.geocities.com/elshamnewsservice (Website tentang LSM hak asasi manusia Papua Barat, Elsham).
- www.irja.org/index2.shtml (Sumber pustaka on-line yang berhubungan dengan Papua).
- www.cs.utexas.edu/users/cline/papua/core.html (Feature versi on-line West Papua Information Kit, dibuat oleh Australia West Papua Association, Sydney).
- www.gn.apc.org/dte (Down to Earth)
- www.gn.apc.org/tapol (TAPOL).
- www.hrw.org (Human Rights Watch).
- www.survival.org.uk (Survival International).
- www.rfkmemorial.org/center/pro_act.htm (Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights).
- www.intl-crisis-group.org (International Crisis Group)
- www.amnesty.org (Amnesty International).

Kontak Narasumber

- Dr. Benny Gilay, Direktur Biro Perdamaian dan Keadilan Gereja KINGMI di Papua
- Kamket Abepura, Jayapura, Papua, Indonesia.
- Pdt. Willem F. Rumsarwir, Sekolah Tinggi Teologi GKI IS. Kijne Jl. Sentani 37, Abepura, Papua, Indonesia.
- Theo van den Broek ofm, Direktur, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Jl. Kesehatan No. 4 Dok II, Kotak Pos 1379,

Jayapura, Papua, Indonesia.
E-mail: sekkp@jayapura.wasantara.net.id
John Rumbiak, Elsham, USA. E-mail: elsham@usadata.net
Dr. Ziegfried Soellner aml. E-mail: szoellner@t.line.de

Berbagai Organisasi (Berbasis di Papua)

Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia
Jln. Kampus ISTP-Padang Bulan, Jayapura
Papua, Indonesia
Tlp/Fax: +62 967 581 600/520
E-mail: elshamnewsservice@jayapura.wasantara.net.id

Alansi Demokrasi Untuk Papua
Jln. Raya Padang Bulan, Depan Asrama Mahasiswa Acemo
Manokwari, Abepura, Jayapura
Papua, Indonesia
Tlp: +62 967 587 890
Fax: +62 967 588 365
E-mail: aldepe@jayapura.wasantara.net.id

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura
Jln. Kesehatan No. 4 Dok II Kotak Pos 1379, Jayapura
Papua, Indonesia
Tlp: +62 967 534 993
Fax: +62 957 534 993
E-mail: sekkp@jayapura.wasantara.net.id

Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat
Adat Papua (PPMA)
Jln. Raya ABG Sentani no. 13B, Abepura, Jayapura
Papua, Indonesia
Tlp: +62 967 582 681
Fax: +62 957 587 614
E-mail: lppma_irja@jayapura.wasantara.net.id

Yayasan Nanimi Wabili Su (YNWS)
Jln. F. Kalasuat No. 96, Kelurahan Malangkedi, Sorong
Papua, Indonesia
Tlp: +62 951 322 787

Fax: +62 951 331 102
E-mail: ferdi_rondong@hotmail.com

Yayasan Pengembangan Prakarsa Wirausaha (YPPWI)
Jln. Raya Sentani no. 92, Padang Bulan, Jayapura
Papua, Indonesia
Tlp: +62 967 581 222
Fax: +62 967 581 222
E-mail: yppwi@jayapura.wasantara.net.id
www.yppwi.arecool.net

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)
Jln. Gerilyawan No. 46, Abepura, Jayapura
Papua, Indonesia
Tlp: +62 967 588 615
Fax: +62 967 588 615

Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua (LPMS)
Jln. Arwana II Gang Batu Karang No. 1, Waena, Jayapura
Papua, Indonesia
Tlp: +62 967 573 970
Fax: +62 967 573 970/1
E-mail: buset@jayapura.wasantara.net.id

Biro Perdamaian dan Keadilan Gereja KINGMI di Papua
Kamkei Abepura, Jayapura
Papua Indonesia
Tlp: +62 961 593 349

Jayasan Humi Inane j(Suara Perempuan) Jayawijaya
Jln. Yos Sudarso No. 20, Wamena
Papua, Indonesia
Tlp: +62 969 31260
Fax: +62 969 31278

Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK)
Jln. Baru Kompleks Yosepha Alomang, Kelurahan Kisamki Baru, Timika
Papua, Indonesia

Tlp: +62 901 323 070

Fax: +62 901 323 070

Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum
(LP3BH)

Jln. Gunung Salju Fanindi, Bengkel Tan No. 18, Manokwari
Papua, Indonesia

Tlp: +62 986 213 160

Fax: +62 986 213 160

FOKER LSM Papua

Jln. Sentani Raya No. 89, Waena, Jayapura

Papua, Indonesia

Tlp: +62 967 573 511

Fax: +62 967 573 512

E-mail: fokerlsm@jayapura.wasantara.net.id

Organisasi-organisasi (berbasis di Jakarta)

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (EL-SAM)

Ifdhal Kasim, SH (Direktur Eksekutif)

Jln. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu

DKI Jakarta, Indonesia

Tlp: +62 21 797 2662/64

Fax: +62 21 79192519

E-mail: elsam@nusa.or.id/advokasi@indosat.net.id

www.elsam.or.id

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)

Syamsudin Ishak (Manager Riset)

Jln. Pedati Raya No. 20 Rt 007/09

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Tlp: +62 21 819 1623

Fax: +62 21 850 0670

E-mail: yappika@indosat.net.id

www.yappika.org

International Crisis Group
Menara Thamrin, Lt. 14, Kamar 1402, Jl. MH. Thamrin Kav. 3
Jakarta, 10250, Indonesia
Tlp: +62 21 3983 0303
Fax: +62 21 3983 0304
E-mail: sjones@crisisweb.org

Peranan Masyarakat Sipil dalam Pencegahan Konflik dan Penciptaan Perdamaian di Timor Timur

Helder Da Costa

Timor Timur adalah negara yang muncul dari sebuah trauma. Anggota dunia yang terbaru ini luasnya hanya 15,000 kilometer persegi pada bagian timur dari pulau Timor. Saat ini negara tersebut tengah menjalani tahun-tahun pertamanya, di mana perdamaian dapat retak sewaktu-waktu, dimulainya perbaikan politik, ekonomi, dan sosial, serta merupakan suatu awal dari proses pengembangan sebuah institusi. Setelah menderita selama berabad-abad akibat penjajahan Portugis, pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai tahun 1945, dan Indonesia selama 24 tahun, masyarakat Timor-Timur telah menyatakan diri mereka sebagai bangsa yang memiliki tekad dan dapat menentukan nasib sendiri.¹

Negara tersebut telah merdeka sejak 20 Mei 2002, ketika Lembaga Peralihan untuk Timor Timur PBB (UNTAET)² secara resmi mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada parlemen lokal yang terpilih.³ Timor Timur adalah sebuah negara yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah, sistem pengamanan internal yang buruk, kurang diakuinya hak-hak kepemilikan, dan sejak penyerahan dari lembaga sementara PBB, jumlah pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Baik Presiden Xanana Gusmao maupun Perdana Menteri Mari Alkatiri telah berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang positif untuk meyakinkan berkelanjutannya dukungan dari masyarakat internasional. Mereka juga mengembangkan hubungan bilateral, khususnya, hubungan dengan Indonesia, yang secara perlahan-lahan terus mengalami kemajuan. Pemerintahan baru tersebut saat ini tengah menghadapi tugas-tugas yang berat untuk mengangkat standar sosial ekonomi Timor Timur agar dapat membangun pondasi ekonomi yang kuat untuk menopang pertumbuhannya.⁴

Penderitaan yang luar biasa yang dialami sebelumnya oleh masyarakat Timor Timur dapat diuraikan kembali yaitu pada masa ketika terjadinya kudeta yang dilakukan oleh gabungan para jenderal berhaluan kiri pada bulan April tahun 1974, yang berhasil menggulingkan diktator Portugis Marcelo Caetano.⁵ Rezim baru tersebut memulai sebuah program dekolonisasi, memberikan para elit politik Timor tiga pilihan: Kemerdekaan penuh, tetap bersama Portugal di bawah pengaturan yang baru dan lebih demokratis, atau berintegrasi dengan Indonesia.⁶ Di Portugal, revolusi telah menimbulkan kekacauan ekonomi, menghilangkan semangat lembaga-lembaga luar negeri, dan mengurangi cengkeraman lembaganya di daerah jajahannya, sebuah situasi yang secara halus dan subversif dieksploitasi oleh para jenderal di Indonesia dengan operasi Komodo.⁷ Dengan mengklaim bahwa intervensi diperlukan untuk memperbaharui perdamaian dan keamanan di Timor Timur, Indonesia menginvasi Timor Timur pada tanggal 7 Desember 1975. Usaha tersebut adalah proyek yang disengaja dari presiden Soeharto, dengan dukungan nyata dari Amerika, Australia, dan

pemerintahan-pemerintahan negara Barat. Orang-orang Portugis yang masih tersisa meninggalkan daerah tersebut, dengan demikian mengakhiri peranan Portugis di daerah tersebut. Pada bulan Juli 1976, parlemen Indonesia mengesahkan undang-undang yang menyatakan Timor Timur sebagai bagian dari negara kesatuan Indonesia sebagai propinsi yang ke-27.⁸

Selama 24 tahun dalam kekuasaan Indonesia, masyarakat Timor Timur telah mengalami penderitaan yang luar biasa. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Dunn (2003), satu dari empat orang Timor Timur meninggal sebagai konsekuensi dari terjadinya tindakan ofensif militer yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia di Timor Timur. Strategi Indonesia untuk mengontrol Timor Timur merupakan kombinasi antara kekerasan dengan bantuan di bidang pembangunan. Rumah Sakit, jalan-jalan, dan sekolah-sekolah dibangun Jakarta dengan cara menyalurkan bantuan keuangan yang tidak seimbang ke propinsi ke-27 tersebut.⁹ Namun usaha-usaha tersebut gagal mematahkan perlawanan, karena pembangunan tersebut lebih dibarengi dengan pelecehan dan kecurigaan yang berkelanjutan daripada kebebasan politik yang sebenarnya. Mungkin contoh kekejaman yang paling terkenal adalah apa yang dikenal sebagai pembunuhan massal Santa Cruz, yang terjadi pada tanggal 12 November 1991 ketika tentara Indonesia menembaki para pengunjung rasa muda yang berkumpul di sebuah pemakaman untuk menghormati dan mengenang salah seorang teman mereka yang terbunuh dua minggu sebelumnya. Mereka yang menentang pemerintahan Indonesia mulai memuncakkan perlawanan yang terorganisir, namun pada akhir tahun 1978, melalui pengerahan kekuatan besar-besaran, pihak militer Indonesia telah berhasil secara perlahan-lahan menghancurkan basis-basis perlawanan di seluruh daerah tersebut.¹⁰ Para politikus dan pejabat militer tingkat tinggi telah menyelamatkan diri mereka sendiri dengan mengorbankan ratusan tentara dan ratusan pejuang gerilya berafiliasi dengan FALINTIL,¹¹ sebuah kelompok utama oposisi bersenjata, yang telah dibinasakan.

Di bawah situasi yang sulit, kepemimpinan gerakan pro kemerdekaan FRETILIN (Front Revolusi untuk Kemerdekaan Timor Timur) memutuskan untuk melanjutkan perlawanan ke seluruh daerah tersebut dan melakukan perang gerilya. Strategi Gusmao pada tahun 1983 adalah untuk meluncurkan sebuah kebijakan persatuan nasional yang meliputi sistem multi partai yang pluralis, mendeklarasikan bahwa FALINTIL tidak terafiliasi secara politik, dan menyusun Lembaga Pertahanan Nasional Maubere (CNRM). Jose Ramos-Horta telah ditunjuk sebagai wakil CNRM di luar negeri. Gerakan perlawanan digalakkan kembali selama konvensi Peniche¹² pada tahun 1998 ketika CNRM dimasukkan ke dalam sebuah organisasi baru, CNRT (Lembaga Nasional Perlawanan Masyarakat Timor), disahkan sebagai sebuah payung bagi organisasi yang dipimpin oleh Xanana Gusmao.¹³

Dengan kombinasi perlawanan internal dan solidaritas internasional, perlawanan yang meluas tanpa kekerasan telah bertahan selama lebih dari 25 tahun. Pada tahun 1996, gerakan kemerdekaan telah memperoleh perhatian lebih jauh dari masyarakat internasional ketika Jose Ramos-Horta, aktivis kawakan pembebasan nasional Timor Timur, dan Uskup Dili, Carlos Ximenes Belo dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian.¹⁴ Dalam pernyataannya ketika menerima anugrah tersebut, komite tersebut mengeluarkan pernyataan yang pedas atas kejahatan Indonesia terhadap hak-hak asasi manusia di Timor Timur.

Pada tahun 1997, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan yang parah dengan jatuhnya nilai mata uang rupiah. Tingginya tekanan dari dalam dan luar negeri telah menyebabkan Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, dan selanjutnya pemerintahan dipimpin oleh Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden untuk menggantikan Soeharto. Karena terganggu oleh krisis politik dan ekonomi yang sedang berlangsung, pemerintahan yang baru di Jakarta mulai memberi indikasi bahwa masalah Timor Timur sudah harus segera diselesaikan. Bagi Timor Timur sendiri hal tersebut seolah-olah memberi angin segar. Pada bulan Januari 1999, Presiden Habibie

mengeluarkan pengumuman yang sangat mengejutkan yaitu bahwa jika masyarakat Timor Timur menolak diberikan otonomi dalam pemerintahan daerahnya, maka mereka dapat memilih untuk merdeka. Para pemimpin gerakan kemerdekaan menyambut usulan yang menggembirakan dan mengejutkan tersebut dengan sikap optimis dan kehati-hatian. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan secara mendadak, Xanana Gusmao dengan ringan mengatakan, “lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali” dan mengisyaratkan bersedia memulai masa gencatan senjata. Pada tanggal 5 Mei, Indonesia dan Portugal secara resmi sepakat untuk menyerahkan usulan dan masalah pelaksanaan referendum kepada PBB. Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan komitmen Indonesia bahwa jika otonomi daerah ditolak, maka Timor Timur akan melepaskan diri dari Indonesia.¹⁵

Dalam pelaksanaan referendum yang dipandu oleh PBB, masyarakat Timor Timur diminta untuk memilih apakah mereka menerima atau menolak berintegrasi dengan Indonesia. Sejumlah 98% masyarakat datang dalam pemberian suara bersejarah tersebut, dengan 78.5% jumlah pemilih yang terdaftar memilih transisi ke kemerdekaan. Pelaksanaan dari hasil pemilihan tersebut seharusnya merupakan saat untuk suatu perayaan, namun pihak militer Indonesia dan milisi pro-integrasi melaksanakan politik bumi hangus. Tak terhitung jumlah masyarakat sipil yang menjadi korban pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai jenis kekerasan lainnya. Pihak militer memaksa masyarakat untuk pergi dari rumah mereka, merampas dan membakar harta benda mereka. Sekitar 260.000 orang telah diculik di Timor Barat, hanya sebagian kecil dari mereka yang termasuk milisi atau pro-otonomi. Selama dua minggu berikutnya, pihak Indonesia dan para milisi telah menghancurkan 75% bangunan-bangunan dan infrastruktur di Timor Timur dan menyebabkan 75% dari jumlah penduduk mengungsi.¹⁶

Pada akhir September tahun 1999, INTERFET (Pasukan Internasional untuk Timor Timur), pasukan yang dipimpin oleh Australia dan diberi wewenang PBB, mengambil alih dan mencoba untuk memperbaiki kondisi di Timor Timur.¹⁷ Penyebaran

INTERFET dibarengi dengan kehadiran badan-badan PBB, LSM internasional dan para aktor kemanusiaan lainnya. Dari dalam negeri sendiri, CNRT, kelompok-kelompok gereja, LSM lokal dan anggota masyarakat yang lain memainkan peranan kunci dalam membantu penduduk yang terkena musibah. Ketika kondisi keamanan telah terjamin, respon para aktivis kemanusiaan perlahan-lahan mulai mencoba untuk melebarkan jangkauannya ke seluruh daerah selama lebih dari dua bulan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruhnya.¹⁸ FALINTIL, setelah melindungi mereka yang membutuhkan tempat perlindungan di bukit-bukit, tidak terlibat pertempuran dengan pihak militer Indonesia selama terjadinya kekerasan pasca pemilihan, dan pada saat kedatangan INTERFET mereka tetap menempati basisnya yang mayoritas berada di bukit-bukit. Masyarakat Timor Timur secara perlahan-lahan kembali ke desa dan kota mereka. Sebagai akibat kerusuhan sepanjang tahun 1999, orang-orang Indonesia yang masih tersisa akhirnya meninggalkan Timor Timur, dan ini membuka jalan pada UNTAET untuk mengawasi jalannya pemerintahan transisi di daerah tersebut, sampai pada akhirnya mereka memproklamkan kemerdekaan pada bulan Mei 2002.

Dinamika Konflik

Sejarah kekerasan yang cukup panjang di Timor Timur telah meninggalkan luka yang belum terobati sampai saat ini. Kelompok-kelompok dalam masyarakat yang merefleksikan perbedaan kelas sosial, kekuatan ekonomi dan politik, serta ideologi merupakan peninggalan terakhir dari pendudukan bangsa asing dan secara signifikan telah memberi kontribusi terhadap konflik yang terjadi sekarang maupun terhadap kemungkinan terjadinya konflik di masa depan. Kelompok-kelompok tersebut menunjukkan keberadaannya sepanjang masa penjajahan Portugal. Perekonomian didominasi oleh kelompok Mestizos,¹⁹ orang-orang Portugis, serta imigran-imigran dari Cina dan Timur Tengah yang menjadi kaya raya dibandingkan dengan penduduk lainnya. Selama pendudukan Indonesia, sejak tahun 1975 sampai dengan

tahun 1999, kelompok-kelompok yang berbeda makin banyak yang berasal dari faksi-faksi yang terlibat dalam perang saudara. Konflik yang terjadi antara gerakan pro dan anti kemerdekaan mencapai titik puncaknya pada referendum yang dilaksanakan pada bulan Agustus serta kejadian-kejadian yang tragis sesudahnya.

Bahkan kelompok nasionalis dan para pemuda Timor Timur terpecah-belah dalam kelompok-kelompok internal. Misalnya, para pemuda terbagi menjadi kelompok yang bekerja sama, dibayar, serta dilindungi oleh para intelijen Indonesia dan kelompok nasionalis. Salah satu konsekuensi dari penindasan yang sistematis yang terjadi selama masa pendudukan adalah bahwa kelompok nasionalis, yang walaupun ikut serta dalam perjuangan pembebasan ternyata terbagi menjadi beberapa kelompok baik kecil maupun besar, yang memiliki perbedaan karakteristik yang jelas.²⁰

Sejak mundurnya Indonesia, sebuah kelompok baru terbentuk di Timor Timur antara Diaspora Timor dan mereka yang tetap tinggal di Timor Timur selama masa pendudukan. Banyak di antara mereka yang ikut berjuang untuk kemerdekaan telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja yang tersedia di Australia dan Portugal. Sebagai akibatnya adalah ketika orang-orang yang dulu dibuang keluar negeri kembali ke negara itu, merekalah yang pada akhirnya menempati posisi-posisi terbaik di pemerintahan dan di sektor swasta. Hal ini menyebabkan terjadinya kecemburuan dari mereka yang memilih tinggal.

Pengelompokan yang terkait kesempatan pendidikan dan Diaspora berhubungan erat dengan pengelompokan dalam penggunaan bahasa. Pada masa penjajahan, hanya sekitar 15% dari jumlah penduduk dapat baca tulis, dan sebagian besar masyarakat berbicara dengan bahasa asli mereka, Tetum. Namun para petinggi dan orang-orang yang kembali dari pengasingan menggunakan bahasa Portugis. Situasi tersebut semakin kompleks dengan diberlakukannya penggunaan bahasa Indonesia di tempat kerja serta diajarkannya bahasa tersebut di sekolah pada masa pendudukan Indonesia. Bahasa Inggris juga telah menjadi bahasa yang penting dalam dunia kerja. Konstitusi baru akhirnya

menegaskan bahwa bahasa resmi yang digunakan di negara tersebut adalah Portugis dan Tetum.

Pada akhirnya, negara baru tersebut dibebani konflik yang berkepanjangan yang berakar dari kekacauan dan pendudukan di masa lalu. Salah satu kelompok, CPD-RDTL (Dewan Rakyat untuk Pertahanan Republik Demokratik Timor Timur), menolak legitimasi lembaga PBB dan menuntut untuk kembali ke konstitusi tahun 1975. Serangkaian baku tembak terjadi di seluruh daerah dan seringkali yang berorientasi politik melibatkan CPD-RDTL. Menghadapi masalah tersebut, Presiden Xanana Gusmao mengambil inisiatif untuk melakukan dialog nasional pada tanggal 25 Januari 2003,²¹ yang mempertemukan wakil-wakil pemerintahan dengan wakil-wakil dari CPD-RDTL, agar dapat berdiskusi secara terbuka dan menyelesaikan tuntutan-tuntutan politik mereka. Dialog tersebut, yang disiarkan ke seluruh negara, tidak menghasilkan pemecahan, namun berhasil memberi kesempatan masing-masing pihak untuk menata posisinya masing-masing dan membuka peluang untuk saling membangun kepercayaan.

Penanggulangan Konflik oleh Badan-badan Resmi

Berbagai macam pandangan atau posisi tentang penyelesaian konflik diterapkan dalam kerangka jaringan multi-polar (multi-polar network).²² Para pelaku penting di antaranya adalah UNTAET, badan-badan PBB seperti UNICEF dan UNHCR, organisasi-organisasi internasional lainnya seperti International Organization of Migration (IOM), organisasi rekonsiliasi dan bantuan untuk masyarakat Timor (AVR),²³ LSM internasional, dan berbagai macam bentuk organisasi masyarakat sipil.

UNTAET, bekerja sama dengan pemimpin masyarakat Timor, membentuk dasar yang kuat untuk sebuah pemerintahan demokratis dengan system modern pada tingkat nasional. PBB juga membantu menciptakan kondisi-kondisi bagi penyelesaian politik jangka panjang antara Timor Timur dan Indonesia. Pasukan penjaga perdamaian PBB memainkan peranan kemanusiaan yang penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan negara

tersebut beserta penduduknya. Para penjaga perdamaian tersebut sangat penting dalam menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terang-terangan dan menciptakan lingkungan yang stabil, untuk pemulihan keadaan darurat dan sebagai dasar untuk pelaksanaan pembangunan.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Faktor penting yang mengurangi keefektifan badan-badan PBB dalam usaha menciptakan situasi yang aman di Timor Timur adalah kecenderungan mereka untuk lebih sering melakukan perundingan dengan para aktor pemerintahan daripada mendengarkan suara rakyat sipil dan memperhatikan keluhan-keluhan mereka. Di bawah UNTAET, para pejabat PBB yang dibekali resep-resep siap pakai, telah gagal dalam membangun berdasarkan kekuatan dan kapasitas yang ada, serta tidak ada kecenderungan untuk mendorong inisiatif yang sesuai dengan konteks masyarakat lokal. Di samping itu, PBB seolah-olah tidak berniat untuk meningkatkan kapasitas yang sudah ada seperti LSM yang cukup kokoh di Timor Timur, malahan bergantung secara eksklusif pada aktor-aktor internasional.

Dalam usaha pembangunan politik, UNTAET mengatur ke arah yang positif. Di satu pihak, pembentukan beberapa partai politik mencerminkan kecenderungan politik dalam masyarakat Timor Timur, di lain pihak, para pemimpin partai secara umum disatukan oleh isu-isu fundamental, tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan, dan tidak ada golongan politik yang mempunyai kecenderungan untuk kembali ke jalan kekerasan dalam usaha mencapai tujuannya. UNTAET telah berhasil, pada periode sesudah terjadinya konflik, dalam mencapai tujuan-tujuan utama misinya: Timor Timur telah aman dari pembalasan dendam para milisi yang telah mengakibatkan banyak malapetaka, dan badan tersebut telah menciptakan suatu lingkungan yang cukup aman sehingga banyak pengungsi yang kembali pulang ke tempat asalnya.

Diplomasi Multi Jalur

Dalam masyarakat Timor Timur ada ketegangan yang melekat dan terus menerus yang berkaitan dengan sisa-sisa permusuhan

selama pendudukan dan kerusuhan sosial, serta konflik-konflik yang tidak terselesaikan yang ada di antara berbagai macam elemen kelas bawah dalam masyarakat Timor. Selama tahun-tahun pendudukan, masyarakat dalam berbagai strata sosial telah mengembangkan metode pertahanan mereka sendiri dan hal tersebut tidak selalu jelas siapa para pelaku di Timor Timur yang bertanggung jawab terhadap aktifitas-aktifitas yang dilakukan, atau pihak-pihak luar mana yang bisa berperanan paling efektif dalam rekonsiliasi dan rekonstruksi. Oleh sebab itu, Timor Timur secara jelas bisa mendapat keuntungan dari pendekatan multi-aktor, multi-level, dan multi-sisi untuk menyelesaikan konflik masa lalu dan konflik-konflik yang muncul kemudian yang saat ini meresahkan masyarakat Timor Timur.

Pada level domestik, CNRT memiliki pengalaman dalam melindungi dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan dan keselamatan orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya dan para pengungsi sejak tahun 1999.

Mereka telah membentuk struktur masyarakat sipil mereka sendiri - sebagai contoh, catatan sipil dan program pendidikan - bagi mereka yang berjuang dalam usaha perlawanan dan hidup di gunung-gunung. CNRT telah membantu PBB dalam penyelesaian kembali isu-isu yang melekat dalam masyarakat pada saat terjadinya konflik dan telah aktif dalam mempersiapkan Timor Timur dari masa transisi ke negara merdeka. Namun, terlepas dari mandat dan meningkatnya kemampuan polisi sipil (Civpol) PBB dan juga adanya PNTL (Policia Nacional Timor Leste) yang baru disahkan, anggota dari berbagai struktur yang paralel tetap melanjutkan apa yang mereka yakini sebagai fungsi “keamanan”, yang seringkali meluas menjadi penggalangan kekuatan untuk menjaga ketertiban dan hukum. Kurangnya jumlah polisi dan layanan hukum negara tersebut pada akhirnya menghadapi cobaan yang sebenarnya pada tanggal 4 Desember 2002, ketika rasa frustrasi terhadap isu-isu ekonomi meletus menjadi sebuah kerusuhan yang serius di mana kekuatan keamanan negara tidak mampu mengendalikan situasi sepenuhnya.²⁴

Pada periode setelah kemerdekaan, pembinaan kelompok-kelompok masyarakat sipil menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan untuk menuju pembangunan yang sesuai dengan yang diinginkan dan yang menjadi penentu dalam upaya untuk menghindari bentrokan dan kekerasan. Para aktor politik lokal memiliki peran yang penting dalam membangun budaya untuk mencegah kekerasan dan menjamin kelanggengan perdamaian.²⁵ Rencana Pembangunan Nasional (National Development Plan)²⁶ menegaskan legitimasi dan pentingnya masyarakat sipil dalam kerangka pembangunan nasional. Melalui forum LSM, komunitas LSM juga telah terlibat dalam membuat kebijakan pada tahap-tahap awal. Dua kategori masyarakat sipil telah muncul setelah melewati waktu bertahun-tahun, yaitu masyarakat sipil selama periode perlawanan dan masyarakat sipil selama periode transisi.²⁷ Timor Timur tidak pernah memiliki institusi pemerintahan yang berdaulat, tetapi hanya pos-pos terdepan kolonial Portugis yang jauh atau institusi-institusi administratif propinsi sebagai pelaksana keputusan dan kebijakan Jakarta pada masa Pemerintahan Indonesia. Namun, masyarakat sipil pada periode transisi yang meliputi komunitas dan organisasi-organisasi masyarakat sipil (LSM, seperti ETADep, Yayasan Hak, kelompok aktivis wanita, *Rede das Mulheres*, dan Gereja Katolik) memainkan peranan aktif dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik yang dirancang dan dilaksanakan oleh LSM lokal, dan seringkali dengan sedikit campur tangan pihak internasional.

Saat ini masyarakat sipil terus berkembang dengan cepat, baik dari segi jumlah maupun dalam berbagai macam aktivitas kegiatan. Lingkungan di mana mereka bergerak sangat kooperatif.²⁸ Sekarang ada sekitar 230 LSM lokal.²⁹ Melalui payung utama mereka, yaitu LSM Forum, LSM ini telah menyediakan saluran atau pos-pos bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi mereka dan juga memberi masukan untuk kebijakan lokal dan nasional. Sebagian besar LSM di Timor Timur terlibat dalam membuat ketetapan mengenai bantuan darurat kemanusiaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pertanian, pembangunan, pelestarian lingkungan,

pemerintahan, tugas-tugas yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dan aktivitas-aktivitas keadilan dan perdamaian.³⁰ Sementara sebagian besar dari kelompok-kelompok ini terpusat di Dili, organisasi-organisasi ini mulai merubah cara pandang mereka dalam semua bidang dengan cara-cara yang menarik.

Dengan dipelopori oleh organisasi-organisasi berpengaruh yang berbasis di Dili yang muncul antara tahun 1996 dan 1999, masyarakat sipil juga telah dilibatkan dalam penyelesaian konflik, pendidikan para pemilih, dan memonitor terciptanya perdamaian dan rekonsiliasi di Timor Timur. Sebagian besar terlepas dari PBB dan badan-badan internasional, walaupun mereka memang mendapatkan bantuan keuangan dari badan-badan luar. Aktivitas mereka seringkali merupakan respon terhadap terjadinya konflik internal dalam negeri. Kampanye pendidikan yang paling sukses saat ini, dihasilkan dari partisipasi 86% pemilih yang memiliki hak pilih dalam pemilihan presiden, merupakan contoh yang luar biasa dari dilaksanakannya pendidikan kewarganegaraan oleh organisasi-organisasi lokal.³¹

Kontribusi nyata yang seperti apakah yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil di Timor Timur? Cara-cara ketika LSM membantu perkembangan masyarakat sipil akan tetap dipakai dalam pelajaran kewarganegaraan baik untuk warga negara maupun para pelaksana kantor. Mereka telah bertindak sebagai mediator antara PBB, administrasi pemerintahan yang baru muncul, dan penduduk pada umumnya. Interaksi-interaksi semacam itu telah membantu para politisi untuk memahami bahwa mereka seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, dan membantu penduduknya untuk memberikan umpan balik dan memberi masukan kepada pemerintah mereka.

Perkembangan penting yang telah berjalan selama lebih dari dua tahun lalu adalah munculnya organisasi-organisasi berbasis masyarakat dan stasiun-stasiun radio yang dioperasikan secara lokal, yang menciptakan *capacity-building* pada masyarakat level paling bawah dan memungkinkan mengudaranya program yang seimbang dan informatif. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat

dalam mengartikulasikan kepentingan mereka, membantu membuat pilihan-pilihan objektif, membantu mendesak pengaruh pada pemerintah untuk meningkatkan pelayanan, dan untuk menjaga agar pemerintah tetap bertanggung jawab, konsisten dengan gagasan yang menyatakan bahwa keterlibatan warga negara adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sebuah pemerintahan yang baik. Adanya kesempatan untuk menyiarkan rasa keingintahuan masyarakat - termasuk pada level yang sangat lokal, memunculkan suatu sikap yang memiliki wewenang untuk bersikap kritis terhadap keadaan yang harus dipertanggungjawabkan dan memberi kekuatan kepada masyarakat miskin.³²

Perhatian khusus harus diberikan terhadap bidang-bidang: *penyelesaian konflik, pembelaan dan pengawasan terhadap hak-hak asasi manusia, dan demokrasi.*

Kelompok-kelompok masyarakat sipil terkemuka, seperti Yayasan Hak, SIL, KSI, dan ETSG, telah memainkan peranan penting dalam mempromosikan inisiatif membangun perdamaian di seluruh Timor Timur. Termasuk juga peranan yang sedang tumbuh dari pergerakan buruh di desa-desa, diprakarsai oleh Lembaga Pembelaan Buruh untuk Timor Timur (LAIFET). Ini adalah pelajaran yang sulit, karena pengalaman yang dimiliki sebagian besar masyarakat adalah pemerintahan asing yang tidak bertanggung jawab yang memaksakan otoritasnya, dan yang bisa mereka lakukan hanya melawan. Sebagian besar program pendidikan kewarganegaraan yang digerakkan oleh masyarakat internasional tidak dapat melaksanakan tujuannya secara efektif, sedangkan beberapa pelaksana lokal telah melakukannya dengan lebih baik.³³ Kegiatan-kegiatan dalam mengelola konflik yang dapat dijadikan contoh yang dilakukan oleh Yayasan Hak, ETSCC, dan SIL, misalnya dengan mengeluarkan selebaran-selebaran, brosur-brosur, dan informasi yang relevan untuk didistribusikan di daerah-daerah sebelum pemilihan Dewan Perwakilan dan Kepresidenan, sangat mengesankan. Dikombinasikan dengan informasi tambahan yang disediakan oleh saluran-saluran berbagai media, seperti ra-

dio UNTAET, Suara Timor Lorosae, TVTL, dan Timor Post, mereka memainkan bagian yang penting dalam menstimulasi dan melindungi demokrasi yang masih berbentuk embrio memenuhi bahan informasi yang kosong yang jika tidak akan diisi oleh rumor dan informasi keliru yang dapat menjadi pemicu ketidakpuasan. Dengan memperluas pelayanan mereka hingga keluar Dili, dan dengan penjelasan mengenai pilihan-pilihan, prosedur pemungutan suara, pentingnya pemilihan tersebut, LSM ini tengah menyusun hubungan langsung dengan populasi tersebut dan membantu membangun dan menanamkan norma-norma demokrasi di negara yang tidak pernah mengalami demokrasi tersebut, apa lagi pemerintahan sendiri. Mereka juga mendorong pertumbuhan organisasi-organisasi akar rumput di luar ibukota. LSM lokal benar-benar membantu perkembangan bentuk masyarakat sipil yang positif yang akan menambahkan secara kualitatif dalam upaya mencegah konflik dan menciptakan perdamaian di Timor Timur.

Kelompok-kelompok berbasis Barat yang aktif di Timor Timur (misalnya Oxfam, Caritas, CARE, World Vision, Concern, the International Republican Institute, Catholic Relief Services, the Asia Foundation, dan banyak lagi), menunjukkan banyak keahlian khusus dalam pekerjaan mereka dalam membangun perdamaian di Timor Timur. Ada pengakuan yang tumbuh dengan cepat bahwa semua kelompok dan organisasi di bidang ini saling membutuhkan satu sama lain jika mereka ingin berbuat banyak terhadap konflik-konflik yang telah berurat dan berakar secara mendalam yang harus mereka selesaikan.

Pelayanan Informasi- Dengan menyediakan saluran komunikasi antara penduduk dengan para elit politik, organisasi-organisasi masyarakat sipil sedang membantu perkembangan komunikasi dan kepercayaan secara umum.³⁴ Pertumbuhan yang subur dalam media cetak dan elektronik seperti *Suara Timor Lorosae*, *Timor Post*, *Talitakum*, *Lian Maubere*, *TVTL*, *Radio Timor Lorosae*, *Radio Katolik Timor Kmanek* (RTK) pada tingkat nasional, bersama-sama dengan komunitas-komunitas stasiun radio yang dipromosikan oleh

ETSCC di Liquica dapat digunakan untuk penyebaran informasi tentang manajemen konflik dan meningkatkan hubungan damai antara partai-partai yang bertikai sebelumnya. Perkembangan media yang dapat dipercaya juga dapat menyediakan layanan penyebaran program partai yang efektif untuk memadamkan dan merespon rumor-rumor negatif yang tidak bertanggung jawab yang cenderung beredar di ibukota. Namun demikian, ada keprihatinan bahwa kebebasan pers yang telah lama diimpikan oleh organisasi media orang Timor mungkin tidak akan berlangsung lama, karena pemerintah saat ini tengah mencoba untuk menentukan batasan-batasan terhadap media.

Keseimbangan Gender- Pada masa lampau, wanita-wanita Timor ditempatkan pada peranan yang marjinal dalam masyarakat Timor Timur. Tetapi dengan dukungan organisasi payung REDE dan Mulheres, secara perlahan-lahan wanita Timor mulai meningkatkan kontribusinya terhadap terciptanya perdamaian dan aktivitas-aktivitas politik. Intervensi yang dilakukan oleh komunitas dan pendonor internasional, seperti yang dilakukan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Bank Dunia juga telah memberi kontribusi untuk mempromosikan peranan wanita dalam struktur pemerintahan lokal.³⁵ Saat ini ada tugas yang tengah dilaksanakan sebagai bagian yang penting dari organisasi pendukung gerakan wanita FOKUPERS, organisasi wanita antar partai OMT, dan PBB untuk meningkatkan kampanye melawan kekerasan domestik, sebuah isu penting mengenai betapa mudahnya wanita Timor diserang atau dilukai. Kampanye publik tersebut dibantu oleh *TVTL*, *Radio Timor Lorosae*, dan *RTK*, yang menyiarkan informasi untuk meningkatkan kewaspadaan publik terhadap isu-isu gender.

Sesungguhnya, wanita Timor Timurlah yang pertama kali meyakinkan bahwa struktur transisi PBB harus memasukkan departemen urusan gender tersebut, dan ini telah terbentuk dalam UNTAET, dan merupakan campuran yang terdiri dari staf lokal dan internasional. Departemen ini telah melakukan banyak hal untuk meyakinkan bahwa pertimbangan gender harus mulai

diperhatikan secara serius, baik oleh otoritas transisi PBB maupun para pemimpin politik Timor Timur. Sebagai hasil dari lobi yang dilakukan secara langsung dengan pemerintah, sebuah kantor untuk peningkatan kesetaraan (OPE)³⁶ telah didirikan dengan program untuk melaksanakan dua strategi yaitu untuk memberi kuasa kepada wanita, baik dalam pemerintahan maupun dalam pelayanan masyarakat, sama halnya dengan wanita dalam masyarakat sipil. Jumlah (26%) wanita sebagai anggota parlemen adalah salah satu konsekuensi yang nyata dari tanda meningkatnya pengakuan akan keberadaan wanita. Ini adalah pengakuan yang penting mengenai peranan wanita Timor yang telah dimainkan dengan baik dan akan terus berlanjut untuk dilaksanakan dalam bidang perwujudan perdamaian dan rekonsiliasi.

Pendidikan dan Pelatihan Universitas-universitas³⁷ dan kelompok-kelompok pemikir independen juga memainkan peranan penting dalam mengkampanyekan kesadaran akan kebijakan publik. Debat publik yang berlangsung terus-menerus di kampus yang diorganisir oleh Universitas Nasional Timor Timur, melalui Pusat Riset Nasional-nya (CNIC),³⁸ bekerja sama dengan Lembaga Demokrasi Nasional untuk Urusan Internasional (NDI), adalah sebuah contoh dari sebuah inisiatif yang telah memberi kontribusi positif bagi terciptanya perdamaian. Seminar-seminar yang dilaksanakan telah menyatukan dua partai yang berpotensi menimbulkan konflik, yaitu F-FDTL dan veteran pendiri FALINTIL yang ternyata tidak terpilih untuk masuk Pasukan Pertahanan Keamanan, untuk bersama-sama membahas secara terbuka pandangan-pandangan dan kontribusi potensial mereka untuk pembangunan bangsa di masa yang akan datang.³⁹ Satu topik yang lebih terbatas namun efektif dalam menangkal isu-isu yang mempengaruhi perhatian nasional tengah dipromosikan melalui sebuah kelompok pemikir yang berbasis di Dili, Kelompok Studi Timor Timur (ETSG)⁴⁰ yang telah memperoleh reputasi karena keberhasilan mereka melibatkan institusi-institusi dan kelompok-kelompok masyarakat sipil tingkat tinggi dalam diskusi mengenai isu-isu kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan

Timor Timur saat ini.

Rekonsiliasi

Sebuah langkah kongkret yang harus diambil untuk membangun persatuan nasional di Timor Timur adalah rekonsiliasi di antara masyarakat Timor Timur, sebuah usaha yang sangat didukung oleh para pemimpin Timor saat ini.⁴¹ Menyadari bahwa pada masa pasca-konflik, masyarakat dan kelompok politik di Timor Timur masih mengalami trauma dan belum mapan, ada semacam kebutuhan untuk mengidentifikasi cara-cara mana perpecahan di dalam dan antara komunitas dapat diarahkan sehingga diharapkan dapat mempersempit perbedaan antara mereka yang mendukung kemerdekaan dan mereka yang menentangnya, mengkampanyekan rekonsiliasi, memperkuat kesatuan sosial, dan menciptakan rasa aman dan kedekatan dalam masyarakat luas.⁴² Secara khusus, isu keadilan, karena ia berkaitan dengan rekonsiliasi, termasuk bagian utama dari pencegahan terjadinya konflik. Gereja Katolik juga memainkan peranan yang menentukan dalam mengkampanyekan rekonsiliasi.

Satu bagian yang penting dalam debat mengenai rekonsiliasi dan keadilan terfokus pada pilihan-pilihan yang dihadapi Timor Timur yang berkenaan dengan instrumen-instrumen yang tepat untuk menghadapi masa lalunya yang menyakitkan, khususnya pada pilihan antara sebuah proses peradilan “penghukuman”, dengan sebuah pengadilan kejahatan perang sebagai instrumen yang terpenting, atau sebuah proses yang bersifat “perbaikan”, dengan komisi kebenaran sebagai instrumen utama.

Banyak perhatian terfokus pada dimensi hukum dari pengadilan tersebut, pengaruhnya yang potensial pada kedaulatan, dan aspek keadilan dari hal tersebut. Sebuah komisi kebenaran telah ditugaskan untuk menyelesaikan kondisi dualisme yang nyata antara kebenaran dan keadilan, dan juga pemberian amnesti.⁴³ Para korban kekerasan mendesak peradilan retributif dengan tekanan yang kuat berdasarkan norma hukum. Namun satu pertimbangan yang penting –pengaruh yang nyata pada satu prosedur atau

prosedur yang lain- secara umum telah dilupakan dalam debat. Pertanyaannya adalah apakah salah satu prosedur tersebut dapat secara sungguh-sungguh menyelesaikan akar penyebab utama dari konflik tersebut. Jika pengaruhnya terbatas hanya pada individu-individu, maka penerapannya tidak akan memberi pengaruh yang berarti terhadap pencegahan konflik. Sayangnya hanya sedikit pekerjaan yang bersifat empiris yang telah dilakukan dalam bidang ini. Hasil yang paling terlihat dari diskusi-diskusi tersebut adalah didirikannya Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR), yang diresmikan pada bulan Januari 2002,⁴⁴ yang dicanangkan “untuk mengkampanyekan rekonsiliasi, persatuan nasional, dan perdamaian.” Badan tersebut telah diberi mandat yang saling melengkapi dengan pengadilan, dengan otoritas untuk berurusan dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang tidak terlalu serius. Komisi tersebut, yang memiliki perwakilan baik di tingkat nasional maupun regional, adalah sebuah lembaga kewenangan independen yang memiliki tiga fungsi yaitu: untuk menyediakan forum pemberitahuan kebenaran dari para korban dan para pelaku kejahatan hak-hak asasi manusia; untuk memfasilitasi rekonsiliasi komunitas bagi pelaku kejahatan-kejahatan yang lebih ringan; dan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai tindak lanjut tentang rekonsiliasi dan hak asasi manusia. Sebuah proses “Kejahatan Serius” telah dilaksanakan dan berjalan sejajar dengan CAVR untuk membawa para pelaku tersebut, yang masih tersisa di Timor Timur khususnya yang melakukan kejahatan serius, ke pengadilan.

CAVR diberi wewenang untuk menentukan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kurun waktu 24 tahun masa pendudukan Indonesia,⁴⁵ dan melaporkan alasan-alasan yang mendasar yang menyebabkan pelanggaran tersebut. CAVR berusaha untuk membantu masyarakat untuk menghormati mereka yang kehilangan nyawanya. Dalam usaha untuk memahami penyebab dari apa yang telah terjadi di Timor pada masa ini, diharapkan bahwa CAVR mungkin akan dapat membuat hal tersebut menjadi sedikit lebih sulit bagi masyarakat internasional

untuk membiarkan hal tersebut terjadi lagi.⁴⁶

Sekalipun CAVR sudah didirikan, perdebatan masih berlanjut mengenai didirikannya pengadilan kejahatan perang internasional di samping komisi kebenaran. Sampai saat ini, satu-satunya tindakan yang diambil melawan para tersangka dari Indonesia yang melakukan kejahatan kemanusiaan yang serius, dilakukan di Jakarta, di mana beberapa –sebagian besar yunior– tentara Indonesia telah diadili pada pengadilan ad hoc hak asasi manusia Indonesia. Hasil-hasil tersebut telah ditolak secara luas karena dianggap tidak cukup oleh masyarakat internasional dan Timor Timur sendiri. Banyak masyarakat Timor Timur menuntut agar masyarakat internasional mengambil inisiatif untuk menghukum mati para pelaku kejahatan hak asasi manusia yang kotor melalui pengadilan internasional. Rekonsiliasi, dalam pandangan ini, lebih merupakan usaha politik yang dikemas dalam bentuk permintaan maaf, jabatan tangan, dan rangkulan. Keadilan bagi para pelaku pelanggaran perlu dilakukan. Bagaimanapun, kepemimpinan Timor Timur yang sekarang yakin bahwa kepentingan nasional negara tersebut akan meningkat lebih baik dengan menghindari potensi merosotnya hubungan antara Timor Timur dengan Indonesia yang dapat terjadi jika orang Indonesia yang menjadi tersangka harus diadili.

Dua model rekonsiliasi yang disederhanakan dilaksanakan di Timor Timur, yaitu, satu berpusat pada elit politik dan yang lain pada masyarakat bawah.⁴⁷ Walaupun usaha-usaha lebih awal untuk melibatkan para tokoh di kedua level tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, hasil akhirnya tampaknya bercampur.⁴⁸

Rekonsiliasi yang berkenaan dengan penduduk kamp pengungsi adalah sebuah isu yang telah, hingga saat ini, membuahkan hasil-hasil yang tercampur. Walaupun agen-agen PBB telah berusaha untuk mengimplementasikan program pemulangan kembali, kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam program tersebut telah membawa ke arah marginalisasi para milisi bersenjata yang mengendalikan kamp-kamp pengungsi tersebut. Hal ini sebagian berkaitan dengan perbedaan pendirian yang berdasarkan ideologi, prinsip-prinsip rekonsiliasi, dan persyaratan-persyaratan

penting untuk memperoleh hasil yang langgeng. Sementara usaha-usaha rekonsiliasi masih berlangsung, sebuah penjelasan yang mungkin memberikan pengertian atas timbulnya kesulitan-kesulitan tersebut dapat dianggap berasal dari simbolisme rekonsiliasi tersebut, dengan suara-suara keagamaan yang kuat dan asosiasinya dengan budaya kemanusiaan masyarakat tradisional Timor (*nahe bitit*)

Rekonsiliasi membutuhkan waktu dan usaha yang efektif. Jika proses tersebut ditinggalkan sebelum pekerjaannya dilaksanakan, konsekuensi yang tidak menguntungkan mungkin adalah bahwa rekonstruksi jangka panjang akan lebih menghalangi daripada membantu.

Perhatian terhadap Para Mantan Pejuang

Banyak negara yang pernah mengalami konflik telah menghadapi kesulitan-kesulitan yang serius ketika mereka gagal untuk memperhatikan permasalahan-permasalahan veteran atau menggunakan kebijakan-kebijakan mengenai veteran yang tidak jelas dan tidak dapat dilaksanakan. Timor Timur memperhatikan lebih awal masalah ini: Presiden Xanana Gusmao telah membentuk dua komisi untuk menyelesaikan masalah tersebut –satu komisi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi para mantan pejuang dari periode tahun 1975-1979 dan satu komisi lagi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi para veteran FALINTIL dari periode tahun 1981-1999.⁴⁹ Betapapun pentingnya pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para veteran dan memuaskan tuntutan mereka dana yang tersedia saat ini tidak mencukupi.

Proses penciptaan perdamaian juga telah berusaha keras untuk mengidentifikasi legitimasi para mantan pejuang dan keluarganya dan mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat sipil. Sebuah Program Bantuan Penempatan kembali FALINTIL (FRAP) dilaksanakan oleh International Organization of Migration (IOM) di bawah UNTAET yang menyediakan dukungan awal dalam pendemobilisasian para anggota FALINTIL dengan bentuk subsidi sejumlah US\$500 dan berbagai macam paket reintegrasi

dalam kelompok-kelompok masyarakat yang besar.⁵⁰ Walaupun sebagian telah dianggap sukses sebagai sebuah prakarsa ekonomi, program tersebut tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang lebih luas dari integrasi sosial, yang memiliki potensi untuk menciptakan kerusuhan yang serius dan berkelanjutan.

Prospek

Pembangunan kembali sistem-sistem politik, sosial, ekonomi, dan keamanan setelah terjadinya konflik yang berkepanjangan adalah sebuah tugas yang benar-benar berat. Faktor-faktor yang menentukan adalah ketahanan dan komitmen –kemauan dari semua pelaksana untuk terlibat dalam usaha-usaha pembangunan kembali dan rekonsiliasi jangka panjang- bersama-sama dengan investasi yang dapat dilakukan dalam usaha mencegah timbulnya kerusuhan yang berulang kembali.⁵¹ Timor Timur menghadapi tantangan yang luar biasa pada banyak bidang ketika ia melangkah untuk membangun lembaga-lembaga politik, sosial dan ekonominya. Sistem hukum dan peraturan, dan peradilan yang adil dan efektif, dan pemerintahan yang baik harus dibentuk untuk mengamankan demokrasi dan menjamin dihormatinya hak asasi manusia yang fundamental.

Kemajuan yang mengarah pada stabilitas akan meminta perhatian bagi sejumlah pokok permasalahan. Rasa frustrasi yang tinggi antara para pejuang FALINTIL muda dan mantan pejuangnya, sebagaimana dibuktikan dengan protes dan tindak kekerasan, merupakan tantangan yang penting di masa depan. Lebih jauh lagi, adanya kebutuhan untuk mengaplikasikan tekanan politik pada proses rekonsiliasi itu sendiri. Ada kemungkinan meningkatnya tekanan politik dan sosial jika proses rekonsiliasi nasional dan penciptaan perdamaian mengalami hambatan. Sebagai tambahan, perkembangan masyarakat sipil yang lemah, bergandengan dengan meningkatnya pelaksanaan kontrol politik oleh partai yang berkuasa (FRETILIN) mengurangi perkembangan pemerintahan yang representatif. Akhirnya, prospek damai terancam oleh kurangnya kemajuan dalam kapasitas pembangunan

baik pada tingkat nasional maupun lokal, dan dengan ketidakstabilan makroekonomi yang disebabkan oleh defisit anggaran yang besar dan sedikitnya kemajuan dalam reformasi ekonomi. Kurangnya sumber daya manusia dan ekonomi dapat merusak kondisi ekonomi dan mungkin akan membawa ke arah ketidakstabilan sosial dan politik.

Proses penciptaan perdamaian di Timor Timur bergantung pada aktivitas dan pelaksana yang kompleks: sokongan, manajemen konflik, dan pendidikan dan pelatihan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil pada tingkat nasional dan daerah. Hal ini penting khususnya bahwa wanita dan kelompok yang termarginalkan lainnya mulai berpartisipasi dalam pembuatan keputusan pada semua tingkatan dalam masyarakat. Proses tersebut akan membutuhkan hubungan antara warga negara dan negara yang diperkuat, dan institusi-institusi yang ditransformasikan untuk dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi efektif warga negara, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

Saran-saran

Pemberdayaan Warga Negara

Masyarakat yang diperkuat oleh agenda penciptaan perdamaian sering kali merasakan adanya solidaritas dan keyakinan bahwa hal tersebut adalah momentum untuk perubahan. Tempat yang paling cocok untuk memulai hal tersebut adalah pada tingkat lokal atau akar rumput masyarakat Timor Timur, di mana pengaruh yang kuat yang paling berpengalaman dan di mana tanda peringatan awal dari munculnya konflik akan berasal dari sini. Masyarakat tingkat bawah juga menyediakan konteks rehabilitasi yang paling bermanfaat. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber daya tradisional bagi perbaikan dan secara relatif menahan konflik. Cara yang paling efektif dan tahan lama untuk membangun perdamaian dan mencegah konflik adalah memastikan bahwa masyarakat Timor Timur, dengan memanfaatkan lembaga dan struktur sosial mereka sendiri, membangun keyakinan akan kemampuan untuk mengatur masalah dan perselisihan mereka sendiri.

Memperkuat Masyarakat Sipil

Usaha-usaha yang dilakukan seharusnya berpusat pada penguatan masyarakat sipil Timor Timur, dan bekerja dengan organ-organ pemerintahan yang muncul (terutama pada tingkat kabupaten dan kecamatan) untuk meningkatkan pendekatan-pendekatan partisipatoris mengenai kebijakan dan perencanaan. Partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan publik, perdebatan dan pembahasan kebijakan dan opsi-opsi yang ada, dan permusyawaratan dalam membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan, harus merupakan bagian inti pemerintahan demokratis pada semua tingkatan. Konflik berkurang ketika masyarakat sipil berjalan dengan baik dan kesempatan untuk partisipasi demokratis terlaksana baik pada level nasional maupun lokal. Hal tersebut adalah sangat penting untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat akan peranan, fungsi dan kegiatan-kegiatan dari organ-organ pemerintahan yang berbeda-beda, badan-badan pemberi bantuan, LSM, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Memperkuat Supremasi Hukum

Adalah hal yang penting bagi semua partai yang terlibat, khususnya pemerintah dan pemberi bantuan, untuk memiliki komitmen dalam pembangunan jangka panjang masyarakat Timor Timur di mana supremasi hukum diberlakukan. Pengaturan keadilan adalah kunci dari ini semua. Rencana pelatihan jangka panjang bagi para hakim, jaksa penuntut, pembela dan perangkat pengadilan lainnya, harus dibuat, sama halnya dengan petunjuk pelaksanaan untuk polisi, jaksa penuntut, hakim, dan para pemimpin masyarakat dalam memperjelas masalah apa yang harus langsung dibawa ke proses pengadilan kriminal formal dan masalah mana yang mungkin lebih cocok diajukan melalui sistem peradilan tradisional. Juga, semua hukum yang dapat diaplikasikan di Timor Timur sebaiknya ditinjau ulang untuk mengidentifikasi kesenjangan dan meyakinkan konsistensi hukum dengan standar internasional

hak-hak asasi manusia, untuk memungkinkan akses untuk keadilan, dan menyediakan bantuan yang dianggap penting atau ukuran-ukuran yang perlu diambil untuk menjamin terlaksananya pengadilan daerah. Akhirnya, penyebaran yang efektif dan tepat waktu dari semua hukum negara yang dapat diaplikasikan ke masyarakat luas harus mulai dilaksanakan, melalui saluran media cetak dan elektronik yang memungkinkan; workshop dan pertemuan yang melibatkan kelompok masyarakat sipil pada tingkat desa harus diorganisir untuk memungkinkan rakyat membiasakan diri mereka dengan hukum yang tengah disebarluaskan, termasuk tugas-tugas dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.

Mempertahankan Perdamaian dan Stabilitas melalui Rekonsiliasi

Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk membina perdamaian dan rekonsiliasi antar masyarakat Timor Timur pada tingkat elit dan tingkat bawah terus menghadapi tantangan yang berat. Karena adanya trauma akibat perang dan sejarah yang kompleks dengan Indonesia, perhatian khusus diperlukan oleh kedua negara pada tingkat negara maupun masyarakat sipil untuk meletakkan hubungan ini di atas pondasi yang baru dan positif. Pada kedua tingkat tersebut masyarakat sipil memiliki peranan yang penting untuk melakukan transformasi perilaku dan sikap yang keras serta situasi yang sulit.

Pendidikan untuk Menciptakan Perdamaian

Kegiatan-kegiatan yang menuju pada usaha menciptakan perdamaian harus dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum baru sekolah untuk menjadi cermin representasi realistik dari sejarah Timor Timur. Kebutuhan untuk mempertahankan kumpulan kenangan dari sejarah masyarakat Timor dalam memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan dan perdamaian adalah suatu keharusan. Perkembangan sejarah itu juga dapat membantu proses tidak hanya dalam perkembangan identitas nasional tetapi juga dalam mengefektifkan penyembuhan secara kolektif. Para pemuka gereja, kelompok-kelompok bisnis, LSM dan para akademisi harus

didorong untuk bersikap proaktif dalam memberikan kontribusi mereka.

Mendukung Saluran Media yang Independen

Satu komponen yang penting untuk memahami resolusi konflik tanpa kekerasan adalah memperkuat organisasi media lokal yang independen, baik media cetak maupun media elektronik, untuk menyampaikan perubahan yang cepat dan drastis dalam manajemen konflik di Timor Timur. Di ibukota, surat kabar *STL* dan *Timor Post* dan *TVTL* berperan konstruktif, sementara pada tingkat daerah dan desa, radio nampaknya menjadi saluran media yang paling efektif. Saluran-saluran yang masih aktif juga perlu dikembangkan untuk memfasilitasi aliran informasi dari masyarakat lapisan bawah kepada para pembuat keputusan, fungsionaris pemerintahan lainnya dan mereka-mereka yang terlibat di dalamnya.

Kerja sama antara Berbagai Macam Unsur dalam Negara

Masyarakat sipil perlu membangun protokol jangka panjang dengan menyadari adanya kebutuhan untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB di Timor Timur sambil tetap mempertahankan kebebasan yang jelas dan eksplisit. Hal yang sama juga berlaku bagi PBB dan badan internasional lainnya yang harus bertanggung jawab untuk secara aktif menjangkau masyarakat sipil. Disarankan agar kewarganegaraan sosial dan politik dapat dihubungkan secara integral untuk meningkatkan mata-pencarian dengan meningkatkan alokasi sumber daya yang adil dan mengurangi ancaman terjadinya konflik sipil. Dalam prakteknya, masyarakat sipil dan badan-badan PBB, bersama-sama dengan pegawai pemerintahan, perlu mencari cara yang lebih baik untuk memperluas kewarganegaraan yang efektif pada masyarakat pedesaan Timor Timur, pria dan wanita, dan untuk melengkapi sumber-sumber daya mereka dengan memberikan dana, pelatihan, dan dukungan dalam kegiatan-kegiatan untuk menuju terciptanya perdamaian.

Catatan

¹ Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dionisio Babo Soares (RSPAS ANU Canberra) dan Francisco Da Costa Guterres (Griffith University, Brisbane) atas komentar mereka pada draft awal paper ini.

² Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET) didirikan berdasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1272 pada tanggal 25 Oktober 1999. Lembaga tersebut diberi kuasa untuk melatih seluruh otoritas legislatif, eksekutif, dan pengadilan Timor Timur. Tugas utamanya adalah mengamankan dan mempertahankan terlaksananya hukum dan peraturan di seluruh daerah tersebut. Untuk penilaian yang lebih kritis mengenai kegiatan UNTAET di Timor Timur, lihat Jonathan Steele (2002) "Nation Building in East Timor", *World Policy Journal*; juga lihat Fox atau Soares, dalam Soesastro dan Subyanto (eds) (2002) *Peace Building and State Building in East Timor*. Untuk catatan yang lebih kritis, silahkan lihat Pitchard (2001).

³ Masyarakat Timor tidak hanya mengalami pemerintah sebagai suatu beban dari luar di bawah pemerintahan Portugis dan Indonesia, tetapi juga pada taraf tertentu di bawah UNTAET. Hal ini secara umum telah mengakibatkan keengganan pada sebagian masyarakat Timor Timur untuk terlibat dengan pemerintah pada tingkat konstruktif, dan pada tingkat kepemimpinan untuk memikul tanggung jawab terhadap sebuah proses di mana mereka merasa hanya memiliki sedikit peran dalam pengendaliannya. Langkah-langkah yang penting telah diambil pada tahun 2000-2002 yang kemudian membawa masyarakat Timor Timur untuk duduk sebagai pengendali. Pada pemilihan bulan Agustus 2001, 16 partai politik mendaftar dan berkampanye. 5 dari partai-partai tersebut telah berdiri pada tahun 1974-1975, dan 11 lainnya sebagian besar baru didirikan pada tahun 2000-2001. Hal tersebut tidak memberi mereka cukup waktu untuk merefleksikan diri mereka lebih dari slogan-slogan kampanye dan strategi mengenai pemerintahan. Sebagaimana diperlihatkan dengan tingginya keikut-sertaan rakyat baik pada saat Referendum tahun 1999 maupun pada pemilihan Majelis Konstituante pada tahun 2001, masyarakat Timor Timur adalah masyarakat yang telah sangat dipolitisir, namun tidak dengan cara modern sedangkan politik masih digerakkan oleh ciri khas diri tokoh daripada digerakkan oleh program.

⁴ Lihat pandangan Makroekonomi dalam *National Development Plan* (2002).

⁵ Lihat Taylor, (1991) *Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor*.

⁶ Dunn, James (1983), *Timor A People Betrayed*, Milton, Jaracanda Press, Sydney.

⁷ Carey dan Bentley (eds) (1995), *East Timor at the Crossroads*.

⁸ Lihat *East Timor* (1999).

⁹ Untuk lebih detail, lihat Saldanha (1994), *The Political Economy of East Timor Development*, Sinar Harapan, Jakarta.

¹⁰ Lihat pidato Xanana Gusmão pada symposium mengenai “Rekonsiliasi, Toleransi, Hak Asasi Manusia, dan Pemilihan Umum” pada tanggal 12 Februari 2001.

¹¹ Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor Leste, yang saat ini direstrukturisasi menjadi Falintil-FDTL resmi (Falintil-Força da defesa de Timor Leste) sesuai dengan konstitusi RDTL.

¹² Pada bulan Maret 1998, para perwakilan yang representative yang mewakili secara keseluruhan kelompok politik masyarakat Timor Timur dan orang-orang yang dibuang dari berbagai unsur menghadiri konvensi yang diadakan di Peniche, Portugal untuk menata program politik. Keputusannya adalah mengubah nama dari CNRM menjadi CNRT di bawah kepemimpinan Xanana Gusmão.

¹³ Setelah menyelesaikan misinya pada tahun 1999, dan dengan tibanya politik multi partai pada bulan Juni 2001, CNRT dibubarkan.

¹⁴ Lihat Nobel Peace Committee (1996).

¹⁵ Lihat Tesk Perjanjian anantara Indonesia dan Portugal di bawah bantuan PBB, PBB (5 Mei 1999).

¹⁶ Lihat Yayasan Hak, dan laporan-laporan PBB lainnya.

¹⁷ Negosiasi diplomatis membawa masuknya Pasukan Internasional di Timor Timur ke Dili pada tanggal 19 September 1999 di bawah Komado Australia. Dewan Keamanan PBB dengan Resolusi no 1272 tanggal 25 Oktober 1999, membentuk UNTAET yang diberi tanggung jawab umum terhadap pelaksanaan pemerintahan di Timor Timur serta melatih seluruh pejabat legislatif dan eksekutif, termasuk penyelenggaraan peradilan. Lihat Resolusi DK 1272, UN SCOR (pada pertemuan ke 4057), UN Doc S/Res/1272 (1999).

¹⁸ Lihat laporan para External Reviewers mengenai Krisis Kemanusiaan

di Timor Timur, www.reliefweb.int. Mei 2000.

¹⁹ Istilah Portugis untuk keturunan Portugis dan orang Timor.

²⁰ Lihat Weissmann (2002), *Bridging a Divide – The Creation of a Tribal Path for Conflict Resolution*, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Swedia, h. 36-38.

²¹ Lihat *Suara Timor Lorosae*, 26 January 2003.

²² Lihat Clements (2000) untuk melihat lebih jauh mengenai diplomasi multi jalur.

²³ AVR dibentuk oleh Xanana Gusmão pada tahun 2000 dan saat ini diketuai oleh Paulo Assis Belo. Kegiatan utamanya meliputi rekonsiliasi, isu-isu kemanusiaan, kredit mikro, dan kesejahteraan para mantan pejuang.

²⁴ Latar belakang munculnya kerusuhan tersebut disebabkan oleh memuncaknya rasa frustrasi yang diakibatkan oleh meningkatnya kemiskinan sejak pergantian penguasa sementara PBB, kurangnya kemajuan di bidang ekonomi, dan kurangnya kesempatan kerja, dan panjangnya sejarah kekerasan di negara tersebut – sebuah sejarah yang mendahului era Indonesia berdarah.

²⁵ Lihat UNDP (2002).

²⁶ Rencana Pembangunan Nasional (National Development Plan) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintahan Baru dari Republik Demokratik Timor Leste. Dokumen tersebut menyebutkan secara garis besar tentang misi, visi untuk tahun 2020 dan strategi pembangunan untuk 5 tahun ke depan.

²⁷ Lihat Natasha Meden (2002).

²⁸ Tidak ada perundang-undangan yang khusus yang mengatur struktur, pengaturan, dan tanggung jawab LSM. Mereka dapat meminta status organisasi sosial dan karenanya mendapat keuntungan dari pemotongan pajak pendapatan dan bea cukai dengan tugas-tugas untuk mengimpor barang-barang untuk tujuan perbaikan kemanusiaan, pendidikan dan kesehatan.

²⁹ Untuk lebih detail, kunjungi website Forum LSM: <http://www.geocities.com/etngoforum/index.html>.

³⁰ Catatan penulis berdasarkan pada kata-kata yang diucapkan oleh beberapa wakil LSM dalam pembicaraan yang tidak resmi di Dili (Februari

2003).

³¹ Harus dicatat, bagaimanapun juga, bahwa Program Pendidikan Kewarganegaraan, hasil rancangan UNDP dan USAID yang telah diimplementasikan oleh beberapa kelompok secara fundamental telah cacat ketika mereka mendefinisikan partisipasi kewarganegaraan dalam pemerintahan secara eksklusif sebagai voting.

³² Lihat Partisipasi dan Keterlibatan Kewarganegaraan (www.worldbank.org/participation/events/bbbs/cr/lotytimorleste.pdf).

³³ PBB juga mensponsori program-program, sebagaimana halnya LSM lokal dan internasional.

³⁴ Lihat Lundry (2002).

³⁵ Untuk deskripsi lebih jelas mengenai peranan wanita di Timor Timur, lihat catatan dari Yvete De Oliveira dan Catherine Scott, "Women and Peacebuilding in East Timor".

³⁶ Maria Domingas Fernandes telah ditunjuk sebagai Penasihat Gender pada kantor Perdana Menteri.

³⁷ Ada indikasi pertumbuhan yang pesat dari universitas swasta di Dili. Setidaknya 14 universitas umum muncul di Dili di tengah ketiadaan kerangka peraturan yang tepat yang mengatur manajemen pendidikan tinggi di Timor Timur.

³⁸ Lihat website Centro Nacional de Investigação Científica (CNIC) dalam bahasa Portugis, www.cnictimor.org.

³⁹ Sebuah seminar yang berjudul: Peranan Para Veteran dalam Demokrasi di Timor Timur diadakan di CNIC-UNTL pada bulan Juni 2002. Serangkaian seminar yang diadakan terus-menerus ini diorganisir oleh CNIC bekerja sama dengan NDI.

⁴⁰ Kunjungi website Kelompok Studi Timor Timur: www.rspas.anu.edu.au/etsg.

⁴¹ Lihat wawancara dengan Xanana Gusmão, www.reliefweb.int (18 Desember).

⁴² Lihat Soares (2001).

⁴³ Dirk Kotze (2002) *Issues in Conflict Resolution*.

⁴⁴ Lihat <http://www.easttimor-reconciliation.org>.

⁴⁵ Lihat CAVR Terbaru Juni-Juli 2003.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Lihat Soares (2001) untuk detailnya.

⁴⁸ Sejumlah pertemuan-pertemuan rekonsiliasi telah dilaksanakan dengan melibatkan para elit politik, perwakilan para veteran perlawanan, para pemimpin lokal, LSM, dan anggota keluarga, pada tingkat internasional di Singapura, Darwin, London, Jakarta, Washington, dan Canberra, dan pada tingkat nasional di Baucau, Batugade, Suai, dan Ainaro.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ World Bank Background Paper untuk pertemuan negara-negara pendonor di Timor Timur, 9-10 Desember 2002.

⁵¹ Lihat Albrecht Schnabel, (tanggal tidak tercatat) Challenges of Operational Conflict Prevention: From Proactive to Reactive Prevention, UNU, presentasi untuk sesi mengenai “Sistem dan Prosedur untuk Pencegahan dan Penyelesaian Konflik”.

Laporan-laporan

Center for Development Research (ZEF Bonn)

Clements, Kevin P., *Civil Society and Conflict Prevention, Facing Ethnic Conflicts*, 14-16 Desember, 2000.

International Peace Academy

Chesterman, Simon, *East Timor in Transition: From Conflict Prevention to State-Building*, 2001. (www.ipacademy.org/publication/reports/research/PublTimorPrint) Policy Report, *Sharing Best Practices on Conflict Prevention: The UN, Regional and Sub Regional Organizations, National and Local Actors*. (tak tertanggal) www.ipacademy.org

UNDP

East Timor Human Development Report, *Ukum Rasik A'an*, (Bab 3), New Roles for Civil Society, Mei 2002. www.undp.east-timor.org
Interview: President Xanana Gusmão of Timor-Leste, 2002. www.reliefweb.int

United Nations

The UN and East Timor: Self-Determination Through Popular Consultation,

1999, New York. *SC resolution 1727*, UN SCOR (pertemuan ke-4057), 2002.

World Bank

Draft Summary of the Joint Assessment Mission to East Timor, Darwin, Australia, 15 November, 1999.; *Background Paper for the Donor Meetings on Timor-Leste*, 2-3 Juni 2003, Dili, East Timor.; *Tapping the Power of Grassroots Radio Bank Initiative Incorporating Support for Community Stations*, Participation and Civic Engagement, 2003 (www.World.bank.org/participation/events)

Publikasi

P. Carey dan G. Garter Bentley (eds), 1995, *East Timor at the Cross roads*, Honolulu: University of Hawaii Press

James Dunn. Milton, 1983, *Timor a People Betrayed*, Sydney: Jacaranda Press.

James J. Fox, "Tracing the Path, Recounting the Past: Historical Perspectives on Timor", dalam James J. fox & Dionisio Babo Soares (eds).1990, *Out of the Ashes*.

James J. Fox, *Destruction and Reconstruction of East Timor*, Adelaide: Crawford House Publishing.

James J. Fox, "Assessing UNTAET's Role in Building Local Capacities for the Future", dalam Soesastro dan Subyanto (eds), 2002, *Peace Building and State Building in east Timor*, Jakarta: CSIS.

Dionisio Babo Soares, "Success, Weakness, and Challenges of Political Transition in East Timor", dalam Soesastro dan Subyanto (eds), 2002, *Peace Building and State Building in East Timor*, Jakarta: CSIS.

Soesastro dan Subyanto (eds), 2002, *Peace Building and State Building in east Timor*, Jakarta: CSIS.

J.G. Taylor. 1991, *Indonesia's Forgotten War: the Hidden History of East Timor*, London: Zed Books.

Joao Mariano Saldanha, 1994, *The Political Economy of East Timor Development*, Jakarta: Sinar Harapan.

Arsenio Bano, "The Role of Civil Society Organisations in Sustainable Development in East Timor", dalam Russell Anderson dan Carolyn

- Deutsch (eds), *Sustainable Development and the Environment in east Timor: Proceedings of the Conference on Sustainable Development in East Timor*, 25-31 Januari, 2001.
- Carlos Filipe Ximenes Belo, 2001, *Peacebuilding in East Timor: The Role and Contribution of the Church*, Oslo, Norway, Desember, 2001.
- Carlos Filipe Ximenes Belo, 2002, *On Amnesty and the Settlement of Crimes Against Humanity, A Pastoral Appeal*, Dili, 29 Juni 2002.
- Helder Da Costa, "Sustainable Future, How East Timor Manages Its Economy?", *Inside Indonesia*, No, 71 Juli-September 2002 h. 8-9.
- Lucas Da Costa dan Jose Antonio Neves, 2001, *A Popular Challenges to UNTAET's Achievements*, RENETIL.
- Dirk Kotzé, "Issues in Conflict Resolution", *African journal in Conflict Resolution*, No. 1., 2002
- Antonio Guterres Lopes, "Reconciliation from Legal Perspective", *Bulletin The La'o Hamutuk*, No.1 Vol. 1, 21 Juni 2000, Dili.
- "Bilateral Aid to East Timor: An Overview", *Bulletin The La'o Hamutuk*, Vol. 2, No.8 Desember 2001, Dili.
- Natasha Meden, 2002, "From Resistance to Nation Building: The Challenging Role of Civil Society in East Timor", *Development Outreach*, Washington DC: World Bank Institute.
- <http://Inweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/Countries/East+Timor/D383AA29E775539785256BA0006C2ED??OpenDocument>
- Nobel Peace Prize Committee, *Text of the Norwegian Nobel Committee's Citation for the 1996 Peace Prize*, Oslo, Norwegia, 1996
- Dionisio babo Soares, *Nabe Biti: The Philosophy and Process of Grassroots Reconciliation*, Paper yang disajikan untuk Konferensi bertema "Road to Reconciliation" 11-12 April, 2001, Bergen, Norwegia.
- Jonathan Steele, "Nation Building in East Timor", *World Policy Journal*, Summer 2002.
- Suara Timor Lorosae*, 26 Januari 2003, Dili, Timor Lorosae.
- External Reviewers on Humanitarian Crisis in East Timor, www.reliefweb.int, Mei, 2000.
- Chris Lundry, *NGOs, Civil Society, and Hopes for Democracy in East Timor*, (Paper yang tidak dipublikasikan, 2002).
- Anita Riberts, *Two-track Transitional Justice Model in Timor-Leste*, Activating

- Human Rights and Diversity Conference, Southern Cross University, Australia. www.scu.edu.au.
- Albrecht Schnabel, *Challenges of Operational Conflict Prevention: From Proactive to Reactive Prevention*, UNU, Presentasi pada sesi yang bertajuk “System and Procedures for Conflict Prevention and Resolution”. (tidak tertanggal).
- “Council for Asia-Europe Cooperation, Publication on East Timor, Kosovo, and Bosnia”, www.caec-asia-europe.org/conference/publications/index.html.
- Xanana Gusmão, *Reconciliation, Tolerance, Human Rights, and Elections*, Symposium, National Council, Dili, 12 Februari, 2001. www.etan.org/et2001a/february/11-17/12pres.htm.
- Xanana Gusmão, *Challenges of Peace and Stability*, Pidato yang disampaikan di Melbourne University, 17 April, 2003. www.etan.org/et2003/april/07/07xg.htm.
- Sarah Pritchard, 2001, *United Nations Involvement in Post Conflict Reconstruction Efforts: New and Continuing Challenges in the Case of East Timor*, www.jsmp.minihub.org/Reports/Pritchardpercent20FF.pdf.
- Jose Ramos Horta, *The Role of NGOs in Asia, An East Timorese Example*, (tidak tertanggal). www.easttimor.com/lh.html.
- RTDL Planning Commission, *National Development Plan*, Dili, 2002. www.gov.easttimor.org/web.%20development%20partners/left%20frame.m
- J.M. Saldanha dan M. Salla, *East Timor Facing the Future, Reconciliation, Institution Building, and Economic Reconstruction*, Website Kelompok Studi Timor Timur: <http://rspas.anu.edu.au/etsg/briefs/procl.rtf>.
- Gwi-Yeop-Son, 2001, *Peace-Building in east Timor: Good Governance as the Key Ingredient to Success*, New York: Columbia University, (www.barnard.columbia.edu/bcrw).
- Mikael Weissmann, 2001, *Bridging a Divide – The Creation of a Third Path for Conflict Resolution*, Sweden: Uppsala Universitet, <http://orient4.orient.su.se/EastTimor/TowardsaCivilSociety.pdf>.

Situs Internet

www.easttimor-reconciliation.org/ Commission for Reception, Truth and Reconciliation.

www.jsmp.minihub.org/ Judicial System Monitoring Programme.

www.etan.org/1h/ (La'ó Hamutuk, The East Timor Institute for Reconstruction, Monitoring and Analysis.

www.geocities.com/etngoforum/index.html/ (NGO forum web)

Kontak Narasumber

Ahli Lokal

Dionisio Babo Soares, Deputy Country Director the Asia Foundation, Jl. Jacinto Candido, Audian, Dili. Email: dionisio@tafet.org.

Francisco da Costa Guterres, PhD Candidate School of International Business and Asian Studies, Griffith University, Nathan, QLD 4111, Australia. Email: [F.C. Guterres@griffith.edu.au](mailto:F.C.Guterres@griffith.edu.au). Dia juga seorang Fellow dari Kelompok studi Timor Timur untuk bidang Hukum dan Politik.

Cecilio C. Freitas, Executive Director of the East Timor NGO Forum. Email: etngocenter@hotmail.com.

Julio Martins, Pemimpin Tim bantuan dari Forum NGO. Email: vique10@yahoo.com.

Filomena dos Reis, Direktur pada Pengembangan dan Bantuan Wanita, FOKUPERS, Forum Komunikasi wanita Timor Timur. Email: fokupers@fokupers.minihub.org

Adriano do Nascimento, La'ó Hamutuk, The East Timor Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis. Email: mentoadi@hotmail.com.

Aniceto Neves, Perkumpulan HAK. Email: yayasanhak@minihub.org.

Ahli Internasional

Charlie Scheiner, La'ó Hamutuk, The East Timor Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis. Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org.

Rebecca Engel, Center for International Conflict Resolution (CICR) Columbia University. Email: rec7@columbia.edu.

Mindanao: Hambatan dan Prospek menuju Perdamaian Berkelanjutan

Rufa Cagoco-Guiam

Tak ada wilayah di Filipina yang begitu sering dilanda banjir darah dan kekerasan selain wilayah Tengah dan Barat pulau Mindanao Selatan—pulau terbesar kedua di Filipina—tempat mayoritas penduduk Muslim melanjutkan perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan.¹ Meski kesepakatan damai telah ditandatangani pada 1996, yang menghasilkan Otonomi Daerah Mindanao Muslim (ARMM), namun perdamaian tetap jauh dari penduduk Mindanao yang berjumlah 18 juta jiwa itu. Prospek peredaan konflik dan perdamaian abadi di Mindanao menjadi semakin suram sejak beberapa bulan terakhir. Tetapi, kelompok-kelompok masyarakat terus bekerja untuk mendorong semakin tumbuhnya kesadaran akan perdamaian, dengan harapan dapat mengakhiri tekanan pemerintah maupun para pemberontak demi mewujudkan perdamaian abadi.

Sebelum pemerintahan kolonial, kaum Muslim Mindanao (juga disebut sebagai Bangsamoro atau rakyat Moro) telah secara sosial, politik dan ekonomi masuk ke dalam dua Kesultanan Maguindanao dan Sulu.

Kesultanan ini berkembang sebagai negara-negara boneka yang kawasan dan wilayah pengaruhnya naik turun menurut kemampuan kepemimpinan para sultannya. Keturunan dan kekeluargaan menyatu dengan struktur yang lebih luas untuk mengelola pendapatan dan pertahanan di kesultanan itu. Kekayaannya sebagian besar diperoleh dari perdagangan antar negara yang berjalan baik dengan Cina dan negeri-negeri Arab di Timur Tengah, termasuk Yaman. Perdagangan antar negara ini tidak hanya mendatangkan para pedagang namun juga para dai Arab-Islam ke Mindanao, Sulu dan Tawitawi. Ini melapangkan jalan bagi Islamisasi banyak daerah di Mindanao yang dimulai sejak awal tahun 1380, tarikh yang agaknya dinisbatkan kepada bukti fisik tertua kehadiran Islam, yakni makam seorang pedagang di Simunul, Tawitawi.

Kesultanan memainkan peran penting dalam membangun jati diri khas Muslim Mindanao sebagai sebuah bangsa yang terpisah dari rakyat Luzon dan Visaya yang menganut agama Kristen di bawah pemerintahan kolonial Spanyol.

Zaman kolonial Spanyol dimulai dengan berdirinya sebuah pemerintahan di Manila, bagian utara kepulauan yang mereka sebut Filipina, sejak akhir tahun 1500-an. Selama lebih dari tiga abad, pemerintah kolonial Spanyol mengkristenkan penduduk asli di Luzon dan Visaya. Penduduk utara asli yang telah menganut agama Kristen ini digunakan oleh Spanyol untuk memerangi kaum Moro Mindanao dalam serangan pasifikasinya. Meski Spanyol sempat menanamkan pengaruhnya di Mindanao utara, timur dan barat daya, namun orang-orang Spanyol gagal menjajah kawasan yang dikuasai kaum Muslim itu. Orang-orang Moro dengan gigih melawan pemerintah kolonial Spanyol. Meskipun Spanyol gagal menancapkan kekuasaan politik penuh atas orang-orang Moro dan wilayah kesultanan, namun ia memaksa mereka terlibat dalam

perang senjata yang tiada habisnya dan meruntuhkan dasar perekonomian kesultanan itu melalui blokade perdagangan.

Amerika Serikat mengalahkan Spanyol dalam serangkaian konfrontasi bersenjata yang memuncak pada Perang Pantai Manila pada 1898, yang secara efektif mengakhiri pemerintahan Spanyol di Filipina. Kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Paris pada bulan Desember 1898, yang mengakhiri perang dan memberikan kepada AS kepemilikan utuh atas kepulauan Filipina, termasuk Mindanao. Pemerintahan kolonial AS di Filipina berlangsung selama lebih dari empat dekade, sejak penghujung abad itu hingga 4 Juli 1946, ketika AS memberikan kemerdekaan. Seperti halnya Spanyol, pemerintah kolonial AS menjadikan Manila sebagai ibukota. Tetapi berbeda dengan Spanyol, pemerintah kolonial AS menekankan pendidikan, dan bukan penyebaran agama Kristen. Para pejabat Amerika menggunakan pendidikan sebagai “alat penaklukan.”² Mereka pun benar-benar berhasil dalam meyakinkan para pemimpin Moro untuk mengirimkan putra-putri mereka ke sekolah-sekolah yang didirikan orang Amerika. Akibatnya, banyak pemimpin Moro yakin bahwa mereka lebih baik berada di bawah pemerintahan Amerika, dengan propinsi mereka (Sulu) sebagai “wilayah permanen Amerika Serikat,” daripada bergabung dengan negara Filipina merdeka.³ Pemerintah kolonial Spanyol dan Amerika sama-sama memulai proses perubahan drastis komposisi penduduk di Mindanao. Meski pernah memiliki jumlah yang banyak dan pengaruh politik, namun kaum Muslim Moro tiba-tiba menjadi minoritas di Mindanao. Melalui perpindahan penduduk yang disponsori pemerintah pusat, orang-orang Filipina Kristen yang mencari tanah dari Luzon dan Visaya datang berduyun-duyun ke Mindanao. Para pendatang menempati lahan pertanian Mindanao yang paling produktif dan berhasil menanam padi, jagung dan kelapa. Perusahaan transnasional diberi hak luas penguasaan lahan untuk menanam nanas, pisang dan karet. Para pengusaha kayu yang kaya dari Luzon maupun Visaya mendapatkan konsesi penebangan hutan yang luas sekali.⁴

Perkembangan itu, yang diakibatkan oleh penerapan hukum tanah kolonial (seperti Akta Registrasi Tanah 1902, Akta Komisi Filipina no. 718, dan Akta Tanah Umum 1903), yang tidak mengakui adat (hukum adat Moro) atas pengelolaan tanah, secara perlahan menimbun rasa benci di kalangan kaum Muslim terhadap pemerintah pusat di Manila. Di samping itu, meningkatnya ketegangan dan permusuhan antara kaum pendatang dan kelompok-kelompok Muslim/Moro yang dimiskinkan dan dianggap minoritas lambat laun berubah menjadi pemberontakan kaum Muslim pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Pada mulanya, pemberontakan itu merupakan serangkaian pemberontakan kecil yang dengan cepat menyebar dalam lingkup dan skalanya. Tetapi salah satu kelompok, Fron Pembebasan Bangsa Moro (MNLF), dipimpin oleh Nur Misuari, yang bekerja sebagai dosen pada Universitas Filipina, berupaya menghimpun kekuatan Moro yang paling loyal ke dalam kerangka MNLF yang masih kurang terikat. Pada 1972, MNLF mendeklarasikan dalam manifestonya tujuan mendirikan Republik Bangsamoro, dan menyatakan perjuangan bersenjata sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan sejati rakyat Moro dari belenggu penjajahan Filipina.

Serangkaian peristiwa telah meyakinkan banyak intelektual dan bahkan politisi Muslim bahwa perjuangan bersenjata merupakan satu-satunya cara untuk membela harga diri dan mendapatkan hak wajar mereka untuk merdeka. Peristiwa paling tragis adalah Pembantaian Jabidah pada bulan Maret 1968 di mana tentara Filipina membunuh lebih dari 20 orang pemuda Sama dari Sulu atas perintah kepala staf mereka, yang berada langsung di bawah komando Presiden Ferdinand Marcos. Konon, berdasarkan perintah Presiden Marcos, militer Filipina merekrut pemuda Sama untuk dilatih dalam persiapan melakukan invasi ke Sabah. Pemerintah Filipina di bawah Marcos menerapkan langkah untuk memenangkan klaim wilayahnya atas Sabah yang, secara historis, merupakan bagian wilayah kesultanan Sulu. Para pemuda itu akan menjadi semacam tentara gerilya untuk dikirim ke Sabah, namun mereka tidak diberitahu mengenai niat Presiden Marcos ketika

mereka direkrut. Setelah pelatihan, yakni ketika mereka diberitahu apa misi yang sebenarnya, para pemuda Muslim Sama memberontak. Banyak dari pemuda itu memiliki kerabat jauh yang tinggal di Sabah, dan menolak untuk dijadikan mesin perang melawan saudara Muslim mereka di sana. Konon para pemberontak itu dibantai di pulau Corregidor. Salah seorang dari mereka, Jibin Arula, selamat dan meminta bantuan dari beberapa politisi, khususnya mendiang Senator Benigno Aquino. Aquino memimpin serangkaian investigasi kongres tentang kejadian itu. Tetapi, investigasi ini gagal menegakkan kebenaran di baliknya dan malah ada beberapa versi mengenai kejadian itu. Banyak kaum Muslim yakin bahwa pemerintahan Marcos benar-benar bertanggung jawab atas pembantaian itu, dan kejadian ini cukup untuk menyulut apa yang disebut sebagai “pemberontakan Moro” di Mindanao.⁵

Dinamika Konflik

Sejumlah penulis menyatakan bahwa dendam membara dan prasangka antara pemerintah pusat yang didominasi Kristen dan kelompok-kelompok minoritas Muslim memicu perang di Mindanao.⁶ Kira-kira selama tiga setengah abad pemerintahan kolonial menyuburkan perasaan itu di kalangan komunitas yang sangat beragam di Mindanao.

Pemerintah kolonial Spanyol melestarikan citra negatif kaum Moro, atau Muslim di Mindanao. Sikap semacam itu mungkin berasal dari sejarah kolonial mereka sendiri yang brutal di bawah pemerintahan kaum Moro Muslim Maroko dan bagian lain Afrika Utara, yang menundukkan penduduk asli semenanjung Iberia nyaris selama delapan ratus tahun. Kegagalan pemerintahan kolonial Spanyol untuk mengkristenkan kelompok Moro yang sangat galak itu meneguhkan kembali rasa benci mereka terhadap sekelompok orang yang menganut budaya dan kepercayaan yang juga dianut oleh musuh leluhur mereka. Pemerintahan kolonial juga menggunakan Indios⁷ yang terkristenkan dari Luzon dan Visaya dalam serangan pasifikasi mereka terhadap kaum Moro.

Pemerintah kolonial Amerika juga memiliki citra negatif yang sama terhadap kaum Muslim, seraya bersahabat dengan para pemimpin daerah yang lebih mudah diatur.⁸ Salah seorang gubernur jenderal Amerika pada masa penjajahan secara berterus terang mengatakan, “Moro yang baik adalah Moro yang mati.”⁹ Penegasan atas identitas khas yang berbeda dari mayoritas orang Filipina yang beragama Kristen juga merupakan salah satu motivasi yang paling penting untuk melanjutkan perjuangan Bangsamoro merebut kemerdekaan, yang mereka anggap sebagai hak yang dikaruniakan Tuhan. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa mereka tengah menjalankan perang suci.

Konflik di Mindanao mencapai puncaknya pada awal tahun 1970-an, dengan serangan udara, darat dan laut besar-besaran terhadap berbagai posisi MNLF, yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda. Menurut hitungan pemerintah, dari tahun 1970 hingga 1976 saja, sekitar 18 orang terbunuh setiap hari. Dari tahun 1970 hingga 1996, pemerintah Filipina telah menghabiskan dana sebesar 73 milyar pesos, atau sekitar 138 juta dolar AS, berdasarkan rata-rata kurs 53 pesos untuk setiap satu dolar AS.¹⁰ Mending presiden Ferdinand Marcos pernah mengungkapkan bahwa lebih dari 11,000 prajurit Filipina tewas pada delapan tahun pertama peperangan (1972-1980).¹¹ Seruan gencatan senjata dimulai pada 1973, ketika rezim diktator Marcos akan menghadapi embargo minyak yang dijatuhkan oleh negara-negara penghasil minyak. Organisasi Negara Pengekspor Minyak Arab (OAPEC) memutuskan untuk menjatuhkan embargo minyak terhadap semua negara yang mendukung Israel. Filipina termasuk ke dalam negara yang terkena embargo ketika itu. Filipina “hanya memiliki persediaan minyak mentah untuk bertahan tiga bulan, dan ia mendapatkan 93.3% kebutuhannya dari dua negara Arab... Arab Saudi dan Kuwait, keduanya musuh Israel...”¹²

Pada 1976, melalui perantara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), khususnya Komisi Empat Menteri yang diketuai Libya, pemerintah Filipina dan pemimpin MNLF mendatangi Perjanjian Napoli. Perjanjian itu memberikan rancangan otonomi

bagi 13 propinsi di kepulauan Mindanao, Sulu dan Palawan yang diklaim MNLF sebagai bagian wilayah pengaruh mereka. Tetapi perjanjian ini mati sejak dini.¹³ Ia mengabaikan berbagai isu penting dan banyak pasalnya yang tidak dilaksanakan karena masalah-masalah penafsiran. Dengan gagalnya Tripoli Agreement, MNLF meneruskan perang bersenjata melawan tentara Filipina. Sayang sekali, pada waktu yang sama juga, MNLF mengalami perpecahan dalam kepemimpinan pusatnya. Ini menghasilkan pembentukan dua pihak yang terpisah: Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin oleh Hashim Salamat, seorang ustad dari Maguindanao, dan kelompok MNLF-Reformis yang dipimpin oleh Dimas Pundatu dari Maranaw.

Setelah runtuhnya mantan Presiden Marcos seusai gerakan “People Power” pada tahun 1986, suatu pemerintah baru ditetapkan dengan Cory Aquino sebagai presiden. Aquino langsung mengadakan pertemuan dengan Nur Misuari dan MNLF di Sulu. Meski ini menimbulkan kemarahan di kepemimpinan MILF¹⁴ tindakan itu membuka jalan untuk serangkaian negosiasi yang dilangsungkan semasa pemerintahan Aquino. Sayang sekali pembentukan persetujuan makan waktu sepuluh tahun lagi. Pada tanggal 2 September 1996, di bawah pemerintahan Presiden Fidel V. Ramos sebuah Final Peace Agreement (FPA) ditandatangani. Namun, tujuh tahun setelah penandatanganan ini Mindanao tetap jauh dari keadaan damai. Walaupun perdamaian dengan MNLF bertahan terus, tentara pemerintah menghadapi tantangan baru dari MILF. Pada bulan Maret 2000, Presiden Estrada mengumumkan perang total melawan MILF.

Perang total Estrada menimbulkan suatu seri peperangan kecil-kecilan di wilayah pegunungan Mindanao Pusat dan Barat tempat kamp-kamp MILF yang paling penting. Dari Januari sampai Juni 2002 kira-kira 196 orang tewas dalam peperangan itu: 97 pejuang MILF, 25 anggota tentara Filipina dan 74 orang sipil.¹⁵

Pertempuran sengit antara MILF dan tentara pemerintah mulai lagi pada awal tahun 2003. Jumlah korban meningkat terus, dan jumlah pengungsi meningkat juga. *Time Magazine* melaporkan

pertempuran pada bulan Februari 2003 telah menewaskan setidaknya 160 pemberontak MILF dan delapan prajurit Filipina, dan terusnya lebih dari 40,000 penduduk hanya dari satu kota saja.¹⁶ Saat ini, perang menjadi kenyataan sehari-hari bagi banyak penduduk di Mindanao Tengah, umumnya karena sikap keras pemerintah Filipina terhadap “para teroris lokal.” MILF dicap seperti itu, dan dituduh memiliki hubungan erat dengan jaringan teroris internasional Osama bin Laden, al-Qaeda. Pengeboman atas kota-kota penting Mindanao dianggap dilakukan sebagai aktivitas “teroris” MILF.¹⁷

Penanggulangan Konflik oleh Pemerintah

Selama lebih dari dua dasawarsa, pemerintah Filipina selalu menggunakan kekuatan militer untuk menangani konflik di Mindanao. Pada puncak “pemberontakan Moro” pada pertengahan tahun 1970-an, sekitar 80 persen tentara Filipina dikirimkan ke berbagai wilayah yang dikuasai kaum Muslim di Mindanao.¹⁸ Ini berlangsung hingga kini, ketika gunung yang diduga menjadi sarang pemberontak MILF menjadi target mortir dan meriam howitser tentara Filipina.

Selain strategi militer untuk “menyelesaikan” konflik, pemerintah Filipina juga menempuh pendekatan “wortel”, meski tidak sebanyak pendekatan “tongkat” atau militer. Yang menarik, pemerintah cenderung menggunakan pendekatan “wortel” jika para aktor luar menekannya untuk melakukan hal itu.

Pada 1975, rezim Hukum Perang Presiden Ferdinand Marcos melunak dan menyerukan gencatan senjata dalam mempersiapkan pembicaraan damai dengan pemimpin MNLF. Ini karena embargo minyak yang telah disebutkan di atas terhadap negara-negara, termasuk Filipina, yang mendukung Israel, dan rendahnya cadangan minyak Filipina. Akibat pendekatan yang lebih lunak ini, pemerintah dan MNLF menandatangani Perjanjian Tripoli pada bulan Desember 1976 di Libya. Presiden Libya Muammar Qaddafi menjadi perantara dan mendorong penandatanganan dokumen bersejarah namun akhirnya tidak efektif ini. Perjanjian Tripoli

runtuh dan permusuhan antara militer Filipina dan pasukan MNLF berlanjut pada tahun berikutnya.

Beberapa tahun setelah itu, yang melewati masa pemerintahan dua orang presiden Filipina, Kesepakatan Final Perdamaian ditandatangani. Layak dicatat peran penting negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam menciptakan peristiwa bersejarah ini. OKI yakin, Nur Misuari maupun presiden Ramos bersepakat untuk “mengakhiri” perang di Mindanao. Para akademisi memandang kesediaan presiden Ramos bersepakat untuk “mencapai penyelesaian komprehensif dan langgeng” sebagai hasil dari tindakannya yang penuh perhitungan untuk mendapatkan bantuan keuangan negara-negara OKI demi melaksanakan program pembangunan kembali Mindanao pasca-peperangan.¹⁹ Penandatanganan Kesepakatan Akhir Perdamaian pada tanggal 2 September 1996 diiringi dengan upacara meriah di Manila.

OKI telah menggunakan berbagai sarana “diplomasi Islam” yang didasarkan atas prinsip umma (masyarakat beriman di dalam Islam), selain sarana konvensional dan “itikad baik” untuk menyikapi konflik di Mindanao.²⁰ Pengacara Doliman Santos Jr. memandang bantuan OKI sebagai “konsisten di seluruh proses itu...OKI tidak dapat menunggu hasil negosiasi tanpa berupaya menghapuskan penderitaan kaum Muslim di Filipina...”²¹

Pemerintahan PBB di Filipina adalah donor internasional pertama yang menanggapi permintaan pemerintah terhadap bantuan pembangunan. Ini dan bantuan yang datang dari berbagai donor internasional lainnya dipandang sebagai bagian dari komitmen resmi pemerintah untuk menyelesaikan konflik demi mencegah merebaknya kembali kekerasan di berbagai wilayah itu yang paling menderita karena hilangnya nyawa dan kerusakan harta benda.

Selama masa singkat kepresidenan Joseph Estrada (Juni 1998-Januari 2001), pengendalian konflik oleh pemerintah berubah, dengan menguatnya kembali penekanan atas pendekatan tingkat. Pada bulan April 2000, Estrada memaklumkan “perang

menyeluruh” setelah tentara pemerintah bentrok dengan MILF dalam pertempuran kecil-kecilan di Mindanao Tengah. Perang ini malah menimbulkan semakin kuatnya kelompok garis keras MILF dan membawa rekrutmen pengikut dan simpatisan yang lebih banyak kepada jalan pemberontakan.²² Tak ada perundingan berarti selama masa pemerintahan singkat Estrada. Konstitusi Filipina pada 1987 menjamin supremasi sipil untuk memimpin angkatan kepolisian dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban. Tetapi, pasal ini lebih sering dilanggar daripada dilaksanakan. Militer telah memainkan, dan tetap memainkan, peran penting dalam mempengaruhi keputusan penting terhadap konflik Mindanao. Para pengamat bahkan yakin bahwa militer merupakan penentu *de facto* atas kebijakan resmi pemerintah di Mindanao. Pendapat ekstrem malah memandang militer sebagai “kekuatan” di belakang presiden-presiden Filipina, dengan “perang menyeluruh” Estrada, misalnya, mencerminkan kuatnya pengaruh militer terhadap presiden yang sedang berkuasa.

Baru baru ini, kebijakan pemerintahan Arroyo terhadap konflik di Mindanao tercantum dalam instruksi pemerintah yang ditandatangani presiden pada tanggal 28 Februari 2001, hanya beberapa hari berselang setelah lengsernya presiden Estrada. Instruksi pemerintah No. 3 memberikan “kerangka pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan integrasi semua inisiatif pemerintah dan partisipasi rakyat sipil dalam menciptakan perdamaian yang adil dan langgeng.” Berdasarkan instruksi ini, Kantor Penasehat Presiden mengenai Proses Perdamaian (OPAPP) ditugaskan untuk menyusun agenda perdamaian yang mencakup tiga prinsip bagi sebuah “proses perdamaian yang komprehensif,” maupun “Enam Jalan Menuju Perdamaian.” Prinsip maupun Enam Jalan Menuju Perdamaian itu merupakan buah karya Komisi Persatuan Nasional (NUC) yang dibentuk pada masa pemerintahan presiden Ramos.²³

Dalam teori, pengendalian konflik oleh pemerintah Arroyo didasarkan atas upaya “menyeluruh untuk menciptakan perdamaian,” yang sangat berbeda dengan kebijakan presiden Estrada. Tak lama setelah menduduki jabatan presiden, Arroyo

mengirim utusan ke MILF untuk melanjutkan pembicaraan. Akhirnya, dia juga memberi nama Mindanawon kepada Kabinet yang baru dibentuknya dan bahkan mengangkat Tim perdamaian yang semua anggotanya orang Mindanao untuk bernegosiasi dengan MILF. Tim ini sangat berbeda dari tim sebelumnya ketika dipimpin oleh tokoh sipil, Jesus Dureza, yang mantan Asisten Presiden untuk urusan Mindanao. Presiden Arroyo juga menyebut dua orang perempuan, salah satunya adalah mantan rektor Universitas Negeri Mindanao, dan yang lainnya, pemimpin perempuan Kristen yang terkenal yang berkantor di Davao, sebagai bagian dari lima orang tim perdamaian.

Untuk mewujudkan seluruh kepeduliannya terhadap perdamaian di Mindanao, Presiden Arroyo juga mengundang rapat semua pejabat pemerintahannya untuk menjalankan tugas kepresidenan demi melakukan rehabilitasi atas berbagai wilayah di Mindanao yang rusak oleh kebijakan “perang menyeluruh” pendahulunya pada tahun 2000.²⁴

Arroyo juga menekankan agar perundingan damai dilaksanakan kembali pada 2001. Pada tahun itu, perdana menteri Malaysia membantu pemerintah Arroyo meyakinkan MILF untuk melanjutkan perundingan, yang membawa kepada penandatanganan kesepakatan untuk melanjutkan pembicaraan resmi pada tanggal 24 Maret 2001.

Pada bulan Maret itu, perwakilan MILF bertemu dengan beberapa pemimpin MNLF di Malaysia. Para pemimpin MNLF kemudian menyebut diri mereka sendiri sebagai anggota “Badan Eksekutif” atau “Badan 15”. Beberapa pengamat menyatakan hal ini adalah fase awal dari sebuah kudeta MNLF terhadap Misuari. Kudeta ini semula digagas oleh orang-orang di Istana Kepresidenan Malacanang, dan oleh presiden Arroyo sendiri. Akibatnya, Misuari dilengserkan dari kedudukannya sebagai ketua MNLF, dan Badan Eksekutif menjadi pemimpin kolektif kelompok itu. Badan itu “memberhentikan” Misuari, dengan menyebutnya sebagai “pensiunan ketua MNLF.” Misuari menolak hal itu dan menuduh badan tersebut telah mengkhianati dirinya dan MNLF.

Pada tahun itu juga, Kongres Filipina mengeluarkan RA 9054, atau undang-undang ARMM (Autonomous Region Muslim Mindanao, Daerah otonom Muslim Mindanao) yang diperluas. Kongres juga menetapkan tanggal referendum di Mindanao untuk menanyakan kepada para pemilih apakah mereka mendukung perluasan itu atau tidak. Yang berada di luar propinsi ARMM ditanyakan apakah mereka ingin bergabung ke dalam ARMM yang diperluas atau tidak. Namun berbeda dengan kampanye Presiden Arroyo untuk memilih suara “ya”, para pemilih justru menggemakan suara “tidak”. Hanya satu propinsi (Basilan, tak termasuk kota Isabela) dan satu kota (Marawi, di Lanao del Sur) memilih bergabung dengan ARMM yang diperluas. Selain suara “tidak” yang populer, juga sangat rendah jumlah penduduk yang datang ke kotak suara di Mindanao Selatan dan Barat.²⁵

Pada bulan Juni 2001, pemerintah dan tim MILF mengadakan pembicaraan di Tripoli, Libya yang menghasilkan penandatanganan Kesepakatan Damai Tripoli 2001. Kesepakatan ini menyerukan pembahasan mengenai keamanan, rehabilitasi dan pembangunan wilayah-wilayah yang diterpa konflik. Sejak saat itu dan seterusnya, pembicaraan semakin sering dilakukan, terutama di Malaysia.

Pada tanggal 24 Nopember 2001, tokoh MNLF, Misuari, ditangkap di Malaysia dengan tuduhan melakukan pemberontakan setelah sebelumnya kelompok pendukungnya yang setia menyerang pos keamanan di Jolo, Sulu. Sementara itu, salah seorang pemimpin kudeta terhadap Misuari, Dr. Parouk Hussin, terpilih menjadi gubernur ARMM pada pemilihan daerah 24 Nopember. Pemilihan tersebut umumnya dianggap sebagai dipengaruhi oleh Malacanang. Beberapa tuduhan dilemparkan oleh calon pesaing Dr. Hussin, yang mengatakan bahwa hasil pemilihan itu dicurangi oleh pihak Malacanang.

Berbagai kejadian pada 2002 membangkitkan kembali lingkaran kekerasan tahun sebelumnya. Pemberontakan berlanjut di berbagai tempat di Mindanao pada bulan Februari yang membuat Presiden Arroyo memutuskan untuk menunda pembicaraan resmi mengenai perdamaian dengan MILF pada bulan Maret. Tetapi,

pada bulan Maret, pembicaraan justru dilanjutkan dan pada tanggal 6 Mei 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia, ditandatangani Komunike Bersama tentang isolasi dan larangan terhadap semua sindikat kejahatan dan berbagai kelompok penculikan-demi-tebusan yang beroperasi di Mindanao. Esok harinya, dokumen lain ditandatangani bersama oleh pejabat yang berwenang dari kedua pihak di Putrajaya. Dari bulan Juni hingga November, serangkaian pembicaraan dan pertemuan diselenggarakan, termasuk pelatihan beberapa Tim Pengawas Lokal (Local Monitoring Teams, LMT) di berbagai wilayah Mindanao Tengah dan Barat. Sejak bulan Desember, anggota-anggota tim pemerintah menyatakan bahwa kesepakatan damai diharapkan dapat dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berikutnya (2003).

Pada tanggal 10 Februari 2003, tim perdamaian pemerintah menyampaikan konsep akhir kesepakatan damai dengan MILF kepada para pemimpin Kongres Filipina. Tetapi keesokan harinya, angkatan bersenjata Filipina menyerang Kompleks Buliok, karena diyakini menjadi tempat persembunyian pemimpin MILF, Hashim Salamat. Hari itu juga merupakan hari suci umat Islam, Idul Adha. Seketika itu juga, proses perdamaian terhenti. Para pemimpin MILF menolak bertemu dengan pihak pemerintah kecuali jika pasukan Filipina ditarik keluar dari Pikit, Mindanao Tengah.

Pada bulan Maret, April dan Mei 2003, sejumlah peristiwa ledakan bom menggetarkan Kota Davao dan kota Siocon, Zamboanga del Sur. Semua peristiwa peledakan bom itu dituduhkan kepada, dan ditolak oleh, MILF. 38 orang tewas pada dua kali ledakan bom di Kota Davao sementara 22 orang lainnya tewas dalam peledakan bom di Siocon.

Semua peristiwa ini mengakibatkan hancurnya prestasi yang telah dicapai sebelumnya oleh pemerintahan Arroyo. Peristiwa nahas itu juga memperkeras posisi maupun memperjelas agenda kedua belah pihak yang saling bertentangan itu. Tak pelak lagi, ini mempengaruhi hubungan antara banyak Bangsa Moro, kaum Kristen dan masyarakat Lumad.

Semua peristiwa itu, yang seiring dengan tekad pemerintahan Arroyo untuk dengan segala upaya memerangi “terorisme,” telah menimbulkan kegagalan pemerintah untuk mencapai “perdamaian yang komprehensif, adil dan langgeng” yang dicanangkannya bagi Mindanao. Setidak-tidaknya untuk beberapa waktu mendatang, perdamaian masih akan menjadi impian kosong penduduk di Mindanao Tengah dan Barat.

Jalur-jalur Diplomasi

Filipina kemungkinan menyajikan kepada Asia Tenggara aktivisme penduduknya yang paling dinamis dan penuh semangat. Ini terbukti lewat pertumbuhan sumbu berbagai LSM dan kelompok-kelompok yang dibentuk di luar pemerintahan yang bergerak di bidang pembangunan dan bantuan sosial. Kelompok semacam itu disebut organisasi non-pemerintah (NGO, LSM), atau baru-baru ini disebut sebagai organisasi masyarakat (CSOs, Ormas). Ada kekurangjelasan dan perdebatan mengenai penggunaan istilah semacam itu; bagi artikel ini, LSM dan Ormas digunakan dalam arti yang sama yakni organisasi nirlaba, lembaga non-pemerintah yang melaksanakan pembangunan sosial dalam arti seluas-luasnya. Para pelopor kelompok ini bekerja sama pada masa pra-Hukum Perang. Pada masa Hukum Perang, beberapa kelompok “yang berorientasi-sebab” seperti Bayan dan organisasi lainnya yang bersifat kekirian juga telah melakukan serangan “parlemen jalanan.” Ini mencakup berbagai bentuk tindakan massa dan mobilisasi masyarakat kelas bawah dalam rapat umum dan serangkaian tindakan menentang rezim Hukum Perang. Setelah berakhirnya Hukum Perang, banyak organisasi ini yang menjadi organisasi resmi dengan kantor pusat Komisi Keamanan Negara. Masa sesudah Hukum Perang membuka ruang demokratis di dalam politik Filipina, yakni dengan memberikan peluang seluas-luasnya untuk menata keragaman luas pergerakan rakyat, organisasi masyarakat kelas bawah dan kelompok-kelompok lainnya yang benar-benar ingin melaksanakan pembangunan sosial, termasuk membantu terciptanya perdamaian.

Selama dua atau tiga dasawarsa silam, organisasi-organisasi ini telah aktif menentang pemerintahan yang mapan dan mengajukan berbagai strategi alternatif untuk memberikan bantuan kepada lapisan masyarakat yang miskin, tercerabut dan terpinggirkan. Banyak organisasi ini yang telah mencapai status dihargai dan disegani khususnya karena berbagai bantuan yang mereka berikan kepada kaum miskin dan terpinggirkan. Karena berbagai upaya mereka dalam memberikan bantuan yang secara tradisional merupakan tanggung jawab negara, mereka dapat memiliki pengaruh yang cukup kuat terutama di kalangan rakyat yang mereka bantu dan rekan-rekan sejawat. Inilah sumber utama kekuatan mereka. Kelompok-kelompok yang telah membangun keberadaan atau jaringan berskala nasional itu adalah kelompok yang relatif stabil dan lebih aktif dalam mengangkat berbagai isu dan perhatian menyangkut lapisan masyarakat yang terpinggirkan. Ini mencakup kelompok-kelompok 'berorientasi-sebab' di kalangan arus bawah seperti petani, pekerja di bidang sarana transportasi, kaum miskin di perkotaan dan di pedesaan. Kepemimpinan dan keanggotaan ini menjadi barisan depan massa dan tindakan menentang berbagai kebijakan dan strategi pemerintah yang kontroversial.

Dalam kaitan dengan penyelesaian konflik, transformasi konflik, pencegahan konflik dan seluruh upaya penciptaan perdamaian lainnya, kelompok masyarakat di Mindanao masih menghadapi jalan panjang dalam menyatukan upaya bersama demi mewujudkan perdamaian. Meski ada cukup banyak kelompok masyarakat yang menyampaikan perlunya melonggarkan perdamaian di Mindanao, usaha mereka masih saja tidak memiliki sinergi yang dibutuhkan untuk mencapai pengaruh yang berarti terhadap proses perdamaian komprehensif yang memang tidak berkembang di kawasan itu. Sebabnya, kelompok-kelompok yang menyuarakan perdamaian berasal dari orientasi politik atau ideologis yang beragam. Kelompok-kelompok yang memiliki ideologi berbeda bahkan bertentangan enggan menjalin hubungan, sehingga menimbulkan konflik dan ketegangan di dalam

masyarakat itu sendiri.²⁶

Bahkan ada persoalan mendasar menyangkut kurangnya dana untuk melaksanakan program dan proyek yang mendukung berbagai upaya LSM untuk melanggengkan perdamaian di Mindanao. Akibatnya, kelompok-kelompok non-pemerintah ini saling bersaing untuk mendapatkan dana dan sumber daya pembangunan yang jumlahnya memang sangat sedikit itu. Inilah sumber potensi konflik lain di antara para pemimpin masyarakat. Banyak dari kelompok ini, khususnya kelompok yang kecil dan baru saja terbentuk, masih perlu membangun kredibilitas atau capaian prestasi agar dapat memperoleh dana dari partner pemerintah asing.

Kelemahan lainnya adalah bahwa banyak pencinta atau pencipta perdamaian yang tidak memiliki bekal profesional dan keahlian khusus untuk mengubah konflik. Banyak di antara aktivis perdamaian di Mindanao yang terlibat hanya karena tuntutan aktivitas pembangunan sosio-ekonomi mereka, dan banyak kelompok masyarakat di Mindanao memulai langkahnya sebagai LSM pembangunan sosial meski belum pernah aktif di dalam kelompok pencinta perdamaian. Sungguhpun demikian, para aktivis perdamaian yang profesional, berkeahlian dan memiliki keteguhan hati telah bangkit di Mindanao.

Inisiatif Perdamaian Masyarakat

Ada kawasan luas inisiatif perdamaian di Mindanao. Ia mencakup penyelenggaraan berbagai seminar mengenai sejarah konflik bersenjata, jurnalisme perdamaian, dialog tentang kehidupan dan budaya, dan aktivitas pemberian bantuan untuk mendorong masuknya wakil masyarakat ke dalam proses perdamaian resmi yang dilaksanakan karena adanya kemudahan dari pemerintah Filipina. Bentuk lain inisiatif tadi memusatkan perhatian terhadap pelatihan para aktivis perdamaian dalam bidang pengelolaan konflik, penyelesaian, penciptaan perdamaian dan pendidikan damai.

Pada 1996, uskup Katolik dan pemimpin Protestan bertemu dengan para pemimpin Muslim melalui inisiatif Kantor Penasehat Kepresidenan Bidang Proses Perdamaian (OPAPP). Pertemuan ini telah mendorong terbentuknya Forum Uskup-Ulama (FUU), sebuah kelompok yang bertanggung jawab melaksanakan proses pelembagaan “Pekan Perdamaian Mindanao.” Upacara ini sebenarnya berasal dari kegiatan tahunan Peace Advocates of Zamboanga (PAZ). FUU telah berperan sangat aktif dalam menciptakan perdamaian melalui inisiatif penciptaan rasa percaya diri dan mediasi daerah (misalnya kelompok para pendeta, imam dan pastur di Kota Kidapawan, Cotabato). Selain berbagai upaya ini, ia dikritik pedas oleh berbagai kelompok masyarakat karena bersikap diam pada saat-saat kritis proses perundingan damai, bahkan ketika pertikaian keras terjadi di antara berbagai kelompok bersenjata.

Pada bulan Desember 2001, sekelompok pemimpin perempuan Mindanao bertemu di Kota Davao. Kelompok ini menyebut dirinya sebagai Komisi Mindanao bagi Kaum Perempuan. Dipimpin oleh seorang anggota tim perdamaian GRP, kelompok itu memiliki banyak kesempatan untuk menyerukan peran aktif kaum perempuan dalam upaya menciptakan perdamaian, selain menerbitkan laporan tahunan mengenai keadaan kaum perempuan di Mindanao.

Dewasa ini, dengan pecahnya permusuhan terakhir, inisiatif dipusatkan untuk membantu penduduk sipil yang terlantar memenuhi berbagai kebutuhan mereka (dari kebutuhan yang bersifat fisik hingga psiko-sosial) di pusat-pusat evakuasi.

Program penanggulangan dan rehabilitasi maupun pelayanan psiko-sosial, seperti penyembuhan trauma anak-anak yang terjebak dalam konflik, diberikan oleh Yayasan Balik-Kalipay (Kembali kepada Kebahagiaan), Yayasan Tabang Mindanao dan Komisi Ekumenik bagi Keluarga dan Masyarakat Terlantar (Ecumenical Commission for Displaced Families and Communities, ECDFC). Umumnya organisasi ini berkantor pusat di Kota Cotabato, propinsi Maguindanao dan Cotabato. Kelompok masyarakat juga

mencela media karena memperburuk pemusuhan lama di berbagai kalangan masyarakat di Mindanao. Sebagian praktisi media yang berkantor di Mindanao menyadari bahwa jika mereka “bagian dari masalah, maka mereka juga harus menjadi bagian dari solusi.” Seperti yang dikemukakan Carol Arguillas, direktur Mindanao News and Information Cooperative Center, Inc (MindaNews) di sebuah forum di Kota Jenderal Santos pada tanggal 18 September 2003, “Pemberitaan media tidak membantu tetapi malah memperburuk konflik... Kami menyalahkan pemerintah... pemberontak, politisi, tetapi di media kita lupa bahwa kita ikut bersalah.”²⁷ Pada tanggal 18 Mei 2002, Arguillas dan lebih dari 50 wartawan yang bekerja di Mindanao, penyiar radio, penerbit, dan pengelola radio dan televisi menandatangani sebuah perjanjian, “Inilah Mindanao Kita” setelah menyelenggarakan Pertemuan Media Mindanao Pertama di Kota Davao. Dalam pertemuan ini, praktisi media mengemukakan berbagai faktor yang, melalui peliputan dan ulasan, mengakibatkan wartawan memperburuk hubungan yang sudah tegang di kalangan berbagai kelompok masyarakat di Mindanao. Sebagian pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat juga hadir pada pertemuan tersebut sebagai pengamat. Pertemuan itu diakhiri dengan tekad dari para praktisi media untuk menggalang kerja sama dengan perguruan tinggi dan lapisan lain dalam upaya menciptakan perdamaian. Usaha seperti itu akan memusatkan perhatian terhadap perlunya para praktisi media untuk benar-benar memahami akar konflik di Mindanao.

Salah satu faktor yang cenderung mengekalkan konflik antara Bangsamoro, Lumad dan komunitas Kristen adalah proses peminggiran (*marginalization*) Bangsamoro maupun Lumad jika dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat Kristen. Dengan demikian, pembangunan sosio-ekonomi, meski tidak secara langsung bersifat efektif terhadap perdamaian, juga penting dan layak. Ini dilaksanakan oleh pusat-pusat sumber daya dan layanan pemerintah yang memberikan fasilitas kredit kecil bagi rumah tangga dan pengembangan usaha di kalangan partner dan pengguna jasanya. Banyak kegiatan mereka benar-benar mengarah

kepada pemberdayaan ekonomi, selain juga akhirnya, pemberdayaan politik atau perluasan partisipasi rakyat dalam pemerintahan daerah. Kelompok masyarakat, kecil maupun besar, telah mengemukakan perlunya sikap saling pengertian antara dua agama besar—Islam dan Kristen—di Mindanao. Upaya untuk mencapai pengertian semacam itu dianggap sebagai langkah awal dalam menciptakan dialog yang berkesinambungan. Forum pendidikan dan seminar lokakarya mengenai latar belakang sejarah konflik di Mindanao yang diberikan oleh para sejarawan dan nara sumber asli Mindanao sangatlah bermanfaat dalam mendorong para peserta untuk mengkaji akar historis konflik. Melalui lokakarya, para peserta merumuskan langkah-langkah menuju upaya mengurangi iklim permusuhan antara berbagai kelompok yang berperang di Mindanao atau Filipina Selatan.²⁸ Inisiatif semacam itu telah dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Silsilah Movement di Kota Zamboanga, Koalisi Pengembangan LSM Mindanao (MINCODE), dan berbagai kelompok kecil seperti Maguindanao Development Foundation, Inc. (Cotabato Selatan); Kadtuntaya Foundation Inc. (Kota Cotabato dan Maguindanao); Kalimudan Foundation (Kota Marawi dan Lanau del Sur); Peace Advocates of Zamboanga (PAZ) dan sebagainya.

LSM internasional, regional dan lokal aktif pula memberikan bantuan teknis untuk menyalurkan berbagai upaya penanggulangan dan rehabilitasi ke daerah-daerah yang paling parah dilanda konflik di Mindanao. Di antaranya adalah Oxfam-GB, VSO-Toscadar Programme, Accion, the Community and Family Services International (CFSI), Inc., dan Catholic Relief Services (CRS).

Selain itu, CRS telah mendirikan Mindanao Peacebuilding Institute tahunan selama empat tahun terakhir. Lembaga itu melaksanakan pelatihan tematik mengenai Budaya Damai, Penanganan Konflik, Penyelesaian Konflik dan Pendidikan Perdamaian. Para peserta tidak hanya berasal dari Mindanao, tetapi juga dari seluruh penjuru negeri maupun negara-negara Asia Pasifik lainnya (termasuk Pakistan, India, Indonesia dan Vietnam).

Upaya penciptaan perdamaian yang bersifat terbatas, seperti dalam penetapan “zona-damai”, menjadi pusat “perdamaian pragmatis” di berbagai komunitas yang dilanda konflik yang lebih parah. Di kawasan seperti ini, para anggota dari berbagai komunitas (Muslim, Kristen dan penduduk asli) sepakat untuk bekerja sama demi mewujudkan perdamaian langgeng di dalam komunitas mereka sendiri. Ini telah ditempuh di Maladeg, Zamboanga del Sur dan di Sapad, Lanao del Norte—tempat yang menjadi saksi pertikaian berdarah antara pemberontak Muslim dan tentara Filipina pada puncak peperangan di pertengahan tahun 1970-an.²⁹

Contoh lain inisiatif arus bawah terhadap upaya menciptakan perdamaian adalah peran rakyat dan komunitas yang didasarkan atas prinsip penyelesaian konflik di kalangan komunitas kecil yang dilanda permusuhan paling buruk dari tahun 2000 hingga 2003. Ini mencakup upaya para penduduk desa Muslim dan Kristen di Cotabato yang menyatakan daerah mereka sebagai “Ruang bagi Perdamaian.” Inisiatif semacam itu terjadi sekurang-kurangnya di lima *barangays* di kota Pikit. Salah satu penggagasnya “Ruang bagi Perdamaian” adalah pendeta Katolik, Fr. Bert Layson, OML. Fr. Layson adalah wakil ketua Mindanao People’s Caucus (MPC). Dua orang wakil ketua lainnya adalah seorang Moro dan seorang Lumad (penduduk asli). Susunan wakil ketua mencerminkan sifat tripartit MPC.

Di Kauswagan, Lanao del Norte, sebuah kelompok dibentuk menjelang deklarasi perang menyeluruh Presiden Estrada pada tahun 2000. Kauswagan merupakan kamp penting MILF. Kelompok yang disebut Pakigdait, istilah Cebuano-Visayan yang berarti “sikap saling pengertian” itu, menyelenggarakan serangkaian forum dan simposium yang meningkatkan sikap saling pengertian antara para penduduk Muslim dan Kristen di kawasan itu. Berbagai seminar yang mereka selenggarakan sejak tahun 2000 bertujuan untuk “memperbaiki hubungan yang rusak antara kaum Muslim dan kaum Kristen” yang diakibatkan oleh perang menyeluruh Estrada. Pihak-pihak yang menandatangani perjanjian adalah para tokoh masyarakat Muslim dan Kristen (Maranaw) di daerah

Mindanao Tengah.

Pada gilirannya, berbagai lembaga pendidikan tinggi di Mindanao telah membantu penyebarluasan agenda perdamaian di perguruan tinggi. Misalnya, Universitas Notre Dame di Kota Cotabato menjadi contoh di antara lembaga-lembaga di Mindanao yang menawarkan program sarjana bidang Perdamaian dan Pembangunan (Magister maupun Doktor). Universitas Ateneo de Davao memberikan penghargaan tinggi kepada upaya tokoh-tokoh di luar pemerintahan dalam meningkatkan perdamaian dan pembangunan. Baru-baru ini universitas tersebut menyelenggarakan program penyetaraan pada jenjang SLTA maupun Sarjana bagi orang-orang yang berpengalaman dalam upaya menciptakan perdamaian maupun dalam bidang khusus lainnya. Program Akreditasi Pendidikan Luar Sekolah (The Extended Tertiary Educational Accreditation Program, ETEAP) telah dimulai pada tahun 2001 dan telah meluluskan dua mahasiswa Program Magister Perdamaian dan Pembangunan.

Beberapa organisasi telah menyuarakan proses perdamaian dalam pernyataan tentang kesepakatan damai GRP-MNLF. Misalnya, Konferensi Perempuan Bangsamoro tentang Proses Perdamaian yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2002 di Kota Cotabato telah menghasilkan mengeluarkan pernyataan tegas dan bahkan tuntutan terhadap pembebasan tanpa syarat Nur Misuari dari penjara dan pelaksanaan semua pasal Kesepakatan Damai Tahun 1996.³⁰ Sebagian telah memainkan peran advokasi terhadap berbagai isu yang secara langsung berhubungan dengan proses perdamaian. Pada tahun 2001, Kaukus Rakyat Mindanao dibentuk di Kota Davao untuk meningkatkan sikap saling pengertian antara ketiga rakyat Mindanao. Yang memelopori mobilisasi kaukus ketiga rakyat ini merupakan Initiatives for International Dialogue (IID), juga berkantor pusat di Kota Davao. Kaukus sangat aktif dalam memobilisasi aksi massa yang menuntut persatuan di antara berbagai kelompok rakyat di Mindanao dan dalam menyerukan bersikap moderat selama masa krisis, misalnya insiden bom di Kota Davao pada bulan Maret 2003.

Renungan tentang LSM

Secara umum, ada perubahan penting dalam hubungan antara berbagai kelompok masyarakat di Mindanao, khususnya ketika dibutuhkan semangat kebersamaan bagi perdamaian. Meski masih terdapat berbagai perpecahan, namun kelompok-kelompok masyarakat kini semakin bertekad untuk bekerja sama, terutama dalam menekan pemerintah maupun kelompok pemberontak untuk menghentikan peperangan. Ini dibuktikan dengan adanya “konsorsium” seperti Konsorsium Organisasi Masyarakat Bangsamoro, atau CONSORTIUM. Para anggotanya berasal dari berbagai orientasi dan simpatisan politik (sebagiannya pro-MNLF dan sebagian lainnya pro-MILF).

Di samping itu, kini ada upaya bersama sektor pendidikan tinggi (negeri maupun swasta) dan kelompok-kelompok LSM dalam menyusun Projek Kajian Mindanao yang bertujuan untuk menyelenggarakan database perdamaian dan pengembangan sumber daya di Mindanao. Konsorsium Kajian Mindanao beranggotakan sepuluh universitas (lima di antaranya merupakan universitas negeri); lima lainnya adalah universitas swasta sektarian (Katolik) dan sebuah LSM sumber yang berkantor pusat di Kota Davao (Alternate Forum for Research in Mindanao atau AFRIM).

LSM dan kelompok masyarakat yang bekerja untuk perdamaian relatif bebas melaksanakan berbagai aktivitas yang telah mereka gariskan dan mengupayakan tercapainya tujuan respektif mereka. Di pihak pemerintah, ada keuntungan karena berbagai kelompok masyarakat aktif dalam membantu terciptanya perdamaian. Pemerintah tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan (personil, peralatan dan dana) untuk mencapai “perdamaian komprehensif yang adil dan langgeng” yang dikumandangkan oleh Instruksi Presiden Arroyo No. 3. Ia membutuhkan bantuan apa saja dari kelompok maupun individu masyarakat yang diterpa konflik bersenjata. Dengan mendapatkan dukungan LSM bagi agenda perdamaian pemerintah, pemerintah telah memenangkan separuh pertempuran hati dan pikiran para

pemilih, apakah mereka Muslim, Kristen atau penduduk asli.

Demikian pula, MILF membutuhkan dukungan yang luas, yang tidak selamanya dalam melaksanakan apa yang mereka pahami sebagai perjuangan adil melawan pemerintah Filipina, namun yang lebih penting lagi dalam menanamkan pengertian kepada rakyat terhadap akar penyebab konflik. Oleh karena itu, mereka menyambut LSM yang mengembangkan sikap saling pengertian di kalangan kaum Muslim dan Kristen di Mindanao. Meskipun metode mereka sering kali “tidak-damai” seperti yang berulang kali mereka nyatakan melalui juru bicara mereka, perdamaian merupakan tujuan mereka juga dan tidak hanya tujuan pemerintah saja.

Kelompok masyarakat sipil memiliki kedudukan unik di tengah-tengah masyarakat. Ini bersumber dari potensi mereka dalam memberdayakan penduduk dan meningkatkan partisipasi luas dalam “proses perdamaian yang komprehensif.” Meski berbagai kelompok masyarakat berada di luar birokrasi pemerintah, namun mereka melaksanakan berbagai kegiatan dan telah menjalankan peran maupun kewajiban yang tak lain merupakan urusan pemerintah. Dalam konteks proses perdamaian menyeluruh, semua aktivitas ini mencakup penyelenggaraan seminar-lokakarya bagi sikap saling pengertian dan dialog untuk memberikan bantuan penanggulangan dan rehabilitasi, termasuk pula memberikan layanan dasar dan psikologis bagi penduduk yang terusir.

Dari segi mempengaruhi keputusan pemerintah dalam proses perdamaian, upaya kolektif berbagai kelompok di Mindanao tampaknya berpengaruh terhadap keputusan presiden mengangkat tim perdamaian yang “semuanya orang Mindanao” untuk menghadapi juru runding perdamaian MILF. Ini merupakan sebuah terobosan baru terutama jika diingat susunan tim perunding perdamaian sebelumnya. Di samping itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah perundingan perdamaian, dua pemimpin kaum perempuan Mindanao telah ditunjuk menjadi anggota tim perdamaian ini.

Lobi intensif oleh berbagai kelompok seperti Kaukus Rakyat Mindanao telah berhasil memasukkan seorang wakil Lumad ke dalam Komite Teknik Tim Perdamaian pemerintah. Datu Al Sailing dari Carmen, propinsi Cotabato ditunjuk oleh staf ahli Presiden bagi Mindanao Jesus Dureza untuk menjadi bagian dari kelompok bidang teknis kawasan leluhur. Ini menyiratkan pengakuan terhadap fakta bahwa penduduk asli Lumad perlu dipertimbangkan dalam perundingan perdamaian dengan pihak MILF. Dalam perundingan dan perjanjian damai sebelumnya, penduduk Lumad di Mindanao tidak diberi hak untuk bersuara, apalagi kursi di meja perundingan. Pengangkatan Datu jelas merupakan sebuah prestasi, mengingat “dosa pengebirian” pemerintah masa lalu yang tidak memasukkan tokoh Lumad dalam perundingan perdamaian. Tetapi masih ada keengganan untuk mengakui peran penting penduduk asli dalam memetakan pandangan yang sama bagi masa depan Mindanao. Saran mereka sangat berharga dalam memperluas dan meningkatkan wacana sosial untuk Mindanao dan keragaman penduduknya.

Masih harus dilihat apakah tim penasihat perdamaian yang beranggotakan orang Mindanao itu dapat benar-benar mempengaruhi jalannya pembicaraan dan upaya untuk menciptakan sikap saling menerima pada bulan-bulan mendatang. Sebelumnya, dilaporkan adanya kekecewaan anggota tim karena merasa disisihkan dalam upaya “jalan belakang” yang mulai merebak sejak tahun silam untuk menandatangani kesepakatan sementara.³¹

Prospek

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, prospek berakhirnya perang di Mindanao masih suram. Fr. Roberto Layson, OMI, wakil ketua Kaukus Rakyat Mindanao dan kordinator Dialog Antar Agama Missionary Oblates of Mary Immaculate (OMI), mengeluh dalam karya memoarnya tentang perang: “Dalam perang, musuh sejati adalah perang itu sendiri. Perang membuat orang menjadi kejam...”

Pada tanggal 8 Februari 2003, militer Filipina membombardir kompleks Bullok di Pikit. Komplek itu konon dihuni oleh Hashim Salamat, ketua MILF; banyak penduduk sipil terpaksa mengungsi. Insiden ini memupuskan harapan pendeta itu terhadap penyelesaian akhir konflik.

Meski Fr. Layson mencela apa yang menurutnya “sikap tidak jujur” pihak MILF karena tidak menghargai kesepakatan gencatan senjata sebelumnya, namun dia berpendapat bahwa pemerintah lebih bertanggung jawab terhadap semua penderitaan para pengungsi di kotanya. “Sebab sebuah negara (pemerintah Filipina) haruslah memiliki moral yang tinggi untuk menempuh semua sarana perdamaian demi mencegah peperangan...”³² Pakar konflik Mindanao lainnya, pengacara Soliman Santos Jr. mengungkapkan pesimisme dan kekecewaan terhadap berbagai peristiwa baru-baru ini di Mindanao Tengah. Santos berpendapat “tak banyak yang akan terjadi dalam bulan-bulan mendatang kepresidenan Arroyo dari segi pencapaian kesepakatan yang bisa diterima...Pemerintahan ini hanya akan begitu saja berlalu, dan menyongsong presiden baru terpilih pada 2004...”³³

Tetapi, Santos melihat beberapa alasan bagi optimisme dan harapan dalam “melunakkan” pendirian MILF untuk menyetujui sebuah pembicaraan lanjutan dan mempertahankan jalur perundingan damai. Dia percaya bahwa MILF “tak akan melangkah mundur” untuk mengabdikan seruan umum bagi kelanjutan pembicaraan dengan pihak pemerintah. Dia juga mengatakan bahwa dinamisme upaya masyarakat dapat pula menjadi sumber harapan lain sehingga sesuatu yang positif akan dapat muncul, bagaimana pun tragis dinamisme itu telah terbukti bagi Mindanao.

Rekomendasi

Berbagai kelompok masyarakat telah mengajukan dua opsi untuk mengakhiri perang dan mencapai penyelesaian abadi terhadap konflik di Mindanao: (1) pelaksanaan sistem pemerintahan federal bagi seluruh Filipina, dan (2) menyelenggarakan referendum yang diawasi PBB. Pada bulan Mei 2001, sekelompok pakar

menyelenggarakan rapat di Kota Davao untuk membahas rancangan luas naskah konstitusi bagi pembentukan Republik Federal Filipina. Rapat ini dimungkinkan oleh para peserta dari Kusog Mindanao (Kekuatan Mindanao), sebuah koalisi luas kelompok masyarakat dan individu yang berupaya menciptakan Mindanao yang lebih damai dan lebih maju.

Pada 17-20 Desember 2002, Pertemuan Rakyat Mindanao diselenggarakan di Kolese Kristen Selatan di Midsayap, Cotabato Utara. Pertemuan itu menghasilkan Deklarasi Midsayap 2002 yang, antara lain, menyerukan pemerintah Filipina "...untuk menyelenggarakan Referendum yang diawasi PBB di berbagai wilayah Bangsamoro di Mindanao." Gerakan Damai Rakyat Mindanao (The Mindanao Peoples Peace Movement, MPPM) bertekad untuk mendukung proposal ini melalui strategi banyak jalur, antara lain, namun bukan semata-mata, tekanan legislatif, inisiatif rakyat, pembentukan konstituensi perdamaian dan lobi internasional. Kelompok itu yakin bahwa hanya melalui referendum Bangsamoro akan mendapatkan kesempatan untuk menentukan sendiri nasib dan masa depan politiknya. Sekurangnya 500 perwakilan organisasi rakyat dan kelompok masyarakat lainnya di Mindanao menghadiri Pertemuan itu. Pada tanggal 22 Februari 2003, Pertemuan Pemimpin Muslim Mindanao diselenggarakan di Kota Davao. Pertemuan para pemimpin Muslim yang berasal dari berbagai propinsi di Mindanao itu mengeluarkan 13 butir Pernyataan Perdamaian dan Pembangunan yang disampaikan kepada pemerintah nasional. Pernyataan itu diringkas ke dalam empat seruan utama, yakni:

- "Menolak perang menyeluruh di Mindanao"
- "Menolak *Balikatan* (secara harfiah, bahu-membahu, yang merujuk pada latihan militer bersama antara Filipina dan pasukan AS) di Sulu;
- "Ya bagi federalisme," dan
- "Ya bagi pemerintah AS, bukan bagi bantuan *militer* [cetak miring ditambahkan]."³⁴

Meski berbeda orientasi politiknya, namun para peserta dalam

pertemuan tersebut bersatu dalam seruan mereka kepada pemerintah pusat untuk “mengentaskan wabah kemiskinan” di Mindanao. Mereka juga menuntut pemerintah pusat untuk “menempuh jalan damai dan mengkampanyekan penentangan terhadap penggunaan perang dan agresinya sebagai alat kebijakan nasional dan internasional.” Selain itu, ada beberapa upaya yang mungkin ditempuh untuk mengembalikan proses perdamaian Mindanao ke jalur demi mencapai penyelesaian akhir. Upaya tersebut antara lain:

1. Meninjau kembali strategi militer di Mindanao, termasuk kemungkinan secara bertahap menarik instalasi militer, khususnya yang berada di berbagai wilayah yang kini secara perlahan mulai stabil dalam arti perdamaian dan ketertiban. Organisasi pemerintah maupun non-pemerintah dapat bermusyawarah untuk melaksanakan pasal-pasal konstitusional tentang supremasi Polisi Nasional Filipina untuk melindungi warga negara. Tetapi, kemungkinan ini akan menghadapi banyak rintangan karena militer selalu memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan terhadap urusan Mindanao.
2. Pertahankan wacana sosial menyangkut negara “multi-bangsa” untuk memberi peluang bagi identitas yang tak terangkum dalam definisi identitas nasional Filipina. Di samping itu, ada kebutuhan untuk memperluas pembahasan mengenai seluruh ranah alternatif dan kemungkinan bagi masa depan penduduk Mindanao yang beragam itu.
3. Pembentukan konstituensi perdamaian di seluruh wilayah, dan pada seluruh jenjang pendidikan, dengan program pembinaan kemampuan bagi para aktivis perdamaian. Ini mencakup berbagai modul bagi pelatihan berbagai sektor, bahkan militer, untuk membantu mereka memahami akar konflik di Mindanao.
4. Selain itu, pemain-pemain luar seperti OKI, yang diawali dengan kepemimpinan Malaysia, dapat memainkan peran yang jauh lebih besar dan lebih luas dalam tahap proses perdamaian MILF-GRP dewasa ini. Peran semacam itu tidak hanya bertumpu pada pemerantaraan dan fasilitasi Kesepakatan Akhir,

namun juga pemantauan seluruh upaya pemeliharaan perdamaian, dan pemberian bantuan dana bagi inisiatif-inisiatif non-pemerintah yang diperlukan untuk mencapai perdamaian yang langgeng di Mindanao.

Sebenarnya, Mindanao dapat menjadi kunci yang membuka potensi perekonomian regional dan akhirnya perekonomian nasional yang dinamis yang didasarkan atas kemandirian, kejujuran, keadilan dan keberdayaan penduduknya. Mindanao memiliki jaringan kuat masyarakat yang beranggotakan berbagai kelompok dengan tekad melaksanakan pembangunan sosial bagi rakyatnya yang beragam. Ia kaya dalam sumber alam, dan keragaman budaya. Sumber sistem pengetahuan penduduknya, khususnya dalam penyelesaian dan transformasi konflik, pada umumnya masih merupakan sumberdaya yang belum terjamah. Semua ini dapat dimanfaatkan untuk membentuk sebuah masyarakat yang maju.

Catatan

¹ Bab yang secara khusus membahas konflik antara Angkatan Bersenjata Pemerintah Republik Filipina dan Bangsa Moro (Moro National Liberation Front-Moro Islamic Liberation Front).

² B.R. Rodil, *The Minoritization of the Indigenous Communities of Mindanao and the Sulu Archipelago*, (Davao City: Alternate Forum for Research in Mindanao [AFRIM], 1994), h. 51.

³ B.R. Rodil, *ibid.*, h. 54.

⁴ Muslim and Cagoco-Guiam, *op. cit.*, h. 11-13. Lihat juga Cagoco-Guiam, *Child Soldiers in Central and Western Mindanao: A Rapid Assessment*, (Jenewa: International Labour Office 2002), h.

⁵ Rufa Cagoco-Guiam, "Separatism, Autonomy and Democratization in Southern Philippines: Issues and Challenges", makalah disampaikan pada forum para penulis bagi projek Separatism, Autonomy and Democratization in Asia, Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Indonesia, 22-25 Januari 2002, h. 3-4. Tidak diterbitkan.

⁶ Lihat misalnya karya B.R. Rodil, Samuel K. Tan, Macapado A. Muslim, dan sebagainya dalam bab bibliografi.

⁷ Indios adalah istilah para penjajah Spanyol yang mengandung arti penduduk asli di Luzon dan Visaya yang mereka paksa untuk menganut agama Kristen.

⁸ Lihat Jeremy Beckett, "The Compliant and the Defiant: Maguindanao Datus under Colonial Rule," dalam Alfred W. McCoy dan Ed. C. de Jesus (ed), *Philippine Social History. Global Trade and Local Transformation* (Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1998), h. 391-414.

⁹ Rufa Cagoco-Guiam, "Telling the Truth of the Other: Images of Islam and Muslims in Southern Phillipines," dalam Melinda Quintos de Jesus (ed), *The Media and Peace Reporting: Perspective on Media and Peace Reporting* (Pasig City: Office of the Presidential Adviser on the Peace Process [OPAPP], 2000), h. 62-80.

¹⁰ Lihat Carolyn O. Arguillas, "The Cost of War," dalam *Mindaneans*, 12 Maret, 2003. www.mindanews.com

¹¹ Macapado A. Muslim dan Rufa Cagoco-Guiam, "Mindanao: Land of Promise," dalam *Accord, An International Review of Peace Initiatives*, Issue 6/1999, h. 16.

¹² B.R. Rodil, *Kalinaw Mindanaw: The Story of the MNLF Peace Process 1975-1996*, Davao City: Alternate Forum for Research ini Mindanao, 2000, h. 3-4.

¹³ Salah satu alasan mengapa perjanjian itu sejak awalnya telah diduga hanya akan dilaksanakan menurut konstitusi dan proses hukum Filipina. Misalnya, pelaksanaan otonomi harus melalui proses pengundangan hukum lalu referendum untuk menentukan propinsi mana yang akan menjadi bagian Daerah Otonom. Ia akan menghindari, dan bukan menyelesaikan, isu kemerdekaan.

¹⁴ Pengarang pernah menyaksikan satu perkumpulan anti-MNLF dan anti-Cory di Cotabato pada tahun 1987 di mana sejumlah pembicara MILF berganti mengutuk pertemuan itu sebagai "bersifat memecah-belah". Pertemuan itu juga akan "mendorong beberapa pemimpin Moro seperti Misuari untuk memberikan kelonggaran kepada pemerintah Filipina."

¹⁵ Dihitung dari lembar perhitungan korban berkaitan dengan konflik, lampiran pada Midyear Briefing dari IBON Databank, khususnya dari

artikel “Stabilization and Recovery?” oleh Antonio A. Tujan, Jr. Manila: IBON Databank, 2002.

¹⁶ Lihat artikel Zoher Abdoolcarim, “Terrorist Refuge,” dalam *Times Magazine*, edisi 24 Februari 2003. Kantor *Mindaneews* di Davao mengklaim jumlah korban di pihak MILF dibesar-besarkan oleh laporan *Times*. Korban tewas di pihak MILF diperkirakan hanya berjumlah 60 orang. Dari hasil wawancara tak resmi dengan Carolyn Arguillas, editor kepala *Mindaneews*, 4 Maret 2003. Lihat website mereka, pada www.mindaneews.com.

¹⁷ Menurut tulisan ini, Kota Davao, kota penting di Mindanao dan pusat bisnis dan perdagangan di kawasan itu, telah beberapa kali diguncang bom; salah satunya di Bandar Udara Internasional Davao pada 4 Maret 2003 yang menewaskan 17 orang dan melukai sejumlah yang lain; lalu insiden bom di terminal penumpang di Sasa Wharf pada 2 April 2003, yang menewaskan 16 orang dan melukai lebih dari 30 orang.

¹⁸ Macapado A. Muslim dan Rufa Cagoco-Guiam, “Mindanao: Land of Promise,” dalam *Accord, An International Review of Peace Initiatives*, Issue 6/1999, London: Concillian Resources, 1999, h. 16.

¹⁹ Lihat Macapado A. Muslim dan Rufa Cagoco-Guiam, op. cit., 1999, h. 19.

²⁰ Lihat Soliman Santos Jr., “Islamic Diplomacy, Consultation and Consensus”, dalam *Accord, An International Review An International Review of Peace Initiatives*, Issue 6/1999, London: Concillian Resources, 1999, h. 20-23.

²¹ Santos, *ibid.*, h. 23.

²² Lihat Rufa Cagoco-Guiam, “Separatism, Autonomy and Democratization in Southern Phillipines: Issues and Challenges”, makalah disampaikan pada Projek Separatism, Autonomy and Democratization in Asia (SADA), dibahas pada pertemuan para penulis di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Indonesia, 22-25 Januari 2002, h. 31.

²³ Lihat The Semi-Annual Accomplishment Report, First Semester, 2002, Manila: Office of the Presidential Adviser on the Peace Process, h. 1.

²⁴ Cagoco-Guiam, “Negotiations and Detours: the Rocky Road to Peace in Mindanao,” dalam *Accord, The Mindanao Peace Process*, sebuah suplemen untuk *Compromising on Autonomy*, (London: Concilliation Resources, Agustus 2003), h. 6.

²⁵ Cagoco-Guiam, *ibid.*

²⁶ Ini termasuk isu dan tantangan yang dihadapi oleh hubungan masyarakat di Filipina yang disebutkan oleh Karina Constantino-David dalam makalahnya, "From the Present Looking Back: A History of Philippines NGOs," dalam Sidney Silliman dan Lela Garner Noble (ed), *Organizing for Democracy, Civil Society and the Philippine State* (Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1998).

²⁷ Carol Arguillas, "Media and peace building in Mindanao," makalah pada seminar-lokakarya "Belajar dari Partisipasi Rakyat dalam Proses Perdamaian", yang dilaksanakan pada 18 September, Vancouver Hall, Sydney Hotel, General Santos City. Disponsori bersama oleh Conciliation Resources, London dan Catholic relief Services-Mindanao Regional Office dan dilaksanakan oleh Center for Peace and Development Studies, Mindanao State University-General Santos City.

²⁸ Lihat Rufa Cagoco Guiam, "An Exploratory Study of Civil Society Organizations among Muslim Communities in Two Provinces in the Autonomous Region in Muslim Mindanao," laporan yang tidak diterbitkan kepada Konrad Adenauer Foundation, Desember 2002.

²⁹ Mengenai penjelasan bagaimana zona-damai ini terwujud, lihat Karl M. Gaspar, et al., *Mapagpakalinon, A Reader for Mindanao Peace Advocates*. Davao City: Alternate Forum for Research in Mindanao dan Catholic Relief Services-Mindanao Regional Office, 2002.

³⁰ Perwakilan 16 organisasi masyarakat Bangsamoro menghadiri konferensi tersebut. Semua organisasi itu bermarkas di berbagai daerah di Mindanao. Antara lain termasuk: The Bangsamoro Women Solidarity Forum (BMWSF), Bangsamoro Women Foundation for Peace and Development, Inc., (BMWFPDI), Federation of United Mindanawan Bangsamoro Women (FUMBW), Bangsamoro Women Professionals and Employees Organization, Incorporated (BWPEOI), Consortium of Bangsamoro Civil Society Organizations (CONSORTIUM), dan semua cabangnya; Asian Muslim Action Network in the Philippines (AMANPHIL), Maranao People's Development Center, Inc., (MARADECA), Salam Women Organization, Incorporated, Ompong O Mga Bae sa Ranao (OBAERA), Peace and Development Advocates League of Maguindanao, Lumah Ma Relaut, HAGS, Inc., Maáljamaáh Development Foundation, Incorporated and the Bangsamoro Youth Assembly (BMYA). Lebih dari 200 orang peserta, kebanyakannya kaum

perempuan, hadir. Penulis diundang untuk berbicara tentang meningkatnya partisipasi masyarakat umum pada proses perdamaian.

³¹ Ini dikemukakan pada sebuah pembicaraan tak resmi antara penulis dengan seorang anggota perempuan dari tim perdamaian pemerintah pada awal Maret 2003 di Davao City.

³² Lihat Catatan Akhir, dalam Fr. Roberto Layson, OMI, *In War, the Real Enemy is War Itself*. Davao City: Initiatives for International Dialogue, 2003, h. 67-68.

³³ Dari hasil wawancara via telepon dengan Atty, Soliman M. Santos Jr., oleh penulis, pada 31 Maret 2003.

³⁴ Carolyn O. Arguillas, "Mindanao's Muslim Leaders: Head Our Calls," dalam www.mindanews.com. 22 Februari 2003.

Laporan-laporan

Conciliation Resources

"The MNLF-GRP Peace Process: Mindanao in Transition." *Accord*, vol. 3, No. 1 dan 2 Januari-Juni, London, 1999.

"A Critical Collaboration-Civil Society Participation in the Peace Process," oleh Rufa Cagoco-Guiam. Dalam: *An International Review of Peace Initiatives*, seri *Accord*, Conciliation Resources, London, 1999.

ILO

"Child Soldiers in Central and Western Mindanao: A Rapid Assessment," oleh Rufa Cagoco-Guiam, Jenewa, 2002.

Publikasi

Jeremy Beckett, "The Compliant and the Defiant," dalam Alfred W. McCoy dan Ed. C. de Jesus (ed), *Philippine Social History. Global Trade and Local Transformation*, Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1998.

Rufa Cagoco-Guiam, *Organizations in Two Provinces in the Autonomous Region in Muslim Mindanao*, General Santos City: Center for Peace and Development Studies, Mindanao State University, 2002. Tidak diterbitkan.

Rufa Cagoco-Guiam, *Separatism, Autonomy and Democratization southern*

- Phillippines: Issues and Challenges*, makalah yang dipersembahkan kepada projek Separatisme, Otonomi dan Demokratisasi yang didanai oleh United States Institute for Peace, 2002. Tidak diterbitkan.
- Miriam Coronel-Ferrer (ed), *The SPCPD: A Response to the Contravercy*, Quezon City, Phillipines: UP Center for integrative and Development Studies, 1997.
- K. Gaerlan dan M. Stankovitch (ed), *Rebels, Worldlords and Ulama: a reader on Muslim separatism and the war in Southern Mindanao*, Quezon City, Phillipines: Institute for Popular Democracy, 2000.
- M. Dafiguilan Vitug dan G.M. Gloria, *Under the crescent moon: rebellion in Mindanao*, Quezon City, Phillipines: Ateneo Center for Social Policy and Pubic Affairs and Institute for Popular Democracy, 2000.
- Patricia P. Diaz, *Understanding Mindanao Conflict*, MidaNews Publications, 2003.
- T.J.S. George, *Revolt in Mindanao: The Rise of the Islam in Phillipine Politics*, Oxford University Press, 1980.
- Fr. Roberto Layson, *In War, the Real Enemy is War Itself*, OMI, Davao City: Initiatives for International Dialogue, 2003.

Situs Internet

- www.mindanews.com (Kisah Mindanao, berita dan komentar menarik lainnya tentang konflik dan wabah kemiskinan di Mindanao. Situs ditangani Mindanao News and Information Cooperative Center yang dipimpin Caroy O. Arguillas).
- <http://mnlf.net> (Website MNLF).
- just_peace@yahoo.com (laporan dan perkembangan baru tentang kegiatan kelompok-kelompok yang terlibat dalam upaya menciptakan perdamaian, seperti Gaston Z. Ortigas Peace Institute).
- www.respond.org (dikelola oleh organisasi Responding to Conflict. Alamat surat adalah 1046 Bristol Road, Selly Oak, Birmingham B29 6LJ, UK. Organisasi tersebut menerbitkan buku pelatihan tentang *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*, oleh Simon Fisher, et. Al., pada 2001).
- www.c-r.org (dikelola oleh Concilliation Resources, LSM kecil yang menerbitkan *Accord: An International Review of Peace Initiatives*. Issue 6/1999 terfokus terhadap Proses Perdamaian antara MNLF dan

Pemerintah Filipina. Pembaruan proses perdamaian MILF-GRP tengah dipersiapkan).

Kontak Narasumber

Ms. Carolyn O. Arguillas, e-mail: carol@mindanews.com

Fr. Eliseo R. Mercado, Jr., OMI, e-mail: junmeromi@yahoo.com/
ermomi@hotmail.com

Atty. Soliman M. Santos Jr., e-mail: gavroche@info.com.ph

Ms. Irene Santiago, Convener, Mindanao Commission on Women, e-mail:

irenesantiago@yahoo.com

Dr. Jamail Kamlian, Wakil Penasehat Research and Extension, Mindanao State University-Iligan Institute of Technology, Iligan City, Mindanao, Phillipines.

Dr. Grace Rebollos, Direktur People's Center for Peace and Development Initiatives Western Mindanao State University, Zamboanga City, e-mail: rebollos@wmsu.edu.ph

Dr. Macapado, seorang Penasehat Muslim, Mindanao State University-General Santos City.

Organisasi

Bangsamoro Women Foundation for Peace and Development, Inc.

Door 1, Salic Apt. Rabago Street.

Corner Espino Ext., Cotabato City, Phillipines.

Tlp: +63 64 421 6154

e-mail: bmwf@microweb.com.ph

Initiatives for International Dialogue

27 Galaxy St. GSIS Heights

Matina, Davao City

Tlp: +63 82 299 2574-75

Fax: +63 82 299 2052

e-mail: iid@iidnet.org

Mindanao Commission on Women
121 University Avenue, Juna Subdivision
Matina Davao City
Tlp: +63 82 298 4031
e-mail: mc_women@hotmail.com

Peace Advocates Zamboanga Foundation, Inc.
C/O Fr. Angel Calvo, CMF
Claret School, San Jose, Zamboanga City
Tlp: +63 62 991 1168
e-mail: acalvo@mozcom.com

Mindanao Center for Peace and Development
Gomez Compound, Yniquez St.
Ma-a, Davao City
Tlp: +63 82 244 0648
e-mail: infos@skyinet.net

Perempuan, Rekonsiliasi dan Adat: Kisah Sukses Penciptaan Perdamaian Pasca-konflik di Bougainville

Volker Böge dan Lorraine Garasu

Pada tahun 1998, setelah berperang nyaris selama satu dasawarsa, penciptaan perdamaian dimulai di pulau Bougainville. Sejah ini, kecuali beberapa kemunduran, proses perdamaian telah menjadi kisah sukses di mana semua pihak melaksanakan kesepakatan gencatan senjata. Kemajuan berarti telah dicapai dalam pembangunan kembali, rehabilitasi dan rekonsiliasi. Tetapi, sementara penyelesaian persoalan-persoalan politik yang menjadi penyebab konflik telah disepakati, namun masih ada hambatan yang harus diatasi demi mencapai perdamaian abadi. Penyerahan senjata belum tuntas dan penegakan hukum dan ketertiban masih menjadi tantangan

serius. Luka psikologis dan mental akibat perang berkepanjangan masih membekas, sementara langkah-langkah penting dalam penyelesaian politik masih harus ditempuh, dan keadaan sosial maupun ekonomi masih membutuhkan perbaikan yang berarti. Tetapi, keberhasilan tersebut dimungkinkan oleh kepemimpinan dan partisipasi masyarakat di dalam proses perdamaian. Dalam upacara dan prosesi tradisional, mantan militan, kaum perempuan, gereja dan LSM bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian melalui berbagai saluran resmi. Tulisan ini tidak membahas sebab-sebab konflik yang bersifat historis, politik atau ekonomi, namun melukiskan proses perdamaian masyarakat adat yang masih berlangsung hingga kini.

Pulau Bougainville terletak persis di perbatasan timur Papua New Guinea, namun secara etnik dan geografis ia lebih dekat dengan pulau Solomon di Pasifik Selatan, yang dengannya ia mempertahankan ikatan sosial dan kultural. Luasnya yang mencapai 8,800 km² menjadikannya sebagai pulau terbesar di kepulauan ini. Tetapi secara konstitusional ia merupakan bagian dari negara Papua New Guinea, yang baru memerdekakan diri pada 1975. Bersama dengan pulau Buka yang bertetangga hingga ke sebelah utara dan beberapa pulau karang, ia membentuk salah satu dari 19 propinsi PNG. Dari 1988 hingga 1998, 180,000 penduduk Bougainville menderita karena berada dalam perang hutan rimba yang kejam, yang konon merupakan konflik paling lama dan paling berdarah di Pasifik Selatan sejak Perang Dunia II. Kekerasan bersenjata bermula di akhir tahun 1980-an. Yang menjadi sumbernya adalah persoalan dampak sosial dan lingkungan penambangan umum tembaga. Penambangan Panguna di Bougainville tengah dibuka pada 1972 dan sejak saat itulah dimulai penambangan paling luas di dunia. Penambangan itu dilakukan oleh perusahaan pertambangan Bougainville Copper Limited (BCL), cabang perusahaan pertambangan raksasa Inggris-Australia Rio Tinto Zinc (RTZ)/Conzinc Riotinto Australia (CRA) dengan saham minoritas dimiliki oleh pemerintah PNG. Pada saat itu pula, RTZ dan CRA bergabung menjadi Rio Tinto.

Pada tahun 1970-an dan 1980-an, penambangan Panguna menjadi tulang punggung perekonomian nasional PNG dan penghasil devisa terbesar. Pada saat yang sama, penambangan berskala luas itu menimbulkan ancaman terhadap pandangan hidup tradisional orang Bougainville, yang memiliki hubungan kuat dengan lahan. Karena keberadaan para pekerja dari propinsi-propinsi lain di PNG dan arus deras uang, jalinan tradisional hubungan sosial di kalangan masyarakat kesukuan terusik. Baik BCL dan pemerintah pusat PNG mengabaikan dampak negatif penambangan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Rakyat yang terkena dampak penambangan secara ekonomi merasa diperas dan secara sosial dipinggirkan kemudian menuntut kompensasi bagi kerusakan lingkungan, hilangnya lahan dan saham yang lebih besar. Perusahaan pertambangan dan pemerintah pusat menolak tuntutan kepemilikan lahan adat itu terhadap kompensasi dan syarat-syarat untuk melindungi lingkungan yang dibebankan kepada usaha penambangan itu—yang memang telah berjalan tanpa kepedulian terhadap lingkungan. Para pemuda setempat menghentikan penambangan itu pada akhir tahun 1988 dengan melakukan sabotase.

Ketika polisi anti huru-hara tak dapat menguasai tindakan para pengunjung rasa, pemerintah pusat mengirim tentara ke pulau itu pada bulan Maret 1989. Para anggota suku di kawasan penambangan kemudian membentuk Tentara Revolusioner Bougainville (BRA) dan mulai menyerang pasukan pemerintah. Dengan demikian, perang di sekitar kawasan penambangan berkembang menjadi perang yang pada mulanya terjadi di Bougainville tengah lalu dengan cepat merambah ke seluruh pulau. BRA kemudian menganut sikap memisahkan diri, menyerukan pemerintahan sendiri dan kemerdekaan politik bagi Bougainville, mengemukakan perbedaan etnik antara orang Bougainville dan seluruh rakyat Papua New Guinea dan menekankan hubungan historis dan budaya dengan pulau Solomon, yang berarti menyerukan pemisahan diri yang pernah dilakukan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Seperti sebelumnya, pemerintah pusat PNG

menolak tuntutan kemerdekaan BRA dan menegaskan kedaulatan dan kesatuan wilayah negara PNG. Ia merasa berwenang untuk menggempur habis-habisan “unsur-unsur kriminal” BRA.

Sikap pemerintah pusat didukung oleh bekas penguasa kolonial, Australia. Australia khawatir bahwa PNG, yang penduduknya mencakup lebih dari 700 kelompok etno-linguistik akan terpecah jika kaum separatis Bougainville berhasil dan menjadi contoh bagi yang lain. Oleh karena itu, dan demi kepentingan perusahaan pertambangan Australia, pemerintah Australia membantu pemerintah PNG dalam memerangi gerakan separatis. Sebaliknya, kaum separatis sama sekali tidak menerima bantuan dari luar. Muncul sikap simpati di pulau Solomon terhadap perjuangan mereka—BRA dapat memanfaatkan pulau-pulau yang terdekat dengan Bougainville untuk bersembunyi dan mendapatkan pasokan. Pada saat peperangan, ribuan orang Bougainville mengungsi ke Pulau Solomon, khususnya untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Tetapi, dunia umumnya mengabaikan tuntutan kaum separatis, dan secara internasional sulit membuat orang menaruh perhatian terhadap perang hutan rimba yang berkobar di sebuah pulau Pasifik Selatan yang terpencil itu.

Dinamika Konflik

BRA berhasil menghentikan penambangan Panguna pada awal perang dan sejak saat itu, penambangan tersebut telah ditutup; bahkan saat ini ia berada di tangan sebuah faksi dari kaum separatis. Pada tahap awal perang—akibat kebrutalan pasukan pemerintah terhadap penduduk sipil—BRA berhasil mendapatkan dukungan dari banyak penduduk pulau dan merekrut semakin banyak anak muda, jumlahnya kira-kira 2000 orang, ke dalam perjuangannya. Melalui perang gerilya, BRA berhasil melakukan serangan terhadap polisi anti huru-hara dan PNGDF (Angkatan Bersenjata Papua New Guinea), yang memiliki perlengkapan yang lebih baik dari segi peralatan maupun personel karena mendapatkan bantuan militer yang besar dari Australia (pelatihan, persenjataan, bahkan

“penasehat-penasehat militer”).

Pada bulan Maret 1990, pasukan pemerintah sepenuhnya ditarik dari pulau itu. Pemerintah pusat kemudian memerintahkan blokade total terhadap Bougainville yang menimbulkan kematian ribuan penduduk dalam beberapa tahun, terutama karena runtuhnya sistem pelayanan kesehatan. Pada bulan Mei 1990, sebagai reaksi terhadap blokade tersebut, BRA menyatakan kemerdekaan “Republik Bougainville” dan membentuk pemerintahan sendiri, Pemerintahan Sementara Bougainville (BIG), dengan Francis Ona, tokoh yang sebelumnya memimpin demonstrasi anti-pertambangan, sebagai presidennya. Tetapi, tak satu pun negara di dunia internasional mengakui negara baru itu.

Setelah tahun 1992, PNGDF berhasil merebut kembali bagian-bagian pulau berkat dukungan dari unit-unit bantuan penduduk lokal Bougainville, yang disebut Pasukan Perlawanan. Pasukan Perlawanan membentuk kelompok-kelompok pertahanan desa selama masa pemerintahan diktator BRA, ketika BRA terbukti gagal menjaga hukum dan ketertiban. Sebagian unit BRA atau kelompok-kelompok sempalan yang tidak disiplin, menyerang rakyat sipil dan melanggar hak asasi manusia.

Perlawanan juga berasal dari para pejuang eks BRA yang kecewa, yang menyempal karena berbagai alasan. Perlawanan, yang mungkin beranggotakan 1500 pejuang, berperang di pihak PNGDF melawan BRA. Ia dipersenjatai dan didukung oleh PNGDF dan selama tahun-tahun terakhir, perang benar-benar melahirkan keberpihakan terhadap pemerintah, namun belum saatnya untuk secara resmi melebur ke dalam pasukan pemerintah. Dengan demikian, komando dan pengendalian pasukan perlawanan telah menimbulkan persoalan yang berlarut-larut terhadap militer dan kepemimpinan politik pihak PNG. Tetapi, pembentukannya benar-benar telah mengubah sifat konflik. Dari perang penduduk Bougainville melawan tentara pemerintah “asing” menjadi perang di kalangan penduduk Bougainville sendiri. Sejak saat itu, konflik tradisional antara berbagai kelompok dan suku, yang mendukung BRA maupun Pasukan Perlawanan, sebenarnya juga merupakan

peperangan di dalam payung perang “besar” kaum separatis.

Berkali-kali satuan Pasukan Perlawanan melakukan perang “pribadi” melawan satuan BRA hanya karena isu-isu lokal, khususnya pertikaian masalah tanah. Di samping itu, mustahil tokoh satuan Perlawanan maupun BRA mengubah pendirian mereka. Demikian pula, tak semua satuan Perlawanan berpihak kepada pemerintah, dan pasukan BRA pun tidak memiliki rantai komando dan pengendalian yang jelas.

Selama bertahun-tahun, tak ada pihak yang berhasil mencapai kemenangan militer yang telak. BRA mampu mempertahankan sebagian besar wilayah kekuasaan mereka di Bougainville tengah di sekitar tambang Panguna dan di selatan, sedangkan PNGDF dan Pasukan Perlawanan menguasai bagian utara, garis pantai sebelah timur dan pulau yang berdekatan dengan Buka, di mana dampak pertambangan sama sekali tidak terasa dan dukungan kaum separatis secara umum memang lebih lemah.

Pada 1996, serangan besar-besaran terakhir PNGDF/Pasukan Perlawanan berhasil dipatahkan dalam beberapa minggu. Pada bulan Maret 1997, upaya pemerintahan Perdana Menteri PNG, Chan, untuk merebut tambang Panguna dan menghancurkan BRA, dengan secara diam-diam merekrut tentara bayaran Inggris-Afrika Selatan dari perusahaan Sandline International dan Executive Outcomes menuai bencana. Para petinggi PNGDF menahan staf dan menentang impor Sandline itu. Demo besar-besaran menentang tentara bayaran di ibukota Port Moresby memaksa Chan untuk lengser dan tentara bayaran meninggalkan negeri itu. Setelah itu, perang terjadi dalam skala yang lebih kecil.

Setelah pemilihan umum PNG pada 1997, sebuah pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Bill Skate naik ke tampuk kekuasaan. Skate menyatakan bahwa pemerintahannya ingin berunding dengan kaum separatis. Yang menjadi faktor penentu bagi perkembangan ini tak lain perubahan sikap orang-orang Australia, yang dukungan militernya secara besar-besaran telah memampukan pemerintah pusat dan PNGDF-nya untuk melanjutkan perang hingga ke titik tersebut, namun akhirnya

menyadari bahwa penyelesaian militer terhadap konflik itu telah menjadi mustahil. Pemerintah Australia telah mulai mengubah sikapnya sebelum krisis Sandline di bulan Maret 1997. Tetapi, krisis tersebut memang semakin mendorong pihak Australia untuk mengubah pendekatannya terhadap konflik.

Di samping itu, nyaris setelah sepuluh tahun pertumpahan darah, penduduk Bougainville binasa dan menjadi takut-perang. Semakin meluas cita-cita menuju perdamaian dan kembali kepada keadaan normal yang tidak dapat diabaikan oleh BRA maupun Pasukan Perlawanan.

Rakyat sipil lah yang paling menderita dalam konflik tersebut; hanya sekelompok kecil dari mereka merupakan pejuang yang tewas di dalam pertempuran. Kebanyakan kematian akibat-perang terjadi karena blokade, yang melarang semua impor, bahkan obat-obatan.

Berulang kali lebih dari separuh penduduk pulau itu terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di hutan dalam tenda-tenda pembersihan di berbagai kawasan yang dikuasai BRA atau di dalam apa yang disebut sebagai barak-barak “penampungan” (tenda-tenda yang dikuasai tentara pemerintah). Beberapa ribu orang di antaranya mengungsi ke kepulauan Solomon.

Infrastruktur, pemerintahan umum dan khususnya layanan kesehatan dan pendidikan benar-benar telah hancur. Jalan dan jembatan rusak, kegiatan ekonomi terhenti, kopra dan coklat, sumber penghasilan utama pulau itu, tak lagi dapat dijual dan diekspor, rumah sakit dan pos-pos kesehatan bubar, sekolah tutup, dan seluruh generasi muda Bougainville menjadi putus sekolah. Di kota-kota dan sentra-sentra penduduk, banyak gedung yang dihancurkan, sementara seluruh desa diratakan dengan tanah. Perang menjadi semakin lengkap dengan pelanggaran hak asasi manusia; perdamaian terhenti, dan pembantaian, penyiksaan, “penculikan” menjadi fenomena umum, demikian pula pengusiran, pembunuhan massal, perkosaan, pelecehan seksual dan serangan lainnya terhadap kaum perempuan dan anak-anak.

Akibatnya, ketika proses penting perdamaian mulai dicanangkan pada bulan Juli 1997, masyarakat Bougainville benar-benar terlanjur menderita secara psikis, mental, sosial dan spiritual.

Penanggulangan Konflik oleh Pemerintah

Pada 1997, pemerintah Selandia Baru menyelenggarakan beberapa pertemuan dan perundingan meja-bundar. Di satu pihak ada BRA dan Pemerintah Sementara Bougainville (BIG), dan di pihak lain ada pemerintah pusat, Pasukan Perlawanan dan Pemerintah Peralihan Bougainville (BTG adalah pemerintahan propinsi yang dibentuk pada 1995, melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan beribukota di Buka yang dikuasai PNGDF, sebuah pulau dengan pusat pemerintahan yang berdekatan dengan Bougainville).

Selain itu, perwakilan berbagai kelompok lain di Bougainville juga menghadiri pertemuan tersebut, membentuk sepertiga kelompok, yang mencerminkan kepentingan masyarakat “kelas-bawah.” Kelompok ketiga ini beranggotakan perwakilan masyarakat sipil modern—LSM, khususnya kelompok-kelompok gereja dan kelompok kaum perempuan—dan para wakil penguasa tradisional—tetua desa, dan kepala suku.

Pembicaraan dan perundingan menghasilkan apa yang disebut sebagai Deklarasi Burnham, yang di dalamnya berbagai pihak bersepakat bagi sebuah penyelesaian konflik secara damai (Juli 1997), dan Gencatan Senjata Burnham (Oktober 1997, dinamai dengan pusat militer Selandia Baru tempat perundingan itu berlangsung). Gencatan Senjata Burnham berlangsung selama 90 hari yang harus dipantau oleh kelompok pengamat internasional. Gencatan Senjata Burnham ditandatangani bukan hanya oleh pejabat puncak politik dan militer pihak-pihak yang bertikai, namun juga oleh wakil-wakil masyarakat sipil modern, penguasa tradisional dan para panglima daerah BRA dan Pasukan Perlawanan. Ini membuatnya secara sosial lebih mengikat dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Berbagai kesepakatan antar “kalangan atas”

diragukan maknanya jika para pemimpin politik dan militer formal hanya dibatasi untuk mengendalikan pasukan mereka sendiri.

Dengan ikut serta dalam perundingan dan menandatangani kesepakatan, para panglima daerah juga memiliki peran yang lebih besar dalam perjanjian itu dan merasa lebih bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Demikian pula, para wakil masyarakat sipil modern dan suku tradisional mempunyai kewajiban yang sama dalam menjaga gencatan senjata dan meredakan keadaan. Pendekatan inklusif ini ditindaklanjuti oleh seluruh proses yang menjamin perdamaian dan benar-benar menciptakan keberhasilannya.

Para panglima daerah dan wakil-wakil masyarakat sipil, para pemimpin dan ketua suku dilibatkan dalam setiap tahapan proses dan membentuk komite perdamaian daerah yang menjadi tanggungjawab dan peran mereka sendiri, yakni menghubungkan proses perdamaian pada lapisan atas dengan proses perdamaian pada lapisan bawah masyarakat.

Pada bulan Januari 1998, berbagai pihak berunding dan menandatangani “Kesepakatan Lincoln tentang Perdamaian, Keamanan dan Pembangunan di Bougainville” di Universitas Lincoln di Gereja-Kristus, Selandia Baru. Kesepakatan ini menuangkan prinsip-prinsip bagi proses perdamaian yang didambakan dan melapangkan jalan bagi penyelesaian konflik secara damai. Semua pihak pada prinsipnya bersepakat untuk melakukan demiliterisasi konflik dan menyetujui sebuah prosedur bagi sikap politik selanjutnya. Seperti yang telah disepakati di Universitas Lincoln, perjanjian itu menjadi gencatan senjata resmi pada tanggal 30 April 1998. Ia dinyatakan bersifat ‘permanen dan tak dapat dibatalkan.’

Gencatan senjata harus diawasi oleh Kelompok Pemantau Perdamaian (PMG), yang merupakan sebuah satuan tak-bersenjata yang pada awalnya beranggotakan 300 pria dan wanita, dari kalangan militer maupun sipil dari Australia, Selandia Baru, Fiji dan Vanuatu.

Selain PMG, misi pengamat PBB diundang ke Bougainville, dan, tak lama berselang setelah resolusi Majelis Keamanan PBB,

UNOMB (United Nations Observer Mission on Bougainville) kecil ini memulai pekerjaannya pada bulan Agustus 1998.

Selama upacara gencatan senjata pada tanggal 30 April 1998, pemimpin militer BRA, Sam Kauona, menyatakan: “Perang telah berakhir”. Dan, kenyataannya, gencatan senjata itu memang tetap berlangsung hingga kini (Nopember 2003). Oleh karena itu, orang dapat dengan tegas mengatakan bahwa 30 April 1998 menjadi akhir peperangan di Bougainville. Sungguhpun demikian, perkembangan berikutnya sekali lagi membuktikan bahwa akhir perang tidak secara mutlak berarti perdamaian. Bahkan hingga saat ini, nyaris enam tahun telah berlalu, Bougainville masih saja berada dalam proses pengembangan perdamaian pasca-konflik, yang harus dipahami sebagai proses peralihan yang kompleks dan panjang dari perang menuju perdamaian.

Dalam bidang penanggulangan konflik oleh pemerintah, memang terdapat banyak kemajuan sejak tahun 1998 (dan sedikit kegagalan atau kemunduran) yang tidak dapat dikemukakan selengkapnyanya di sini. Inti berbagai upaya ini adalah usaha untuk mencapai kedudukan yang sama di kalangan berbagai pihak di Bougainville (seperti yang telah disebutkan di atas, Bougainville jauh dari persatuan), lalu menghadirkan pemerintah pusat dengan kedudukan integral dan menemukan kompromi yang dapat diterima oleh pemerintah pusat maupun rakyat Bougainville.

Pada dasarnya ada tiga isu utama yang harus ditangani: referendum tentang status masa depan politik Bougainville, otonomi atau kemerdekaan penuh, dan perlucutan senjata. Hanya setelah sejumlah putaran pembicaraan dan perundingan, berbagai perbedaan mengenai persoalan tersebut dapat diselesaikan.

Akhirnya, pada tanggal 30 Agustus 2001, Kesepakatan Damai Bougainville (BPA) ditandatangani. BPA dapat dipandang sebagai sebuah penyelesaian politik yang komprehensif. Kesepakatan ini memberikan:

Pertama, Otonomi politik yang lebih luas kepada Bougainville di dalam kerangka konstitusional PNG; *Kedua*, Sebuah referendum menyangkut status masa depan politik Bougainville dalam

10 hingga 15 tahun mendatang, termasuk opsi untuk kemerdekaan penuh; *Ketiga*, Pelucutan senjata dalam proses tiga tahap.

Selama masa peralihan, Bougainville peroleh otonomi khusus. Ia akan memiliki konstitusi sendiri dan pemerintahan otonomi sendiri dengan kewenangan nyaris dalam semua lapangan politik, termasuk perpajakan, pertambangan, pelayanan umum, polisi, peradilan dan bahkan—dalam tingkatan tertentu—urusan luar negeri. Tak lebih dari 15 tahun dan tak kurang dari 10 tahun setelah pembentukan pemerintahan otonom, sebuah referendum menyangkut status masa depan politik Bougainville akan dilaksanakan bagi rakyat Bougainville; pilihan yang diajukan dalam referendum haruslah mencakup kemerdekaan bagi Bougainville; itu berarti bahwa opsi kemerdekaan penuh, meski ditanggguhkan, masih tetap terbuka. Inilah yang diperjuangkan oleh BRA dan ditolak mentah-mentah oleh pemerintah pusat.

Hanya setelah penyelesaian isu kunci tentang referendum dicapai, berbagai isu lain dapat pula dituntaskan. Pemilihan umum untuk, dan pendirian, pemerintahan otonom hanya dapat terjadi setelah tuntasnya proses perlucutan senjata yang komprehensif, yang mencakup tiga tahapan:

Pertama, senjata harus digudangkan di bawah pengawasan para panglima daerah. *Kedua*, senjata-senjata itu dikumpulkan di dalam gudang dan, yang lebih utama, dengan kunci rezim-ganda (satu kunci dipegang oleh seorang panglima daerah, satu kunci dipegang oleh perwakilan PBB). *Ketiga*, “keadaan akhir senjata” harus diputuskan (secara praktis ini berarti penghancuran senjata-senjata tersebut). Selain perlucutan senjata, kehadiran PNGDF di Bougainville harus semakin dikurangi—ini telah dilaksanakan.

Proses perlucutan senjata ini dimulai pada bulan Desember 2001 dan benar-benar telah mencapai kemajuan, meski belum sempurna. Kebanyakan wilayah berada dalam tahap kedua, dan di beberapa distrik, proses tersebut malah telah mencapai tahapan pemusnahan senjata. Pada 2001/2002, Komisi Konstitusi Bougainville sibuk menyusun sebuah konstitusi bagi Bougainville yang otonom. Draf tersebut disampaikan kepada masyarakat pada

awal tahun 2003 dan masih dibahas secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat “kelas-bawah” di seluruh Bougainville. Konstitusi itu akan diresmikan oleh Majelis Rakyat, dan berdasarkan konstitusi itu, pemilihan umum bagi pemerintahan otonom Bougainville akan dilaksanakan, kemungkinan pada tahun 2004, bergantung pada perkembangan baru dalam perlucutan senjata. Hubungan antara Bougainville dan pemerintah pusat ditangani oleh Lembaga Pengawasan Bersama yang dibentuk pada bulan Februari 2003 dan yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan BPA dan mencegah munculnya persoalan dalam hubungan Bougainville-PNG.

Jalur-jalur Diplomasi

Dalam konteks umum masyarakat pedesaan tradisional seperti yang masih ada di Bougainville hingga kini, konsep “jalur-jalur diplomasi” dan “masyarakat sipil” dengan sendirinya berbeda dari pemahaman modern ala Barat. Kami tidak menemukan sebuah ranah tentang partai-partai politik, perserikatan, persatuan para pekerja, media, LSM dan sebagainya, yang membentuk “masyarakat sipil” dalam kosakata Barat.

Tetapi, bagi Bougainville, masyarakat sipil berhubungan sangat erat dengan jalinan kehidupan desa masyarakat tradisional. Bahkan persatuan yang dapat disebut sebagai “LSM” terangkum dalam struktur tradisional, atau—secara lebih tepat, hanya jika persekutuan semacam itu terangkum dalam struktur tradisional, ia akan menjadi penting bagi pengembangan perdamaian dan jalur-jalur diplomasi. Sebenarnya, kekuatan proses perdamaian Bougainville yang benar-benar akan membawa keberhasilan adalah perpaduan gaya “diplomasi” Melanesia tradisional yang didasarkan atas hukum adat di satu pihak dan gaya “masyarakat sipil” modern di pihak lain. Dengan demikian, para aktor seperti para kepala dan sesepuh desa, pria dan wanita dengan kepemimpinan spiritual merupakan bagian dari apa yang membentuk “masyarakat sipil” dalam konteks Bougainville.

Penciptaan perdamaian di Bougainville, dengan demikian, “berjalur-jalur” terutama dalam arti bahwa penyelesaian konflik adat dan sumber maupun mekanisme pengembangan perdamaian ditambahkan kepada dan digabungkan dengan penanggulangan konflik oleh pemerintah pada tataran politik. Hanya segelintir peserta yang merupakan pejabat-pejabat dari pemerintahan yang sah. Demi mengembangkan perdamaian pada lapisan masyarakat kelas-bawah, hukum-hukum dan ritual adat telah dimanfaatkan di banyak tempat di seluruh Bougainville selama proses peralihan dari perang menuju perdamaian.

Pada inti pengembangan perdamaian adat adalah rekonsiliasi dan pemulihan masyarakat. Hal ini pada dasarnya dicapai melalui kompensasi yang memutus lingkaran dendam berdarah. Bentuk penciptaan perdamaian ini melibatkan sebuah proses perundingan yang panjang dan sering kali pelik, yang di dalamnya para kepala dan sesepuh bertindak selaku penengah. Mereka mengajukan syarat-syarat kesepakatan damai dan bentuk dan jumlah kompensasi, misalnya babi, makanan tradisional, sebagai pengganti uang tunai. Ketika kedua belah pihak telah menyetujui hasil perundingan, maka ada upacara pemulihan yang melibatkan seluruh masyarakat. Upacara itu menjadi pertanda bagi masyarakat bahwa konflik telah berakhir. Ia melambangkan bahwa kerukunan masyarakat telah dipulihkan kembali. Di dalam upacara semacam itu biasanya diadakan amalan dan benda-benda simbolik dan ritual, berbagi makanan, mematahkan tombak dan anak panah, mengunyah buah pinang bersama-sama, tukar-menukar hadiah, bernyanyi, menari dan berpesta bersama. Kegiatan simbolik ini merupakan ungkapan tekad dan keyakinan yang lebih penting serta lebih kuat daripada hanya kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Sejak berakhirnya perang di Bougainville, banyak prosesi dan upacara semacam itu dilaksanakan di antara desa-desa dan suku-suku di seluruh pulau itu, yang melibatkan seluruh anggota masyarakat yang bertikai. Dengan demikian, pendekatan berbasis-masyarakat ini bersifat menyeluruh, dan meski sangat berbeda dengan pendekatan individualistik barat-modern (yang biasanya

berhubungan dengan paham “masyarakat sipil”), ia benar-benar berporos pada “masyarakat sipil, jika kita memahami “masyarakat sipil” sebagai istilah yang juga mencakup struktur desa setempat.

Sebenarnya, tidaklah berlebihan untuk menyatakan bahwa hanya “diplomasi” melalui “jalur” ini yang memungkinkan terciptanya perdamaian. Ia benar-benar berperan dalam stabilisasi seluruh proses perdamaian. Penanggulangan konflik oleh pemerintah pada “jalur satu” tidak akan mencapai keberhasilan tanpa “diplomasi” adat ini pada tataran masyarakat kelas bawah—belum termasuk jalan dan sarana adat dan penguasa tradisional yang juga dilibatkan dalam “jalur satu” penanggulangan konflik pada tataran politik resmi.

Masyarakat sipil dalam kosakata modern memang berperan dalam pengembangan perdamaian dengan cara membantu penyelesaian konflik adat dan menambahkan aspek-aspek “modern” tertentu kepadanya sehingga akhirnya ia benar-benar menjangkau setiap desa.

Gereja memiliki hubungan yang erat dengan kultur masyarakat adat Melanesia dan dapat memadukan adat istiadat dengan agama Kristen sehingga membuat mereka mampu menjadi pencipta perdamaian yang efektif pada tataran masyarakat kelas bawah. Dalam banyak kasus, proses perdamaian lokal dan regional mengalami kemajuan karena orang-orang gereja.

Pada masa perang, gereja-gereja melalui jaringan mereka sendiri telah mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan seperti obat-obatan, pakaian dan perkakas rumah tangga. Di samping itu, tiga gereja besar di Bougainville (Katolik Roma, Gereja Inggris, Advent Hari Ketujuh) menyelenggarakan berbagai program pembaharuan untuk mewujudkan pemulihan dan rekonsiliasi.

Di Gereja Katolik, sebuah program “Healing of Memories Retreats” (HOM) telah dimulai sejak awal tahun 1992, yang pada mulanya dijalankan oleh Biarawati Veronika Kihono dari Jemaat Biarawati Nazareth, dengan bantuan para sukarelawan. Seminar-seminar HOM bertujuan untuk mewujudkan sikap saling memaafkan dan rekonsiliasi. Seminar-seminar ini dihadiri oleh umat

semua gereja dan para pasukan baik dari BRA maupun Pasukan Perlawanan. Beberapa mantan-pasukan menjadi tenaga sukarela pada Tim HOM.

Kaum perempuan dari gereja sangat aktif dalam upaya menciptakan perdamaian. Kelompok kaum perempuan jemaat gereja aktif di seluruh Bougainville. Karena status sosial kaum perempuan yang tinggi pada kebanyakan masyarakat matrilineal di Bougainville, kaum perempuan berada dalam posisi untuk merundingkan perdamaian di dalam komunitas mereka dan untuk menggunakan pengaruh mereka di antara pihak-pihak yang berperang untuk memulai dan mempertahankan dialog. Kaum ibu pergi ke hutan untuk berusaha membawa pulang anak lelaki mereka. Di samping itu, kelompok-kelompok perempuan dan para pemimpin perempuan juga menjadi pemain penting di arena politik. Mereka membentuk barisan perdamaian, penjaga perdamaian, pembaca doa perdamaian sehingga memberikan tekanan kepada para pemimpin pria dari pihak-pihak yang berperang. Pada bulan Juli 1995, Bougainville Inter-Church Woman's Forum (BICWF) didirikan, yang mempersatukan kaum perempuan dari berbagai latar belakang yang bertekad untuk bekerja demi perdamaian. BICWF membentuk Forum Perdamaian Kaum Perempuan yang diselenggarakan di Arawa pada bulan Agustus 1996. Forum itu dihadiri oleh sekitar 700 orang perempuan dari seluruh pulau yang berbicara lepas mengenai rasa takut mereka terhadap konflik dan keinginan mereka terhadap perdamaian, dan yang membentuk kelompok-kelompok aktif untuk mewujudkan rencana kongkrit mengenai bagaimana mencapai penyelesaian akhir terhadap konflik. Konferensi perdamaian itu menjadi langkah penting menuju proses perdamaian yang dimulai setahun kemudian di Burnham, Selandia Baru.

Selain memiliki peran dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap budaya Bougainville, kaum perempuan telah berjuang untuk secara langsung terlibat di dalam proses perdamaian politik resmi, yang memang didominasi oleh kaum pria. Tetapi, berbagai bentuk dukungan kaum perempuan bagi penyelesaian politik

terhadap konflik, yang sering kali terungkap dari pinggiran pertemuan resmi atau lobi kepada berbagai pihak, telah mempertahankan tekanan penting terhadap kaum pria untuk melanjutkan upaya damai.

Meski kaum perempuan terlibat dalam semua putaran penting perundingan pada tataran politik resmi, namun jelas mereka tak terwakili. Ini juga menjadi kasus organisasi politik resmi, misalnya Kongres Rakyat Bougainville atau Pemerintah Propinsi Sementara Bougainville. Persoalan keterlibatan kaum perempuan dalam struktur pemerintahan baru yang otonom juga masih terbuka. Para pemimpin kaum perempuan di Bougainville menuntut agar kaum perempuan diberikan kesempatan untuk terlibat penuh dalam kehidupan politik.

Kaum perempuan masih mengemban tugas berat pada beberapa LSM yang aktif demi upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi dalam situasi pasca-konflik dewasa ini. Misalnya, Bougainville Community Integrated Development Agency (BOCIDA) merupakan badan yang memelopori penyaluran bantuan kemanusiaan pada masa perang. Kini ia memusatkan aktivitasnya pada pendidikan baca-tulis dan kesehatan ibu. Leitana Nehan Women Development Agency (LNWDA) memberikan sejumlah pelayanan kepada kaum perempuan dan pemuda seperti nasehat dan program untuk melawan kekerasan terhadap kaum perempuan. BICWF telah mengubah fokus aktivitasnya menjadi pendidikan baca-tulis, pelatihan usaha kecil dan pengembangan kaum perempuan dan organisasi perempuan setempat.

Ini dan semua LSM perempuan lainnya (misalnya Kaum Perempuan Bougainville untuk Perdamaian dan Kemerdekaan, Lembaga Perempuan Kecamatan, Lembaga Perempuan Propinsi dan Organisasi Perempuan Gereja) memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat kelas bawah dan karenanya berada dalam posisi untuk bekerja demi stabilisasi situasi.

Semua organisasi tersebut dapat melakukan hal itu karena mereka sudah berada di tengah-tengah rakyat pada masa perang dan—seperti halnya gereja—mendapatkan simpati masyarakat

karena telah berada bersama mereka bahkan dalam saat-saat yang paling sulit. Anggota-anggota mereka makan makanan yang sama, menghargai dan memahami kehidupan pedesaan Melanesia—sebab mereka memang merupakan bagian darinya. Ini berlaku hanya bagi segelintir LSM, misalnya Paruparu Education Development Centre (PEDC).

Harus pula disebutkan secara khusus bahwa para anggota Yayasan Perdamaian Melanesia telah bekerja demi perdamaian di Bougainville bahkan pada saat-saat paling ganas dari peperangan. Inti kegiatan yayasan adalah lokakarya untuk melatih masyarakat kelas bawah agar dapat menjadi penengah dalam konflik pada tingkat lokal. Yayasan Perdamaian Melanesia berhasil melatih 160 orang peserta antara tahun 1994 dan 2000. Mereka juga membantu penyelenggaraan 250 kursus mediasi bagi lebih dari 6400 peserta. Sedangkan menyangkut seminar pemulihan gereja Katolik, kursus Yayasan Perdamaian Melanesia ini tidak memasukkan konsep-konsep matang, eksternal dan bergaya Barat modern ke dalam lingkungan Bougainville, namun justru mengembangkan pengalaman masyarakat adat.

Unsur kunci dalam pendekatan Yayasan Perdamaian Melanesia adalah konsep keadilan restoratif—yakni gagasan bahwa rakyat dapat mengatasi konflik, kesalahan dan keluhan melalui mediasi yang bertujuan untuk mencapai hasil yang sama-sama menguntungkan berupa sikap saling memaafkan, rekonsiliasi dan pulihnya keharmonisan di dalam masyarakat—dan bukan balas dendam dan penghukuman. Pendekatan ini jelas mirip dengan cara adat penyelesaian konflik di Bougainville dan di Melanesia pada umumnya. Dengan demikian, keberhasilan kursus-kursus Yayasan Perdamaian Melanesia adalah perannya dalam menyebarluaskan gagasan tentang penyelesaian konflik secara damai pada tingkat masyarakat kelas bawah bahkan selama masa perang. Pentingnya kenyataan bahwa ratusan dan ribuan penduduk awam Bougainville telah ikut serta dalam kursus-kursus ini, seminar-seminar pemulihan ingatan dan upaya serupa dari berbagai kelompok lain tidak dapat terlalu dibesar-besarkan.

Di samping itu, para pemimpin pihak-pihak yang berperang juga dilatih dalam penyelesaian konflik. Misalnya, Ruby Miringka (yang kemudian menjadi Direktur BOCIDA) mengikuti kursus pada 1996 yang diselenggarakan bagi anggota-anggota sayap politik BRA, tak lama berselang setelah dia mengikuti program pelatihan diplomasi di University of South Wales, Sydney. Pengacara Australia Leo White mengikuti kursus tentang keahlian berunding bagi para pemimpin pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pada 1997 yang jelas sangat berperan bagi keberhasilan pembicaraan Burnham.

Meski ini menjadi contoh positif dari bantuan masyarakat sipil luar bagi proses perdamaian Bougainville, orang tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa campur tangan pihak luar juga dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.

Setelah gencatan senjata dan stabilisasi situasi keamanan bagi sejumlah besar badan pembangunan asing, LSM internasional dan program maupun lembaga-lembaga PBB menjadi aktif di Bougainville, yang berupaya membantu rekonstruksi dan pengembangan perdamaian.

AusAID, badan pembangunan pemerintah Australia, menjadi donor terbesar, yang memberikan sejumlah besar dana bagi projek-projek besar seperti pembangunan rumah sakit dan sekolah-sekolah, selain juga memberikan bantuan lunak bagi projek-projek masyarakat. New Zealand Official Development Assistance (NZODA) mendukung penyatuan kembali para mantan pasukan melalui pelatihan calon tenaga kerja dan sebagainya. United Nations Development Programme (UNDP) telah mendanai Program Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Pembangunan, yang dibantu oleh Amerika Serikat dan Kanada.

Sejumlah besar LSM Australia dan negara asing lainnya telah melaksanakan berbagai program di Bougainville. Orang akan memiliki kesan bahwa ada “terlalu banyak” bantuan: terlalu banyak dana, terlalu banyak campur tangan asing, terlalu banyak gagasan asing. Ada bahaya besar timbul tenggelamnya inisiatif masyarakat adat dan sikap paternalistik. Sebagai “masyarakat sipil” semu yang

tidak memiliki hubungan dengan masyarakat desa kelas bawah, LSM yang sangat bergantung pada dana donor dan tidak memiliki basis di dalam masyarakat Bougainville bisa menimbulkan akibat negatif—bahkan kemungkinan merugikan upaya pengembangan perdamaian.

Sebagian LSM internasional telah menjadi target anak-anak muda yang kecewa. LSM tersebut membangun kantor dan infrastruktur mereka sendiri secara besar-besaran dan sangat menyolok jika dibandingkan dengan tidak adanya sumber daya bagi kelompok-kelompok lokal. Dipertontonkannya kekayaan komparatif mereka telah menimbulkan kecemburuan, yang terlihat jelas dari sikap para pemuda yang mencuri peralatan mereka. LSM luar tidak selalu cerdas dalam memiliki partner-partner lokal, dan bantuan luar disebarkan secara tidak adil, misalnya lebih memilih daerah pesisir yang mudah dijangkau daripada daerah pegunungan atau daerah-daerah yang pernah dikuasai pemerintah daripada daerah-daerah yang pernah dikuasai BRA. Ini dapat memicu konflik baru.

Kelompok-kelompok lokal sering merasa tersisih oleh LSM internasional yang lebih kaya dan lebih kuat dan mencela mereka karena menyelenggarakan program-program tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dan karena mengabaikan inisiatif lokal yang ada. Ancaman bahaya ada karena bantuan luar menciptakan kebergantungan bahwa pola “pembangunan” asing lagi-lagi menciptakan keadaan yang menjadi penyebab utama perang.

Semua badan dari luar harus selalu menyadari bahwa mereka adalah tamu di pulau itu dan bahwa melalui perang khususnya masa rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca-perang, rakyat Bougainville telah mengembangkan rasa percaya diri yang kuat, telah belajar untuk bersandar pada kekuatan mereka sendiri, bertekad dan mampu menangani urusan mereka sendiri dan tetap menjadi penentu nasib mereka sendiri.

Landasan bagi masyarakat sipil semacam itu telah terbangun selama dan sesudah perang; lalu masyarakat sipil terbukti cukup kuat untuk mengemban kepemimpinan politik dan militer untuk

merundingkan perdamaian dan kemudian tetap memberikan bantuan dalam proses perdamaian. Tetapi dalam batas-batas tertentu, masyarakat kelas bawah, mantan militan dan masyarakat sipil mengambil alih hak terhadap proses tersebut. Semua pihak terkait dan semua lapisan masyarakat dilibatkan dan diikutsertakan dalam proses itu. Yang tak kalah pentingnya adalah keterlibatan kaum perempuan, yang berdasarkan kelembagaan matrilineal kebanyakan masyarakat di Bougainville memiliki kedudukan yang kuat dan benar-benar menyerukan perdamaian. Wakil-wakil masyarakat sipil dan penguasa tradisional hadir dan aktif dalam perundingan, dan mereka dengan suka rela mengemban kewajiban untuk memajukan perdamaian pada lapisan masyarakat kelas bawah. Dalam melakukan hal itu, mereka menggabungkan gaya dan metode penyelesaian konflik masyarakat sipil dengan sarana pengembangan perdamaian masyarakat adat. Pada inti yang disebut terakhir adalah menerima tanggung jawab, rekonsiliasi dan pemulihan keadilan maupun keharmonisan sosial (melalui kompensasi terhadap kerusakan yang terjadi dan kesalahan yang telah dilakukan). Hanya dengan cara itu, tuntutan balas dendam dapat diubah dan perdamaian yang langgeng dapat dicapai.

Rekonsiliasi masyarakat adat sangatlah penting dalam penyelesaian perpecahan yang parah pada tingkat lokal. Prosesi dan upacara adat dipadukan dengan unsur-unsur Kristen; pihak gereja sangat aktif dalam menumbuhkan dan memantapkan proses perdamaian pada masyarakat kelas bawah. Diakui bahwa pengembangan perdamaian merupakan proses pemulihan psikologis dan mental yang rumit dan menyakitkan.

Dengan mengatakan hal ini berarti mengakui bahwa pengembangan perdamaian bukanlah sebuah perbaikan yang cepat, namun membutuhkan waktu. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Bougainville memerlukan waktu untuk tiba pada penyelesaian yang langgeng. Setelah nyaris selama sepuluh tahun berperang, kini kita menyaksikan enam tahun upaya pengembangan perdamaian, dengan lebih dari 20 putaran perundingan, dan BPA merumuskan 10 hingga 15 tahun masa peralihan. Landasan kuat

bagi periode ini telah dibangun, dan prospek perdamaian di Bougainville terlihat cerah, jika semua pihak tetap mempertahankan pendekatan yang inklusif, sabar dan melanjutkan musyawarah yang telah mereka laksanakan dalam beberapa tahun terakhir.

Tetapi, dapat diramalkan bahwa friksi dan persoalan masih tetap mengancam: tidak semua faksi secara aktif terlibat dalam proses perdamaian (Francis Ona dan Pasukan Me'ekamui-nya, sempalan BRA), yang masih menguasai tambang Panguna, tetap berada di luar, meski mereka dengan tegas menerima proses tersebut.

Situasi hukum dan ketertiban masih genting dan kekerasan masih menjadi fenomena yang bersifat umum. Banyak mantan tentara muda kehilangan prospek pribadi dan profesional dalam kehidupan masyarakat. Perlucutan senjata belum sepenuhnya dilaksanakan, persoalan keadilan, amnesti dan ampunan masih perlu dipikirkan. Pemilihan umum bagi pemerintahan yang otonom dapat menjadi pertikaian baru selain juga dapat semakin memupuk rasa percaya diri rakyat Bougainville. Landasan keuangan bagi otonomi sama sekali belum dihimpun dan anggaran bagi pemerintahan otonom masih tertunda untuk beberapa waktu lamanya. Kemampuan memerintah masih lemah, pemulihan ekonomi masih terbatas dan pembangunan infrastruktur berjalan lambat. Masa depan tambang Panguna belum dibahas sama sekali.

Di samping itu, PMG hengkang pada pertengahan tahun 2003, dan PBB juga tampaknya siap-siap mengucapkan salam perpisahan bagi Bougainville. Diharapkan bahwa bantuan luar bagi proses perdamaian, yang telah memiliki pengaruh pemantapan yang positif, tidak dicabut terlalu cepat.

Rekomendasi

Pertama, Kesabaran sangat dianjurkan. Semua pihak yang terlibat telah memperlihatkan kesabaran yang mengesankan selama beberapa tahun terakhir, dan jelas sangatlah bodoh untuk bersikap tidak sabar dan gelisah dalam tahapan proses saat ini. Sayangnya, ada banyak pertanda ketidaksabaran: hengkangnya PMG, sikap

keras pemerintah pusat terhadap perlucutan senjata, rasa frustrasi rakyat Bougainville terhadap lambannya pemulihan ekonomi dan perbaikan sosial.

Kedua, Kekuatan pengembangan perdamaian rakyat Bougainville sejauh ini telah menjadi orientasi prosesnya dalam konteks pemikiran jangka panjang, baik pada tingkat politik atas maupun tingkat masyarakat kelas bawah. Berbagai pihak harus bersikap seperti itu. Proses rekonsiliasi yang ada, pada tingkat desa-ke-desa dan suku-ke-suku haruslah berlanjut dan dikembangkan.

Ketiga, Rancangan otonomi harus benar-benar dilaksanakan setahap demi setahap. Bantuan luar harus diberikan dalam perspektif jangka panjang, termasuk bantuan dalam mendanai pemerintahan otonom.

Keempat, Perlucutan senjata harus dilanjutkan tanpa memaksa pihak terkait dengan menetapkan batas akhir (yang, berdasarkan pengalaman dari kawasan lain, jelas-jelas tak dapat dicapai); tetapi rakyat yang masih memegang senjata harus dengan sabar diberi tekanan moral supaya timbul rasa malu.

Kelima, Naskah konstitusi harus dibahas secara umum dengan waktu yang memadai.

Keenam, Pemilihan umum dan pembentukan pemerintahan yang otonom harus dilaksanakan secepat mungkin (meski senjata terakhir belum dilucuti), namun harus dipersiapkan dengan baik, meski ini berarti perlunya beberapa penundaan. Yang penting bagi proses perdamaian adalah bahwa rakyat Bougainville memiliki pemerintahan yang otonom yang akan diterima oleh mayoritas rakyat dan dengan demikian menjadi sah dan dipercaya (meski dana maupun kemampuan administratifnya mungkin sangat terbatas untuk beberapa waktu lamanya). Pemerintahan semacam itu akan berada dalam posisi mengantarkan Bougainville menuju rekonstruksi, rehabilitasi, rekonsiliasi dan penentuan nasib sendiri sehingga akhirnya rakyat Bougainville mampu memutuskan masa depan mereka melalui referendum basis sosial yang kuat dan dalam keadaan damai.

Laporan-laporan

Amnesty International

Papua New Guinea, Bougainville: The Forgotten Human Rights Tragedy, (ASA 34/01/97), London 1997.

World Council of Churches Programme Unit IV

Stories of Bougainville. Report of Women's Team Visit (Brenda Fitzpatrick), Jenewa, 1993.

United Nations Inter-Agency Mission

The Rehabilitation and Reconstruction of Bougainville, Papua New Guinea: A Needs Assessment and Programme Proposal. Draft Report, ed. By Rohn R. Rogge. Port Moresby, 1995.

United Nations Development Programme Mission Report

Bougainville Rehabilitation, Reconstruction and Development Project. Achieving Sustainable Human Development through strengthening social capital in Bougainville. Peacock-Taylor, Colleen (Team Leader) / Ahai, Naihuo / Momis, Elizabeth / Kwa, Enaha, Nopember 1999 (PNG/98/002/07/UNOPS).

Parliament of Australia. Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade.

Report: *Bougainville: The Peace Process and Beyond*. Canberra, 27 September 1999.

Publikasi

Andy Carl dan Sr. Lorraine Garasu (eds), *Weaving consensus. The Papua New Guinea–Bougainville peace process*, Conciliation Resources Accord Issue 12. London, 2002.

Anthony J. Regan, "The Bougainville political settlement and the prospects for sustainable peace", dalam *Pacific Economic Bulletin*, vol. 17, No. 1, h. 114–129, 2002.

Donald Denoon dan Matthew Spriggs (eds), *The Bougainville Crisis: 1991 update*, Canberra, 1992.

Donald Denoon, *Getting under their Skins: Australia and the Making of the First Bougainville Agreement*, Melbourne, 2000.

Geoff Harris, Naihuwo Ahai dan Rebecca Spence, *Building Peace in*

Bougainville, Waigani, Armidale, 1999.

Moinica Wehner dan Donald Deenon (eds), *Without a Gun. Australian's experiences monitoring peace in Bougainville, 1997–2001*, Canberra, 2001.

Naihuwo Shai, *Bougainville: Rebuilding Trust and Rebuilding People*, Centre for Peace Studies University of New England Discussions Paper No. 9. Armidale, 1996.

Pat Howley, *Breaking Spears and Mending Hearts: Peacemakers and Restorative Justice in Bougainville*, London, Leichhardt, 2002.

Peter Polomka (ed.), *Bougainville: Perspectives on a Crisis*, Canberra, 1990.

Volker Boge, *Bergbau–Umweltzerstörung–Gewalt. Der Krieg auf Bougainville Im Kontext der geschichte ökologisch indusierter Modernisierungskonflikte*, Hamburg, 1998.

Volker Boge, *Conflict Potential and Violent Conflicts in the South Pacific. Options for a Civil Peace Service*, Research Unit of Wars, Armament and Development Working, Paper No. 1/2001. Hamburg.

Situs Internet

www.perc.org.fj (Pacific Concerns Resource Centre-PCRC).

www.eco-action.org/bougainville/ (Bougainville Freedom Movement).

www.unpo.org/member/bougain/bougain.html (Unrepresented Nations and People Organisation. Bougainville Page).

www.dod.aov.au/belisi/ (Australian Defence Force. Operation Bel Isi. Peace Monitoring Group, Bougainville).

www.dod-gov.au/geo/png/bougainville/ (Australian Department of Foreign Affairs and Trade: The Bougainville Peace Process).

<http://rspas.anu.au/melanesia/bougainville/htm> (Bougainville Resource Page: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University).

Kontak Narasumber

Sister Lorraine Garasu. CSN, Bougainville Inter-Church Women's Forum (BICWF), e-mail: bicwf@dg.com.pg.

Vikki John, Bougainville Freedom Movement, e-mail: vikki@law.uts.edu.au

Anthony Regan, State, Society and Governance in Melanesia Project,
Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National
University, Canberra, e-mail: anthony.regan@anu.edu.au.

Volker Boge, Bonn International Center for Conversion, e-mail:
boege@bicc.de.

Donald Denoon, Research School of Pacific and Asian Studies, Aus-
tralian National University, Canberra ACT 0200, Australia.

Heinz Schurmann-Zeggel, Amnesty International, Pacific Desk, e-mail:
hschurma@amnesty.org

Martin R. Mirioru, Secretary Bougainville Interim Government, e-mail:
miriori@bart.nl.

Organisasi

Conciliation Resources

173 Upper Street

London N1 1RG

United Kingdom

Telp: +44 20 7359 7728

Fax: +44 20 7359 4081

E-mail: accord@c-r.org

www.c-r.org

European Center on Pacific Issues (ECSIEP)

PO Box 151

3700 AD, Zeist

The Netherlands

Telp: +31 30] 692 7827

Fax : +31 30] 692 5614

E-mail: ecsiep@antenna.nl.

www.antenna.nl.ecsiep.

Pacific Concerns Resource Centre

83 Amy Street, Private mail Bag

Suva, Fiji

Telp: 679 304 649

Fax : 679 304 755

E-mail: pcrc@is.com.fj

World Council of Churches
Pacific Desk
150 Route de Ferney
PO Box 2100
CH-12111 Geneva 2
Switzerland
Telp: +41 22 791 6218/6219
Fax : +41 20 788 0067
E-mail: tevi@wcc.org
www.ecc-coe.org

II

Jaringan LSM untuk Perdamaian dan HAM

Indonesia

Jaringan LSM Hak Asasi Manusia di Aceh

Pada 1998, limabelas LSM yang peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Aceh membentuk Koalisi LSM HAM Aceh. Tujuannya adalah membangun jaringan regional dan internasional bagi bantuan hak asasi manusia di Aceh. Jaringan ini bercita-cita membentuk sebuah masyarakat yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, gender dan demokrasi. Koalisi tersebut berkampanye untuk meningkatkan kesadaran terhadap kondisi hak asasi manusia di Aceh, lokal maupun internal. Ia menyelidiki dan mencatat pelanggaran hak asasi manusia; memberikan bantuan kepada korban melalui pendekatan hukum dan kekeluargaan; dan melobi pemerintah daerah dan pusat untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia dan rehabilitasi para korban. Pada tingkat akar rumput, Koalisi tersebut telah mendirikan Pusat Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia di enam kawasan konflik di Aceh. Semua pusat ini beranggotakan para hakim dan jaksa hak asasi manusia, dan memberikan bantuan hak asasi manusia di tingkat pedesaan.

Jalan Sudirman No. 11 A

Banda Aceh, 23239

Indonesia

Tlp: [062 651] 41998/47898

Fax: [062 651] 47839

koalisi@asia.com

www.koalisi-ham.org

Kontak: Maimul Fidar, Direktur PB-HAM, Risman A. Rachman,
Direktur

Jumlah staf: 12 orang

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

Sebagai akibat penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di kalangan rakyat sipil. Menyadari hal ini, Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta memandang perlu untuk membentuk sebuah lembaga yang bekerja memberikan bantuan hukum di Banda Aceh demi membela kepentingan rakyat sipil yang hak asasinya diinjak-injak. Didirikan pada tanggal 30 Nopember 1996, lembaga ini dimaksudkan untuk membela hak hukum rakyat sipil yang tertindas.

Kegiatan utama lembaga ini adalah menangani isu gender, hukum, lingkungan, hak asasi manusia, demokrasi, sektor informal dan buruh. Semua kegiatan itu dilaksanakan dalam bentuk pengembangan, bantuan maupun advokasi kemasyarakatan. Lembaga ini telah menyelenggarakan berbagai diskusi dan memberikan bantuan terhadap beberapa kasus, terutama kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Ia bergabung dengan Forum LSM Regional Aceh dan WALHI Aceh. Pada tingkat nasional, ia menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Jl. Teungku Chik Pantee Kulu Lt. II, No. 12
Banda Aceh, 23242, Daerah Istimewa Aceh.
Indonesia Tlp: [062 651] 23321 Fax: [062 651] 31163
lbh-banda@wasantara.net.id
Kontak: Abdul Rahman Yakob, SH, Direktur
Jumlah staf: 6 orang

Yayasan Akar Pama (YAPAMA)

Yayasan Akar Pama pada mulanya merupakan sebuah kelompok studi yang dibentuk para aktivis mahasiswa di Kalimantan Barat dan menjadi yayasan pada tahun 2001. YAPAMA memusatkan perhatian kepada pembangunan masyarakat multi-etnik di Kalimantan Barat, yang diberdayakan, independen dan mampu berpikir kritis menyangkut isu agama, hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan dan perdamaian. Misi YAPAMA adalah memberdayakan masyarakat multi-etnik melalui organisasi masyarakat, membela korban pelanggaran hak asasi manusia seraya meningkatkan kemampuan organisasinya sendiri.

Jl. Paris II

Komplek Alex Griya Permai I Blok D-15

Pontianak, Kalimantan Barat, 78241

Indonesia

Tlp: [062 561] 712 146

Fax: [062 561] 881 849

Akar_guns@yahoo.com

Kontak: Charles, Direktur

Jumlah staf: 4 orang, 6 relawan

Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AIDP)

Aliansi Demokrasi Untuk Papua adalah sebuah LSM independen, yang didirikan pada tahun 2000, yang berjuang untuk dan memberikan dukungan kepada aspirasi masyarakat terhadap demokrasi dan keadilan di Papua melalui pemberian bantuan hukum, pendidikan politik, publikasi, penelitian, pengembangan kemampuan masyarakat dan pembentukan berbagai jaringan. Programnya yang utama adalah: bantuan kebijakan dalam penyusunan undang-undang dan kewajiban lembaga legislatif dalam membuat undang-undang; meningkatkan akurasi dan kelengkapan informasi mengenai semua bentuk pembangunan di Papua; kajian strategis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aktor politik, organisasi, birokrasi dan militer, khususnya dengan memusatkan perhatian kepada kewenangan yang dimiliki oleh setiap struktur dan pengaruhnya terhadap masyarakat; penelitian, kajian, pemberian bantuan, pelatihan dan dukungan bagi proses pembangunan, penguatan dan pengembangan kedudukan dan kedaulatan rakyat; dan pengefektifan jaringan internal dan eksternal guna meningkatkan visi AIDP.

Jl. Raya Padang Bulan
Depan Asrama Mahasiswa Acemo
Manokwari, Abepura, Jayapura
Papua Barat
Tlp: [062 967] 587 890
aldepe@jayapura.wasantara.net.id
Kontak: Latifah Anum Siregar
Jumlah staf: 9 orang

Bina Swadaya

Bina Swadaya merupakan LSM nirlaba (didirikan pada 1967) yang berupaya memberdayakan kelemahan menyangkut berbagai isu kelembagaan dan bisnis. Misinya adalah berjuang demi kebijakan pembangunan kaum miskin dan menjembatani kesenjangan sosio-ekonomi demi menciptakan struktur sosial yang jujur dan adil. Organisasi ini bekerja untuk meningkatkan kemampuan, seraya menciptakan jaringan yang kuat dan program pengembangan melalui pendidikan, penerbitan dan penelitian. Salah satu jaringan yang telah dibentuknya disebut AMAN dan ia juga bekerja sama dengan *Minority Rights Group* (Kerajaan Inggris), LSM daerah dan Forum Baku Bae. Bina Sawadaya memiliki departemen Bantuan Kemanusiaan yang utamanya memusatkan perhatian kepada program pencegahan/penanggulangan konflik, termasuk program Kerukunan Perdamaian di daerah Maluku (Utara).

Gunung Sahari 111/7, 10610 Indonesia

Tlp: [062 021] 420 4402 Fax: [062 021] 420 8412

binaswadaya@binaswadaya.org

www.binaswadaya.org

Kontak: Bambang Ismawan, Direktur

Jumlah staf: 6 orang, untuk pencegahan/penanggulangan konflik
(jumlah 750 orang)

Anggaran: 25.000-100.000 dolar AS

Publikasi: Newsletter: *Pluralism, Humanity and Anti-Discrimination; Peace vs War.*

Yayasan Peduli Hak Asasi Manusia (YPHAM)

Berdiri pada bulan Juli 1998, Yayasan Peduli Hak Asasi Manusia disebut Forum Peduli HAM, namun sejak tahun 2001 berubah menjadi YPHAM. Organisasi ini berjuang untuk meningkatkan dan memperbaiki keadaan hak asasi manusia di Aceh melalui program kesadaran akan hak asasi manusia. Ia secara khusus melaksanakan pelatihan hak asasi manusia yang mencakup pendidikan hak asasi manusia hingga pelatihan forensik; penyebaran informasi tentang hak asasi manusia melalui newsletter dan seminar-seminar, pemberian bantuan dan kampanye, dan penyelidikan serta dokumentasi. Kumpulan dokumentasinya sangat bermanfaat bagi sumber-sumber penelitian terhadap Aceh. Selain misinya, YPHAM juga melaksanakan program yang menyangkut penanggulangan konflik, penciptaan perdamaian dan pemerintahan yang baik.

Jl. T. Hasan Dek No. 160
Beurawe, Banda Aceh
Naggroe Aceh Darusalam
Indonesia

Tlp: [062 651] 24726

Fax: [062 651] 32242

ypham_aceh@yahoo.com atau fpham@aceh.wasantara.net.id

Kontak: Saifuddin Bantasyam, Direktur Eksekutif

Jumlah staf: 10 orang, beberapa orang relawan

Indonesia PEDULI Internasional

Indonesia PEDULI Internasional menjadi rekanan Departemen Dalam Negeri. Indonesia PEDULI Internasional telah aktif di Indonesia sejak tahun 1967. Pada mulanya aktif membagi-bagikan makanan di Jawa, organisasi ini kemudian memperluas cakupan program dari penanganan keadaan Darurat ke Penanggulangan keadaan Darurat (Transisional) hingga Pembangunan. Program Pembangunan di lembaga Indonesia PEDULI Internasional ini memberikan prioritas kepada pembangunan sarana air, sanitasi, kesehatan, pertanian, lingkungan, kegiatan ekonomi kecil, pemerintahan yang baik dan masyarakat sipil. Baru-baru ini lembaga yang memiliki staf sekitar 600 orang ini melaksanakan program ekstensif di Jawa Timur dan Jawa Barat, Kalimantan Timur, Tengah, dan Selatan, dan Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Timor Barat dan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jl. Pattimura No. 33
Kebayoran Baru, Jakarta,
12110 DKI Jakarta

Indonesia

Tlp: [062 021] 796 661 (72)

Fax: [062 021] 225 52 (72)

sgilbert@cbn.net.id

www.careinternational.org.uk/cares_work/where/indonesia/

Kontak: Steve Gilbert, Asisten Direktur Perencanaan

Jumlah staf: 300 orang

Catholic Relief Service Indonesia

CRS Indonesia merupakan bagian LSM internasional Catholic Relief Service. Di Indonesia, CRS telah melaksanakan kegiatan penanggulangan dan pembangunan sejak awal 1950-an dan visinya adalah ikut aktif menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Misinya adalah meningkatkan kesetaraan bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya seraya memperkuat solidaritas antara berbagai etnik dan umat beragama di Indonesia. CRS bekerja di bidang kesehatan, pertanian, keadaan darurat, usaha kecil, penciptaan perdamaian dan pemberian layanan bagi masyarakat tanpa memandang agama masyarakat tersebut. CRS melaksanakan programnya bekerjasama dengan mitra daerah.

Dalam Program Menciptakan Perdamaian, CRS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keefektifan pelaksana penciptaan perdamaian melalui pengembangan kemampuan rekanan, memberikan dana bantuan bagi pembentukan jaringan, dokumentasi dan penyebaran praktik-praktik dan penelitian yang baik ke dalam pendekatan penanggulangan konflik. Secara lebih umum, masyarakat diperkuat melalui pelatihan, peningkatan kesadaran gender dalam upaya menciptakan perdamaian, membangun media komunitas yang kuat dan meningkatkan pemerintahan yang baik melalui pendidikan kelompok-kelompok masyarakat sipil, tokoh agama dan pemimpin informal lainnya. Pengembangan perdamaian juga dipadukan dengan program penanggulangan dan pengembangan untuk meningkatkan fokus kelembagaan menyeluruh dan arah strategis menuju perdamaian dan keadilan. Di Asia Tenggara CRS memiliki kantor dan program di negara-negara seperti Vietnam, Timor Timur, Filipina, Kamboja, Burma dan Thailand.

Jl. Wijaya I, 35 Kebayoran Baru Jakarta, 12170
Indonesia Tlp: [062 021] 725 339 Fax: [062 021] 725 1566
crsindo@crs.or.id, www.catholicrelief.org
Kontak: Mike Frank, Direktur Eksekutif CRS Indonesia
Jumlah staf: 10 orang, dalam Program Penciptaan Perdamaian
Anggaran: 300.000 dolar AS

Publikasi: *The Peace-building Toolkit; The Indonesian Peace-building Directory* (bekerja sama dengan Cordaid); *Peace by Peace: Good Practice in Peace-building in Central Java, Indonesia; Conflict is Beginning of Peace: Stories and Good Practice from Field Workers Serving East Timor Refugees in West Timor; Not Eno: Documentation of Information Dissemination Program on East Timor Commission on Truth, Acceptance and Reconciliation by West Timor NGO Coalition.*

Center for Research on Intergroup Relations and Conflict Resolution (CERIC)

Pusat Studi Hubungan antar Kelompok dan Resolusi Konflik (CERIC) adalah lembaga riset yang mengkaji dinamika hubungan antar kelompok masyarakat sebagai sumber potensial konflik, melalui metode penelitian yang terbuka dan terarah. CERIC melaksanakan pelatihan pencegahan konflik dan perantara kelompok bagi masyarakat umum dan aktif mengembangkan berbagai pendekatan pendidikan yang didasarkan atas pemahaman terhadap hubungan antar berbagai kelompok dan penanggulangan konflik, melalui pengembangan kurikulum dan silabus. Kegiatan riset dilaksanakan melalui berbagai program, misalnya lokakarya, pelatihan, seminar, kajian dan publikasi. CERIC juga aktif membangun jaringan dengan berbagai perguruan tinggi, LSM, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Gedung C Lantai Kampus Fisip UI

Depok

DKI Jakarta, 16424

Indonesia

Tlp: [062 021] 787 3838

Fax: [062 021] 787 3777

ceric@cbn.net.id

www.indonesia-conflict.org

Kontak: Imam B. Prasodjo, Direktur

Jumlah staf: 8 orang, 19 orang relawan

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, Universitas Gajah Mada

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (CSPS-UGM) merupakan lembaga nirlaba universitas yang didirikan pada bulan Oktober 1996. Misi utamanya adalah membentuk kembali pemahaman terhadap keamanan dan perdamaian, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keamanan dan perdamaian internasional, regional dan nasional. Target utamanya adalah menciptakan riset, pelatihan dan advokasi bermutu tinggi dalam bidang isu konflik dan perdamaian. CSPS-UGM memusatkan perhatian kepada Reformasi Sektor Keamanan, Penanggulangan Konflik, Pencegahan Konflik, Rekonstruksi Pascakonflik, Media dan Jaringan. Berbagai isu ini diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan seperti penelitian, pelatihan, pemberian bantuan, dan advokasi kebijakan, di beberapa daerah di Indonesia. Selain perannya sebagai koordinator nasional Southeast Asian Conflict Studies Network (SEA-CSN) di Indonesia, CSPS menjaga kerjasama dan hubungan baik dengan banyak rekanan nasional maupun internasional.

Sekip K-9 Yogyakarta 55281 Indonesia

Tlp/fax: [062 274] 520 733

Csps-ugm@jmn.net.id

www.csps-ugm.or.id

Kontak: Lambang Trijono, Direktur

Jumlah staf: 16 orang

Anggaran: 25.000-100.000 dolar AS

Publikasi: Newsletter; *Building Sustainable Peace and Fostering Development in Papua* (laporan akhir e-convergence)

The Center for Strategic and International Studies (CSIS)

The Center for Strategic and International Studies (CSIS) adalah lembaga swasta nirlaba yang didirikan pada 1971. CSIS melaksanakan kajian berorientasi kebijakan terhadap masalah-masalah dalam negeri dan internasional sebagai suara independen di dalam sektor pemerintah dan swasta, dan kontributor bagi debat publik. Kegiatan utama CSIS adalah penelitian, nasihat kebijakan, kerjasama, pengumpulan data dan penerbitan buku dan majalah yang disebarakan secara regional. Selain kajian tentang isu pembangunan politik dan hubungan internasional, ia juga memusatkan perhatian kepada diplomasi warganegara, pendidikan, pembangunan demokrasi, dan peningkatan hak asasi manusia. CSIS memiliki program abadi tentang penanggulangan konflik di Aceh dan Papua yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan penanggulangan konflik melalui proyek analisis konflik dan dialog dengan pemerintah, pemimpin daerah dan organisasi masyarakat. CSIS juga memainkan peranan penting dalam Council for Security Cooperation in Asia Pacific (Lembaga Kerjasama Keamanan di Asia Pasifik) dan telah membentuk hubungan internasional dengan banyak lembaga, termasuk Henry Dunant Center (Swiss).

Jl. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta 10160 Indonesia

Tlp: [062 021] 380 9637 40/385 6532 35

Fax: [062 021] 380 9641/384 7517

csis@csis.or.id, www.csis.or.id

Kontak: Rizal Sukma

Anggaran: 25.000-100.000 dolar AS

Publikasi: *Peace Building and State Building in East Timor*, 2002.

Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian

Misi Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian bertujuan memberdayakan individu dan masyarakat untuk pengembangan perdamaian di dalam keluarga, umat beragama, tempat kerja, dan di dalam masyarakat yang didasarkan atas cinta, kebenaran, keadilan dan perdamaian. Tujuan ini ditempuh melalui penelitian dan pengembangan perdamaian, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan penengahan konflik, terapi trauma dan penyampaian informasi. Sebagian proyeknya antara lain: Terapi Trauma dan Penanggulangan Konflik; Pelatihan Polisi dalam Kerjasama Penanggulangan Konflik; Mediasi Sejajar; Pemberdayaan Fasilitator Daerah; Tim Independen untuk Kerukunan di Ambon; dan Pengembangan Kerukunan dan Hak Asasi Manusia dalam Proses Demokratisasi di Papua.

Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian

Universitas Kristen Duta Wacana

Jl. Dr. Wahidin 5-19 Yogyakarta 55224 Indonesia

Tlp: [062 274] 563 929 ext. 108

Fax: [062 274] 513 235

pspp@ukdw.ac.id, www.ukdw.ac.id/pspp/indexeng.html

Kontak: Rev. Paulus S. Widjaya, Ph.D

dan Rev. Jozef M.N. Hehanussa, M.Th.

Jumlah staf: 5 orang

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi didirikan pada 1991 untuk meningkatkan pembangunan masyarakat sipil yang demokratis, independen dan menghargai pluralisme. Misionya adalah berjuang untuk menciptakan sebuah masyarakat sipil yang demokratis melalui komitmen terhadap hak-hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat; meningkatkan proses transformasi sosial dan reformasi masyarakat berbasis ekonomi untuk menciptakan struktur yang adil, independen dan sejajar dan mendukung seluruh upaya untuk menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi atas nama agama, etnisitas, ras, dan gender demi meningkatkan pluralisme masyarakat. YAPPIKA memiliki tiga program strategis dalam pembangunan: ia mendukung inisiatif masyarakat untuk meningkatkan kerukunan sosial, tujuan untuk memperkuat kemampuan dan pemerintahan sipil dan memusatkan perhatian kepada pengembangan sosial-ekonomi masyarakat. Pada masa lalu, YAPPIKA telah melaksanakan penelitian di Aceh maupun Papua dan, saat ini, melakukan kajian terhadap kesepakatan damai menyangkut konflik di Maluku.

Jl. Pedati raya No. 20 Rt 007/09 Jakarta Timur 13401

DKI Jakarta Indonesia

Tlp: [062 021] 819 1623

Fax: [062 021] 850 0670

yappika@indosat.net.id

www.yappika.org

Kontak: Otto Syamsudin Ishak, Manajer

Jumlah staf: 22 orang

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS)

KONTRAS dibentuk pada bulan Maret 1998 oleh koalisi 12 LSM dan aktifis Pro-demokrasi sebagai respons terhadap sikap diam pemerintah Indonesia atas hilangnya beberapa aktivis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran rakyat Indonesia terhadap hak-hak rakyat untuk bebas dari semua bentuk kekerasan dan mendukung perubahan yang konsisten dalam hukum dan politik yang akan menciptakan perbaikan dalam perlindungan terhadap rakyat.

KONTRAS melaksanakan berbagai program khususnya bantuan hukum terpadu yang mencakup konsultasi hukum bagi korban dan keluarganya, bantuan hukum untuk menggugat pertanggungjawaban pemerintah, terapi pos-trauma dan rehabilitasi bagi korban dan keluarganya, dan penyelidikan. Program lain adalah mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, pemantauan keadaan hak asasi manusia, dan juga membentuk pendapat umum untuk pendidikan dan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Pada 2001, KONTRAS mendirikan Suara Hak Asasi Manusia, sebuah radio untuk pendidikan hak asasi manusia. KONTRAS menjalin kerjasama dengan jaringan LSM nasional maupun internasional.

Jl. Cisadane No. 9 Menteng Jakarta Pusat
Indonesia Tlp: [062 021] 390 1978 Fax: [062 021] 314 1484
kontras_98@hotmail.com
www.desaparecidos.org/kontras/links.html
Kontak: Ori Rahman, Koordinator Presidium

Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, Keadilan dan Perdamaian (PSE & KKP)

Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, Keadilan dan Perdamaian merupakan organisasi binaan gereja dan berjuang demi rakyat yang serba kekurangan, tertindas, miskin dan terpinggirkan. PSE & KKP aktif berjuang bersama kelompok rakyat melalui kampanye, peningkatan kesadaran dan pengembangan sosial ekonomi (pemerataan pendapatan). Mereka juga memusatkan perhatian kepada pemberdayaan masyarakat kelas bawah dan meningkatkan kesadaran akan krisis moral di dalam masyarakat, mengembangkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab melalui pelatihan pertanian dan pembentukan kelompok antar-etnik yang mandiri.

Jl. WR. Supratman 100 PO Box 1270 Pontianak
Kalimantan Barat 78011Indonesia
Tlp/fax: [062 561] 748 116
pse_kap@pontianak.wasantara.net.id
Kontak: P. Yeremias
Jumlah staf: 4 orang, 6 orang relawan

Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat

PPKM didirikan di Jakarta. Badan pendirinya antara lain adalah Emil Salim, Erna Witoelar, Ismid Hadad, Bambang Ismawan dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. PPKM merupakan sebuah lembaga yang menyalurkan bantuan melalui LSM dan kelompok-kelompok masyarakat mandiri kepada masyarakat lemah di Indonesia yang paling menderita akibat krisis ekonomi. Komunitas penerima bantuan merencanakan berbagai kegiatan yang meningkatkan pemberdayaan individu dan kelompok dengan bantuan LSM. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga mendorong terciptanya peningkatan kekuatan dan daya tahan masyarakat di masa depan. Selain memberikan bantuan kepada para korban krisis ekonomi, PPKM juga menolong korban kekerasan horisontal di berbagai tempat seperti Maluku, Aceh, dan Kalimantan Tengah. Pendekatan organisasi bersifat partisipatoris dengan PPKM hanya berperan sebagai fasilitator.

Jl. Tebet Dalam I No. 10 Jakarta Selatan, 12810

DKI Jakarta Indonesia

Tlp: [062 021] 828 0050

Fax: [062 021] 837 04405

indocrp@indocrp.or.id

www.indocrp.or.id

Kontak: Amrullah, Manajer Program

Jumlah staf: 22 orang

Anggaran: 1.000 000 dolar AS

Consortium for Assisting the Refugees and Displaced in Indonesia (CARDI)

CARDI merupakan sebuah konsorsium kemanusiaan nirlaba yang didirikan oleh The Danish Refugee Council, The Norwegian Refugee Council, The International Rescue Committee, dan Stichting Vluchteling (Dutch Refugee Foundation) yang mengemban mandat yang sama dalam memberikan bantuan dan penanggulangan para pengungsi dan tunawisma di Indonesia. Mereka menghimpun dana demi mengurangi penderitaan masyarakat yang dilanda konflik dan meringankan beban para pengungsi di Indonesia, seraya mengembangkan masyarakat sipil yang lebih kuat.

Dengan bekerja sama dengan LSM daerah dan internasional, pemerintah Indonesia, dan badan-badan PBB, CARDI berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilanda konflik. Kegiatan utamanya adalah penanggulangan keadaan darurat, pengembangan kemampuan organisasi berbasis massa dan LSM daerah, pendidikan, pembangunan masyarakat, pendidikan perdamaian atau berbagai kegiatan pengendalian konflik di berbagai kawasan dengan jumlah pengungsi yang tinggi, pemberdayaan ekonomi (misalnya, pemerataan pendapatan, pelatihan kejuruan dan sebagainya), membantu pemukiman kembali, air dan sanitasi, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi akibat konflik atau keterusiran dan menciptakan hidup berdampingan yang damai dan langgeng.

Untuk Tahun 2002-2003, Program CARDI meliputi:

- Inisiatif Partisipasi Generasi Muda, dilaksanakan dengan bantuan UNICEF untuk memperkuat dasar pemulihan sosial di Maluku Utara pascakonflik dengan memobilisasi generasi muda dari berbagai latar belakang agama untuk meredakan konflik secara damai, melalui pepaduan pendidikan lintas kelompok dan acara radio.

- Pendidikan Darurat dan Bantuan Psikososial di Pulau Ambon, untuk mengurangi akibat buruk kekerasan dan keterusiran terhadap para pengungsi generasi muda melalui jaringan berbagai pusat pemuda, menawarkan kegiatan terstruktur, keahlian dan pendidikan perdamaian.
- Membentuk pusat-pusat informasi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, dengan tujuan memberikan informasi kepada para pengungsi mengenai berbagai keputusan yang menyangkut masa depan mereka dan membantu kerukunan dengan orang-orang yang pernah menjadi tetangga mereka.

CARDI

Jl. Cibulan 16 A Jakarta 12170 Indonesia

Tlp: [062 021] 726 2452

Fax: [062 021] 726 2452 ext. 105

cardi@cbn.net.id

Kontak: Hervé de Bailleux

Jumlah staf: 110 orang

Anggaran: 100.000-500.000 dolar AS

Konsorsium LSM Lokal Sulawesi Selatan (KL2SS)

Didirikan pada tahun 1998, Konsorsium LSM Lokal Sulawesi Selatan merupakan gabungan dari 24 LSM lokal. Setiap organisasi mewakili satu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Mereka peduli terhadap kesejahteraan kaum terpinggirkan yang miskin, lemah dan jauh tertinggal dalam proses pembangunan. LSM itu menghimpun sumber daya dan bekerja sama untuk mengentaskan masalah sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat. Cita-cita dan semangat berjuang ini terangkum dalam motto KL2SS “Bersama Melawan Kemiskinan.” Untuk mencapai tujuannya, KL2SS melaksanakan beberapa kegiatan strategis seperti meningkatkan pendapatan keluarga dengan cara mengembangkan badan usaha, meningkatkan kelestarian lingkungan, memperbaiki kesehatan keluarga, membela hak-hak rakyat sipil, mengembangkan sumber daya manusia, menyebarkan informasi, dan memberikan nasihat. Di dalam semua kegiatan ini tercermin gagasan toleransi dan pluralisme yang akan semakin mereka perhatikan di tahun mendatang.

Jl. Tengko Situru No. 5 Malangngo, Rantepao
Tana Toraja Sulawesi Selatan Indonesia
Tlp: [062 423] 23 985/21 365
Fax: [062 423] 21 885
Kontak: May Januar, Koordinator
Anggaran: 25.000-50.000 dolar AS

Crisis Center Diocese of Amboina (CCDA)

Crisis Center Diocese of Amboina (CCDA) didirikan pada bulan Juli 1999 oleh Uskup PC. Mandagi Msc. Selama terjadinya konflik di daerah itu, yang berawal pada bulan Januari 1999, CCDA aktif dalam berbagai upaya rekonsiliasi, evakuasi dan bantuan darurat bagi para pengungsi, pendanaan, bantuan kemanusiaan, peningkatan hak asasi manusia, mediasi dan pembangunan/rehabilitasi. Ia melaksanakan pertemuan besar pada bulan Maret 2001 tentang “Membangkitkan Kembali Budaya Lokal untuk Rehabilitasi dan Pembangunan di Maluku menuju Indonesia Baru” bagi para peserta dari kedua belah pihak. CCDA juga menjalin kerjasama dengan badan-badan internasional maupun para pejabat pemerintah daerah dan masyarakat nasional atau lokal, dan dengan para pemimpin Muslim. Sejak bulan Juni 2000, ia mulai menyebarluaskan informasi mengenai konflik kepada masyarakat internasional. Ketika pada bulan Oktober 2002, konflik dianggap telah berakhir, Crisis Center itu kemudian membatasi diri untuk secara umum bersiap siaga dan memberikan dukungan, namun tetap melanjutkan penerbitan newsletter.

Puspaskup

Jl. Pattimura 32 Ambon 97124 Indonesia

Tlp: [062 911] 342 195 Fax: [062 911] 355 337

crisiscentre01@hotmail.com, www.malra.org/posko

Kontak: CJ. Böhm, M.Sc. dan Felix Wee

Anggaran: <25.000 dolar AS

Jumlah Staf: 2 orang

Publikasi: Newsletter: *The Situation in Ambon/Moluccas* yang berisi laporan tentang konflik di Maluku dan upaya-upaya rekonsiliasi. Sejak bulan Juni 2000, newsletter itu telah dikirim ke seluruh dunia melalui surat tercatat kepada 370 anggota

Forum Dialog antar Kita Kalimantan Selatan (Forlog Kalsel)

Forum Dialog antar Kita Kalimantan Selatan diprakarsai oleh organisasi lokal sebagai tindak lanjut dari seminar Dian Interfidei tentang pluralisme, dialog dan konflik. Kesadaran akan pentingnya penyebarluasan gagasan pluralisme untuk mencegah atau menanggulangi konflik membuat LPKOP, STT GKE, MASIKA, GMKI, PMII, Yowana, Peradah, LK3, Gemabudhi bekerja sama untuk melakukan kampanye umum melalui diskusi dan media, maupun pelatihan. Mereka telah menyelenggarakan pelatihan di daerah-daerah pascakonflik, seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mengenai pengendalian konflik, dan juga beberapa penelitian dan penerbitan buletin untuk meningkatkan jurnalisme konflik. Mereka juga bekerja sama dalam mendorong dialog, bimbingan trauma dan rehabilitasi pasca konflik.

Jl. Simpang Gatot Subroto VII/Rama Rt 20 No. 61
Banjarmasin 70235 Kalimantan Selatan Indonesia
Tlp: [062 511] 271 689 Fax: [062 511] 271 689
Lk3@indo.net.id
Kontak: Gazalirrahman, Sekretaris
Anggaran: <25.000 dolar AS
Jumlah Staf: 3 orang, 8 orang relawan

Forum Partisipasi Masyarakat

FPM merupakan forum nirlaba non-partisan yang didasarkan atas kemampuan dan keragaman lokal. Visinya adalah pengembangan masyarakat sipil pada jenjang kelas bawah; sebuah bentuk masyarakat sipil yang dapat menganalisis, menjangkau dan mengelola berbagai isu yang berpengaruh terhadap lingkungannya dan memajukan hubungan luas sebagai contoh aktif ‘swadaya’. Forum ini mencapai tujuannya dengan menjalin kerjasama dan komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan para praktisi pengembangan masyarakat; mendukung pendekatan inovatif-partisipatoris yang memungkinkan para anggota masyarakat untuk berinteraksi secara aktif. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang ada dan mengembangkan hubungan dengan dunia luar; mendorong berbagai kegiatan bagi pengembangan sumber daya manusia melalui pertukaran informasi dan pengalaman di dalam kerangka belajar bersama; melaksanakan berbagai studi dan pemberian bantuan menyangkut kebijakan pada tingkat pusat dan regional.

Taman Duren Sawit Blok AI No. 69
Jl. Rawa Domba, Jakarta Timur 13440 DKI Jakarta
Indonesia Tlp: [062 021] 860 4606/860 9571
Fax: [062 021] 860 4606
forumppm@indo.net.id
www.fppm.org
Kontak: Tri Bangun Asih, Sekretaris
Jumlah Staf: 23 orang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan lembaga pemerintah yang didirikan melalui Keputusan Presiden pada 1993, yang diperkuat oleh Undang-undang No. 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia dan peran Komnas HAM. Misinya adalah menanggulangi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan menyelenggarakan pendidikan hak asasi manusia. Meski menjalankan mandat negara, Komnas HAM bersifat imparisial dan independen. Para anggotanya merupakan tokoh masyarakat yang dikenal sebagai pembela hak-hak asasi manusia dan dipilih melalui tes kelayakan oleh parlemen.

Untuk mencapai misinya, Komnas HAM berperan sebagai sebuah lembaga yang menampung keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia, penyidikan, terutama kasus-kasus besar hak asasi manusia, dan membuat rekomendasi mengenai cara menindaklanjuti kasus tersebut kepada pemerintah dan lembaga peradilan. Saat ini, yang menjadi prioritas adalah kasus Maluku dan Tanjung Priok. Untuk menjalankan peran ini, Komnas HAM melaksanakan penelitian mengenai pernyataan/kebijakan menyangkut berbagai isu hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia internasional, mendorong kebijakan agar sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan maupun kepentingan umum, dan/atau merekomendasikan ratifikasi instrumen tersebut. Komnas HAM juga memberikan pendidikan hak asasi manusia kepada masyarakat, khususnya LSM, para pemimpin agama, militer, polisi, para hakim dan sebagainya. Untuk menyebarkan pemikiran tentang hak asasi manusia, Komnas HAM menerbitkan brosur bulanan, melaksanakan kampanye hak asasi manusia, menyelenggarakan seminar, dan sebagainya. Demi mencapai tujuannya, Komnas HAM juga menjalin kerjasama internasional.

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, 10310
Jakarta Pusat Indonesia
Tlp: [062 021] 392 5230
Fax: [062 021] 392 5227
info@komnas.go.id
www.komnas.go.id

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merupakan ormas independen dengan para anggota yang berasal dari masyarakat adat dari seluruh pelosok nusantara. AMAN merupakan organisasi payung yang bekerja sama dengan masyarakat adat dalam perjuangan melindungi hak-hak, eksistensi dan kedaulatan tradisional mereka. Ini dapat dicapai jika masyarakat bisa menata diri mereka sendiri dengan sebaik-baiknya dan mengelola sumber daya alam mereka.

Program AMAN mencakup pengembangan jaringan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui pemberian bantuan. Selain itu, mereka memusatkan perhatian kepada penguatan ekonomi, pendidikan dan kaum wanita dari masyarakat adat.

Jl. B No. 4 Rawa Bambu Satu Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520 Indonesia
Tlp/fax: [062 021] 780 2771
rumahaman@cbn.net.id
Kontak: Emilianus Ola Kleden, Direktur
Anggaran: 25.000-100.000 dolar AS
Jumlah Staf: 6 orang

Gerakan Perjuangan Anti-Diskriminasi (GANDI)

Gerakan Perjuangan Anti-Diskriminasi dibentuk sebagai sebuah badan koordinasi untuk menghapuskan diskriminasi di Indonesia. Tak lama berselang setelah peristiwa 1998, muncul kesadaran kolektif di berbagai unsur masyarakat, seperti para pengusaha Indonesia dari kelompok etnik Tionghoa dan para Kiai dari NU (seperti Gus Dur) bahwa ada sesuatu yang salah pada bangsa ini dan bahwa situasi ini harus diperbaiki melalui tindakan bersama. Dengan visi menciptakan penghormatan terhadap kesetaraan, toleransi dan keragaman, GANDI didirikan. Saat ini, GANDI cenderung lebih memusatkan perhatian kepada peningkatan upaya untuk menciptakan keadilan, kesetaraan dan keragaman. Kini lembaga ini aktif dalam hukum nasional menyangkut kewarganegaraan dan *vital statistics* (angka-angka statistik).

Jl. Raya Kebayoran Lama No. 72 Jakarta Barat
DKI Jakarta 11540 Indonesia
Tlp: [062 021] 949 4284
Fax: [062 021] 5367 8143
wisantara@yahoo.com
Kontak: Wahua Effendy
Jumlah Staf: 6 orang, 5 orang relawan

Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan (LPHL)

Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia merupakan LSM independen yang bergerak dalam bidang hukum lingkungan. Lembaga tersebut aktif dalam memberikan bantuan dan pemberdayaan untuk meningkatkan pemenuhan hak dan pengendalian lingkungan dan sumber daya alam secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penyelenggaraan pelatihan tentang hukum lingkungan dan pelaksanaannya; pelatihan dan lokakarya; penyusunan pedoman perlindungan lingkungan hidup dan pemberian bantuan hukum terhadap kasus-kasus hukum lingkungan. LPHL telah bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM dan sebagainya untuk meningkatkan kebijakan penanganan atas berbagai isu yang berhubungan dengan perspektif lingkungan dan pembangunan.

Jl. Dempo II No. 21 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12120 Indonesia
Tlp: [062 021] 726 2740/723 3390
Fax: [062 021] 726 9331
s_indri@lycos.com
icel@indosat.net.id
Kontak: Indriani Augustine
Jumlah Staf: 22 orang

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia merupakan organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap berbagai isu lingkungan hidup. WALHI dibentuk sebagai respon terhadap berbagai isu dan ketidakadilan karena salah urus sumber daya alam sebagai akibat pembangunan. Kegiatan-kegiatannya antara lain memperkuat komunitas, masyarakat sipil dan lembaga-lembaga adat melalui pelatihan analisis hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, pelatihan manajemen kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Jakarta 12790
Indonesia Tlp: [062 021] 791 93363 Fax: [062 021] 794 1673
info@walhi.or.id
www.walhi.or.id

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Aliansi Jurnalis Independen dibentuk sebagai serikat jurnalis nirlaba. Organisasi tersebut didirikan pada 1992 sebagai respons terhadap pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia, dan sentralisasi informasi di tangan media pemerintah. Misinya adalah melindungi, dan berperan sebagai pembela kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. AJI sangat menekankan pengembangan demokrasi, pengembangan kemampuan para jurnalis melalui pelatihan, dan kerjasama. Selain kegiatan ini, AJI juga aktif dalam bernegosiasi dan mediasi, pemberian bantuan hukum dan pembangunan/rehabilitasi.

Projek Pusat Media Maluku, yang dilaksanakan AJI, berupaya untuk mendidik dan mendorong para jurnalis untuk menulis peliputan yang tidak subjektif mengenai konflik di Maluku, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan perdamaian di kawasan itu. AJI berusaha membentuk jaringan nasional dan internasional.

Jl. LAN I no. 123 A Pejompongan Jakarta, 10210 Indonesia

Tlp: [062 021] 571 1044/56 Fax: [062 021] 571 1063

ajioffice@aji-indonesia.or.id

www.ajinews.or.id

Kontak: Ati Nurbaiti, Direktur Eksekutif

Anggaran: 25.000-100.000 dolar AS

Jumlah Staf: 10 orang

Institut Pluralisme Indonesia (IPI)

Institut Pluralisme Indonesia didirikan di Jakarta pada tahun 2000 dengan tujuan mengembangkan pluralisme sebagai dasar berdialog dan bekerja sama di dalam masyarakat Indonesia. Visi IPI adalah menciptakan pemahaman, solidaritas dan kerjasama di kalangan individu dan kelompok sosial di Indonesia, tanpa membedakan latar belakang etnik, agama/kepercayaan, gender, orientasi politik, status sosial-ekonomi atau keturunan. Kegiatan ini mencakup pengembangan sistem donor darah, penelitian terhadap pendidikan pluralistik, pengembangan bahan pelatihan bagi pluralisme, pengendalian konflik dan kepemimpinan, dan mendorong terbentuknya lingkungan dialog generasi muda.

Jl. Percetakan Negara C-553 Lantai 4 DKI Jakarta 10570
Indonesia Tlp/fax: [062 021] 422 6449
ipi@cbn.net.id atau ilmasy@yahoo.com
Kontak: William Kwan HL
Jumlah Staf: 3.600 orang relawan

Institute for Human Rights Studies and Advocacy-West Papua (ELSHAM)

Institute for Human Rights Studies and Advocacy-West Papua (ELSHAM) adalah organisasi hak asasi manusia independen yang berbasis di Papua yang memiliki misi dan visi demilitarisasi, keadilan dan penciptaan perdamaian, penentuan diri dan pemberdayaan.

Sekelompok pengacara, aktivis LSM dan pemimpin gereja mendirikan ELSHAM pada tahun 1998 dengan niat kuat untuk menghapus kekerasan anti-HAM dan kekerasan struktural di Papua Barat. ELSHAM berusaha memberdayakan masyarakat lewat empat program: pendidikan, bantuan hukum, riset dan gender, dengan membangun kesadaran dan pengertian tentang HAM universal. Sejak pendiriannya ELSHAM juga merupakan penyokong yang fasih dan terkemuka bagi pengembangan hak asasi di Papua Barat, yang acap kali melakukan riset dan mengeluarkan laporan tentang pelanggaran HAM.

Jl. Kampus ISTP-Padang Bulan Jayapura West Papua

Indonesia Telp: [062 976] 581 600

Fax: [061 976] 581 520

elshamnewsservice@jayapura.wasantara.net.id

www.geocities.com/elshamnewsservice/

Kontak: Aloysius Renwarin, Wakil Direktur

Institut Dayakologi (ID)

Sejak tahun 1991, Institut Dayakologi (ID), sebuah LSM berbasis massa, telah secara aktif berupaya membangkitkan kembali warisan budaya Dayak di Kalimantan melalui penelitian, kajian strategis, kerjasama, penerbitan dan dokumentasi. Pembangunan yang timpang telah mengancam eksistensi jatidiri dan budaya masyarakat Dayak. Oleh karena itu, ID berjuang untuk memberdayakan masyarakat Dayak dengan tujuan memberikan bantuan pada tingkatan lokal, nasional dan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, ID melaksanakan berbagai kegiatan yang membangkitkan kembali agama adat masyarakat, lembaga dan hukum adat, pengetahuan lokal, dan mendorong inisiatif lokal. Dalam bekerjasama dengan LSM lokal, nasional dan internasional, maupun dengan media, ID secara aktif terlibat dalam upaya pengembangan perdamaian melalui lokakarya, diskusi umum, terapi-trauma, rekonsiliasi, pendidikan kewarganegaraan, dan kegiatan sistem peringatan-dini.

Kompleks Bumi Indah Katulistiwa

Jl. Budi Utomo Blok A3, No. 3-4 Pontianak 78241 Kalimantan Barat

Indonesia Tlp: [062 561] 884 567 Fax: [062 561] 883 135

i.dayakologi@ptk.centrin.net.id

www.dayakologi.com

Kontak: John Bamba, Direktur

Jumlah Staf: 30 orang, 9 relawan

Institut Dialog antar-Iman di Indonesia (Interfidei)

Sejak tahun 1991, Institut Dialog antar-Iman di Indonesia telah aktif menangani berbagai masalah kemanusiaan di Indonesia. Interfidei bertujuan menjadi sebuah forum untuk membahas bersama konsep-konsep keagamaan. Ia menghargai warisan pemikiran agama dan menghormati semua agama dalam keragamannya. Kegiatannya yang utama adalah mengembangkan toleransi dan pluralisme melalui diskusi umum, menyelenggarakan pelatihan, penelitian dan melaksanakan kajian keagamaan. Selain itu, Interfidei juga menerbitkan buku-buku dan buletin, demi mengembangkan kemampuan personil dan organisasi. Pentingnya kerjasama bagi organisasi itu tercermin dalam kerjasama Interfidei dengan LSM lokal dan internasional maupun dengan pemerintah. Pada tingkat lokal, Interfidei mendorong terciptanya dialog melalui program pengembangan kemampuan. Forum Dialog “Antar-Kita” di Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara merupakan hasil usaha Interfidei.

Jl. Banteng Utama 59 Kaliurang Km 8 Yogyakarta 55581
Indonesia Tlp/fax: [062 274] 880 149
profide@yogya.wasantara.net.id
Kontak: Elga Sarapung, Direktur
Jumlah Staf: 12 orang
Anggaran: 50.000-100.000 dolar AS

Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)

Lembaga Bela Banua Talino merupakan organisasi non-pemerintah yang membantu pengembangan sumber hukum adat untuk membangun sebuah masyarakat yang independen dalam arti hukum dan advokasi; yang menghormati hak-hak asasi manusia; peduli terhadap lingkungan dan didasarkan atas kesetaraan gender dan demokrasi. Kegiatannya mencakup penataan masyarakat, studi kebijakan dan pendidikan hukum yang kritis.

Kompleks Bumi Indah Katulistiwa
Jl. Budi Utomo Blok A3, No. 5 Pontianak 78241 Kalimantan
Barat
Indonesia Tlp: [062 561] 889 623 Fax: [062 561] 884 566
banua@pontianak.wasantara.net.id
Kontak: C. Kanyam, Direktur
Jumlah Staf: 12 orang, 1 orang relawan

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat adalah sebuah LSM yang bergerak pada advokasi kebijakan, yang didirikan pada tahun 1993. Tujuannya adalah menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati hak-hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi. Untuk mencapai tujuan ini, ELSAM menyelenggarakan beberapa program penelitian kebijakan/hukum, pengundangan hukum, advokasi kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia, pendidikan/pelatihan hak asasi manusia, dan penyebarluasan informasi tentang hak asasi manusia. ELSAM berhasil dalam upayanya sehingga pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Hak-hak Sipil dan Politik, dan secara aktif ia juga ikut serta dalam penyusunan dasar hukum dan kerangka bagi Komisi Kebenaran dan Kerukunan di Indonesia, kini tengah dibahas di DPR. ELSAM juga menerbitkan buku-buku tentang hak asasi manusia, *Judicial Monitoring Review*, yang menganalisis proses peradilan yang selaras dengan parameter hak asasi manusia, dan buletin ASASI, yang menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Semua penerbitan tersebut dipersembahkan kepada para pejabat publik, pembuat-keputusan dan penegak hukum.

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu Jakarta 12510 Indonesia
Tlp: [062 021] 797 2662/797 2564 Fax: [062 021] 7919 2519
elsam@nusa.or.id, www.elsam.or.id
Kontak: Ifdhal Kasim, Direktur Eksekutif
Jumlah Staf: 20 orang

Lembaga Transformasi Sosial (INSIST)

Yayasan INSIST adalah sebuah LSM yang berkantor-pusat di Yogyakarta, namun aktif secara nasional. Didirikan pada 1997 dan visinya adalah “masyarakat sipil” sebagai sebuah gerakan sosial yang secara organik, bersama dengan rakyat, terlibat dalam ‘kegiatan menentang hegemoni’, menentang pemikiran neo-liberalisme yang dominan dan negara yang menjadi pelindung modal global. INSIST bertujuan untuk mencapai semua tujuan ini dengan berbagai upaya dan cara untuk menemukan sebuah jalan baru melalui: para relawan muda bagi gerakan sosial yang berada di Indonesia; relawan bagi program Gerakan Sosial dan Indonesian Research and Advanced Co-education Fellowship Programme for Community Empowerment. Ia mendukung program-program masyarakat seperti Research, Education, and Alternative Dialogue (ReaD), Insist Press, Insist Training, Insist Gender Specialists dan Insist Human Rights.

Blimbingsari CT IV No. 38 (Sekip Blok T/7) Sleman

Yogyakarta 55281 Indonesia

Tlp/fax: [062 274] 561 847/541 602

donmarut@insist.or.id, insist@insist.or.id, www.insist.or.id

Kontak: Mr. Donatus K. Marut, Direktur Eksekutif

Publikasi: *Facilitation Manual for Revitalisation of People's Rights*, 2000

Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN)

Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak didirikan pada tahun 2002. LAPPAN merupakan LSM yang berjuang demi hak kaum perempuan dan anak, dan memberdayakan kaum perempuan dan anak melalui penghapusan ketimpangan ekonomi dan pengembangan perdamaian. Kegiatan utamanya adalah pendidikan perdamaian pada tingkat masyarakat melalui seminar, diskusi dan terapi-trauma bagi kaum perempuan dan anak dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. LAPPAN menyelenggarakan pelatihan pengendalian konflik bagi para guru sekolah lanjutan tingkat atas untuk secara kritis dan aktif memungkinkan mereka mengubah keterampilan para siswa melalui reformasi kurikulum dan meningkatkan perdamaian serta pluralisme.

Jl. Pintu Air Kompleks THR Kelurahan Waihaong Ambon 97112
Maluku Indonesia Tlp: [062 911] 314 176/312 022
Fax: [062 911] 312 007
lappan_thr@yahoo.com
Kontak: Baihajar Tualeka, Direktur Eksekutif
Jumlah Staf: 7 orang

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sipil (Yayasan Cordova)

Cordova adalah sebuah LSM yang telah aktif sejak tahun 1990 di Kutaradja, Aceh. Cordova bertujuan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sipil, sehingga ia bertekad untuk menegakkan hak asasi manusia dan prinsip kehidupan dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Kegiatan Cordova mencakup dokumentasi, penyelidikan, penerbitan, maupun pendidikan, dan menghormati nilai-nilai demokratis dan kemanusiaan. Cordova telah melaksanakan berbagai bentuk penyelidikan dan kajian mengenai berbagai isu hak asasi manusia dan masalah-masalah demokratisasi dan telah menerbitkan beberapa karya tentang kasus-kasus hak asasi manusia. Cordova berpengalaman dalam melaksanakan berbagai bentuk lokakarya, seminar dan pelatihan.

Jl. As Sumantrani No. 3 Darussalam Banda Aceh 23111
Indonesia Tlp: [062 651] 51 157 Fax: [062 651] 54 186
cordova@aceh.wasantara.net.id
Kontak: Risman A. Rachman, Direktur
dan TM. Zulfikar Arifin, Manajer Program
Jumlah Staf: 6 orang, 3 orang relawan.

Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)

Para aktivis Jawa-Muslim mendirikan Lembaga Kajian Islam dan Sosial, dengan tujuan menciptakan masyarakat transformatif yang pluralistik, dimana para anggotanya bekerja sama dan berkomunikasi secara damai. Selain mendapatkan dana dari para donor, LKIS mendirikan sebuah usaha penerbitan untuk membiayai kegiatan dan program-program harian. LKIS menyelenggarakan beberapa program penting di media audio-visual untuk menyebarluaskan gagasan tentang pluralisme; ia melaksanakan penelitian untuk memberikan pemikiran alternatif mengenai Islam dan pluralisme dan memiliki kelompok diskusi bulanan tentang pluralisme, masyarakat sipil dan toleransi Islam. LKIS menyelenggarakan pendidikan alternatif tentang kritik agama, politik Islam, agama dan feminisme, dan dialog agama. Tujuannya adalah pendidikan masyarakat; advokasi, penerbitan, dan pengembangan jaringan. Sebagian aktivitasnya telah mencapai keberhasilan, misalnya pendidikan kewarganegaraan di pesantren (sekolah Islam) di Tasikmalaya untuk mendidik santri menjadi toleran dan bekerja demi masyarakat mereka dan mengembangkan pluralisme.

Jl. Pura I/1 Sorowajan Yogyakarta Indonesia
Tlp/fax: [062 274] 524 901 lkis@indosat.net.id
www.lkis.or.id
Kontak: Jadul Maula, Direktur Eksekutif

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Forum LSM Internasional bagi Pembangunan Indonesia (INFID) didirikan pada bulan Juli 1985, dengan nama INGI (Konferensi antar-LSM tentang masalah-masalah IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) atas dasar inisiatif beberapa LSM Indonesia dan sejawatnya di Belanda. INFID merupakan jaringan terbuka dan pluralistik LSM dari Indonesia dan berbagai negara anggota CGI maupun badan-badan internasional yang memiliki kepentingan dan komitmen terhadap Indonesia. Sejak 1985, INFID telah memberikan masukan kritis dan rekomendasi kepada IGGI mengenai berbagai isu pembangunan di Indonesia. IGGI meruakan konsorsium negara-negara pemberi bantuan kepada Indonesia yang pada 1992 diubah menjadi CGI yang dipimpin oleh Bank Dunia.

Tujuan INFID adalah menyuarakan perspektif dan masalah umum rakyat yang diwakili oleh LSM yang terlibat di Indonesia vis-à-vis pemerintah, lembaga pembangunan multilateral dan pihak swasta. INFID bertujuan membantu komunikasi antara LSM di dalam dan di luar Indonesia demi memperbaiki berbagai kebijakan mengurangi kemiskinan struktural dan meningkatkan kemampuan penanggulangan keadaan kaum miskin dan mereka yang kurang beruntung di Indonesia.

Jl. Mampang Prapatan XI/23 Jakarta Indonesia
Tlp: [062 021] 7919 6721/2 Fax: [062 021] 794 1577
infid@infid.org, www.infid.org
Kontak: Miss Binny Bukhari, Sekretaris Eksekutif.

European Liaison Office
Vlasabrieksraat 11 1060 Brussels Belgium
Tlp: [032 02] 5361 950/1 Fax: [032 02] 5361 906
infid@infid.be
Kontak: Dr. Klaus H. Schreiner, Liaison Officer

KALYANAMITRA

Kalyanamitra, yang berarti “Sahabat Yang Baik” merupakan LSM perempuan yang didirikan pada 1985. Misinya adalah mengembangkan demokrasi dan kesetaraan gender melalui terapi-trauma dan membantu kaum perempuan korban kekerasan. Kegiatan utamanya adalah pendidikan melalui pelatihan, pengumpulan data, pencarian fakta, peningkatan hak asasi manusia maupun pengembangan demokrasi. Tujuan utama adalah membangun jaringan nasional dan internasional seperti dengan CARE Belanda dan Brot fur die Welt, Jerman. Kalyanamitra tidak memiliki bagian khusus penanggulangan konflik, namun ia mendukung kegiatan ini melalui pendidikan. Misalnya, ia telah mengadakan pelatihan psikososial bagi relawan Baileo Maluku dan jaringan komunitas mereka di Maluku Tengah dan Tenggara pada tahun 2002.

Jl. Kaca Jendela II No. 9 Rawajati, Kalibata
Jakarta 12750 Indonesia
Tlp: [062 021] 790 2102 Fax: [062 021] 790 2112
ykm@indo.net.id
Kontak: Ruth Indiah Rahayu
Jumlah Staf: 20 orang
Anggaran: <25.000 dolar AS

Yayasan Lepa-Lepa Maluku (LEMA)

Yayasan Lepa-Lepa Maluku aktif membangun masyarakat yang lebih kuat, damai dan mampu mengelola sumber alam secara mandiri. Misi mereka adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas kehidupan, membangun masyarakat yang adil dan damai dan aktif mengembangkan perdamaian dan menciptakan perdamaian sebagai bagian kehidupan masyarakat. Kegiatannya antara lain negosiasi dan mediasi di Maluku melalui lembaga adat, garis keturunan dan pemberdayaan sektor perikanan. Selain itu, LEMA aktif dalam isu-isu pemberdayaan ekonomi di kawasan konflik, termasuk rekonsiliasi, negosiasi, mediasi dan terapi-trauma.

Jl. Pelita Ohoibun Atas
Tual Maluku Tenggara
Maluku 97611
Indonesia
Tlp/fax: [062 911] 622 163
Kontak: Theo Panumby, Sekretaris Eksekutif
Jumlah Staf: 6 orang, 4 orang relawan

Mercy Corps

Mercy Corps telah aktif di propinsi Maluku Indonesia Timur sejak lebih dari dua tahun silam, ketika konflik komunal tengah berlangsung sejak awal tahun 1999. Mercy Corps menyalurkan dana darurat (tenda, air, sanitasi, distribusi NFI, dan sebagainya) dan proyek pemberdayaan ekonomi (kredit kecil, nelayan dan pertanian, dan sebagainya), maupun kegiatan peningkatan kemampuan dan pengembangan perdamaian melalui organisasi-organisasi lokal. Dengan menyadari banyaknya orang yang menderita karena konflik, Mercy Corps mendanai proyek-proyek yang membantu kaum lemah dan miskin, termasuk masyarakat pribumi, bukan hanya para pengungsi, agar tidak menimbulkan kecemburuan dan meningkatkan ketegangan, dan mencegah potensi konflik karena memperebutkan sumber alam yang terbatas seperti air dan modal usaha.

Mercy Corps menjadi contoh organisasi internasional pertama yang memiliki tim gabungan kaum Muslim dan Kristen yang bekerja di satu kantor di sebuah kawasan netral Ambon (ibukota propinsi). Pendekatan Mercy Corps dalam mengembangkan perdamaian di Maluku juga lebih bersifat praktis dan bukan teoritis, misalnya, menciptakan peluang interaksi dan mendorong terlaksananya dialog antara umat dengan berbagai komunitasnya untuk memiliki kepedulian dan pemikiran yang sama. Sejak setahun yang lalu, Mercy Corps membuka sebuah Pusat Komunitas LSM di Ambon, tempat LSM lokal dapat menyelenggarakan lokakarya dan pertemuan, dan dapat menggunakan komputer dan sebagainya.

Dalam memilih proyek mana yang akan didanai, Mercy Corps mempertimbangkan bagaimana kegiatan itu menyatukan rakyat, jumlah orang yang mewakili berbagai komunitas, maupun bagaimana semua kegiatan ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan perdamaian.

Jl. Mutiara 53A Ambon 97123 Maluku Indonesia
Tlp: [062 911] 315 390 Fax: [062 911] 315 391
b_dayna@yahoo.com
info@mercy Corps.org (Kantor AS)
www.mercy Corps.or.id
Kontak: Dayna Brown, Ketua Pengembangan LSM
Jumlah Staf: 100 orang

Mitra Bentala

Didirikan pada 1995 Mitra Bentala adalah sebuah LSM yang berjuang untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan dalam mengelola sumber daya alam abadi Sumatera. Mitra Bentala memusatkan perhatian kepada tiga kegiatan utama: memberdayakan masyarakat, advokasi dan penelitian kebijakan. Meski tidak memiliki departemen khusus bagi pencegahan dan penanggulangan konflik, staf tetap terlibat aktif dalam isu-isu advokasi selama masa konflik. Pihak-pihak yang aktif dalam penanggulangan konflik antara lain para akademisi, LSM, media dan kelompok-kelompok nelayan. Mitra Bentala aktif dalam sebuah jaringan yang dibentuk di propinsi Lampung dan mencakup organisasi-organisasi regional dan lokal yang menangani berbagai isu menyangkut lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia dan kegiatan lainnya.

Jl. Flamboyan No. 18
Enggal Bandar Lampung
Propinsi Lampung 35118
Indonesia
Tlp/fax: [062 721] 241 383
yamitra@indo.net.id
Kontak: Guswarman, Direktur
Jumlah Staf: 7 orang, 2 orang relawan
Anggaran: <25.000 dolar AS

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan merupakan sebuah organisasi independen namun didirikan berdasarkan Keputusan Presiden sebagai jawaban terhadap tuntutan rakyat, khususnya kaum perempuan, atas tanggung jawab negara pada Kerusuhan Mei 1998 yang mendiskriminasi dan menyebabkan kaum perempuan keturunan Tionghoa menjadi korban perkosaan. Misionya adalah membangkitkan kesadaran rakyat atas kekerasan terhadap kaum perempuan, mengarahkan hukum dan kebijakan menuju peningkatan perlindungan terhadap kaum perempuan, memperkuat daya cegah terhadap kekerasan dan menanggulangi keadaan kaum perempuan pascapelanggaran. Programnya mencakup evaluasi atas tindakan pemerintah untuk melindungi kaum perempuan dari kekerasan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan, memperkuat kemampuan jaringannya bagi pemberdayaan sistem bantuan korban, dan juga pendidikan bagi kesadaran.

Jl. Latuharhari 4B

Jakarta 10310

Indonesia

Tlp: [062 021] 390 3963

Fax: [062 021] 390 3922

andy@komnasperempuan.or.id

www.komnasperempuan.or.id

Kontak: Kamala Chandrakirana, Sekretaris Umum

Jumlah Staf: 6 orang

Jaringan Organisasi Independen untuk Penguatan Rakyat (JOIPaRa)

Jaringan Organisasi Independen untuk Penguatan Rakyat berawal dari sebuah kelompok kecil LSM di Sumatera Utara, yang kemudian menggabungkan daya dan misi mereka ke dalam Kelompok Kerja Pengembangan Kemampuan pada 1992. Pada 2000, kelompok kerja itu mengubah namanya menjadi JOIPaRa. Fokus utama mereka adalah rakyat kelas bawah di desa-desa dan masyarakat kota di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Lampung dan Jambi. Mereka juga membangun jaringan nasional dan internasional demi mengembangkan kinerja mereka. Mereka mendukung pembentukan organisasi masyarakat melalui organisator komunitas mereka, dan membantu rakyat kelas bawah dengan memberikan pendidikan politik kewarganegaraan, advokasi kebijakan, pelatihan pengembangan daya kelembagaan dan perluasan jaringan.

Jl. Medan Tanjung Morawa Km. 20.5 Psr. VII No. 112

Tanjung Morawa

Deli Serdang 20362

Sumatera Utara

Indonesia

Tlp: [062 061] 794 3929

Fax: [062 061] 799 0436

joipara@yahoo.com

Kontak: Syamsul Bahri, Sekretaris Umum

Jumlah Staf: 4 orang

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura

Lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Keuskupan Katolik Jayapura, yang memusatkan perhatian kepada empat macam bidang. *Pertama*, ia bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan melaporkan dan bekerja sama dengan korban, umat beragama dan kelompok LSM. *Kedua*, lembaga ini ingin secara komprehensif membangkitkan kesadaran dan pemahaman terhadap berbagai persoalan yang melanda Papua melalui penyelenggaraan seminar dan serangkaian penerbitan, ‘memoria passionis’, dan ‘catatan politik’. *Ketiga*, SKP Jayapura aktif mengupayakan solusi damai melalui pemberdayaan rakyat sipil, rekonsiliasi, mediasi atau negosiasi. Dan akhirnya, lembaga ini bekerja sama dengan sejumlah rekanan dan rakyat dari berbagai agama, budaya dan ideologi politik, yang memiliki kepedulian, program dan fokus yang sama pada tingkat lokal (Papua), nasional atau internasional.

Jl. Kesehatan No. 4 Dok II
Kotak Pos 1379, Jayapura
Papua 99013
Indonesia
Tlp/fax: [062 967] 534 993
sekkp@jayapura.wasantara.net.id
Kontak: Theo van den Broek, Direktur
Jumlah Staf: 5 orang, 55 orang relawan
Anggaran: 60.000 dolar AS

Oxfam Great Britain, Indonesia

Oxfam Great Britain mulai beroperasi di Indonesia pada 1972. Berdasarkan misinya untuk bekerja sama dengan pihak lain demi menemukan solusi yang sebaik-baiknya dalam mengurangi kemiskinan dan penderitaan, Oxfam mengerahkan segenap kemampuannya dalam beberapa bidang utama seperti pembangunan/rehabilitasi, peningkatan hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan maupun peredaaan konflik, penyelidikan dan pengumpulan data, dan kegiatan advokasi yang mencakup lobi, nasihat kebijakan, penelitian dan sebagainya. Bidang lain yang juga ditangani Oxfam adalah pengembangan kemampuan, pendidikan dan media. Bagi projek-projek berskala kecil, Oxfam memberikan dana dan melakukan kerja sama yang erat dengan sejawatnya.

Khususnya dalam peredaaan konflik di Indonesia, Oxfam telah bekerja sama dengan LSM lokal dalam mengembangkan program penanggulangan konflik berbasis massa.

1. Dengan gerakan Baku Bae di Ambon Maluku Tengah selama tahun 2001-2002. Program ini diarahkan kepada masyarakat kelas bawah untuk membantu upaya pengembangan perdamaian yang melibatkan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam konflik, pemimpin informal dan unsur penting masyarakat lainnya.
2. Inisiatif lain juga di Maluku Tenggara menyangkut penanggulangan konflik yang menggunakan pendekatan kekeluargaan sebagai bagian dari program Pembangunan Sosial Ekonomi Terpadu untuk Maluku. Mitra utama adalah Jaringan Baileo (koalisi 9 LSM di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara) dan akan selesai pada bulan April 2004.
3. Di Poso-Sulawesi Tengah, dengan LPSHAM dalam menciptakan dan mendukung dialog antar komunitas dan sistem peringatan dini pada awal 2003. Program tersebut melibatkan 17 desa di mana masyarakatnya dapat membagi kepedulian dan kepentingan mereka di dalam dan/atau dengan masyarakat lainnya maupun pemerintah daerah dan pasukan keamanan.

Oxfam berencana untuk tetap membantu kawasan itu pada tahun-tahun mendatang.

Komplek Gejayan Indah Blok B No. 20A Gejayan

Yogyakarta 55281 Indonesia

Tlp/fax: [062 274] 584 722

oxfam-ids@oxfam.or.id

www.oxfamgb.org/eastasia

Kontak: Leopold Sudaryono, Staf Pengendalian Konflik

Jumlah Staf: 40 orang

Anggaran: 25.000-100.000 dolar AS

Lembaga Bantuan Hukum (LBH Papua)

Lembaga Bantuan Hukum Papua didirikan pada 1985, melalui inisiatif sejumlah gereja di Papua dan menjadi cabang ke 14 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). LBH Papua merupakan organisasi masyarakat sipil berbasis massa, yang meyakini mekanisme negara harus melindungi rakyat dan menjaga hak-hak ekonomi-sosial-budaya dan kebebasan dasar. Program-programnya antara lain adalah membangkitkan kesadaran, bantuan hukum masyarakat, advokasi kebijakan, pembelaan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai kegiatan ini dilaksanakan demi meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka dan untuk memberi tahu hak dan tanggung jawab kepada mereka.

Jl. Gerilyawan No. 46
Abepura Jayapura
PO Box 224 Abepura
Indonesia
Tlp: [062 967] 581 710
Fax: [062 967] 582 559
jprlbh@jayapura.wasantara.net.id
Kontak: Demianus Wakman, Direktur
Jumlah Staf: 21 orang, 3 orang relawan
Anggaran: <25.000 dolar AS

Forum LSM Papua (Foker LSM Papua)

FOKER merupakan sebuah forum jaringan bagi LSM di Papua yang didirikan pada 1991. Sebagai sebuah forum jaringan, FOKER aktif mengembangkan struktur yang lebih adil dan beragam, membangkitkan perhatian terhadap masyarakat adat yang secara ekonomi kurang beruntung di Papua (lelaki maupun perempuan) untuk memampukan mereka memanfaatkan dan mengelola sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya secara mandiri dan membuka peluang bagi mereka untuk mencapai masa depan mereka sendiri. Kegiatannya antara lain adalah: mendukung LSM yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai isu yang relevan dalam konteks Papua melalui dialog dan musyawarah yang terarah; pelatihan bagi peningkatan kinerja organisasi dan pengelolaan organisasi untuk meningkatkan kualitas advokasi dan kegiatan memberikan bantuan kepada masyarakat.

Jl. Sentani Raya No. 89

Waena, Jayapura 99358

Papua

Tlp: [062 967] 573 511

Fax: [062 967] 573 512

fokerlsm@jayapura.wasantara.net.id

Kontak: Golda Aronggear, SH, Sekretaris

Jumlah Staf: 6 orang, 6 orang relawan

Institut Titian Perdamaian

Institut Titian Perdamaian, resminya “Gerakan Baku Bae”, adalah komunitas berbasis proses rekonsiliasi yang dibentuk oleh unsur masyarakat sipil sebagai sebuah alternatif bagi penanggulangan konflik dan rekonsiliasi dalam konteks politik Indonesia dewasa ini. Institut Titian Perdamaian merupakan istilah adat yang mencerminkan semangat perdamaian, yang biasanya digunakan dalam permainan anak-anak untuk memulihkan persahabatan setelah pertengkaran. Gerakan ini digunakan untuk menghentikan “perang” suku dan agama di Pulau Maluku.

Gerakan Institut Titian Perdamaian diprakarsai oleh unsur-unsur masyarakat sipil (para sarjana, aktifis LSM, pengacara, wartawan, pemimpin agama dan informal) dengan lima tahapan penanganan. *Pertama*, perwakilan dan pemimpin informal pihak-pihak yang bertikai didorong oleh pemrakarsa gerakan Institut Titian Perdamaian untuk berkumpul di luar Pulau Maluku, bertukar pengalaman, merasakan pengalaman pihak lain, dan menyelenggarakan dialog intensif untuk memahami hakikat konflik. *Kedua*, dialog dikembangkan dalam beberapa lokakarya di kalangan para wakil rakyat Maluku. *Ketiga* adalah meminta pandangan pihak-pihak yang bertikai mengenai sifat konflik, reaksi mereka, cara menghentikan konflik, harapan dan aspirasi mereka. Hasilnya disebarluaskan kepada masyarakat, dengan harapan bahwa hal itu akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hakikat konflik, seraya mengubah etos konflik menjadi etos perdamaian. Langkah selanjutnya mencakup penciptaan zona-netral dimana kedua komunitas itu aman dalam menjalankan kegiatan antar-kelompok mereka. Tahapan terakhir adalah pernyataan umum Institut Titian Perdamaian, di mana diskursus terbuka digalakkan. Dalam jangka panjang, kebenaran dalam arti penegakkan hukum dilaksanakan setelah masyarakat pulih dan rukun.

Keberhasilan gerakan Institut Titian Perdamaian menyiratkan manfaat pendekatan *bottom-up* dan peran masyarakat sipil dalam memperkuat dan memberdayakan para pejuang untuk mengembangkan proses rekonsiliasi mereka sendiri.

Jl. Mendut no. 3

Jakarta Pusat

Indonesia

Tlp: [062 021] 153 865

bagjanet@indo.net.id atau titian-damai@plasa.com

Kontak: Ichsan Malik

Pusat Media Poso

Pusat Media/Informasi Poso (PMC) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh para aktifis LSM, wartawan, akademisi, praktisi hukum dan pemimpin agama sebagai sebuah mekanisme untuk membantu pembicaraan di kalangan semua kelompok yang berkepentingan, khususnya yang berada di Poso. PMC bertujuan untuk menjadi pusat informasi yang memberikan informasi tentang analisis dan kajian konflik/perdamaian kepada setiap pihak yang berkepentingan. PMC berupaya mengklarifikasi informasi yang menyesatkan dari media massa. Program yang tengah dijalankan adalah memantau media (media televisi), menciptakan media alternatif (jurnalisme damai), dan melaksanakan bantuan hukum dan hak asasi manusia.

Jl. KS. Tubun No. 28
Pulu, Sulawesi Tengah 94112
Indonesia
Tlp: [062 451] 422 229
pmc@telkom.net
Kontak: Amran Amier
Jumlah Staf: 12 orang, 5 orang relawan

Yayasan Sahara

Yayasan Sahara didirikan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Ia memusatkan perhatian kepada partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan, melaksanakan, dan memantau pembangunan, dan kebebasan menjangkau seluruh bidang swadaya.

Misinya adalah mengembangkan kemampuan kelompok-kelompok masyarakat untuk menentukan hak-hak mereka dan keadilan dalam semua pembuatan keputusan dan swadaya aktif untuk memperkuat masyarakat sipil. Kegiatannya antara lain adalah penelitian, penyelidikan, kampanye, lobi, pengundangan hukum, pendidikan, dan lokakarya, memperkuat hak-hak masyarakat adat dan mengembangkan jaringan yang kuat.

Jl. Kol. H. Habib Muhammad Syarief No. 1
Kelurahan Simpang Empat
Lhokseumawe
Aceh Utara, NAD 24314
Indonesia
Tlp/fax: [062 064] 546 484
sahara@lhokseumawe.wasantara.net.id
Kontak: Saifuddin Irhas, Sekretaris Eksekutif
Jumlah Staf: 12 orang, 30 orang relawan

Search for Common Ground Indonesia

Search for Common Ground Indonesia berawal pada bulan Agustus 2001. Tujuan program ini adalah menciptakan kehidupan bersama yang damai dan adil dengan mengubah cara penanganan konflik, menggunakan metode yang menciptakan solidaritas, kebersamaan dan pluralisme. Proyek-proyek Common Ground Indonesia berencana untuk memusatkan perhatian kepada kerjasama dengan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat di kawasan yang dilanda konflik di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Madura dan Papua. Program tersebut memungkinkan kelompok-kelompok ini untuk mengembangkan keahlian yang dibutuhkan dalam mencegah dan menanggulangi konflik melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan. Kini, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki drama radio tentang konflik dan penanggulangan konflik, bernama Pangkalan Menteng, yang mengudara bersama lebih dari 160 stasiun radio di seluruh Indonesia. Selain itu, ada program komik yang menjadi sarana pendidikan untuk menanggulangi konflik, dan penyelenggaraan sebuah festival film.

Gedung Griya Upakara Lt. III

Jl. Cikini IV, No. 10 unit 10 Jakarta 10330 Indonesia

Tlp: [062 021] 392 3738

Fax: [062 021] 392 5216

commonground@indocg.org

www.sfcg.org

Kontak: Vanessa Johanson, Direktur Daerah

Jumlah Staf: 21 orang

Anggaran: >1,000,000 dolar AS

Penerbitan: *Women Transforming Conflict: Assessment Report*, Januari 2003

Forum Dialog Antar Kita Sulawesi Selatan (FORLOG)

Didorong oleh keprihatinan terhadap semakin meningkatnya konflik dewasa ini di wilayah-wilayah di Indonesia, para aktifis dari berbagai latar belakang sepakat membentuk Forum Dialog Antar Kita Sulawesi Selatan pada 1999 dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Dian Interfidei. Ia beranggotakan sekitar 50 tokoh dan menegaskan komitmennya dalam mengembangkan pluralisme dan toleransi untuk mencegah konflik dengan melaksanakan banyak kegiatan dan secara aktif terlibat dalam proses mediasi dalam konflik di Poso. Pluralisme dan toleransi dikembangkan melalui kampanye publik seperti siaran radio, penyelenggaraan seminar dan diskusi terbuka dan sebagainya. FORLOG secara aktif juga berkiprah dalam demokratisasi, terapi-trauma dan jurnalisme damai. Fokusnya adalah kelas menengah dan kelas bawah dimana “dialog intelektual” dilengkapi dengan memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman antar agama dan antar-budaya dan berbagai kegiatan perdamaian/kemanusiaan.

Jl. Bonto Ramba No. 8
Makassar 90221
Indonesia
Tlp: [062 411] 854 703
forlog@gmx.net
www.geocities.com/forlog
Kontak: Alimuddin, Koordinator Program
Jumlah Staf: 50 orang relawan
Anggaran: <10 000 dolar AS
Penerbitan: Jurnal *Lintas*

Yayasan Tengko Situru (YTS)

Yayasan Tengko Situru didirikan pada 1974 di Sulawesi Selatan. YTS aktif memberdayakan masyarakat dengan membantu kelompok-kelompok swadaya di Sulawesi Selatan. Kelompok-kelompok tersebut terdiri dari empat unit dan memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan yang meningkatkan keberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain adalah inisiatif pengembangan perdamaian seperti penguatan masyarakat sipil, masalah gender, demokratisasi, advokasi/lobi dan pendidikan kewarganegaraan.

Jl. Tengko Situru No. 5 Malangngo Rantepao
Tana Toraja
Sulawesi Selatan 91831
Indonesia
Tlp: [062 423] 23 985/21 365
Fax: [062 423] 21 885
tengkos@indosat.net.id
Kontak: May Januar, Direktur
Jumlah Staf: 32 orang, 4 orang relawan

Yayasan Tita Mae (YTM)

Yayasan Tita Mae merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan di Maluku. Ia didirikan pada 1989 melalui reformasi Yayasan Relia, yang didirikan pada 1990. Dengan demikian, YTM sudah aktif sejak tahun 1999, dan diberi nama YTM berdasarkan akta notaris pada 1999. Kegiatannya antara lain adalah projek ekonomi dan rehabilitasi psikis/mental bagi para pengungsi, advokasi terhadap hak-hak masyarakat, terapi-trauma bagi anak-anak dan pelatihan dalam manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia. YTM juga aktif dalam kegiatan rekonsiliasi dengan bekerja sama dengan LSM lainnya di Maluku.

Jl. Dr. Kayadoe Sk 26/1
Ambon, Maluku
Indonesia
Tlp/fax: [062 911] 352 443
titamae@ambon.wasantara.net.id
Kontak: John Lefmanut, Direktur
Jumlah Staf: 4 orang, 4 orang relawan

Suara Hak Asasi Manusia di Indonesia (SHMI)

Suara Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan perkembangan dari POKASTIM (Kelompok Kerja bagi Kesejahteraan dan Pendidikan Rakyat Timor Timur), yang menghentikan kegiatannya bersamaan dengan kemerdekaan Timor Timur. SHMI menangani masalah-masalah hak asasi manusia dan demokratisasi di Timor Timur dan melaksanakan investigasi atas tindak kekerasan di dalam masyarakat yang menyertai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ia juga mengadakan dialog dan memberikan pendidikan bagi para korban Orde Baru dan mendorong terciptanya dialog antara organisasi masyarakat/kemanusiaan dan pemerintah dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, tindak kekerasan dan sebagainya. SHMI aktif dalam memberikan bantuan hukum, penerbitan dan penyelenggaraan seminar dan lokakarya tentang hak asasi manusia. Ia juga aktif dalam bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain di Indonesia dan dunia internasional.

Jl. Kayu Manis Barat No. 7

DKI Jakarta 13130

Indonesia

Tlp/fax: [062 021] 858 0405

shmi@cbn.net.id

Kontak: Ade Rostina Sitompul, Koordinator Program

Jumlah Staf: 7 orang, 50 orang relawan

Aktivitas Perempuan untuk Pembangunan Desa (Yayasan Bunga Aceh)

Yayasan Bunga Aceh, yang didirikan pada 1989 di Aceh, adalah LSM yang terkenal secara nasional dan internasional yang berjuang demi hak-hak kaum perempuan yang terpinggirkan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hak-hak kaum perempuan dan keadilan gender. Visi tersebut muncul dari pengalaman perempuan Aceh yang tertindas dan terpinggirkan dalam situasi konflik maupun di kalangan masyarakat. Meskipun Yayasan Bunga tidak memiliki departemen khusus yang menangani konflik, mereka menjalin hubungan erat dengan para korban konflik. Sejak 15 tahun silam, Yayasan Bunga secara aktif mengembangkan hak-hak asasi manusia dan secara khusus melaksanakan program pemberdayaan kaum perempuan melalui pelatihan, penelitian, bantuan kemanusiaan, dan penerbitan. Dalam menyikapi situasi dewasa ini, Yayasan Bunga melaksanakan kerjasama dengan LSM lokal dan internasional untuk menyelenggarakan pelatihan penanggulangan konflik bagi kaum perempuan dan kampanye terbuka bagi kesadaran masyarakat.

Jl. T. Mohd Taeb Peurelak/Gabus No. 15 Lampriet, Banda Aceh
Nanggroe Aceh Darussalam 23126 Indonesia
Tlp: [062 651] 32 229 Fax: [062 651] 26 848
flower@aceh.wasantara.net.id
Kontak: Elvida, Kordinator Kampanye Publik dan Penelitian
Jumlah Staf: 11 orang
Anggaran: 25 000-100 000 dolar AS

Lembaga Perempuan Kajian dan Advokasi (eLPeKA)

Lembaga Perempuan Kajian dan Advokasi merupakan sebuah LSM perempuan, yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial-politik di hadapan hukum. eLPeKA peduli terhadap para pekerja seks komersial (kaum perempuan) dan keadaan kaum perempuan dalam masyarakat multi-etnik di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat dilanda konflik etnik antara masyarakat Dayak dan masyarakat Madura. eLPeka berkampanye menentang perdagangan gelap kaum perempuan di Kotamadya Sambas, Pontianak dan Sanggau, menyelenggarakan pelatihan tentang hak asasi manusia bagi LSM dan mengadakan dialog terbuka tentang hak-hak kaum perempuan, serta bantuan hukum terhadap kasus-kasus terkait.

Jl. A. Yani Parit H. Husin
Komplek Alex Griya 1A Blok D No. 15
Pontianak Selatan
Kalimantan Barat 78124
Indonesia
Tlp: [062 561] 712 146
Fax: [062 561] 886 373
elpeka-ptk@yahoo.com atau asmaniar@yahoo.com
Kontak: Asmaniar, Direktur Eksekutif
Jumlah Staf: 5 orang

Yayasan Madanika

Yayasan Madanika merupakan sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada 1998 dengan misi memberdayakan masyarakat sipil di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Demi mencapai tujuannya, Madanika melaksanakan programnya terutama dalam pengembangan demokrasi, pendidikan, media, dan mediasi. Dengan bekerja sama dengan CESDA USAID, Madanika menyelenggarakan lokakarya dan dialog untuk meredakan konflik dengan sasaran para guru dan murid sekolah lanjutan tingkat atas. Strateginya adalah pendekatan terhadap pencegahan konflik melalui pendidikan kewarganegaraan. Ia membangkitkan kesadaran sosial atas nilai-nilai masyarakat melalui kajian kritis dan proses pengembangan media, mendorong pembentukan kelas menengah sebagai sokoguru pembangunan masyarakat, selain juga mengembangkan iklim dialog dengan mendukung upaya-upaya rekonsiliasi dengan pendekatan sosial.

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
Komplek Sepakat Damai Blok I No. 6
Pontianak 78116
Kalimantan Barat
Indonesia
Tlp/fax: [062 561] 573 276
madanika@pontianak.wasantara.net.id
Kontak: Pahrian Ganawira Siregar, Direktur Eksekutif
Jumlah Staf: 11 orang, di antaranya 2 yang aktif dalam upaya
mencegah konflik
Anggaran: <25 000 dolar AS

Yayasan Pelita Kasih Abadi (PEKA)

PEKA merupakan LSM lokal yang berjuang demi memberdayakan masyarakat sipil dalam mendapatkan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan sosial dan kesehatan. Didirikan pada 1996, PEKA telah melaksanakan program Advokasi untuk Perdamaian yang bertujuan meningkatkan pengembangan perdamaian di Sulawesi Utara dan mencegah konflik melalui pemerintahan yang baik dan meningkatkan teknik pengendalian konflik secara damai. Program tersebut juga mencakup pemberian bantuan kepada anak-anak para pengungsi dari Maluku di Bitung dan Manado. Agenda utama mereka adalah pelatihan perdamaian (jurnalisme) dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan kelas bawah, para pengungsi dan pejabat pemerintah. Secara internasional, mereka bekerja sama dengan OTI/USAID, CRS, CSSP/USAID yang seluruhnya berkantor pusat di Jakarta, dan dengan British Council.

Jl. Mogandi No. 36 Malalayang Satu Manado Sulawesi Utara
Indonesia Tlp: [062 431] 828 046 Fax: [062 431] 882 8045
ypekamdo@indosat.net.id

Kontak: Th. Yuswandani Adiloekito SH, Direktur dan Pemimpin
Staf Advokasi Program Perdamaian
Jumlah Staf: 14 orang, 6 orang staf menangani upaya pencegahan
konflik

Anggaran: 25.000-100.000 dolar AS
Penerbitan: Newsletter DODOKU

Timor Timur

La'ó Hamutuk

Institutu Timor Lorosa'e ba Analiza no Monitor Rekonstrusaun

La'ó Hamutuk (Lembaga Timor Timur untuk Pemantauan dan Analisis Rekonstruksi) adalah sebuah organisasi rakyat Timor Timur dengan beberapa staf Internasional, yang didirikan pada pada tahun 2000. Lembaga itu berusaha memantau dan melaporkan berbagai kegiatan lembaga-lembaga internasional yang ada di Timor Loro Sae dalam kaitannya dengan rekonstruksi fisik dan sosial negeri itu. Lembaga tersebut bekerja berdasarkan asumsi bahwa rakyat Timor Timur harus benar-benar dibantu dalam proses rekonstruksi dan bahwa proses tersebut haruslah merupakan proses yang sedemokratis dan setransparan mungkin. Selain memberikan informasi tentang, dan analisis terhadap proses rekonstruksi dan pembangunan, La'ó Hamutuk aktif meningkatkan komunikasi antara lembaga-lembaga dan organisasi internasional dengan berbagai sektor masyarakat Timor Timur. Akhirnya, La'ó Hamutuk menjadi sebuah pusat sumber daya, yang memberikan literatur mengenai berbagai pola pembangunan, pengalaman dan praktik, maupun memperlancar hubungan antar berbagai kelompok di Timor Timur, para ahli dan praktisi yang terlibat dalam urusan pembangunan di berbagai belahan dunia.

Institutu Timor Lorosa'e ba Analiza no Monitor Rekonstrusaun
PO Box 340, Dili
Timor Timur
Telp: +670 (390) 325 013
E-mail: laohamutuk@easttimor.minihub.org
www.etan.org/lh
Jumlah staf: 9 orang
Anggaran: 100.000–500.000 dolar As.

Publikasi: *The La'o Hamutuk Bulletin* (sebuah penerbitan berkala dengan artikel analitik dan editorial yang sangat tajam), *LH Annual Report Calendar Year 2002*; *LH Mid-Year Report January-June 2002*; *Annual Report April 2000–December 2001*; *Disorder in East Timor: The International Community Must Accept Responsibility*, 2002.

NGO Forum Nasional Timor Lorosae

NGO Forum Nasional Timor Lorosae bertujuan mendorong terciptanya sebuah pembangunan yang pluralistik, demokratis adil dan langgeng di Timor Timur, yang didasarkan atas prinsip-prinsip lingkungan hidup. Ini harus dicapai melalui pemerintahan masyarakat sipil yang kuat, independen dan bertanggung jawab yang bertekad untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang masyarakat, dan wahana utuh hak asasi manusia yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Timor Timur, khususnya yang tertindas. Ini juga mencakup pembebasan dari segala dominasi seraya mendorong pembangunan di Timor Timur. Untuk mewujudkan visi Forum LSM, ia harus meningkatkan kultur belajar, bekerja sama dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat; menghargai hak-hak asasi manusia dan sikap baik di kalangan LSM Timor Timur, antara LSM lokal dan aktor-aktor pembangunan lainnya, baik dari dalam negeri maupun internasional, dan menjadi suara kolektif, independen, non-partisan bagi hak-hak dan kebutuhan masyarakat.

NGO Forum Nasional Timor Lorosae

Kaikoli St. Dili

Timor Timur, 322773

Tel: +670 (390) 7359 7728

E-mail: etngocentre@hotmail.com

www.geocities.com/etngoforum/

Kontak: Cecilio Caminha Freitas, Direktur Eksekutif

Jumlah staf: 23 orang

Forum Komunikasi Kaum Perempuan Timor Timur (Fokupers)

Forum Komunikasi Kaum Perempuan Timor Timur (Fokupers) didirikan pada tahun 1997. Ia memusatkan perhatian terhadap para korban politik, memberikan nasehat dan berbagai bentuk bantuan lainnya bagi kaum perempuan korban kekerasan, termasuk para eks tapol, janda-janda korban perang dan para istri tapol. Mandatnya juga mencakup peningkatan hak-hak asasi manusia di kalangan penduduk lokal, khususnya kaum perempuan Timor Timur. Keegiatannya berkisar pada: menyelenggarakan seminar yang membahas cara meningkatkan atau mengembangkan partisipasi kaum perempuan dalam masyarakat Timor; memusatkan perhatian terhadap pelatihan bimbingan trauma bagi para staf agar dapat memberikan bimbingan kepada kaum perempuan yang menjadi korban; mendukung kaum perempuan dalam menghadapi kekerasan dan mengakhiri kekerasan terhadap kaum perempuan melalui bantuan hukum dan pendidikan; kelompok-kelompok lokal berbasis massa di berbagai belahan negeri.

Rua Governador Celestino da Silva

Farol, Dili, Timor Lorosa'e

Timor Timur

Tel: +670 (390) 321 534

E-mail: fokupers@fokupers.minihub.org

Kontak: Manuela Leong Pereira, Direktur dan Maria Domingas
Alves

Jumlah staf: 5 orang dan banyak relawan

Yayasan HAK

Yayasan HAK (Yayasan bagi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keadilan) didirikan pada tahun 1997. Ia didirikan oleh sejumlah intelektual Timor Timur dan aktivis LSM karena perhatian mereka terhadap hak-hak asasi manusia. Sebelum mencapai keadaannya seperti sekarang ini, Yayasan HAK pada mulanya merupakan sebuah lembaga bantuan hukum. Terletak di Balide, yayasan tersebut memberikan bantuan hukum bagi para tapol dan kaum aktivis sejak awal 1996. Yayasan HAK bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang kritis, independen dan terbuka bagi rakyat Timor Timur—yang kesemuanya didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi. Untuk mencapai keadilan sosial, Yayasan HAK memberikan advokasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia melalui pemberdayaan rakyat yang mencakup alih pengetahuan, peningkatan kualitas dan pengendalian sosial. Bahkan sejak berdirinya, Yayasan HAK telah menangani beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, yang mencakup hak-hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Kasus ini didukung melalui jalur hukum maupun kekeluargaan (mediasi, kampanye dan lobi).

Jl. Gov. Serpa Rosa T-091

PO Box 274

Farol, Dili

Timor Lorosae

Telp: +670 (390) 313 324

E-mail: direito@yayasanhak.minihub.org

&

yayasanhak@minihub.org

www.yayasanhak.minihub.org/

Kontak: Jose Luis de Oliveira, Manajer Program

Jumlah staf: 12 orang

International Federation for East Timor (IFET)

International Federation for East Timor [IFET] didirikan pada tahun 1991, merupakan sebuah federasi LSM, dengan perhatian terhadap proses dekolonisasi Timor Timur maupun berbagai aspek kehidupan rakyat di dan dari kawasan itu, sebab mereka juga menderita karena proses dekolonisasi itu. IFET juga berkeinginan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia benar-benar dilindungi di Timor Timur sesuai dengan standar internasional. Tujuan IFET adalah: menghimpun bantuan dari masyarakat internasional untuk diberikan kepada rakyat Timor Timur dengan tetap melindungi hak-hak mereka dalam penentuan nasib sendiri dalam politik, ekonomi dan sosial; berusaha menjamin hak-hak asasi manusia dan keadilan yang diakui secara internasional bagi semua pihak yang terlibat di dalam perkembangan Timor Timur menuju kemerdekaan penuh; membantu PBB dalam melapangkan jalan Timor Timur untuk mencapai semua tujuan ini dengan memberikan informasi kepada para pejabat dan badan-badan PBB, memobilisasi pendapat masyarakat internasional, dan bekerja sama dengan para pejabat dan negara-negara anggota PBB. IFET juga memperlancar arus informasi dan kampanye internasional terpadu di kalangan LSM dan lembaga-lembaga internasional.

PO Box 88

Dili, Timor Timur

Telp: +670 (390) 723 4335

Fax : +670 (390) 723 7294

E-mail: ifet@etan.org

www.etan.org/ifet

Telp: +1 (718) 596 7668

Fax : +1 (718) 222 4097

john@etan.org

Kontak: Charles Scheiner, Sekretaris atau John M. Miller,
Perwakilan PBB

Jumlah staf: IFET adalah sebuah jaringan yang tidak memiliki kantor atau staf. Semua pekerjaan dilaksanakan oleh para relawan dari organisasi-organisasi anggota federasi tersebut.

Anggaran: <25 000 dolar AS

Publikasi: surat-surat terbuka kepada PBB dan para pejabat lainnya, yang diterbitkan bagi informasi media dan umum.

Judicial System Monitoring Program (JSMP)

JSMP merupakan proyek hak asasi manusia yang didirikan oleh Asosiasi Hakim Timor dan organisasi Timor/Internasional La'õ Hamutuk. JSMP bertujuan untuk membantu Pemerintahan Peralihan PBB di Timor Timur, masyarakat Timor Timur dan masyarakat internasional dengan memberikan rekomendasi tentang reformasi sistem peradilan Timor Timur yang tengah berlangsung. Tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan kualitas keadilan yang diberikan oleh sistem peradilan yang baru terbentuk itu, dan mengembangkan hak asasi manusia dan kaidah hukum kepada rakyat Timor Timur dengan sejelas-jelasnya melalui: pengiriman pengamat resmi untuk memantau pengadilan kejahatan serius; memberikan analisis hukum dan laporan tematik; dan menyebarkan informasi mengenai perkembangan sistem peradilan secara menyeluruh. Kegiatan program pengamatan jalannya pengadilan memusatkan perhatian terhadap kasus-kasus kekerasan pada tahun 1999, yang meliputi kejahatan terhadap hak asasi manusia, pembunuhan massal dan penyiksaan.

Sahe Institut Building

PO BOX 275

Rua da Mozambique I/1-A Palapaso

Dili, Timor Timur

Telp: +670 (390) 325 013

E-mail: jsmp@jsmp.minihub.org

www.jsmp.minihub.org

Kontak: Christian Ranheim, christian@jsmp.minihub.org.

Publikasi: Layanan Berita Berkala JSMP: [list-subscribe@
jsmp.minihub.org](mailto:list-subscribe@jsmp.minihub.org)

Kadalak Sulimutuk Institute (KSI)

KSI adalah sebuah organisasi non-pemerintah Timor Timur yang didirikan oleh peraih Nobel Perdamaian Laureate Uskup Belo untuk menjadi Pusat Perdamaian dan Pembangunan di Timor Timur atau Timur Lorosae yang baru merdeka tersebut. Lembaga itu aktif bergerak dalam bidang pendidikan dan penanggulangan konflik para pengungsi Timor Barat. KSI menyelenggarakan penelitian di bidang hubungan etnik, penampungan kembali para pengungsi, pertikaian lahan dan hak milik dan dampak kebijakan umum. KSI juga menyelenggarakan pelatihan, dan lokakarya untuk mendukung perdamaian dan pembangunan di Timor Timur.

Jl. Bebonok Dili Cornoro
PO BOX 420
Dili, Timor Timur
Telp: +670 (390) 325 188
Kontak: Antero Bendito da Silva

Sahe Institute for Liberation (SIL)

Sahe Institute for Liberation (SIL) bertujuan untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat Timor Timur dalam proses membangun sebuah negara-bangsa melalui penyebaran informasi dan mengadakan diskusi atau seminar. SIL merupakan perkembangan dari sebuah kelompok studi yang bernama Sahe Study Club (SSC) yang dibentuk oleh aktivis mahasiswa Timor Timur dan aktivis pro-demokrasi pada 1998 di Jakarta, Indonesia. SSC menyelenggarakan seminar mingguan sejak pembentukannya, pertama di Jakarta lalu di Dili, hingga terpaksa meninggalkan Jakarta pada awal September. Setelah referendum, SSC melakukan reformasi dan menjadi sebuah lembaga yang dikenal sebagai Sahe Institute for Liberation (SIL). Sejak saat itu, mereka telah menerbitkan selebaran yang mengkritik Bank Dunia dan telah melaksanakan proyek kepemudaan terpadu dalam pendidikan masyarakat.

Sahe Institute for Liberation

C/o Yayasan Hak, Dili

Timor Timur

E-mail: Sahe_Lib@yahoo.com

Kontak: Aderito de Jesus Soares, Koordinator

Publikasi: SSC telah menerbitkan banyak buku tentang Amilcar Cabral, Samora Machel, partai politik Timor Timur Fretilin, dan pujangga Timor Timur Fransisco Borja da Costa. Sebelum referendum, SSC menerbitkan sebuah kajian kritis tentang tawaran otonomi Indonesia dan menyebarkannya sebagai pamflet di seluruh Timor Timur. Surat kabar pro-Indonesia, *Suara Timor Timur*, menghabiskan 22 halaman editorialnya untuk menolak pamflet tersebut.

Timor Institute for Development Studies

Timor Institute for Development Studies, yang sebelumnya bernama East Timor Study Group, adalah sebuah think tank independen dan non-partisan menyangkut berbagai isu kebijakan umum. Tujuannya adalah memberikan riset kebijakan umum bermutu tinggi menyangkut Timor Timur dan hubungannya dengan negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, pada bulan Januari 2002, mereka merekonstruksi ESTG hanya menjadi tiga pusat (bdk. empat sebelumnya). Yaitu: Center for Democracy and Social Studies (CDSS) yang memusatkan perhatian terhadap pemerintahan yang baik; Center for Economic Studies (CES) yang memusatkan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan; Center for Applied Science and Technology Studies (CASTS) yang memusatkan perhatian terhadap teknologi, energi, dan lingkungan. Semua pusat tersebut didukung oleh Unit Administrasi dan Keuangan, Unit Perpustakaan dan Pusat Konferensi.

Rua Maucocomate, atau Lorosae

Telp: +670 (300) 323 889

Fax : +670 (300) 323 889

E-mail: etsg97@yahoo.com.au

<http://rspas.anu.edu.au/etsg>

Kontak: João M. Saldanha, Direktur Eksekutif

Jumlah staf: 10 orang

Filipina

Alliance for the Advancement of People's Rights (KARAPATAN)

Alliance for the Advancement of People's Rights (KARAPATAN) adalah organisasi payung yang didirikan pada tahun 1995 oleh perorangan, kelompok dan organisasi yang berusaha bagi kemajuan dan perlindungan hak-hak azasi manusia di Filipina. Para pendiri dan anggotanya telah berada di barisan depan dalam perjuangan hak-hak azasi manusia di Filipina semenjak zaman keadaan perang pemerintahan rezim Marcos.

Pada saat ini KARAPATAN sibuk dengan kegiatan-kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka melalui modul-modul pendidikan dan seminar-seminar; kegiatan-kegiatan kampanye dan advokasi untuk membina opini publik yang kuat dan untuk menumbuhkan dukungan terhadap masalah-masalah dan perhatian terhadap hak-hak azasi manusia; serta pelayanan bagi kesejahteraan dan kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut hukum dari para tahanan politik, korban penyiksaan, para anggota keluarga dari korban terbunuh dan hilang, para pengungsi dan lain-lainnya. Organisasi ini juga mengumpulkan informasi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM tertentu dan tentang situasi HAM umum di negeri tersebut dalam program yang disebut Program Dokumentasi dan Penelitian. Hasil kajiannya kadang-kadang dikirim sebagai sinyal agar diambil tindakan segera. KARAPATAN bekerja sama dengan organisasi-organisasi HAM internasional seperti Amnesty International (AI), International Committee Against Disappearances (Komite Internasional terhadap Orang-Orang Hilang), Human Rights Watch, dan Organisation Mondiale Contre La Torture/ World Organization Against Torture (Organisai Dunia Melawan Penyiksaan) (OMCT).

#43 Masikap St.,
Central District,
Quezon City 1101
Philippines

Tel: +63 2 435 4146

Fax: +63 2 928 6078

Krptn@philonline.com dan karapatan@edsamail.com.ph

www.karapatan.org

Jumlah staff: 7 orang

Asia-Pacific Peace Research Association (APPRA)

The Asia-Pacific Peace Research Association (APPRA) adalah sebuah LSM internasional dari para peneliti perdamaian, para pendukung perdamaian dan pendidik perdamaian. Asosiasi ini berfungsi sebagai cabang regional bebas dari International Peace Research Association (IPRA). Tujuannya adalah meningkatkan penelitian interdisipliner tentang perdamaian dan konflik melalui kerja sama internasional. APPRA menyelenggarakan konferensi regional, mendukung penerbitan majalah ilmiah dan membantu kegiatan-kegiatan lain dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga dan asosiasi riset perdamaian di seluruh daerah ini.

41 Raja Matanda

Project 4, Quezon City

Philippines 1109

Tel: +63 2 913 9255/439 9119

Fax: +63 2 913 6435/913 9255

perpinan@csi.com.ph

www.geocities.com/asiapacificpeace

Kontak: Mary-Soledad Perpiñan, Secretary General

Publikasi: *APPRA Waves*, newsletter

Bishops-Ulama Forum

Bishops-Ulama Forum adalah forum dialog antara uskup Katolik, tokoh Muslim dan Pemimpin Protestan di Mindanao. Forum ini bersidang empat kali setahun untuk membicarakan hal-hal yang menjadi perhatian bersama demi meningkatkan budaya perdamaian. Di samping itu, Forum ini juga memprakarsai pendirian forum-forum regional untuk menangani masalah-masalah perdamaian dan solidaritas lokal bersama-sama dengan pemimpin agama dari penduduk asli. Melalui usaha-usaha seperti itu, Bishops-Ulama Forum berusaha memperkokoh dasar-dasar spiritual dan kultural untuk perdamaian, serta memberikan tambahan penting pada usaha-usaha mencipta perdamaian secara politis dan sosial ekonomi di Mindanao.

D5 Kimberley Building
Bonifacio Avenue
9200 Iligan City
Philippines
Tel: +62 492 0096
Fax: +63 223 8120
kalinaw@mindanao.com
www.mindanao.com/kalinaw/buf/buf.htm

National Secretariat of Social Action, Justice and Peace (NASSA)

The National Secretariat of Social Action, Justice and Peace adalah Komite Keuskupan dari Kongres Uskup Katolik Filipina dan berfungsi sebagai wakil negara dari Caritas International. Organisasi ini berjuang ke arah terbentuknya masyarakat yang adil dan setara, serta bertujuan untuk memperkuat suara orang miskin dalam proses-proses pembangunan. Untuk tujuan ini, NASSA mendukung dan meningkatkan pendidikan politik, pelestarian lingkungan hidup, hak-hak azasi manusia dan perlindungan anak.

National Secretariat for Social Action

CBCP Building

470 General Luna Street

Intramuros

1002 Manila

Philippines

Tel: +63 (2) 527 4163/527 4148

Fax: +63 (2) 527 4144

staff@massa.org.ph

www.nassa.org.ph

Kontak: Most Rev. Dinualdo Gutierrez (Bishop of Marbel), Ketua

Publikasi: *NASSA News*, bi-monthly newsletter; *Managing Advocacy through Social Transformation*, 2003

Center for Peace Education

Center for Peace Education didirikan pada tahun 1997 dalam rangka melembagakan dan memperkuat pendidikan perdamaian di Miriam College. Untuk maksud tersebut, organisasi ini melatih para dosennya dalam pendidikan perdamaian, mengembangkan kurikulumnya dan mengorganisir sesi-sesi pendidikan tentang penyelesaian konflik bagi para mahasiswa dan dosen. Center for Peace Education ini juga menyelenggarakan lokakarya tentang pendidikan perdamaian, penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan mediasi bagi para guru, para pekerja pembangunan masyarakat dan para pemimpin rakyat. Center for Peace Education juga ikut dalam advokasi, dan telah pula mengadakan sidang Peace Education Network (Jaringan Pendidikan Perdamaian) yang menyatukan sekolah-sekolah dan organisasi-organisasi yang sedang giat melaksanakan pendidikan perdamaian yang berbasis sekolah dan masyarakat. Pusat Pendidikan ini juga mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok dan pusat-pusat organisasi di dalam negeri yang berorientasi perdamaian dan berhubungan juga dengan The Hague Appeal for Peace, Global Campaign for Peace Education dan Peace Education Centers Network yang dikoordinir oleh Peace Education Center of Teachers College, Columbia University.

Miriam College
U.P.P.O. Box 110
Diliman, Quezon City
Philippines
Tel: +63 (2) 435 9231/580 5400
Fax: +63 (2) 924 9769
lcastro@mc.edu.ph
www.mc.edu.ph/center_for_peace.htm
Kontak: Loreta N. Castro, Direktur
Jumlah staf: 3 orang

Community Organizers Multiversity

Community Organizers Multiversity, atau CO Multiversity, adalah lembaga pengembangan kapabilitas yang mempunyai pandangan yang lebih luas tentang proses pemberdayaan. Organisasi ini bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan yang sulit yang dihadapi oleh masyarakat kelas bawah dalam menangani pengaruh kemiskinan yang disebabkan oleh proses globalisasi. Proses pembelajaran dari modul-modul pelatihan berdasarkan pada pelajaran-pelajaran masa lalu dan dituntun oleh masalah-masalah baru masa kini yang dihadapi oleh banyak organisasi massa dan LSM terutama dalam masalah taktik dan strategi pemberdayaan, penggunaan kekuasaan, pemberdayaan proses penanganan penyelesaian perselisihan dan masalah perdamaian dan pembangunan di Mindanao. CO Multiversity menyelenggarakan pelatihan dan riset yang penting artinya bagi organisasi massa. Bersama-sama dengan Asia Foundation, CO Multiversity juga memberikan pelatihan bagi penyelesaian perselisihan agraria kepada komunitas Barangsay Agrarian Reform Councils.

23-B Matulungin Street Brgy. Central 1100 Quezon City
P.O. Box 2631 QCCPO 1166 Quezon City Philippines
Tel: +63 (2) 922 2026 Fax: +63 (2) 922 2026
sanayan@comultiversity.org.ph
www.comultiversity.org.ph
Kontak: Ma. Fides Bagasao, Direktur eksekutif
Jumlah staf: 24 orang

Publikasi: *Promotion of a Common Rural Community Organizing Standard in the Philippines*, 1998; *Rural Community Organizing in the Philippines*, 1996.

Consortium of Bangsamoro NGOs and POs in Mindanao

Konsorsium ini adalah suatu jaringan 31 LSM dan ormas yang meliputi tigabelas propinsi di seluruh Mindanao. Konsorsium ini bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Bangsamoro, dan untuk menegakkan hak-hak mereka untuk hidup dalam masyarakat yang adil, progresif dan damai. Tujuan ini diupayakan melalui (1) riset kebijakan dan advokasi tentang masalah-masalah dan perhatian yang selalu mempengaruhi rakyat Bangsamoro; (2) membangun dan menjaga jaringan kontak yang luas dengan organisasi-organisasi internasional, kelompok-kelompok pendukung, organisasi-organisasi yang paralel, dan individu-individu yang peduli yang bersimpati dengan tujuan Bangsamoro; (3) kampanye-kampanye untuk membantu rakyat Bangsamoro memperdalam pemahaman mereka terhadap situasi sosial, kultural, ekonomi dan politik mereka; (4) membina kemampuan tenaga ahli yang diperlukan dan meningkatkan profesionalisme dari organisasi-organisasi anggotanya dalam melaksanakan program masing-masing sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat (termasuk bantuan teknis dan penggalan sumber-sumber).

2-3/F Demonteverde Building

Dona Pilar St.

Purok Maharlika, Poblacion IV

Cotabato City, Mindanao

Philippines

Tel: +63 (64) 421 4222

Fax: +63 (64) 421 2072

guimel@microweb.cpm.ph atau kadtun@hotmail.com

Kontak: Guiamel Alim

Ecumenical Movement for Justice and Peace (EMJP)

Ecumenical Movement for Justice and Peace (EMJP) dibentuk pada tanggal 28 Juli 1979 oleh anggota dari berbagai golongan dan jemaah agama yang memilih untuk hidup di luar misi mereka dengan cara mengambil sikap terhadap sektor-sektor yang dipinggirkan dan dieksploitir dalam masyarakat Filipina. Di antara penggerak utamanya adalah Association of Major Religious Superiors in the Phil (AMRSP), National Secretariat for Social Action (NASSA), dan National Council of Churches in the Philippines (NCCP). EMJP adalah salah satu pionir organisasi HAM di Filipina pada masa puncak keadaan darurat perang pada akhir tahun 1970-an. Keanggotaannya terdiri atas orang-orang gereja, para profesional, pemuda dan mahasiswa. EMJP bekerja sama dengan cabang-cabangnya di daerah-daerah di seluruh Filipina, untuk melayani para korban konflik dengan cara berkampanye, memberi pelatihan dan mendirikan komite HAM lokal.

#43 Masikap St.

Central District

Quezon City 1101

Philippines

Tel: +63 (2) 435 4146

Fax: +63 (2) 928 6078

E-mail: emjp2004@yahoo.com

Kontak: Rev. Alfredo Faurillo (Anggota Dewan)

Gaston Z. Ortigas Peace Institute – National Peace Conference (NPC)

The first National Peace Conference (NPC) pada tahun 1990 menyatukan wakil-wakil dari pelbagai sektor Filipina dengan maksud menciptakan visi dan agenda nasional bagi perdamaian. Sekarang ini, organisasi tersebut adalah dewan rakyat yang non-partisan dan multi-sektor dari berbagai sektor, termasuk petani, penduduk miskin kota, penduduk asli, wanita dan pemuda. Tujuan NPC adalah untuk mencapai Agenda Perdamaian Dasar dengan cara melobi pemerintah, dengan fokus pada keadilan sosial, proses perdamaian, hak asasi manusia, pemerintahan yang bersih, kepedulian lingkungan dan transformasi sosial-budaya. NPC mendukung perundingan perdamaian antara pemerintah dan kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan mendorong partisipasi aktif penduduk dalam proses perdamaian.

Gaston Z. Ortigas Peace Institute
Social Development Complex
Ateneo de Manila University
Loyola Heights, Quezon City
Philippines

Tel: +63 (2) 426 6122/6001

Fax: +63 (2) 426 6064

peace@codewan.com.ph atau gzopi@netgazer.com.ph

www.codewan.com.ph/caucus/about/a_2000_1211_os.htm

Kontak: Karen Tañada, Direktur Eksekutif

Initiative for International Dialogue

The Initiative for International Dialogue (IID) adalah sebuah LSM yang berusaha untuk memperkokoh solidaritas Selatan-Selatan. Untuk tujuan tersebut, IID, bersama-sama dengan kelompok-kelompok nasional dan regional yang lain, melakukan kampanye dan lobi mengenai berbagai isu di Burma, Timor Timur dan Mindanao. Sebagai contoh, IID memberikan advokasi terhadap keterlibatan konstituen rakyat dalam proses perdamaian di Mindanao, pembicaraan tripartit di Burma serta sanksi-sanksi internasional terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Di samping kegiatan lobi dan advokasi, IID juga terlibat dalam pengembangan kurikulum, pelatihan dan pengorganisasian diskusi dan forum solidaritas. IID juga berfungsi sebagai sekretariat dari Mindanao Peoples Caucus (MPC).

27-G Galaxy Street

GSIS Heights, Matina Davao City Philippines

Tel: +63 (82) 299 2574/5 Fax: +63 (82) 299 2052

iid@skyinet.net

www.iidnet.org

Manila Liaison Office:

Door 15 Casal Building, 15 Anonas Road, Project 3

Quezon City, Philippines Tel: +63 (2) 911 0205

Fax: +63 (2) 435 2900 E-mail: iidmnl@skyinet.net

Kontak: Augusto Miclat Jr., Direktur Eksekutif

Jumlah staf: 21 orang

Publikasi: *Peaceweaving: Cotabato local peace dialogues, 2002; Peacebuilder Kit for Mindanao, 2002*

Institute for Popular Democracy (IPD)

The Institute for Popular Democracy (IPD), didirikan pada tahun 1986, adalah suatu lembaga riset dan advokasi untuk membantu kelompok-kelompok pergerakan sosial, LSM yang bergerak di bidang pembangunan, dan pejabat-pejabat pemerintah setempat yang progresif. Inti dari identitas IPD adalah komitmennya pada kegiatan demokratisasi dan pembangunan sosial. IPD memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah lokal dan nasional yang mempengaruhi daerah-daerah terbelakang secara ekonomis dan daerah-daerah yang menderita berbagai macam otoritarianisme lokal. IPD menempatkan dirinya pada celah-celah masyarakat sipil, ekonomi, dan negara. Kepedulian IPD yang utama adalah masyarakat kelas bawah - LSM dan formasi politik progresif. IPD juga menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih luas serta para individu yang menginginkan reformasi nasional: media, akademisi, para pembuat kebijakan yang reformis di lingkaran pemerintahan dan dalam masyarakat bisnis. IPD menyelenggarakan pelatihan tentang “Demokratisasi Pemerintahan Lokal”, “Penyelenggaraan Kompanye Elektoral”, “Pendidikan Pemilih: Politik Baru dan Kependudukan yang Aktif”, dan tentang “Pendidikan Politik: Pengertian Dasar tentang Demokratisasi”.

45 Matimtiman Street Teachers Village Quezon City
Metro Manila Philippines Tel: +63 (2) 434 6674
Fax: +63 (2) 921-8049 ocd@ipd.org.ph www.ipd.ph
Kontak: Joel Rocamora, Direktur

Publikasi: *Political Brief*, monthly e-letter; *Work in Progress*, berkala.

Institute for Strategic and International Studies (ISIS)

Institute for Strategic and International Studies (ISIS) menyelenggarakan serangkaian dialog tentang Laut Cina Selatan semenjak tahun 1995. Serangkaian lokakarya dimaksudkan untuk menjelaskan implikasi keamanan bagi negara-negara di sekitarnya, jika terjadi konflik di Laut Cina Selatan. Lokakarya tersebut mengumpulkan wakil-wakil dari pihak pemerintah, LSM dan para akademisi dan berusaha mencapai pengertian yang lebih baik serta menciptakan respon kebijakan yang tepat terhadap isu-isu keamanan yang ada di sekitar masalah Laut Cina Selatan. Sampai saat ini, workshop-workshop tersebut telah diselenggarakan pada tahun 1995, 1997 dan 2000.

Room 311, P.S.S. Center
Commonwealth Avenue, Diliman
Quezon City 1001
Philippines

Tel: +63 (2) 929 0889

Fax: +63 (2) 922 9621

idsphil@cnl.net

Kontak: Profesor Malaya Ronas atau Ms. Rowena Layador

Anggaran: \$50.000 - \$100.000

Jumlah staf: 7 orang

Legal Rights and Natural Resources Center (LRC)

Tujuan dari Legal Rights and Natural Resources Center (LRC) adalah untuk memberdayakan rakyat kelas bawah yang tergantung pada sumber-sumber alam, sehingga sumber-sumber alam ini dapat dikelola dan dijaga dengan wajar dan secara ekologis berkelanjutan. LRC menyiapkan analisa kritis tentang kebijakan dan undang-undang yang menyangkut penduduk asli dan sumber daya alam, menyelenggarakan pelatihan paralel dengan komunitas partner serta memberkas kasus-kasus pengadilan. LRC juga melakukan lobi-lobi dengan media, dan mempunyai jaringan kerja dengan organisasi-organisasi lokal, nasional dan internasional dalam rangka mencari dukungan bagi kegiatan-kegiatannya. LRC berhubungan erat dengan masyarakat kelas bawah melalui cabang-cabangnya di daerah. LRC juga merupakan afiliasi resmi di Filipina dari Friends of the Earth International.

#7 Marunong Street
Central District Diliman
Quezon City 1100
Philippines
Tel: +63 (2) 926 4409
Fax: +63 (2) 920 7172
lrcksk@info.com.ph
www.lrcksk.org
Kontak: Ms Milagros Ballesteros

Publikasi: *Mapping the Earth, Mapping Life*, 2001

Mindanao Coalition of Development NGOs (MINCODE)

Mindanao Coalition of Development NGOs adalah suatu koalisi sembilan jaringan kerja LSM dan ormas yang berbasis di Mindanao. Jaringan kerja ini mewakili berbagai sektor: gereja, koperasi, badan-badan pembangunan sosial, organisasi-organisasi penengah dan kelompok-kelompok sektoral. MINCODE juga bertindak sebagai badan advokasi yang berusaha mengangkat kebutuhan dan aspirasi dari sektor kelas bawah demi pembangunan yang berkelanjutan, wajar dalam hal gender dan partisipatif. Dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, anggota jaringan kerja memelopori konsultasi di seluruh daerah di antara LSM pembangunan, dengan tujuan membina konsensus atas agenda pembangunan yang komprehensif dan integratif di Mindanao. Disahkan pada tahun 1996 sebagai “People’s Development Program in Mindanao” – PDPM, dokumen ini menjadi tanda yang jelas akan adanya visi pembangunan bersama untuk daerah tersebut. PDPM pada saat ini menjadi dasar bagi berbagai usaha yang dilakukan oleh MINCODE. Untuk menjamin terlaksananya program tersebut, jaringan kerja ini telah membentuk lima komisi yang difokuskan pada hal-hal berikut: (1) kepedulian, kebudayaan dan sejarah Mindanao; (2) pengelolaan dan pemanfaatan lahan; (3) pertanian dan agro-industri; (4) politik dan pemerintahan lokal; dan (5) keberlanjutan keuangan

110 Maa Road DBP Village Davao City Philippines

Fax: +63 (82) 299-0625

e-mail: secretariat@mincode.org

www.mincode.org

Kontak: Aileen A. Fermalino

Mindanao Peacebuilding Institute (MPI)

Diorganisir oleh Catholic Relief Services (CRS), Mennonite Central Committee (MCC) dan Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), Mindanao Peacebuilding Institute (MPI) mengorganisir program-program kegiatan pelatihan intensif tahunan yang mencoba menciptakan komunitas damai dan adil di daerah Asia Pasifik melalui pelatihan. Semenjak tahun 2000 sampai sekarang, lembaga ini sudah menghimpun lebih dari 450 pencinta perdamaian dan petugas lapangan dari duapuluh satu negara.

MPI, seperti yang dicita-citakan, menciptakan pengalaman yang unik dalam hal bahwa lembaga ini telah menghimpun orang dari berbagai cakupan dengan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam kegiatan yang berhubungan dengan perdamaian. Pelatihan intensif dalam hal-hal seperti pembinaan perdamaian antar agama, transformasi konflik, pembinaan perdamaian berbasis komunitas dan tema-tema lainnya, telah meningkatkan keterampilan orang banyak, dengan cara berbagi pengalaman dari para peserta maupun fasilitator. Berangkat dari hakekat belajar dan berbagi pengalaman tersebut, MPI dapat membangun komitmen orang banyak dan memperkokoh kemampuan mereka dan sekaligus juga kemampuan organisasi mereka dalam membangun dunia yang lebih damai dan lebih adil. Sebagian besar peserta menganggap bahwa persamaan yang tercipta disebabkan oleh ikatan, persaudaraan dan solidaritas yang tercipta dan tumbuh di antara pendukung perdamaian yang berasal dari berbagai negara. Memang, lembaga ini telah menjadi tempat di mana komitmen mereka terhadap tugas-tugas perdamaian makin kokoh.

Mennonite Central Committee Asia Peace Resource

Davao City Tel: +63 (82) 297 8203

E-mail: mccapr@My Real Box.com

www.mcc.org/areaserv/asia/philippines

Kontak: Jon Rudy

Mindanao Peoples Caucus (MPC)

MPC sebelumnya disebut Mindanao Tri-People's Caucus, didirikan semasa Tri-Peoples Grassroots Dialogue diselenggarakan oleh Initiative for International Dialogue (IID) pada bulan April 2001 sebagai respon terhadap kegiatan perdamaian yang diselenggarakan oleh tiga masyarakat (penduduk asli, Bangsamoro dan pendatang Kristen). MPC terdiri dari lebih dari lima puluh pemimpin akar rumput yang berasal dari daerah-daerah konflik di mana terdapat kamp-kamp dari Moro Islamic Liberation Front (MILF). Di samping itu, ada juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang secara resmi berafiliasi dengan MPC. Tugas MPC adalah memberikan kepada pemimpin komunitas, baik Moro, Pendatang atau pun pribumi, perwakilan yang lebih besar dalam proses perdamaian antara MILF dan Pemerintah Filipina, dan menjamin bahwa kepentingan-kepentingan masyarakat akar rumput diatur oleh kedua belah pihak. Sejauh ini, MPC telah berhasil menempatkan dirinya sebagai pemain kunci dalam perundingan-perundingan, dan berhasil juga diakui secara resmi sebagai pemerhati dalam perundingan perdamaian antara pemerintah dan MILF, dan ini belum pernah terjadi dalam rangkaian perundingan yang diadakan semenjak tahun 1976. Initiative for International Dialogue juga berfungsi sebagai sekretariat MPC.

27-G Galaxy Street
GSIS Heights, Matina
Davao City
Philippines
Tel: +63 (82) 299 2574/5
Fax: +63 (82) 299 2052
iid@skyinet.net
www.iidnet.org
Kontak: Augusto Miclat Jr.

National Council of Churches in the Philippines (NCCP)

National Council of Churches di Filipina, yang didirikan pada tahun 1963, adalah suatu perhimpunan persaudaraan dari sepuluh gereja Protestan dan Katolik Roma serta sembilan institusi pelayanan dengan perkiraan jumlah anggota 13 juta orang. Dewan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di antara semua orang Kristen bahwa persatuan, yang merupakan kehendak Tuhan, berarti berusaha membuat semua orang mengetahui Tuhan secara lebih bermakna dan bersaksi kepada Tuhan secara lebih efektif.

Kegiatan NCCP dalam proses perdamaian yang melibatkan Pemerintah Filipina dan National Democratic Front (Front Demokrasi Nasional) Filipina, telah dimulai pada tahun 1987. Semenjak itu, Dewan tersebut telah menegaskan dengan gamblang komitmennya pada pembinaan perdamaian sebagai bagian yang integral dari gereja. Suatu program Konsultasi Perdamaian Bersama (Joint Peace Consultation) antara NCCP dan Catholic Bishop's Conference of the Philippines diadakan pada tahun 1994 dalam rangka mencari dan menentukan usaha-usaha bersama untuk perdamaian. Dari program konsultasi tersebut muncullah suatu Komite Perdamaian Bersama NCCP-CBCP yang telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap perundingan-perundingan perdamaian. Pada tahun 1997, dipandang perlu bahwa partner gereja NCCP yang ada di luar negeri dimasukkan dalam program perdamaian secara lebih nyata dengan membentuk International Peace Advisory Committee (Komite Penasehat Perdamaian Internasional) guna memberikan nasehat pada NCCP tentang peranan yang tepat yang bisa dimainkan dalam perundingan-perundingan. Juga pada tahun 1997 dan tahun 2001, NCCP meminjamkan kantornya sebagai tempat penyimpanan dokumen pembicaraan perdamaian antara Pemerintah Filipina dan NDFP.

879 Epifanio delos Santos Avenue
West Triangle, Quezon City
1100 Philippines

Tel: +63 (2) 929 3745/925 1797

Fax: +63 (2) 926 7076

e-mail: nccp-ga@philonline.com

Kontak: Ms. Sharon Rose Joy Ruiz-Duremdes, Sekretaris Jendral

Philippines Peace Center (PPC)

Philippines Peace Center adalah sebuah LSM nirlaba yang punya komitmen bagi tercapainya perdamaian yang adil dan langgeng di Filipina. Semenjak pendiriannya pada tahun 1992, PPC telah membantu secara langsung dan aktif dalam perundingan-perundingan perdamaian antara Pemerintah Filipina dengan pihak Front Demokrasi Nasional Filipina (NDFP). PPC memberikan bantuan konsultatif dan teknis langsung pada perundingan-perundingan tersebut melalui riset, dokumentasi, dan fasilitas komunikasi bagi kedua belah pihak. PPC juga telah memberikan pelayanan khusus, memainkan peranan penting dalam pelaksanaan langkah-langkah yang bersifat kepercayaan dan jasa baik seperti pembebasan tawanan dari kedua belah pihak, serta menyelenggarakan konferensi solidaritas nasional yang mendahului pembukaan kembali perundingan-perundingan formal pada bulan April 2001. PPC adalah salah satu penyelenggara pertemuan utama dari Pilgrims for Peace, suatu persekutuan multi-sektoral yang luas dari para pendukung perdamaian, dan penyusun draft pernyataan yang menghimbau dibukanya kembali perundingan-perundingan damai, pernyataan mana telah diedarkan dan ditandatangani oleh ribuan orang termasuk wakil presiden Filipina, pemimpin mayoritas Senat, beberapa orang anggota Kongres, ratusan pemimpin gereja dan beberapa orang terkemuka lainnya.

4/f Kaija Bldg. 7836 Makati Ave. Cor Valdez St. Makati City
Metro Manila Philippines Tel: +63 (2) 899 3403/899 3439
Fax: +63 (2) 899 3416 crcc@accessway.ph
Kontak: Rey Claro C. Casambre, Direktur

Publikasi: *Toward an Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law*, 1998; *Which Way to a Just and Lasting Peace?* 1996; *The Ramos Peace Program – Towards a Genuine and Lasting Peace, or a Mere Pacification Campaign?* 1994

Sumpay Mindanao Inc.

Sumpay Mindanao berusaha ke arah pembinaan komunitas yang berkelanjutan di Mindanao, dengan melaksanakan model-model alternatif pembangunan yang muncul dari inisiatif rakyat sendiri. Salah satu program Sumpay adalah program Organizational Development and Peace Constituency Building (Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Konstituen Perdamaian). Program ini bertujuan memperkuat struktur organisasi dari organisasi massa di tingkat komunitas. Sumpay juga mengadakan pendidikan dan advokasi perdamaian pada tiga masyarakat Mindanao, dengan cara menyelenggarakan seminar tentang transformasi konflik, kemah perdamaian pemuda dan memfasilitasi dialog-dialog perdamaian. Sumpay juga bekerja sama dengan banyak mitra pembangunan masyarakat lokal di Mindanao.

Door 1 Kurut Apartment

Doña Josefa Celdran Avenue 3rd East St., Rosario Heights

Brgy. Tubod Iligan City 9200 Mindanao, Philippines

Tel: +63 (63) 223 2508

Fax: +63 (63) 223 2508

sumpay@mozcom.com

Kontak: Ma. Gittel J. Saquilabon, Direktur Eksekutif
dan Eva Olaer-Ferraren, Direktur Eksekutif

Stichting Sumpay Mindanao International

Sint Jacobsstraat 16 Amsterdam 1012 NC

Netherlands

Jumlah staf: 7 orang

Anggaran: < \$25,000

Third World Studies Center (TWSC)

Sebagai badan akademik yang berorientasi internasional Third World Studies Center (TWSC) menghimpun dan saling bertukar pengetahuan dan keterampilan tentang aspek manusia dari proses-proses perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya. TWSC bekerja dengan dan untuk masyarakat yang berbeda-beda dengan pendekatan kritis dan pluralistik, interdisipliner dan komparatif berdasarkan pengalaman yang luas dengan proses-proses pembangunan. TWSC bertujuan memperluas partisipasi sipil dalam proses ke arah pembangunan yang adil dan berkelanjutan dalam konteks perubahan global. TWSC mempunyai lima cakupan riset, salah satunya adalah pengkajian tentang faktor keamanan dalam situasi konflik. Riset tentang faktor keamanan dalam situasi konflik ini terpusat pada hubungan antara konflik dan ketidak-amanan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya, yang dapat menciptakan masyarakat yang stabil, aman dan damai. Pencegahan dan penyelesaian konflik merupakan bidang utama yang dikaji. TWSC juga telah menjadi ko-sponsor konferensi dan workshop internasional seperti Asian Peace Assembly (APA), Asia-Pacific Peace Research Association (APPRO), dan Waging Peace in the Philippines. TWSC bertindak sebagai sekretariat dari Philippine Campaign to Ban Landmines (Gerakan Pelarangan Ranjau Darat Filipina), dan anggota dari Steering Committee dari Philippine Action Network on Small Arms (Jaringan Aksi tentang Senjata Ringan Filipina).

Basement, Palma Hall P.O.Box 210 University of the Philippines
Diliman Quezon City 1101 Philippines
Tel: +63 (2) 920 5428 Fax: +63 (2) 920 5301
twsc@kssp.upd.edu.ph, www.upd.edu.ph/~twsc/
Kontak: Gareth A. Richards, Direktur

Publikasi: *Kasarinlan*, majalah dwi-tahunan; *People's Initiatives: Engaging the State in Local Communities in the Philippines and Thailand*, 2003.

Papua New Guinea

Bougainville Inter-Church Women's Forum (BICWF)

Bougainville Inter-Church Women's Forum (BICWF) adalah organisasi sosial yang didirikan untuk membina persatuan orang-orang Kristen dan membangun rekonsiliasi dan perdamaian di Bougainville. Organisasi ini tumbuh dari tradisi yang kuat di kalangan perempuan di Bougainville untuk membentuk organisasi di gereja-gereja mereka. Dengan menarik anggota dari “perempuan yang tidak berpolitik” dan sebagai organisasi gereja, BICWF melengkapi tugas Dewan Perempuan Propinsi dan struktur-struktur daerahnya. Kegiatan dialog dilakukan di Bougainville utara dengan Tentara Perlawanan Bougainville, Tentara Revolusioner Bougainville, Pemerintahan Papua New Guinea dan Pasukan Pertahanan Papua New Guinea. Yang didialogkan adalah tentang berbagai penyalahgunaan hak-hak penduduk sipil. Kegiatan-kegiatan pada saat ini berkisar pada program-program seperti Pembelajaran dari Proses Perdamaian Bougainville, yang ditujukan untuk mengurangi konflik dan membantu peserta lokakarya memahami konflik di antara mereka yang disebabkan oleh Krisis Bougainville. BICWF adalah bagian dari suatu proyek Keselarasan dan telah pula mengembangkan satu paket materi pendidikan tentang konflik dan proses perdamaian untuk digunakan dalam lokakarya pelatihan melek huruf di seluruh Bougainville.

PO Box 209 Buka NSP Papua New Guinea
Telp: [0675 973] 9983 Fax: [0675 973] 9157
bicwf@dg.com.pg

Kontak: Sister Lorraine Garasu, Direktur CSN
Anggaran: <25.000 dolar AS

Jumlah staf: 8 orang staf kantor (dua di antaranya aktif dalam kegiatan penanganan/penyelesaian konflik) dan 70 orang tenaga lapangan.

Publikasi: *Multi-track Diplomacy*, 2003; *Weaving Consensus: The PNG-Bougainville Peace Process*, 2002; *Learning from the Bougainville Peace Process*, 2002; *Healing Divisions after Conflict in Bougainville*, 2001

Foundation for People and Community Development (FPCD)

Kegiatan-kegiatan Foundation for People and Community Development (FPCD) dipusatkan untuk memajukan dan membina martabat dan kehormatan manusia, pembangunan yang berkelanjutan serta pengembangan kepercayaan pada diri sendiri. FPCD mempunyai beberapa program termasuk *Awareness Community Theater* yang berusaha meningkatkan kesadaran terhadap masalah-masalah lingkungan, sosial dan pembangunan melalui panggung teater. Yayasan ini juga mempunyai Program Manajemen Konflik yang bertujuan mengurangi konflik manajemen sumber daya alam dan masalah-masalah pembangunan melalui workshop dan diskusi-diskusi meja-bundar.

P.O. Box 1119 Boroko NCD Papua New Guinea

Telp: [0675 325] 8470 Fax: [0675 325] 2670

Kontak: Yati A. Bun, Direktur Eksekutif

Anggaran: 25.000 - 100.000 dolar AS

Jumlah staf: 27 orang

Individual and Community Rights Advocacy Forum (ICRAF)

Individual and Community Rights Advocacy Forum (ICRAF) telah berusaha meningkatkan, mengawasi dan melakukan advokasi HAM, hak-hak perempuan, dan hak-hak atas tanah, serta perlindungan lingkungan hidup di Papua New Guinea sejak tahun 1992. ICRAF mempunyai program Litigasi HAM, yaitu pelanggaran HAM, khususnya kekejaman polisi dan tindak kekerasan oleh negara. Forum ini juga mempunyai kantor khusus perempuan yang bertindak sebagai pusat krisis perempuan serta mengawasi hak-hak anak. ICRAF mengkoordinir pelatihan dan workshop tentang Undang-undang Tanah Lingkungan Hidup, hak-hak perempuan dan HAM, dan juga telah menyelenggarakan pawai protes tentang masalah-masalah perempuan dan kehutanan untuk meningkatkan kesadaran.

Seksi 240, Lot 38 Agolo/Ala Street Gerehu stage 2
P.O.Box 155 University P.O. NCD Papua New Guinea
Telp: [0675 326] 2469/2385 Fax: [0675 326] 2703
Kontak: Hilan Los, Direktur Pelaksana
Anggaran: 100.000 – 500.000 dolar AS

Leitana Nehan Women's Development Agency (LNWDA)

Leitana Nehan Women's Development Agency (LNWDA) didirikan pada tahun 1995 dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang aman bagi perempuan dan anak-anak. Badan ini menyelenggarakan workshop tentang kekerasan terhadap perempuan serta memberikan layanan penyuluhan-krisis bagi para keluarga dan perempuan korban kekerasan. LNWDA melaksanakan program 'Penguatan Masyarakat untuk Perdamaian' yang melibatkan tim-tim sukarelawan untuk mengunjungi komunitas dan sekolah-sekolah di seluruh Bougainville dalam rangka meningkatkan kesadaran akan kekerasan, HAM dan perdamaian.

C/-P.O.Box 86 Buka
Bougainville
Papua New Guinea
Telp: [0675 973] 9962 Fax: [0675 973] 9962
Kontak: Helen Hakena

Peace Foundation Melanesia Inc.

Yayasan ini didirikan pada tahun 1989 sebagai yayasan yang bergerak di bidang Hukum, Ketertiban dan Keadilan. Peran yang dimainkan adalah advokasi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan penggunaan metode-metode mediasi tradisional dalam kerangka sistem hukum Barat yang baru diperkenalkan. Pada tahun 1994, sebagai akibat dari krisis Bougainville, tekanan yayasan ini berubah ke arah pemberian pelatihan kepada masyarakat akar rumput dalam hal Keterampilan Rakyat, Penyelesaian Konflik dan Keadilan Restoratif.

Pada tahun 2002, terjadi lagi perubahan kebijakan yang penting. Hasilnya adalah didirikannya Peace & Good Order Committee yang terdiri dari para pemimpin desa, pemimpin gereja setempat, kelompok-kelompok perempuan dan kelompok-kelompok pemuda. Komite ini menunjuk mediator untuk menyelesaikan semua perselisihan di desa atau komunitas mereka, termasuk semua hal yang diajukan ke sistem hukum formal melalui peradilan desa dan polisi.

Yayasan ini kini sedang melaksanakan pelatihan di seluruh Papua New Guinea dan juga sudah memberikan pelatihan kepada Polisi dan Badan-Badan Korektif.

P.O.Box 1272 Port Moresby NCD Papua New Guinea

Telp: [0675 321] 3144 Fax: [0675 321] 3645

peacefound@global.net.pg

www.restorativejustice.org/default.htm

Anggaran: 100.000 - 500.000 dolar AS

Jumlah staf: 12 orang termasuk lebih dari 70 orang pelatih

Publikasi: *Breaking Spears and Mending Hearts and Training Manuals*,
2000

Penulis & Editor

Aguswandi adalah peneliti pada Tapol Indonesian Human Rights Campaign yang berbasis di London.

Chaider S. Bamualim menyelesaikan gelar masternya di Rijk Universiteit, Leiden, Nederland (1998). Pada tahun 2003, ia mengikuti program Fulbright American Studies Institute dalam program “Religion in the United States: Pluralism and Public Presence”. Kini mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan aktif sebagai peneliti di Pusat Bahasa dan Budaya di universitas yang sama. Beberapa penelitian yang pernah dilakukannya diantaranya adalah “Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta” (2000) dan “Gerakan Islam Radikal Kontemporer di Indonesia” (2001); dan *Philantropy for Social Justice in Muslim Societies* (2003-2004). Selain itu, ia ikut menyunting buku dan Jurnal berbahasa Inggris, antara lain *KULTUR, the Indonesian Journal for Muslim Cultures, Communal Conflict in Contemporary Indonesia* (2002) dan *Islam & the West: Dialogue of Civilizations in Search of a Peaceful Global Order* (2003), dan ikut menyusun *Modul Pelatihan Resolusi Konflik Komunal* oleh PBB (akan diterbitkan 2005).

Harold Crouch adalah profesor di Research School of Pacific and Asian Studies pada Australian National University. Dia adalah direktur Indonesia Project of the International Crisis Group dari tahun 2000 sampai dengan 2002 dan mengajar tentang political science di Universitas Indonesia dari tahun 1968 sampai 1971. Dia juga pengarang buku *The Army and Politics in Indonesia* (Militer dan Politik di Indonesia, terjemahan Th. Sumartana, Jakarta: Sinar Harapan, 1986).

Helder Da Costa pada saat ini menjabat sebagai Manager Pendidikan tingkat tiga pada Yayasan Asia 2000 di Selandia Baru. Dia mendapat gelar Master dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Massey University dan gelar PhD dalam bidang Ekonomi dari Adelaide University. Beliau adalah Direktur Eksekutif di Pusat Riset Nasional, Universidade Nacional Timor Lorosae, Dili dan telah mengajar disiplin ilmu Ekonomi Internasional pada institusi yang sama selama dua tahun. Ia telah menjadi konsultan dan peninjau pada AusAID, ADB, UNDP, ACIAR, dan UN-OCHA. Di antara publikasi yang lain, Da Costa adalah salah satu penulis utama dari Laporan Pengembangan Sumber Daya Manusia Timor Timur 2002, *The way Forward*, UNDP Dili.

Irfan Abubakar pada saat ini menjadi peneliti di Pusat Bahasa dan Budaya (PBB). Pendidikan terakhirnya S2 Pengkajian Islam Pascasarjana IAIN Jakarta, tamat tahun 1999 dan sekarang tercatat sebagai mahasiswa S3 di paska sarjana UIN Jakarta. Dia ikut menjalankan program studi konflik komunal di lembaga yang sama dan menjadi editor jurnal *Kultur*. Beberapa karyanya dalam bidang konflik adalah *Beyond Civilization Dialogue: Multicultural Symbiosis in the Service of World Politics* (penyunting), Penerbit Paramadina (2002); *Dialogue in the world disorder: A Response to the Treat of Unilateralism and World Terrorism* (penyunting), PBB (2004); dan ikut menyusun *Modul Pelatihan Resolusi Konflik Komunal* oleh PBB (akan diterbitkan 2005).

John Bamba adalah Direktur Pelaksana Institut Dayakologi, lembaga riset dan advokasi, yang berjuang untuk menghidupkan kembali warisan budaya Dayak di Kalimantan. Baru-baru ini, Institut Dayakologi aktif dalam berbagai inisiatif menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi dengan bekerja sama dengan berbagai LSM di Indonesia. *Kalimantan Review* adalah majalah yang diterbitkan oleh institut tersebut untuk mendukung budaya Dayak dan hubungan damai antar-etnik di Kalimantan. John Bamba

mengajar Dayakologi di IAIN dan bekerja pada Advisory Board of Search for Common Ground-Indonesia.

Jane McGrory bekerja untuk Cordaid and Catholic Relief Services untuk membantu tercapainya berbagai program mewujudkan perdamaian di Indonesia. Di Papua, dia ambil bagian dalam upaya Cordaid untuk membantu kinerja partner daerah dalam mengembangkan inisiatif perdamaian dan keadilan.

Lorraine Garasu adalah anggota Congregation of the Sisters of Nazareth dan Koordinator Program untuk Forum Kaum Perempuan Lintas-Gereja Bougainville, Program Pendidikan Terpadu. Lorraine Garasu adalah pekerja pembangunan masyarakat dan pelatih ahli dalam Penanggulangan Konflik dan Masalah Kaum Perempuan.

Rufa Cagoco-Guiam adalah Direktur Center for Peace and Development Studies, Mindanao State University di General Santos City. Dia adalah antropolog dan praktisi media paruh-waktu yang aktif dalam upaya menciptakan perdamaian, isu kaum perempuan, dan bermusyawarah dengan berbagai organisasi non-pemerintah. Cagoco-Guiam juga anggota Ikatan Guru Besar dan Koordinator Program Sarjana jurusan Pemerintahan Umum pada universitas yang sama. Dia telah menulis beberapa artikel tentang proses perdamaian dan analisis keadaan gender kaum perempuan Bangsamoro di Mindanao. Pada bulan Februari 2002, karyanya *Child Soldiers in Central and Western Mindanao* diterbitkan di Jenewa, Swiss oleh International Labour Organization.

Samsu Rizal Panggabean adalah peneliti pada Center for Security and Peace Studies (CSPS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sekaligus dosen tetap di universitas tersebut.

Volker Böge bekerja pada International Center for Conversion (BICC) di Bonn, Jerman. Volker Böge menulis disertasinya, buku-buku lain, artikel dan makalah tentang konflik di Bougainville. Saat ini dia bekerja pada proyek pengembangan perdamaian pasca-konflik, sarana dan mekanisme tradisional penyelesaian konflik.

Yohanis Gerson Bonay adalah aktivis dan pengacara hak asasi manusia. Yohanis bekerja pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cabang Jayapura sejak tahun 1986 hingga dibentuknya Lembaga Pengkajian dan

Advokasi Hak Asasi Manusia (Els-Ham) Papua pada bulan Mei 1998. Dia menjadi Direktur Els-Ham hingga bulan Agustus 2003, sebuah periode ketika organisasi itu membantu lahirnya gerakan hak asasi manusia berbasis massa dan secara internasional menyuarakan isu tentang hak asasi manusia di Papua. Baru-baru ini, Yohanis menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum untuk Propinsi Papua. Dia sering dimintakan nasehat dan komentarnya mengenai hak asasi manusia oleh LSM, media dan lembaga pendidikan.

Index

A

- ABRI 45
- Aceh 5, 8, 10, 14,
16, 26, 28, 31,
33, 35, 37, 46, 47
- Acehnese Brotherly Dialogue
(ABD) 40
- Acehnese Civil Society Task Force
(ACSTF) 40
- ACSTF 42
- Act of Free Choice
referendum rakyat Papua 115
- Advent Hari Ketujuh 234
- Afrika Utara 189
- AJI (Aliansi Jurnalis Independen)
100
- al-Qaidah 19
- Aliansi Demokrasi untuk Papua
131
- Alkatiri, Mari 152
- Alternate Forum for Research in
Mindanao (AFRIM) 206
- Amazon 56
- Ambon 79, 80, 82,
86, 87, 90, 91, 96
- Ambon Muslim 81
- American University
menyelenggarakan Dialog
Persaudaraan Aceh 40
- Amerika 190
- Amerika Serikat 33, 47, 187, 238
- Amnesti Internasional 130
- Amnesty International 40
- Amungme 137
- Anderson, Benedict 28
- Angkatan Cinta Damai 134
- APEC 124
- Aquino, Benigno 189
- Aquino, Cory 191
- Arab 55, 80, 186
pedagang 54
- Arguillas 202
- Arguillas, Carol 202
- ARMM (Autonomous Region
Muslim Mindanao) 196

Arula, Jibin 189
 ASEAN 47, 124
 Asia 85
 Asia Foundation 164
 AusAID 238
 Australia 157

B

Ba'asyir, Abu Bakar 19
 Bakornas PBP 62
 Baku Bae 97, 99
 Bali 58
 Banda Aceh 38
 Bangsamoro 190, 202
 Bank Dunia 56
 Bapa Radja 100
 Bapa Raja 83
 barangays 204
 Bartels, Dieter 80, 96
 Basilan 196
 BASRA (Badan Silaturahmi Ulama
 Madura) 64
 Batak 128
 Bayan 198
 BBC 65
 Beanal, Thom 137
 Belanda 80, 83
 kolonial 26
 Belo, Carlos Ximenes 154
 Bengkayang 59, 67
 Beureuh, Daud 26
 Biak 117
 Biarawati Nazareth 234
 Bireuen 27
 BOCIDA 238
 Borneo 54
 Bougainville 222, 224, 229, 238
 akhir peperangan 230
 masyarakat terlanjur menderita
 228

memiliki pemerintahan yang
 otonom 242
 Pemilihan umum 241
 Pemilihan umum bagi
 pemerintahan otonom 232
 penciptaan perdamaian 233
 referendum kemerdekaan 231

Bougainville Community Inte-
 grated Development Agen
 236

Bougainville Copper Limited
 (BCL) 222

Bougainville Inter-Church
 Woman's Forum (BICWF)
 235

Brimob 87
 British Council 65
 Bugis 55, 82, 84, 86, 96, 120
 Buka 222
 Bumbun, Hieronimus 64
 Burnham 238
 Gencatan Senjata 228
 Buru 82, 90
 Buton 82, 84, 96

C

Caetano, Marcelo 152
 CARE 164
 Caritas 164
 Catholic Relief Services 65, 164
 Catholic Relief Services (CRS)
 203
 CAVR 168, 169
 Cebuano-Visayan 204
 Cendana 30
 Chan 226
 Cina 53, 80, 156, 186
 CNIC 166
 CNRT 160
 Common Ground Indonesia 130

Community and Family Services
International (CFSI) 203
Concern 164
Conzinc Riotinto Australia (RTA)
222
CORDOVA 37
Corregidor
pemberontak dibantai di pulau
189
Cotabato 201, 205, 208
Cotabato Utara 210

D

Daerah Istimewa 27
Daerah Operasi Militer (DOM) 29
Davao 195, 210
kota 197
Dawood, Dayan 42
Dayak 54, 55, 56, 64
orang 53
Pan- 56
suku 54
Deklarasi Malino 102
memberikan langkah maju 94
deklarasi Malino 103
Deklarasi Malino Februari 2002 79
Dewan Geraja se-Dunia 130
Dewan Gereja Dunia 117
Di Tiro, Hassan 28
Dili 162
Dobo 87
Dureza, Jesus 195, 208
dwifungsi 8

E

Ecunemical Commission for
Displaced Families 201
ELSHAM Papua 131
Eluay, Theys Hiyo 13, 118, 121
Eropa 56

Estrada, Joseph 193
ETADEP 161
ETSCC 163
ETSG 163, 166
Exxon Mobile
Kopassus melakukan tindakan
brutal 29

F

F-FDTL 166
FALINTIL 153, 156, 166, 170
Fiji 229
Filipina 188
Final Peace Agreement (FPA) 191
FKM 91
FOKERLSM 133
FOKUPERS 165
FORERI 136
Forum Perempuan Muslim Baguala
103
Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian/
Papua (FORERI) 125
Forum Uskup-Ulama (FUU) 201
Freeport, PT 119
FRETILIN (Front Revolusi untuk
Kemerdekaan Timor T 154
Fron Kedaulatan Maluku (FKM)
90
Front Kedaulatan Maluku 93
Front Pembela Islam (FPI) 18

G

GAM 16, 34
Gencatan Senjata Burnham 228
Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
11, 26
Gerakan Perempuan Peduli (GPP)
99
Gereja Inggris 234
GKI Division of Law and Human

Rights 131
Goff, Phil 124
Golkar 6, 9
Gugus Tugas Masyarakat Madani
Aceh 42
Gunawan, Bondan 33, 41
Gusmao, Xanana
152, 154, 155, 158, 170

H

Habibie, B.J. 6, 14, 31,
91, 125, 154
Hamzah Haz 19
Hamzah, Jafar Siddiq 40, 42
Haruku 96
Healing of Memories Retreats
program di Gereja Katolik 234
Henry Dunant Center (HDC) 33
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
101
Hindia Belanda 114
Human Rights Watch
40, 117, 130
Hussin, Parouk 196

I

Idris, Safwan 42
Idul Fitri 86
Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (ICMI) 81
Ikatan Kamar Dagang Indonesia
(IKADIN) 131
IKBM (Ikatan Keluarga Besar
Madura) 68
Indios7 189
Initiatives for International
Dialogue (IID) 205
INTERFET (Pasukan
Internasional untuk Timor
Timur) 155

International Crisis Group (ICG)
88
International Forum for Aceh
(IFA) 40
International Medical Corps 65
International Organization of
Migration (IOM)
65, 158, 170
International Republican Institute
164
InterNews 130
Isabela 196
Isman, Zainudin 58
Istana Kepresidenan Malacanang
195

J

Jabidah, Pembantaian 188
Jakarta 10, 31, 56
Jawa 58, 90, 120, 128
Jawa Tengah 62
Jawa Timur 59, 70
Jayapura 120
Jedah Kemanusiaan 41
perjanjian GAM dan Indonesia
33
Jemaah Islamiyah (JI) 18
Jenderal Santos 202
Jenewa 117
Jepang 47, 80
Jesuit Refugee Service 40
Jeumpa 27

K

Kadtuntaya Foundation Inc. 203
Kalimantan 5, 53, 54,
55, 58, 67
Kalimantan Barat
5, 54, 55, 56, 59
Kalimantan Review Magazine 65

Kalimantan Tengah 54, 56
 Kalimudan Foundation 203
 Kanada 238
 Kapuas Hulu 60
 Karamunting 67
 KARMA (Koalisi Mahasiswa Aceh
 untuk Reformasi) 37
 Katolik Roma 234
 Kauona, Sam 230
 Kauswagan 204
 Kei
 Kepulauan 87
 kepulauan 100
 Ketapang 59
 Kidapawan 201
 Kihono, Veronika 234
 Koalisi LSM-HAM 37
 Komisi Konstitusi Bougainville
 231
 Komisi Pengungsi Katolik
 Internasional 130
 Komite Bersama Aksi
 Kemanusiaan (KBAK) 34
 Komite Bersama Modalitas
 Keamanan (KBMK) 33
 komplek Bullok 209
 Kompleks Buliok 197
 Kongres Rakyat Bougainville 236
 Konsorsium Organisasi Masyarakat
 Bangsamoro 206
 Kontras 37, 43
 Kontras Aceh 37
 KONTRAS Papua 131
 Kopassus 29
 KSI 163
 Kusog Mindanao 210

L

LAIFET 163
 Lanao del Norte 204

Lanao del Sur 196
 Laskar Jihad 86, 90, 91, 93, 121
 Laskar Kristus 93
 Laskar Yesus 91
 Latu Patti 83, 97
 Layson, Fr. Bert 204
 Layson, Fr. Roberto 208
 LBH Papua 131
 Lease
 Kepulauan 87
 Leihitu
 semananjung 99
 Leitana Nehan Women Develop-
 ment Agency (LNWDA) 236
 Leitimor
 semananjung 99
 Lembaga Bantuan Hukum 37
 Lembaga Pertahanan Nasional
 Maubere (CNRM) 154
 Lian Maubere 164
 Libya 190, 196
 Liquica 165
 Lumad 202, 204, 208
 masyarakat 197
 Luzon 186, 187, 189
 rakyat 186

M

Madura 17, 53, 54,
 55, 57, 59, 61,
 64, 70, 128
 Maguindanao 201
 Kesultanan 186
 Maguindanao Development
 Foundation, Inc. 203
 Majelis Permusyawaratan Rakyat
 (MPR) 6
 Makassar 82
 Malacanang 196
 Maladeg 204

Malaysia 56
 Maluku 5, 8, 10, 12, 79,
 80, 81, 82, 85,
 86, 88, 90
 Maluku Tengah 82
 Maluku Tenggara 87
 Maluku Utara 80, 82, 86, 90
 Maranaw 204
 Marawi 196, 203
 Marcos, Ferdinand 188, 192
 Mecer, A.R. 58
 Me'ekamui
 Pasukan sempalan BRA 241
 Melanesia 120, 232, 237
 Melayu
 53, 54, 55, 56, 59, 61, 120
 Merauke 117
 Mestizos 156
 Midsayap 210
 Mimika 119
 Minang 128
 MINCODE 203
 Mindanao 185, 186, 189,
 190, 191, 194, 199, 208
 Mindanao People's Caucus (MPC)
 204
 Mindanao Peoples Peace Move-
 ment (MPPM) 210
 Mindanao Tengah 197
 MindaNews 202
 Miringka, Ruby 238
 Misuari 195, 196
 MNLF 188, 190
 Moore, W. 98
 Moro Islamic Liberation Front
 (MILF) 191
 Muhammadiyah 58
 Mulheres 165

N

Nabire 117
 nahe biti 170
 Naik Dango 68
 NAM Center 70
 Nania 99
 Nauru 124
 NDI 166
 New York 115
 New Zealand Official Develop-
 ment Assistance (NZODA)
 238
 Nieuw Guinea 114
 Nusalaut 96
 Nusaniwe 104

O

Oblates of Mary Immaculate
 (OMI) 208
 OCHA 62
 Office for the Coordination of
 Humanitarian Affairs 95
 Office of Justice and Peace
 gereja yang berbasis 131
 OMT 165
 Ona, Francis 225, 241
 Orde Baru 16, 27, 45, 56, 85
 Organisasi Konferensi Islam (OKI)
 193
 Organisasi Papua Merdeka (OPM)
 115
 Osama bin Laden 18, 192
 OXFAM 40
 Oxfam 164

P

Pacific Concerns Resource Centre

130
 Palangkaraya 62
 Palawan 191
 Pancur Kasih
 LSM Dayak 58
 Panguna 223, 224, 241
 Papua 5, 10, 14, 16
 kontemporer 120
 masyarakat pribumi di 114
 pulau Pasifik Selatan 114
 Papua Barat 58, 113, 117,
 121, 127, 138
 Papua Presidium Council (PPC)
 118
 Partai Demokrasi Indonesia-
 Perjuangan (PDI-P) 6
 Paruparu Education Development
 Centre (PEDC) 237
 Passo
 kota Kristen 99
 PBB 62, 162
 Peace Advocates of Zamboanga
 (PAZ) 201, 203
 Peace Brigades International 40
 Penguasa Darurat Sipil 89
 People's Crisis Center 39
 Perang Pantai Manila 187
 Perjanjian Napoli 190
 Pidie 30
 Pikit 197, 209
 PNTL (Policia Nacional Timor
 Leste) 160
 Pohon Pule 99
 Polda Maluku 87
 polisi sipil (Civpol) 160
 Polri 89
 Pontianak 56, 59, 60, 68
 Port Moresby 226
 Portugal 156
 Portugis 80

Poso 5, 8, 10, 12, 17
 Pusat Media Maluku (PMM) 100
 Pusat Rujuk Sosial (PRS) 92

Q

Qaddafi, Muammar 192

R

Radio Katolik Timor Kmanek 164
 Radio Timor Lorosae 164
 radio UNTAET 163
 Raja 83
 Ramos, Fidel V. 191
 Ramos-Horta, Jose 154
 REDE 165
 Rede das Mulheres 161
 Refugees International 67
 Republik Borneo Merdeka (RBM)
 58
 Republik Maluku Selatan (RMS)
 85, 93
 Rio Tinto Zinc (RTZ) 222
 Robinson 28
 Robinson, Geoffrey 31
 Ryacudu, Ryamizard 13

S

Sabah 58, 188
 Saililing, Datu Al 208
 Selamat, Hashim 191, 197, 209
 Sama 188
 Sambah 53, 54, 56, 59, 60, 61
 Sampit 53, 54, 56, 59, 60, 63
 Sanggau Ledo 53, 54, 59, 60
 Santa Cruz
 pembunuhan massal 153
 Santos Jr., Doliman 193
 Santos Jr., Soliman 209
 Sapad 204

Saparua 96
Save the Children 40, 65
Search for Common Ground-
Indonesia 65
Selandia Baru 124, 228, 229
semenanjung Iberia 189
Sentra Informasi Referendum
Aceh (SIRA) 37
Seram 82, 90
kepulauan 96
Serawak 58
SIL 163
Simunul 186
Singkawang 61
Sintang 60
Siocon 197
kota 197
SIRA 43
Sirimau 104
Skates, Bill 226
SMUR 43
SMUR (Solidaritas Mahasiswa
untuk Rakyat) 37
Soeharto 3, 5, 6, 7, 8,
9, 13, 14, 27,
30, 81, 84, 91,
114, 152, 154
diktator 53
Soekarno 26
Soekarnoputri, Megawati
6, 7, 34, 91
Solomon 222, 224
Spanyol 80, 186, 187
SPKP HAM (Solidaritas Para
Korban Pelanggaran HAM)
38
STL 175
Suara Timor Lorosae 164
Sudirja, Suryadi 70
Sulawesi Selatan 82, 87, 90

Sulu 187, 188, 191
Kesultanan 186
Sumatera 58
Sumatera Utara 26
Syafii, Abdullah 31, 33, 41

T

Talitakum 164
Tanjunghulu 68
TAPOL 130
Tawitawi 186
Tentara Pembebasan Nasional
(TPN) 115
Tetum
bahasa asli Timor Timur 157
Time Magazine 191
Timika 123
Timor Post 164, 175
Timor Timur
11, 13, 14, 153, 173
Timur Tengah 156
TNI 89
Tripoli 196
Tripoli, Perjanjian 192
Tual 100
TVTL 164, 175

U

UNHCR 62
Uni Eropa 33, 47
UNICEF 62
United Nations Development
Programme (UNDP) 238
United Nations Observer Mission
on Bougainville (U 230
United Nations Temporary
Executive Authority in We
115
Universitas Ateneo de Davao 205
Universitas Lincoln 229

Universitas Notre Dame 205
Universitas Pattimura 83
University of South Wales 238
UNTAET 158, 165
Usop, Kma 58

V

Vanuatu 124, 229
Visaya 186, 187, 189
 rakyat 186

W

Wahid, Abdurrahman
 6, 7, 18, 32, 91, 122
Waiyame 97, 104
Walhi Aceh 36
Wamena
 pegunungan 121
White, Leo 238
WHO 62
World Vision 164
World Vision Indonesia 130
World Vision International 65

Y

Yaman 186
Yayasan Balik-Kalipay 201
Yayasan Hak 161
Yayasan Pengembangan Prakarsa
 Wirasaha (YPPW-P) 131
Yayasan Perdamaian Melanesia
 237
Yayasan Tabang Mindanaw 201
Yepen Waropen 133
YKKSS (Yayasan Korban
 Kerusuhan Sosial Sambas) 66
Yogyakarta 62

Z

Zamboanga 203
Zamboanga del Sur 197, 204
Zona-Damai 136

Index Lembaga

Indonesia

Jaringan LSM Hak Asasi Manusia di Aceh	249
Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh	250
Yayasan Akar Pama (YAPAMA)	251
Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AIDP)	252
Bina Swadaya	253
Yayasan Peduli Hak Asasi Manusia (YPHAM)	254
Indonesia PEDULI Internasional	255
Catholic Relief Service Indonesia	256
Center for Research on Intergroup Relations and Conflict Resolution (CERIC)	258
Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, Universitas Gajah Mada	259
The Center for Strategic and International Studies (CSIS)	260
Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian	261

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)	262
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS)	263
Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, Keadilan dan Perdamaian (PSE & KKP)	264
Program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat	265
Consortium for Assisting the Refugees and Displaced in Indonesia (CARDI)	266
Konsorsium LSM Lokal Sulawesi Selatan (KL2SS)	268
Crisis Center Diocese of Amboina (CCDA)	269
Forum Dialog antar Kita Kalimantan Selatan (Forlog Kalsel) ...	270
Forum Partisipasi Masyarakat	271
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	272
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)	274
Gerakan Perjuangan Anti-Diskriminasi (GANDI)	275
Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan (LPHL)	276
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)	277
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	278
Institut Pluralisme Indonesia (IPI)	279
Institute for Human Rights Studies and Advocacy-West Papua (ELSHAM)	280
Institut Dayakologi (ID)	281
Institut Dialog antar-Iman di Indonesia (Interfidei)	282
Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)	283
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	284
Lembaga Transformasi Sosial (INSIST)	285
Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN)	286
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sipil (Yayasan Cordova)	287
Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)	288
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)	289
KALYANAMITRA	290
Yayasan Lepa-Lepa Maluku (LEMA)	291
Mercy Corps	292
Mitra Bentala	294
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	295
Jaringan Organisasi Independen untuk Penguatan Rakyat (JOIPaRa)	296
Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura	297

Oxfam Great Britain, Indonesia	298
Lembaga Bantuan Hukum (LBH Papua)	300
Forum LSM Papua (Foker LSM Papua)	301
Institut Titian Perdamaian	302
Pusat Media Poso	304
Yayasan Sahara	305
Search for Common Ground Indonesia	306
Forum Dialog Antar Kita Sulawesi Selatan (FORLOG)	307
Yayasan Tengko Situru (YTS)	308
Yayasan Tita Mae (YTM)	309
Suara Hak Asasi Manusia di Indonesia (SHMI)	310
Aktivitas Perempuan untuk Pembangunan Desa (Yayasan Bunga Aceh)	311
Lembaga Perempuan Kajian dan Advokasi (eLPeKA)	312
Yayasan Madanika	313
Yayasan Pelita Kasih Abadi (PEKA)	314

Timor Timur

La'ó Hamutuk	315
NGO Forum Nasional Timor Lorosae	317
Forum Komunikasi Kaum Perempuan Timor Timur (Fokupers)	318
Yayasan HAK	319
International Federation for East Timor (IFET)	320
Judicial System Monitoring Program (JSMP)	322
Kadalak Sulimutuk Institute (KSI)	323
Sahe Institute for Liberation (SIL)	324
Timor Institute for Development Studies	325

Filipina

Alliance for the Advancement of People's Rights (KARAPATAN)	327
Asia-Pacific Peace Research Association (APPRA)	329
Bishops-Ulama Forum	330
National Secretariat of Social Action, Justice and Peace (NASSA)	331
Center for Peace Education	332
Community Organizers Multiversity	333
Consortium of Bangsamoro NGOs and POs in Mindanao	334

Ecumenical Movement for Justice and Peace (EMJP).....	335
Gaston Z. Ortigas Peace Institute – National Peace Conference (NPC)	336
Initiative for International Dialogue	337
Institute for Popular Democracy (IPD)	338
Institute for Strategic and International Studies (ISIS)	339
Legal Rights and Natural Resources Center (LRC).....	340
Mindanao Coalition of Development NGOs (MINCODE)	341
Mindanao Peacebuilding Institute (MPI)	342
Mindanao Peoples Caucus (MPC)	343
National Council of Churches in the Philippines (NCCP)	344
Philippines Peace Center (PPC)	346
Sumpay Mindanao Inc.	347
Third World Studies Center (TWSC)	348

Papua New Guinea

Bougainville Inter-Church Women’s Forum (BICWF)	351
Foundation for People and Community Development (FPCD) .	353
Individual and Community Rights Advocacy Forum (ICRAF) ...	354
Leitana Nehan Women’s Development Agency (LNWDA)	355
Peace Foundation Melanesia Inc.	356

Profil PBB

Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) adalah lembaga otonom di lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berdiri pada tahun 1999. Selain memberikan pelayanan bahasa, lembaga ini berfungsi sebagai pusat kajian dan riset di bidang Islam dan sosial budaya. Pusat Bahasa dan Budaya hadir untuk mengeksplorasi, mengkaji dan menelaah relasi-relasi sosial dan budaya dalam sinaran pluralisme dan multikulturalisme. Kegiatan yang secara khusus mengkaji konflik komunal dan strategi penanggulangannya dimulai sejak tahun 2000 setelah meletusnya konflik-konflik komunal di Maluku dan Kalimantan.

Sejak itu Pusat ini telah mengadakan kegiatan-kegiatan studi melalui seminar-seminar nasional dan internasional serta workshop tentang konflik komunal di Indonesia. Hasilnya dipublikasikan dalam buku *Communal Conflict in Contemporary Indonesia* (2002); versi terjemahannya telah diterbitkan oleh INIS pada tahun 2003. Pada tahun-tahun 2002-2004, bekerjasama dengan CORDAID Belanda, Pusat ini mengadakan kegiatan workshop dan brainstorming Strategi Resolusi Konflik di Indonesia. Kegiatan ini diikuti dengan kegiatan penyusunan modul resolusi konflik komunal serta pelatihan konflik komunal di Indonesia. Pada tahun-tahun mendatang PBB akan mengadakan kegiatan pengembangan kurikulum studi perdamaian untuk kebutuhan perguruan tinggi keagamaan Islam yang tersebar luas di tanah air.